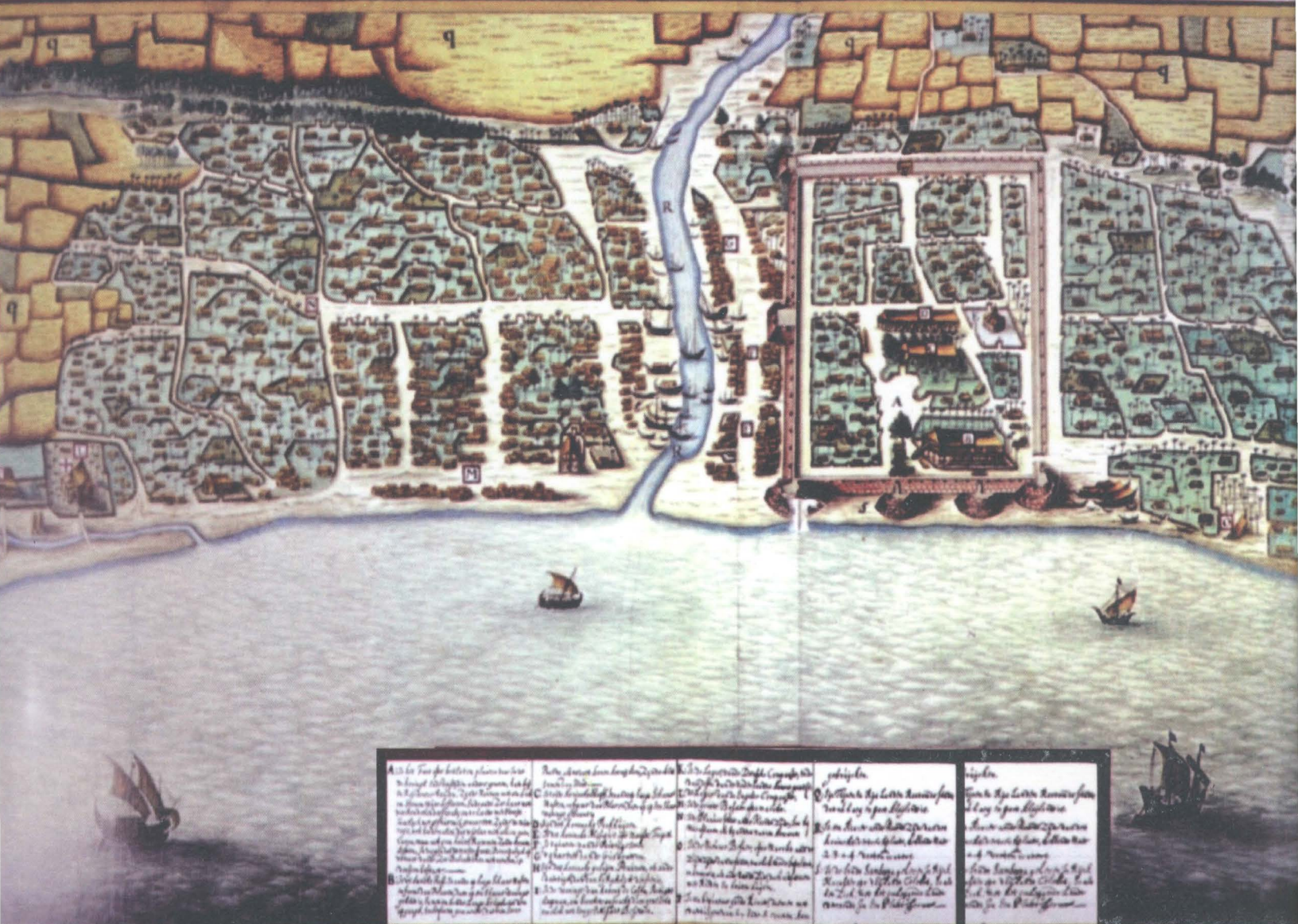


Afbeelding van de Planure Fortification, Ende Voorder gelegenheeden, Soo vande Besloten Plaanen, Ende Woninghen des konings van Macassar, als Blytton, ghe Voorsteden daerheen, alles onder de Nvolgende Linnen in de Carte ghele.



Dari Kale Gowa ke Somba Opu:

Merajut Simpul-simpul Pertahanan Kerajaan Gowa di Sulawesi Selatan



Identitas
Universitas Hasanuddin



Balai Pelestarian
Cagar Budaya Makassar

Afbeelding van de Planure Fortificatiën, Ende Voordeelen gelegenheeden, Soo vande Besluten Plaatsen, Ende Woninghen des konings van Macassar, als bytonghe Vorsteeden der Landen, allen onder de Vorstende Looze der Coninghe.



Dari Kale Gowa ke Somba Opu:

Merajut Simpul-simpul Pertahanan Kerajaan Gowa di Sulawesi Selatan



Identitas
Universitas Hasanuddin



Balai Pelestarian
Cagar Budaya Makassar

Dari Kale Gowa ke Somba Opu;

Merajut Simpul-simpul Pertahanan Kerajaan Gowa di Sulawesi Selatan

PENGARAH

Andi Muhammad Said
Muhammad Ramli

REDAKSI PELAKSANA

Muslimin A.R. Effendy

RISET FOTO

Amir Djambia
Ahmad Abdul

DESAIN DAN TATA LETAK

Basuki Heriyanto, perancang sampul
Tim Danarosi Media & Silkroad Heritage Society

Diterbitkan oleh
Balai Pelestarian Cagar Budaya Makassar
atas kerjasama dengan
Penerbit Identitas Unhas dan Danarosi Media

Hak cipta dilindungi undang-undang. Tanpa izin tertulis BPCB Makassar tidak diperbolehkan memperbanyak dan/atau menyebarkan dalam bentuk apapun sebagian atau seluruh isi buku ini dengan jalan cetak, fotocopy, atau dengan cara lain

Foto sampul:

Peta situasi Somba Opu sekitar tahun 1638
(Sumber : Roever, Arend de and Bea Brommer. *Grote Atlas van de Verenigde Oost-Indische Compagnie Comprehensive Atlas of The Dutch United East India Company. Indische Archipel En Oceanie/ Malay Archipelago and Oceania*).



Dari Kale Gowa ke Somba Opu;

Merajut Simpul-simpul Pertahanan Kerajaan Gowa di Sulawesi Selatan

PENGARAH

Andi Muhammad Said
Muhammad Ramli

REDAKSI PELAKSANA

Muslimin A.R. Effendy

RISET FOTO

Amir Djambia
Ahmad Abdul

DESAIN DAN TATA LETAK

Basuki Heriyanto, perancang sampul
Tim Danarosi Media & Silkroad Heritage Society

Diterbitkan oleh
Balai Pelestarian Cagar Budaya Makassar
atas kerjasama dengan
Penerbit Identitas Unhas dan Danarosi Media

Hak cipta dilindungi undang-undang. Tanpa izin tertulis BPCB Makassar tidak diperbolehkan memperbanyak dan/atau menyebarluaskan dalam bentuk apapun sebagian atau seluruh isi buku ini dengan jalan cetak, fotocopy, atau dengan cara lain

Foto sampul:

Peta situasi Somba Opu sekitar tahun 1638
(Sumber : Roevert, Arend de and Bea Brommer. *Grote Atlas van de Verenigde Oost-Indische Compagnie Comprehensive Atlas of The Dutch United East India Company. Indische Archipel En Oceanie/ Malay Archipelago and Oceania*).



Dari Kale Gowa ke Somba Opu;

Merajut Simpul-simpul Pertahanan Kerajaan Gowa di Sulawesi Selatan

PENULIS

Prof. Dr. Ir. Yulianto Sumalyo, DEA.,- *Guru Besar Arsitektur Universitas Pancasila, Jakarta*

Drs. Dias Pradadimara, MA, MS,- *Staf Pengajar Jurusan Ilmu Sejarah FIB Unhas, Makassar*

Andini Perdana, SS, M. Hum,- *Staf Direktorat Pelestarian Cagar Budaya & Permuseuman Kemendikbud, Jakarta*

Iswadi, SS,- *Staf Balai Pelestarian Cagar Budaya, Makassar*

Nur Ihsan D., SS, MA,- *Staf Pengajar Jurusan Arkeologi Fakultas Ilmu Budaya UHO, Kendari*

Rustan, SS,- *Staf Balai Pelestarian Cagar Budaya, Makassar*

Rahmat Kurniawan, SS,- *Staf Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Baubau Sulawesi Tenggara*

Supriadi, SS, MA,- *Staf Pengajar Jurusan Arkeologi FIB Unhas, Makassar*

Yadi Mulyadi, SS, MA,- *Staf Pengajar Jurusan Arkeologi FIB Unhas, Makassar*

EDITOR

Muslimin A.R. Effendy

Hak penerbitan pada
©Balai Pelestarian Cagar Budaya Makassar

Hak cipta dilindungi undang-undang
All rights reserved

Diterbitkan pertamakali dalam bahasa Indonesia oleh BPCB Makassar
atas kerjasama dengan Penerbit Identitas Unhas (Kampus Tamalanrea Km. 10 Tamalanrea Makassar), dan
Danarosi Media (Kompleks Puri Pattene Permai Blok A 4 No.1 Makassar)

Cetakan pertama, Oktober 2013

Perpustakaan Nasional RI: Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Dari Kale Gowa ke Somba Opu: Merajut Simpul-simpul Pertahanan Kerajaan Gowa di Sulawesi Selatan/penulis,
Yulianto Sumalyo, Dias Pradadimara,... [et.al.]:

Editor: Muslimin A.R. Effendy

Makassar: Penerbit Identitas Unhas dan Danarosi Media, 2013

189 hlm, xiii hlm, 21 x 27 cm

Isi : 1. Sejarah dan Arkeologi, 2. Benteng Peninggalan Kerajaan Gowa, 3. Benteng dan Perkembangan Kota,
4. Arsitektur, 5. Konservasi, Pengembangan dan Pemanfaatan

ISBN : 978-602-8405-49-2



Isi di luar tanggungjawab percetakan CV. Mandiri Cards, Makassar



Sambutan

Kepala Balai Pelestarian Cagar Budaya Makassar

Syukur Alhamdulillah atas berkat dan rahmat Allah SWT. sehingga buku *Dari Kale Gowa ke Somba Opu: Merajut Simpul-simpul Pertahanan Kerajaan Gowa di Sulawesi Selatan* berhasil diterbitkan. Buku ini kami persembahkan sebagai bahan bacaan dan referensi bagi seluruh masyarakat yang ingin mengetahui tinggalan budaya material dan dinamika sejarah perbentengan di Sulawesi Selatan secara komprehensif dan obyektif.

Gagasan penerbitan ini berawal dari diskusi pada penghujung tahun 2012 ketika kami memperbincangkan tentang benteng-benteng peninggalan Kerajaan Gowa dan strategi pengembangan dan pemanfaatannya. Ide itu ditindaklanjuti pada awal tahun 2013 dengan membentuk sebuah tim kecil yang dipimpin Dr. Muslimin A.R. Effendy, MA. untuk merumuskan model penulisan, konten dan tampilannya. Tim tersebut selanjutnya melakukan pertemuan secara intensif untuk membahas dan menentukan topik yang akan dimuat serta penulis yang dapat merealisasikan gagasan tersebut. Oleh karena itu, kami mengucapkan terima kasih kepada para penulis dan semua pihak yang telah membantu dari tahap pengumpulan data, pengolahan data, penulisan, editing hingga penerbitan ini terwujud.

Ketika akhirnya buku ini diterbitkan, mungkin ada juga beberapa tinggalan arkeologis yang belum diketahui secara utuh sehingga tidak ditampilkan, maka akan segera pula terlihat bahwa buku ini masih kurang lengkap. Buku ini adalah salah satu bukti perhatian dan kepedulian kami untuk memberikan informasi yang bermutu tentang warisan Kerajaan Gowa di Sulawesi Selatan. Semoga bermanfaat untuk memberikan pemahaman pada generasi muda dan tentu saja, bagi mereka yang butuh akan ilmu pengetahuan.

Makassar, 15 Oktober 2013

Kepala BPCB Makassar

Andi Muhammad Said, M. Hum.

PENGANTAR EDITOR

Warisan Para Karaeng: Menjaga Keutuhan Negeri yang Terkoyak

Gagasan pembangunan benteng dalam wilayah Kerajaan Gowa bermula ketika Daeng Matenre Karaeng Maguntungi Tumapparisi Kallonna (1511-1548) memerintahkan kepada panglima perangnya untuk mendirikan "kubu" pertahanan di garis pantai Makassar pada dekade keempat abad ke-16. Meskipun pada masa itu kubu/bastion atau yang lebih dikenal sebagai benteng pada masa sekarang, dindingnya hanya dari tumpukan tanah atau tanah isian berlapis bata seperti yang ditunjukkan oleh David Bulbeck (1992, 2005), dan hasil-hasil ekskavasi oleh Tim Suaka Peninggalan Sejarah dan Purbakala [SPSP] Sulselra (sekarang Balai Pelestarian Cagar Budaya Makassar [BPCB]; 1987, 1992, 1995) terhadap Benteng Panakukang, Benteng Garassi, dan Benteng Bayoa namun, mempunyai arti penting dari sisi strategi pengamanan teritorial dan penataan ruang.

Secara geopolitik benteng-benteng yang mengelilingi "pintu depan" ini seakan lebih menegaskan bahwa Makassar sebagai "kota tepian air" (front water city) membutuhkan kekuatan pengaman yang dapat menjamin distribusi barang dan jasa berjalan lancar. Karena itu diperlukan sarana dan jaringan infrastruktur pertahanan yang memadai yang sanggup melantahkan infiltrasi luar, seperti aksi perompakan para bajak laut yang mengganggu keamanan negara. Semangat membangun ini makin bersemayam subur ketika para petinggi kerajaan menyambut hangat bahkan membentuk aliansi strategis dengan bangsa asing seperti Portugis untuk berbagai kepentingan. Para penguasa Makassar mendapatkan pengetahuan baru tentang teknik bangunan perbentengan, mengadopsi ide-ide segar yang dianggap bermanfaat untuk kemajuan perekonomian, politik, budaya, bahkan menelikung masuk ke dalam wilayah-wilayah profan. Tak hanya itu, Raja Gowa ke-9 yang visioner ini pun mengambil langkah maju dengan melakukan penataan administrasi pemerintahan dan hukum serta kodifikasi tradisi literasi dengan menetapkan aksara lontarak sebagai standar penulisan dalam kerajaan.

Penggangtunya, I Manriwagau Daeng Bonto Karaeng Lakiung "Tunipalangga-Ulaweang" (memerintah 1546-1565) meneruskan tradisi yang sama, membangun dan memperbaharui benteng-benteng warisan sang ayah. Ia memulai tonggak baru dalam konstruksi bangunan benteng, yaitu memperkuat struktur dinding dengan bata, membuat bubuk mesiu, mengembangkan kerajinan emas dan logam, memperkenalkan sistem timbangan dan ukuran, dan memobilisasi aneka pengrajin dalam serikat sekerja.

Tunipalangga-Ulaweang mendirikan dua benteng sekaligus pada masa yang hampir sama, yakni Benteng Somba Opu dan Benteng Ujung Pandang/Fort Rotterdam. Benteng Kale Gowa yang dibangun oleh pendahulunya di Tamalate seolah dianggap tak cukup memenuhi ambisinya untuk memberi pesan kepada "dunia" akan kemampuan dan kebesaran negaranya. Benteng Somba Opu yang megah itu diberi amunisi baru dengan menempatkan beberapa meriam di setiap bastion sambil memperkuat benteng dengan suntikan batu karang dan bata pada struktur dinding. Kemegahan Somba Opu dilukiskan Entjik Amin dalam syairnya;

Iradat Tuhan Malik al-jabbar
kebilangnlah ra'yat anak Mengkasar
Sombopu itu kota yang besar
berkampunglah ra'yat Raja Mengkasar.

Faktor yang mendasari perkuatan struktur dinding benteng dan meningkatnya ukuran dan perubahan gaya konstruksi berhubungan dengan statusnya sebagai istana. Di bawah pemerintahan raja berikutnya, Tunijalloq (1566-1590) diangkat penulis istana begitu pula pembuatan badik dan hubungan diplomatik ke luar negeri. Rezim selanjutnya yang cukup singkat dan tidak begitu menggembirakan (Tunipasulu, 1590-1593) terkenal dengan penggunaan senjata, baju baja, dan pedang dalam berperang untuk pertama kalinya.

Pemerintahan selanjutnya cukup berjaya. I Manga'rangi Daeng Manrabia "Sultan Alauddin Tumenanga ri Gaukanna (1594-1639) berhasil menciptakan uang logam, memperkuat angkatan laut



dengan membangun kapal cepat dan perahu layar, dan meningkatkan usaha swasembada beras. Langkah prestisius yang dipilih sultan selanjutnya adalah mengontrol wilayah-wilayah pedalaman dengan kombinasi antara tujuan pragmatis penaklukan dengan misi suci untuk "menyampaikan cahaya kebenaran kepada mereka yang belum Islam". Ekspansi militer dan diplomatik yang dibungkus dengan slogan 'Islamisasi' ini menyelimuti ambisi perluasan kekuasaan, politik, dan ekonomi para karaeng.

Sultan Alauddin membawa Makassar sebagai titik komersial terpenting bagi semua pihak terutama untuk menghindari usaha VOC memonopoli perdagangan rempah di Maluku. Bangsa Portugis mulai sering mengunjungi kota ini sejak dekade awal abad ke-17 dan menjadikannya sebagai basis utama mereka di Asia Tenggara setelah kejatuhan Melaka ditahun 1641. Sultan Alauddin mengizinkan Maskapai Dagang Hindia Belanda "Verenigde Oostindische Compagnie" (VOC) membuka kantor dagangnya pada 1607, disusul Perusahaan Dagang Inggris "East India Company" (EIC) ditahun 1613 dan membangun hubungan khusus pada 1630-an sebagai penyuplai senjata dan amunisi serta kain India. Spanyol mengirim kapal pertamanya ke Makassar pada 1615. Bangsa Denmark mengikuti jejak mereka pada 1618, pedagang Prancis dari St. Malo tiba pada 1622, pedagang Cina mulai menyambangi kota ini pada 1619. Bahkan pada 1650-an setelah kematian sultan yang amat dihormati rakyatnya ini, Kerajaan Golconda dari India Selatan membuka perwakilan tetapnya di Makassar.

Meski Sultan Alauddin yang masih berusia muda, serta pembimbing sekaligus penasehatnya Karaeng Matoaya menunjukkan kecenderungan pribadi dengan menganut Islam pada 1605, keterbukaan mereka terhadap bangsa Eropa sangat fenomenal. Seorang pelancong yang bertandang ke Makassar pada masa itu menuliskan kesan-kesan mereka yang amat memukau; "suasananya sangat menyenangkan dan bermanfaat... dan penduduk Hindia yang paling baik hati kepada orang asing". "Rajanya sangat ramah dan tulus terhadap orang-orang Kristen". Memang benar, demikian tulis Reid (1981), Sultan Alauddin memiliki seorang istri keturunan Portugis di antara 40 istrinya, dan memberinya seorang anak, Francisco Mendes, seorang penganut taat Kristen dan "sekretaris" Portugis pada dua raja berikutnya. Pertumbuhan yang spektakuler ini menginisiasi sultan memobilisasi rakyatnya untuk memperkuat sistem pertahanan dengan membangun tembok dari Ujung Tana di utara kota hingga ke Somba Opu di selatan. Dalam catatan lontarak bilang peristiwa itu terjadi pada 23 Maret 1634.

Raja Gowa yang pertama menerima Islam ini meletakkan fondasi yang kokoh dalam mengembangkan kerajaan. Ia pula yang membangun Istana Kale Gowa di Tamalate pada bulan Juni 1618. Sultan bersama mitranya, yang sering disebut sebagai "penguasa kembar", Sultan Tallo Abdullah Awalul Islam membangun istana yang dipusatkan di Benteng Tallo, yang konstruksinya termasuk mansory. Program pembangunan kembali benteng-benteng didorong oleh meningkatnya frekuensi kunjungan pedagang asing di kota ini, seperti yang sudah dijelaskan di atas. Pada tahun-tahun 1615-1620, dinding sepanjang 2,7 km. di Tallo dan 3,8 km. di Kale Gowa dibangun. Teknologi konstruksi pada masa itu adalah dinding dua lapis dari tumpukan batu [bata] merah sehingga menghasilkan tiga lapisan batu merah paralel pada seksi di Kale Gowa yang awalnya hanya terdiri dari dasar batu [bata] merah tunggal.

Renovasi benteng yang kian gencar ini menimbulkan prasangka dari pedagang asing bahwa Kerajaan Makassar sedang membangun kekuatan militer baru yang mengancam eksistensi mereka. Asumsi itu makin diperuncing dengan adanya persaingan antara Portugis, Belanda dan Inggris yang tidak puas terhadap sikap netral penguasa Makassar yang sangat terbuka terhadap semua pedagang. VOC menginginkan agar sultan mengakhiri hubungan perdagangan dengan Portugis namun, sultan menolak. Pada 1615 Abraham Sterck, Kepala Kantor Dagang VOC meracuni hubungan Belanda-Makassar dengan meninggalkan kota ini secara tiba-tiba dengan sebuah kapal Belanda dan membunuh beberapa bangsawan Makassar yang berada di atas kapal. Tindakan Sterck tampaknya sebagai bagian dari upaya yang gagal untuk memperoleh kembali modalnya. Pada 1672 Pimpinan Perusahaan Dagang Inggris menuntut agar diambil tindakan lebih keras terhadap orang Portugis namun, sekali lagi, sultan lebih memilih berdiri "di tengah-tengah".

Konfrontasi antarpedagang tersebut tidak menghentikan upaya sultan dalam menata wilayahnya. Dalam catatan Kerajaan Gowa ditulis bahwa pada "15 Satemberek 1631/17 Sapparak 1041 H. allo sanneng. Nanibangung Maccinikdanggang. Annampulo banngi allima lekbakna nibangung

nanapanaiki karaenga (pada 15 September 1631/17 Syafar 1041 H. sultan mendirikan istana Maccinik Danggang dan menempatnya enampuluh hari kemudian, 17 November 1631. Setahun setelah itu, 14 Agustus 1632, sultan memperkokoh Istana "Maccinik Danggang" di Benteng Somba Opu dengan bata. Dalam sejarah Tallo kita dapat membaca bahwa Sultan Abdullah Awalul Islam membangun dinding batu [bata] merah untuk memagari Panakukang, Ujung pandang dan Ujung Tana. Metode konstruksi dinding antara Ujung Tana dan Somba Opu tidak disebutkan dalam sumber-sumber sejarah Tallo. Akan tetapi, dinding Barombong (yang kemungkinan memanjang ke utara hingga Panakukang) agaknya menggunakan batu [bata] merah, mengingat fragmen batu [bata] merah bertebaran di situs ini.

Gagasan pembangunan yang melampui zamannya ini, terbilang sukses ketika sultan mengekspose proyek baru, yakni perluasan kekuasaan dan perkuatan fondasi ekonomi lewat sejumlah program, dan yang paling impresif adalah keseriusannya membangun armada maritim yang tangguh, serta revitalisasi kekuatan pertahanan dengan sistem perbentengan. Tradisi literasi Gowa merekam dengan baik bahwa atas perintah sultan, namanjama tauia bata butta sanggenna Juttana nasanggenna Sombaopu (rakyat membuat tembok bata dari Ujung Tana hingga Somba Opu (pada 23 Maret 1634), dan ketika pekerjaan itu sedang berlangsung Sultan Alauddin beserta keluarganya untuk sementara menempati istananya yang lain di Benteng Panakukang. Pada waktu yang sama renovasi ringan terhadap benteng inipun dimulai pada 29 Juli 1634. Pekerjaan serupa dilakukan pula di Benteng Ujung Pandang, di mana tembok-tembok diperbaiki dan dipasang dengan menggunakan batu [bata] merah pada 9 Agustus 1634, dinding Benteng Barombong dengan bantuan orang-orang Somba Opu (sebanyak 855 orang) dikerjakan pada 30 April 1635, dinding kedua di pintu gerbang Benteng Somba Opu pada 23 Juni 1635. Selain benteng sultan membangun masjid di Bontoala pada 10 November 1635, dan lumbung padi di depan Istana Maccinik Danggang pada 26 Agustus 1638.

Menarik untuk diamati bahwa sehabis mendirikan masjid dan lumbung padi, tak terlihat lagi proyek-proyek besar lain yang dikerjakan. Seolah mengakhiri karir kepemimpinannya dengan torehan dua ikonitas sosial (masjid) dan ekonomi (lumbung padi), Sultan Alauddin yang wafat pada 15 Juni 1639 memperlihatkan bahwa elemen-elemen pertahanan yang dibangunnya akan menjadi simbol kebesaran yang terus dikenang dan dilestarikan. Sementara bangunan spiritualitas akan menjaga keserasian sosial dan harmoni antara kebutuhan profetik "nanti", dengan tuntutan yang "kini" sedang diperjuangkan. Prestasi yang gemilang ini mengantarkannya sebagai penguasa yang dipandang paling berhasil dalam sejarah Makassar sebelum Sultan Hasanuddin.

Pada periode kepemimpinan I Mannuntungi Daeng Mattola Karaeng Lakiung "Sultan Malikussaid Tumenanga ri Papangbatuna) (memerintah 1639-1653), semangat membangun dan memperkokoh negara makin berkobar. Sultan Malikussaid percaya bahwa hal itu dapat dicapai apabila bangsanya punya kemampuan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal inilah yang mendorong segelintir elit untuk mendesain sebuah program terjemahan karya-karya bangsa asing, terutama yang berbahasa Portugis, Spanyol, Turki, Melayu dan bahasa Eropa dan Asia Tengah lainnya ke dalam bahasa Makassar. Program itu dimulai sekitar tahun 1640-an di bawah usaha seorang tokoh dan cendekiawan ternama, Karaeng Pattingalloang. Hasil yang paling mengesankan dari usaha ini adalah munculnya bacaan-bacaan mutakhir tentang teknik-teknik membuat senjata, dan adanya tenaga-tenaga trampil yang amat dibutuhkan untuk mendesain, membuat gambar dan peta serta menuliskan segala peristiwa (yang penting dari sudut pandang istana dan atau peristiwa biasa) ke dalam bentuk catatan harian kerajaan yang kini dikenal sebagai lontarak bilang.

Program pembangunan benteng pertahanan yang terakhir agaknya berlangsung menyusul direbutnya Benteng Panakukang oleh Belanda pada tanggal 12 Juni 1660. Selain menguasai benteng, pasukan yang dipimpin John van Dam, dan Truytman tersebut juga melucuti sejumlah loyalis dan membunuh tiga orang pembantu dekat sultan, yakni Karaeng Batubatu, Karaeng Tompokbalang, dan Karaeng Bontonompok. Atas peristiwa tersebut Sultan Hasanuddin meminta gencatan senjata dan akhirnya menandatangani perjanjian yang isinya, antara lain; Makassar harus meninggalkan Buton, Manado dan Kepulauan Maluku; mengusri Portugis dari Makassar (sedangkan VOC akan diberi "tempat menetap"), dan Makassar akan menanggung biaya peperangan. Benteng Panakukang hanya akan dikembalikan jika semua syarat itu telah dipenuhi. Ternyata Benteng Panakukang tidak dikembalikan, tetapi dihancurkan dengan alasan Makassar belum memenuhi apa yang tertera dalam perjanjian.

Bullbeck (2005: 134) yang mengutip Dagb-Register tahun 1661 menulis bahwa Karaeng Summana, atas perintah Raja Gowa I Malombasi Daeng Mattawang Karaeng Bontomangape "Sultan Hasanuddin Tumenanga ri Balla'pangkana (1654-1670) membangun tanggul di selatan Benteng Panakukang dengan batu [bata] merah. Sumber lokal melaporkan bahwa pada 15 Agustus 1662 orang-orang Barombong mulai membangun dinding benteng kedua, Benteng Barombong. Sultan juga mengerahkan rakyatnya untuk membuat dinding Benteng Ujung Pandang dengan tanah di sebelah utara pada 13 Agustus 1665. Jadi, antara tahun 1661 dan 1663 Karaeng Summana berkonsentrasi memperkuat kembali pertahanan antara Panakukang dan Barombong yang telah dihancurkan Belanda selama penaklukan Panakukang. Terdapat kecocokan dengan temuan arkeologis dalam bentuk lapisan-lapisan fragmen ketebalan batu merah yang tidak biasa, yang melintasi bukit pasir di pantai bagian selatan Panakukang, di daerah yang kini bernama Pattukangang.

Meski Lontarak Bilang mencatat konstruksi di Pattukangang, namun keseluruhan sistem pertahanan pantai tetap diperhatikan dan diperluas dengan penekanan khusus pada rentang Panakukang-Somba Opu, daerah sekitar perkampungan Portugis (selatan Mariso), dan Benteng Ujung Pandang di utara Pantai Makassar. Bahkan terdapat rujukan tentang pembangunan dinding pantai hingga Benteng Tallo dan tentang Sultan Hasanuddin yang menggali kanal antara Somba Opu dan Garassi. Tampaknya setelah tahun 1663, kalau kita bersandar pada karya historiografi lokal, hanya ada dua upaya revitalisasi benteng, yakni perbaikan dinding Benteng Tallo dan Benteng [Ana/Kale?] Gowa masing-masing pada tanggal 2 dan 3 Juni 1670.

Geliat membangun mengalami pasang surut berkaitan dengan meningkatnya eskalasi politik yang menggiring Kesultanan Gowa dan sekutu-sekutunya ke dalam pusaran konflik dengan Belanda lewat "Perang Makassar" pada 1666-1667. Perang tersebut meninggalkan banyak luka. Hampir separoh aset-aset kesultanan jatuh ke tangan Belanda. Ketika Gowa takluk pada 1666, yang kemudian dikukuhkan lewat "Perjanjian Bungayya" (Bongaïsch Verdrag) setahun kemudian, pada 18 November 1667, Gowa harus rela melepas atribut kekuasaan politik dan ekonominya kepada Belanda. Amputasi kekuasaan tersebut ditandai dengan kesediaan para Karaeng Gowa untuk melucuti dan menghancurkan semua markas pertahanannya. Membongkar benteng-bentengnya, kecuali Benteng Somba Opu untuk para pembesar Gowa, dan Benteng Ujung Pandang untuk penguasa kolonial".

Di Benteng Ujung Pandang Belanda mulai melakukan penataan dengan membangun sebuah gedung (sekarang Gedung D) pada 1686 untuk kediaman para petinggi VOC. Bentengpun diubah namanya menjadi "Fort Rotterdam" untuk mengabadikan tempat kelahiran Panglima Armada VOC/Belanda Admiral Cornelis Speelman di Nederland.

Bagi VOC benteng adalah kebutuhan utama disamping modal dagang. Benteng mengalami perkembangan fungsi ketika dijadikan pusat pemerintahan dan kegiatan administrasi yang mengatur wilayah kekuasaan badan usaha dagang itu. Dalam konteks ini maka benteng berfungsi sebagai tempat perlindungan bagi mereka yang tinggal di dalamnya. Dengan banyak dan beragamnya individu yang tinggal di dalam benteng, dinamika kehidupan menjadi kompleks. Bersamaan dengan itu benteng tidak lagi menjadi simbol pertahanan tetapi juga menjadi pusat aktivitas dan interaksi sosial.

Ketika benteng tidak memadai lagi untuk menampung personil VOC, penduduk sipil Eropa dan sebagian anggota pasukan membuka pemukiman baru di sekitar Benteng Ujung Pandang/Fort Rotterdam. Kompleks perkampungan yang baru dibangun pada akhir abad ke-17 ini disebut "Vlaardingen". Sebagai suatu simbol budaya Eropa pada abad ke-19 di kompleks permukiman Vlaardingen berdiri sebuah Societeit yang disebut "De Harmonie Societeit". Ini merupakan tempat berkumpul untuk melakukan aktivitas budaya yang menunjukkan kehidupan seni dan sosial masyarakat Eropa.

Pada penghujung abad ke-17 dan awal abad ke-18 suatu kompleks permukiman baru juga muncul disekitar Benteng Ujung Pandang/Fort Rotterdam. Kompleks ini dihuni oleh orang-orang pribumi yang menjadi kawula atau pegawai rendahan pemerintah Belanda. Diantaranya adalah orang-orang Melayu, Buton, Ternate, dan mestizo serta orang-orang Cina. Mereka tinggal di sebelah selatan Benteng Ujung Pandang/Fort Rotterdam yang dikenal sebagai "Kampung Baru". Ketiga kompleks ini; Benteng Ujung Pandang/Fort Rotterdam, Vlaardingen dan Kampung Baru memberikan warna baru dalam

kehidupan sosial di Makassar sejak akhir abad ke-17. Dengan lokasinya yang terletak di jantung Makassar, ketiganya menjadi pusat gravitasi kehidupan kota yang mengontrol potensi perekonomian dan kekuatan politik dan sosial masyarakat pribumi, dan Kampung Baru (yang kemudian berdiri pula "Pasar Baru") merupakan model masyarakat plural produk kekuasaan kolonial di timur.

Penataan ini memberi kesan "kebaruan" yang berbeda sama sekali dengan kondisi Makassar lama yang kita jumpai di benteng-benteng lama, yang lebih mengutamakan harmoni dan keserasian sosial. Dengan begini, masyarakat Makassar seperti diajak untuk melupakan kepedihan dan trauma akibat penindasan politik yang membentuk "memoria passionis", kenangan akan penderitaan yang mendalam dari drama perang yang mengoyak keutuhan negeri. Semoga para karaeng yang sudah tertidur lelap, terkubur bersama mimpi-mimpi besarnya bisa "menyaksikan" bahwa warisannya kini telah melampaui jamannya, dan menjadi kebanggaan bersama milik bangsa Indonesia.

Makassar, 24 Oktober 2013
Muslimin A.R. Effendy

DAFTAR ISI

SAMBU TAN KEPALA BALAI PELESTARIAN CAGAR BUDAYA MAKASSAR	iv
PENGANTAR EDITOR, Warisan Para Karaeng: Menjaga Keutuhan Negeri yang Terkoyak	v
DAFTAR ISI	x
Bagian Pertama:	1
Benteng dan Perkembangan Kota	1
A. Pengantar Pendahuluan: Benteng-benteng Makassar	1
B. Tradisi Tembok, Benteng dan Kota	8
C. Benteng dan Pembentukan Kota di Nusantara	22
Bagian Kedua :	27
Benteng-benteng Peninggalan Kerajaan Gowa	27
A. Benteng Kale Gowa	27
B. Benteng Somba Opu	30
C. Benteng Ujung Pandang/Fort Rotterdam	35
D. Benteng Tallo	37
E. Benteng Panakkukang	39
F. Benteng Barombong	40
G. Benteng Garassi	41
H. Benteng Ana' Gowa	42
I. Benteng Galesong	44
J. Benteng Sanrobone	44
Bagian Ketiga:	47
Arsitektur, Konstruksi dan Pola Permukiman Dalam Benteng	47
A. Arsitektur Benteng Ujung Pandang/Fort Rotterdam	47
B. Pola Permukiman Dalam Benteng Kale Gowa	61
C. Konstruksi dan Bahan Benteng Garassi	68
Bagian Keempat:	75
Konservasi, Pengembangan dan Pemanfaatan Benteng	75
A. Konservasi dan Zonasi Benteng Ujung Pandang/Fort Rotterdam	75
B. Konservasi dan Zonasi Benteng Somba Opu	101
C. Konservasi dan Zonasi Benteng Sanrobone	119
D. Menyelami Dunia yang Dilipat: Sebuah Analisis Struktural Terhadap Kawasan Benteng Somba Opu	139
Bagian Kelima :	187
Catatan Penutup	187



BAGIAN PERTAMA

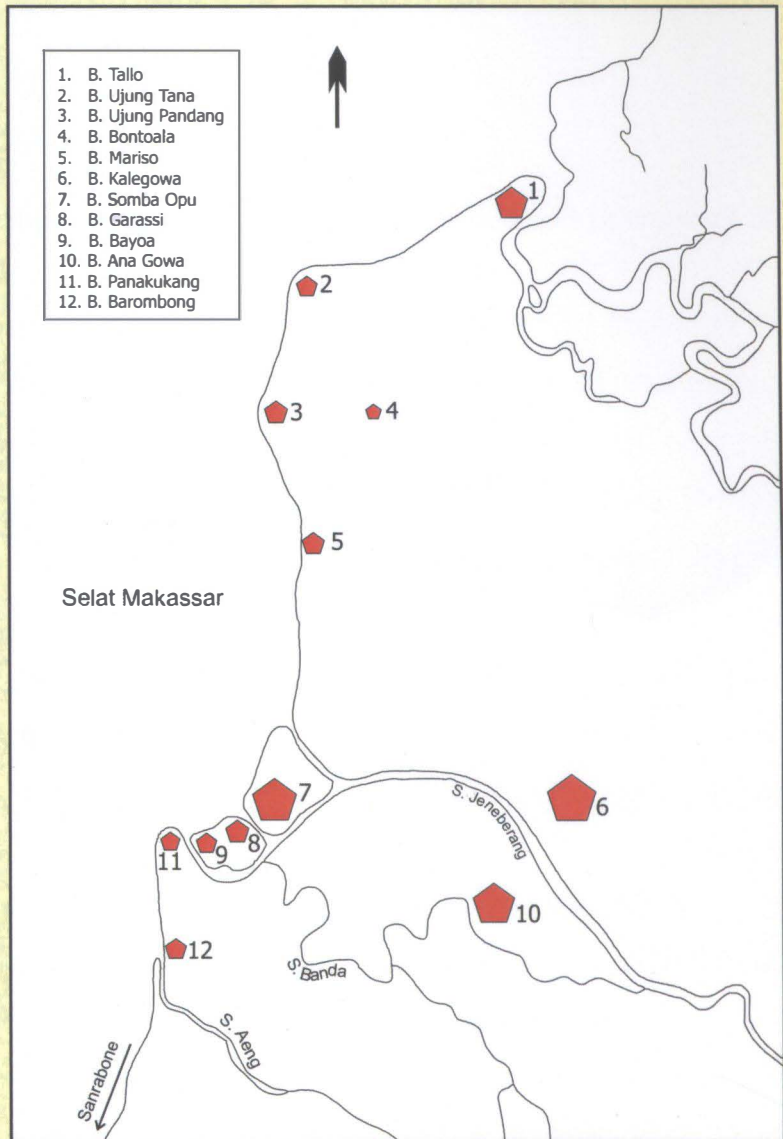
Benteng dan Perkembangan Kota

A. Pengantar Pendahuluan: Benteng-benteng Makassar

Di semenanjung barat Pulau Sulawesi, utamanya di Kota Makassar dan di sekitarnya di bagian selatan dan timur kota, bisa ditemukan belasan benteng. Tak diragukan lagi, Benteng Ujung Pandang/Fort Rotterdam bahkan bisa dianggap sebagai salah satu ikon Kota Makassar yang menjadi pusat perhatian bagi pengunjung dari luar kota dan luar negeri. Namun, benteng tersebut hanya satu dari sekian banyak benteng yang ada wilayah ini. Benteng-benteng ini merupakan bagian dari pusaka (*heritage*) yang *tangible* yang dimiliki tidak hanya oleh masyarakat Kota Makassar atau masyarakat penutur bahasa Makassar atau masyarakat Sulawesi Selatan, tetapi benteng-benteng ini adalah pusaka dari bangsa Indonesia dan menjadi bagian dari tradisi pembuatan benteng di dunia.

Tidak banyak daerah di Indonesia dimana bisa ditemukan serangkaian benteng yang dibangun ratusan tahun yang lalu. Sebagian besar benteng ini dibangun dengan fungsi pertahanan sebagai alasan utama perencanaan dan pembangunannya. Dari Benteng Tallo di muara Sungai Tallo di Kota Makassar, ke arah selatan ke daerah Ujung Tanah (kini Pelabuhan Sukarno Hatta, terus ke selatan Benteng Rotterdam hingga Benteng Somba Opu dan berujung di Benteng Barombong, bisa ditemukan bukti-bukti tinggalan benteng dan/atau sisa-sisa tembok pertahanan yang membentang melindungi garis pantai sepanjang lebih dari 10 kilometer. Dan jauh di sebelah selatan, kurang lebih 40 kilometer dari Kota Makassar, dapat ditemui Benteng Sanrabone. Namun, tidak semua benteng dibangun di tepi pantai. Benteng Kale Gowa yang bisa dianggap sebagai benteng paling tua dan paling penting, kini berada di Sungguminasa Kabupaten Gowa, tidak jauh dari Sungai Jeneberang namun cukup jauh dari garis pantai.

Meski benteng-benteng Makassar ini sangat unik, pada saat yang sama, apabila kita melihat pada sejarah militer ataupun sejarah kota di dunia, dapat kita lihat bahwa tradisi membangun benteng merupakan hal yang sudah sangat tua dan dilakukan oleh berbagai bangsa di dunia. Ribuan tahun yang lalu sudah dibangun benteng yang mengelilingi permukiman atau bahkan kota di Timur Tengah ataupun di Cina. Tembok Cina yang sangat terkenal tersebut adalah satu contoh dari tradisi pembangunan benteng ini. Dan berdasarkan kajian arkeologis dan juga berdasarkan sumber-sumber tertulis bisa diperkirakan bentuk benteng-benteng

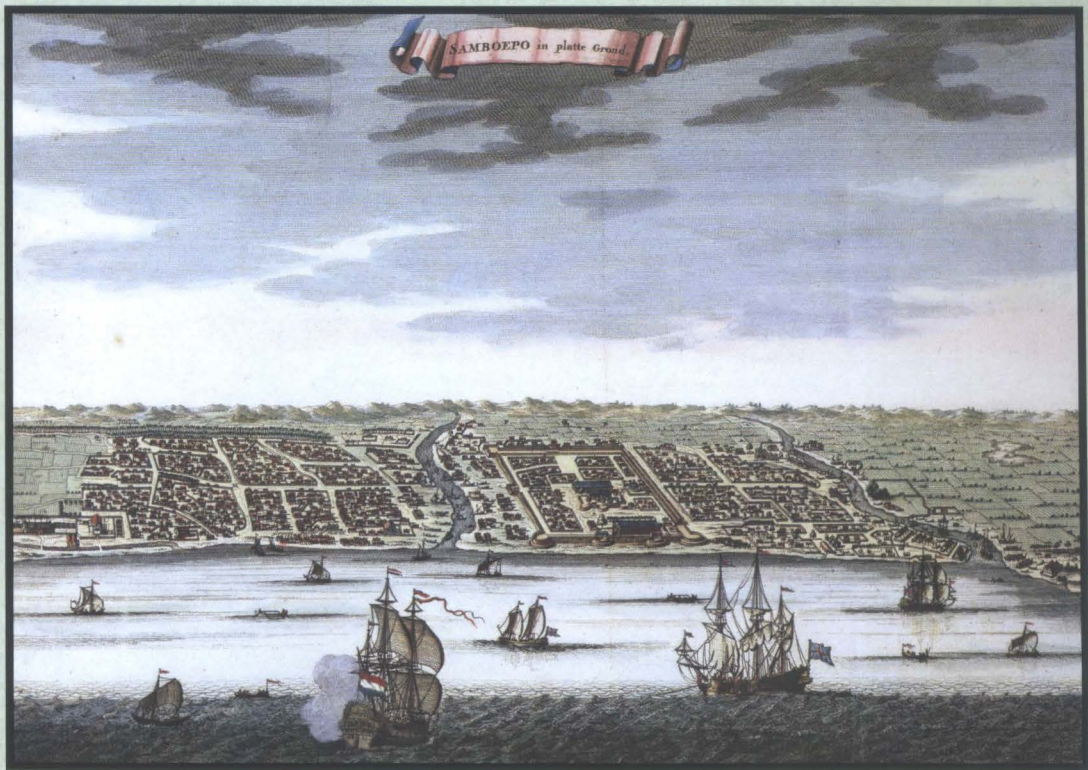


Gambar 1: Sebaran benteng pertahanan Kerajaan Makassar tahun 1667 (Bullbeck, 2005: 69)

yang (pernah) dibangun meski sebagian kini tidak lagi dapat dilihat bentuk aslinya. Tentu pada saat ini belum bisa dipastikan hubungan antara pembangunan satu benteng dengan benteng lain di dunia--setidaknya untuk benteng-benteng dari ribuan tahun yang lalu. Apakah benteng di Cina, misalnya, secara langsung mengambil teknik pembangunan benteng dari tempat lain, ataukah perkembangannya bisa dikatakan mandiri dan berasal dari tradisi lokal?

Berbeda misalnya dengan benteng-benteng yang dibangun sejak abad pertengahan di Eropa dan terutama di abad ke-11 dan sesudahnya. Sejak masa itu asal usul perkembangan serta saling-serap teknologi pembangunan benteng sudah dapat diperkirakan. Selain itu, konteks perkembangan rencana dan bentuk benteng dikaitkan dengan adanya perkembangan teknologi perang yang diterapkan secara hampir bersamaan di satu tempat (di Eropa, misalnya). Penggunaan pasukan berkuda (kavaleri), mesiu, dan akhirnya, meriam adalah beberapa perkembangan teknologi perang yang mempengaruhi rencana dan bentuk benteng.

Meski pertahanan adalah fungsi utama, namun aspek militeristik bukanlah satu-satunya aspek yang lahir dari pembangunan benteng ini. Benteng-benteng Makassar membentuk juga permukiman yang berkembang menjadi perkotaan. Para pelaut dan pedagang Eropa sangat mengagumi "Kota Makassar" yang tidak lain adalah permukiman yang dilindungi oleh tembok yang dikenal sebagai Benteng Somba Opu. Dan meskipun kini sudah diralat, seorang sejarawan penting pernah memperkirakan bahwa di dalam dan di sekitar Benteng Somba Opu terdapat permukiman perkotaan yang pada puncaknya di abad ke-17 dihuni oleh sekitar 100 ribu penduduk (Reid, 1998: 72). Angka yang tepat memang sulit didapat, namun penduduk kota pada saat itu mungkin separuh dari jumlah yang diperkirakan. Yang penting disimpulkan di sini adalah bahwa benteng dan kota memiliki hubungan yang erat. Meski tidak selalu, benteng dapat berfungsi sebagai pusat pertumbuhan kota. Benteng Somba Opu dan Benteng Kale Gowa menjadi pusat kota sebelum dihancurkan oleh VOC di akhir abad ke-17, dan Benteng Ujung Pandang/Fort Rotterdam menjadi pusat kota baru yang dibangun oleh VOC di masa sesudahnya.



Gambar 2: Peta Benteng Somba Opu tahun 1638

Benteng dan usaha untuk membangunnya adalah bagian dari gerak sejarah satu masyarakat disatu kurun waktu. Benteng-benteng Makassar memiliki keunikan karena mereka dibangun disatu kurun waktu secara hampir bersamaan oleh masyarakat yang bermukim disepanjang pantai barat dan pantai selatan semenanjung Sulawesi. Kalau kita ikuti kesimpulan tentatif para ahli arkeologi, sejarawan, ataupun ahli sastra vernakular, maka bisa dikatakan bahwa benteng-benteng Makassar dibangun sejak dekade pertama abad ke-16 dan terus dibangun sepanjang abad tersebut hingga akhirnya harus dibongkar sesudah kekalahan Kesultanan Gowa dalam Perang Makassar di tahun 1669. Dan memang masa kurang lebih seratus lima puluh tahun tersebut merupakan masa yang sangat dinamis dalam sejarah sosial, ekonomi, dan utamanya politik di daerah yang sekarang adalah Provinsi Sulawesi Selatan.

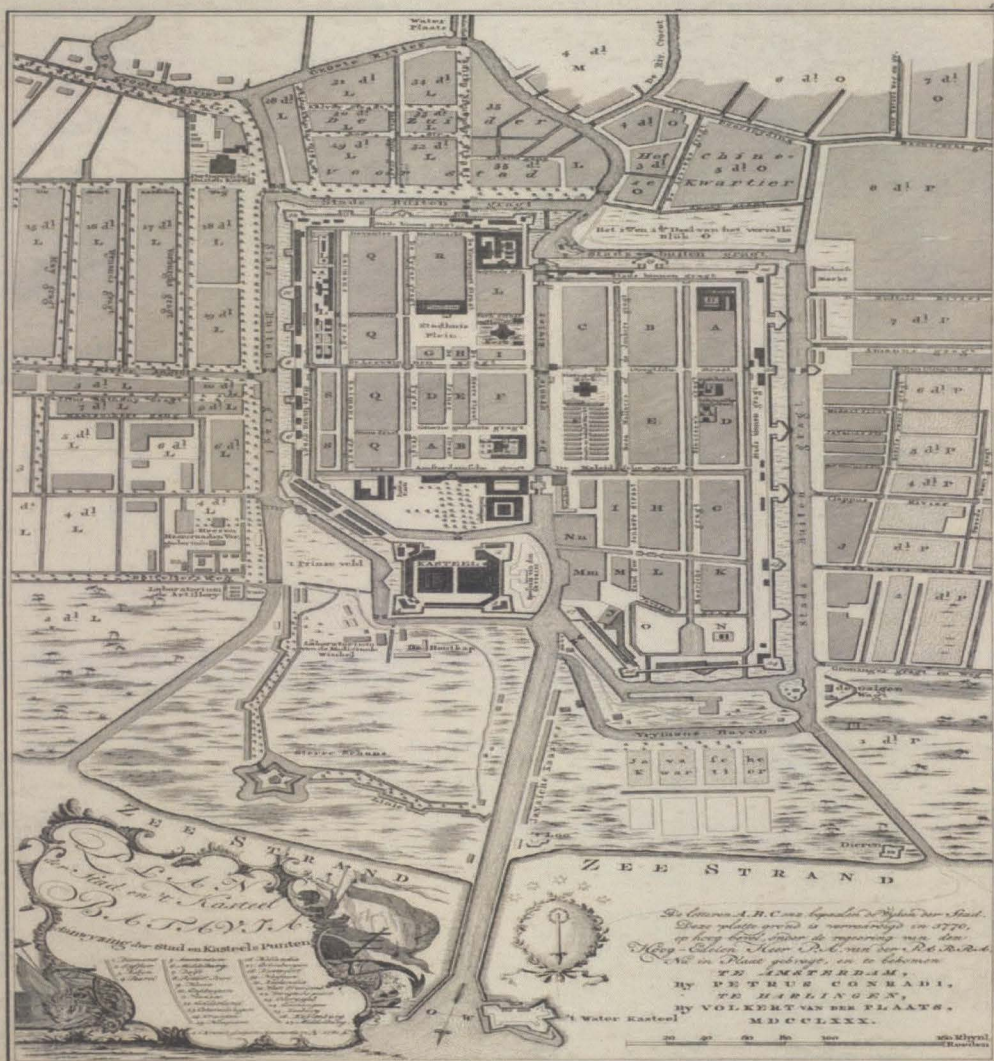
Seperti diketahui bahwa pertumbuhan satuan-satuan politik di semenanjung barat Sulawesi mengalami percepatan pada awal abad ke-16 ketika penguasa Gowa

Karaeng Tumaparisi Kallona (memerintah mulai dari akhir 1510 atau 1511 sampai akhir tahun 1546) mulai melakukan perluasan kekuasaannya ke daerah-daerah di sekitarnya. Di masa kekuasaannya Gowa berdagang dengan Melaka dan kemudian menerima pedagang Portugis sesudah Melaka jatuh ke tangan Portugis. Di bawah pimpinannya Gowa menyerang dan menundukkan ke wilayah yang luas dan jauh hingga ke Bone, Luwu dan Sidenreng. Pertumbuhan internal dan ekspansi Gowa terus berlanjut di bawah para pengganti Karaeng Tumaparisi Kallona. Di masa itu para pengrajin dipekerjakan khusus untuk mengerjakan tugas seperti membuat kapal, membuat tali, pandai besi dan pengrajin emas yang kesemuanya menunjukkan adanya masyarakat yang semakin kompleks yang ditandai dengan spesialisasi dalam bidang ekonomi. Lebih jauh lagi diciptakan jabatan-jabatan baru dan penting dalam hierarki pemerintahan seperti sahbandar (sabannara), tumabicarabutta, dan tumailalang. Ketiga jabatan ini menjadi sangat penting mengingat semakin beragamnya urusan yang harus ditangani oleh para penguasa dan semakin luas dan bermacamnya wilayah dan masyarakat yang harus dihadapi oleh somba—penguasa puncak di Kekaraengan (dan nantinya Kesultanan Gowa). Pada saat yang bersamaan, sejak Tumaparisi Kallona, benteng-benteng pertahanan dibangun dan diperbaiki di sepanjang pantai dekat pusat Kekaraengan Gowa. Dan di masa penggantinya, yakni Tunipalangga (memerintah dari tahun 1547 sampai dengan 1565) benteng-benteng yang sebelumnya dibangun dengan dinding tanah diperbaiki dengan teknologi batu merah.

Diterimanya Islam sebagai agama “resmi” yang dianut oleh penguasa Gowa di tahun 1605 merupakan momen historis yang sangat penting dalam sejarah masyarakat di semenanjung barat Sulawesi. Dianutnya Islam untuk pertama kalinya oleh petinggi kekaraengan yang sangat dihormati yakni Karaeng Matoaya dan kemudian disusul oleh Sultan Alauddin yang menjadikannya penguasa Gowa pertama yang memeluk Islam menandai satu proses Islamisasi yang dirasakan hingga sekarang. Pada saat yang sama, Islam kemudian menawarkan satu konsep ideologis “baru” yang diharapkan saat itu untuk dapat “melintasi” konsep ideologis yang berakar pada tradisi lokal. Perang demi

penyebaran Islam berkobar di semenanjung barat Sulawesi berlangsung hanya beberapa tahun setelah para penguasa Gowa memeluk Islam, bercampur dengan perang perluasan politik dan wilayah yang kecenderungannya sudah dimulai di abad ke-15. Dianutnya Islam seolah juga menandai semakin terserapnya masyarakat di semenanjung barat Sulawesi ke sistem perdagangan global dalam apa yang oleh sejarawan disebut sebagai "kurun niaga."

Era perdagangan global ini pada gilirannya juga membawa para pedagang dari Eropa yang kemudian bermaksud untuk menguasai jalur-jalur perdagangan utamanya—di abad ke-16 dan ke-17—yang berpusat pada Kepulauan Maluku. Setelah Portugis menaklukkan Melaka di tahun 1511 dan kemudian berusaha menguasai kepulauan penghasil cengkeh dan pala, beberapa dekade sesudahnya perusahaan dagang dari Kerajaan Belanda *Verenigde Oost-Indische Compagnie* (VOC) secara lebih sistematis dan brutal mengambilalih rencana Portugis dan menciptakan sistem monopoli yang berpusat di Batavia yang bertahan hingga akhir abad ke-18. Dalam rencana ini Kesultanan Gowa menguasai satu titik penting dalam jaringan pelayaran dan perdagangan menuju Kepulauan Maluku. Posisi geografis Gowa dan kedudukan politiknya di daerah sekitar pulau rempah-rempah menyebabkan cepat atau lambat menjadi duri dalam daging dalam rencana monopolistik VOC. Benturan kepentingan antara VOC dan Kesultanan Gowa tinggal menunggu waktu saja dimana Gowa terus membangun benteng sebagai persiapan. Konflik bersenjata akhirnya meletus dan sejak tahun 1660 sampai dengan 1669 dimana VOC dan sekutunya La Tenritata Arupalakka dari Bone dan Soppeng berhasil menaklukkan Kesultanan Gowa melalui perang besar yang memakan begitu banyak jiwa dan sumberdaya. Diujung perang Kesultanan Gowa dipaksa untuk membongkar seluruh sistem perbentengan yang sudah dibangunnya.



00014

Gambar 3: Peta Kastil Batavia, kantor utama VOC di Abad ke-18 yang menunjukkan tembok benteng (Sumber: Balk et.al. 2007, 208).

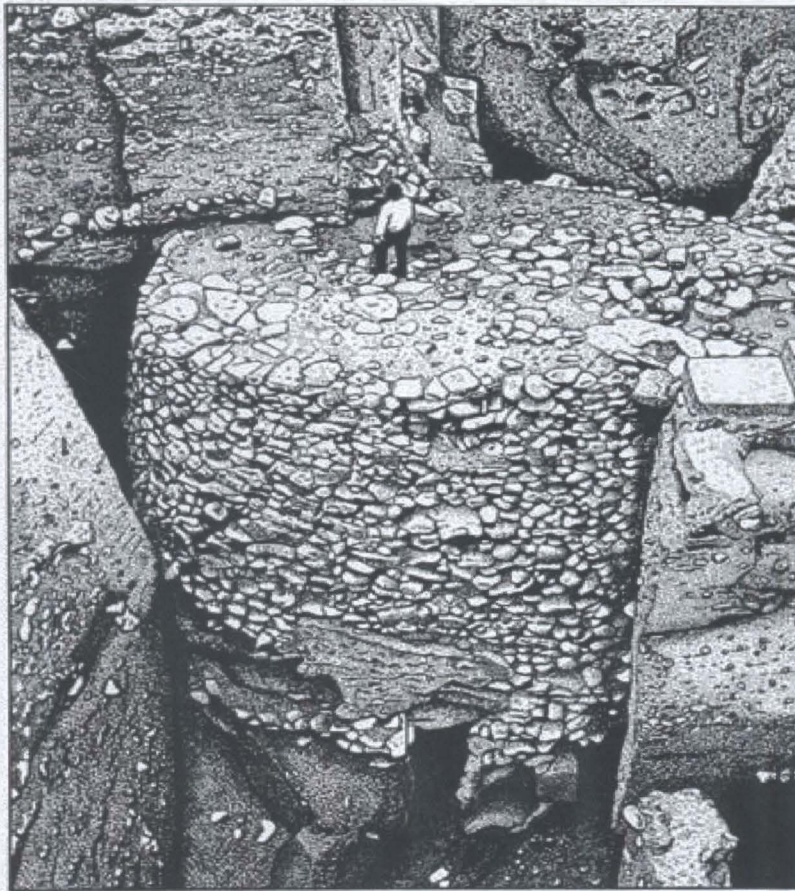
Dari gambaran kronologis singkat di atas diketahui bahwa "masa kejayaan" pembangunan benteng terjadi selama kurang lebih dari pertengahan abad ke-16 sampai dengan pertengahan abad ke-17 atau sekitar satu abad. Dengan kata lain, sepanjang seratus tahun, sekian banyak benteng dibangun yang tentu saja menghabiskan sumber daya alam (bahan bangunan, kayu dan sebagainya) dan sumber daya sosial (di antaranya, untuk mobilisasi tenaga kerja dan sistem organisasi tenaga kerja) yang tidak sedikit. Kita masih belum tahu dampak langsung dari pengerjaan "proyek" militer seperti ini terhadap susunan masyarakat yang ada pada saat itu. Namun,

kita tahu bahwa benteng-benteng ini secara perlahan bersama dengan berjalannya waktu membentuk permukiman padat yang pada gilirannya menjadi kota.

Meski benteng dapat menjadi pusat permukiman yang kemudian berkembang menjadi kota, pada saat yang bersamaan, perkembangan kota perlahan-lahan menghancurkan sisa-sisa benteng. Sesudah ditaklukkannya Kesultanan Gowa di akhir abad ke-17, benteng-benteng Makassar harus dihancurkan dengan pengecualian apa yang kelak disebut Benteng Ujung Pandang/Fort Rotterdam. Dan berkembangnya permukiman di Sungguminasa perlahan-lahan menelan sisa-sisa Benteng Kale Gowa. Demikian pula permukiman dan pembanguna kota di muara Sungai Tallo membuat sisa-sisa Benteng Tallo semakin sulit ditemui. Dari sekian banyak benteng-benteng Makassar, hanya sedikit yang masih bisa dengan mudah ditemui sisa-sisanya. Dan dari yang sedikit ini, semakin sedikit pula yang masih sempat direnovasi dan dipelihara.

B. Tradisi Tembok, Benteng dan Kota

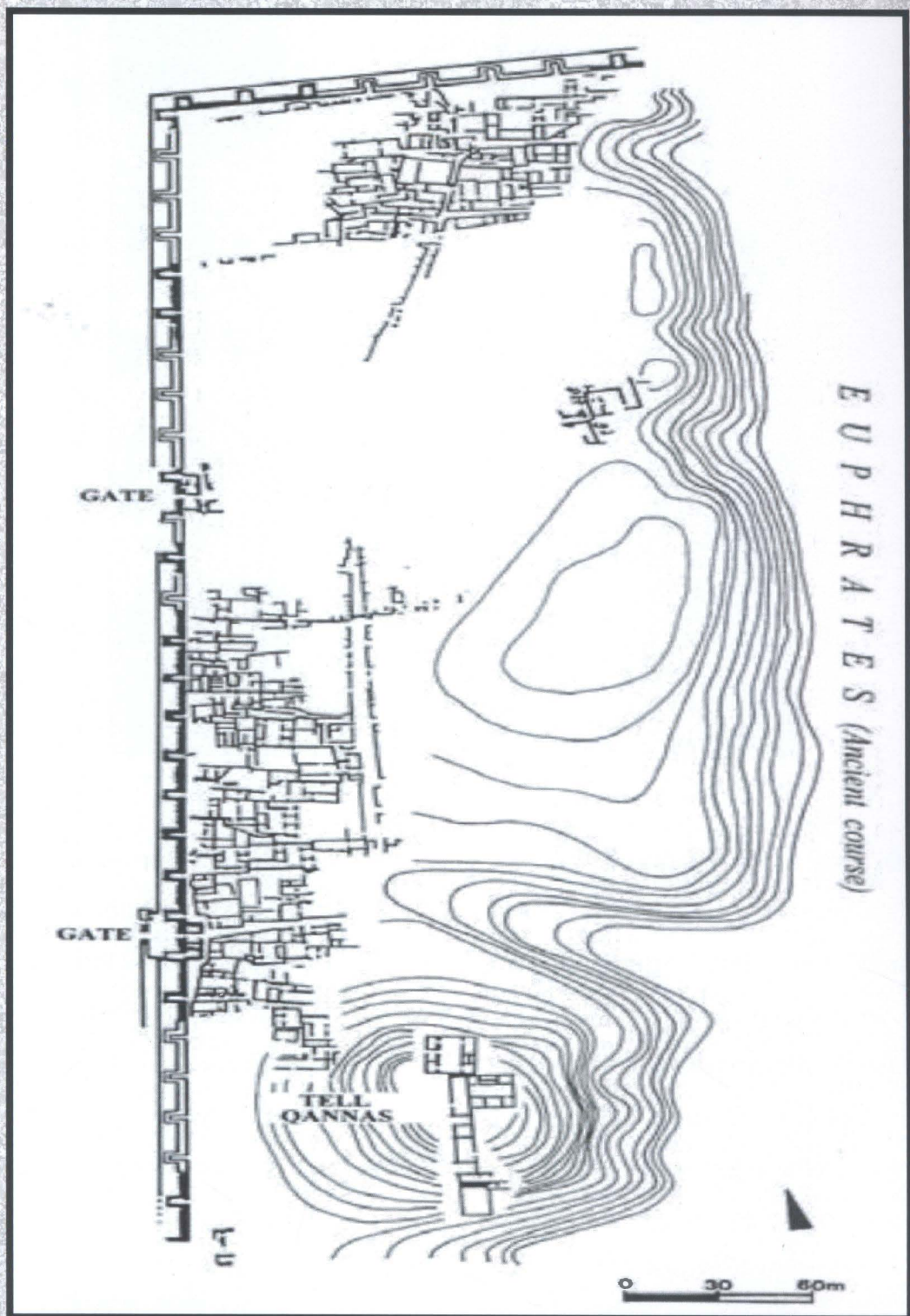
Secara historis dan di banyak tempat di belahan dunia, tembok dan benteng adalah bagian-bagian penting dari perkembangan kota. Dari penggalian arkeologis, di Jericho (Palestina), sudah ditemukan adanya tembok benteng setinggi 3,6 meter yang melindungi sisi barat sebuah permukiman seluas 4 hektar. Permukiman ini dilengkapi juga sebuah menara pengamat setinggi 9 meter, dan keseluruhan permukiman ini sungguh menakjubkan mengingat tempat ini diperkirakan dibangun antara 8500 sampai dengan 6000 tahun Sebelum Masehi, atau lebih dari 8000 tahun yang lalu di masa yang oleh para ahli arkeologi Timur Tengah disebut masa Neolitik Pra-Keramik (Gates, 2011: 17). Demikian pula, di Sumeria, Kota Uruk yang sangat luas dan yang diperkirakan merupakan awal tradisi perkotaan di Mesopotamia di masa kira-kira 4000 sampai dengan 3100 Sebelum Masehi, juga sudah dilengkapi tembok pertahanan sepanjang 10 kilometer. Tembok yang terbuat dari bata dan lumpur ini dapat melindungi daerah seluas 435 hektar (Gates, 2011: 32).



Gambar Foto Menara di Jericho (Sumber: Gates, 2011, 17)

Di Cina dimana ditemui tradisi perkotaan sejak ribuan tahun yang lalu, kota, apalagi ibukota, selalu dikelilingi oleh tembok besar yang membentuk benteng. Ibukota pertama dibangun dekat Sungai Wei di bagian utara Cina sekitar 1000 tahun Sebelum Masehi. Sejak saat itu sekurangnya 7 ibukota dibangun di sekitar lokasi ibukota pertama. Tiap ibukota dikelilingi tembok yang membentuk pola bujur sangkar dengan panjang sekurangnya satu kilometer di tiap sisinya—sebuah ukuran yang luar biasa untuk zamannya. Tradisi membangun tembok untuk membentuk benteng pertahanan terus berlanjut hingga masa-masa sesudahnya.

Dibangunnya “Tembok Besar” di daerah Cina bagian utara karenanya bisa dilihat sebagai bagian dari tradisi ini. Tembok ini mulai dibangun sejak Dinasti Qin (atau Chin) yang berusaha menyatukan Cina di tahun 221 Sebelum Masehi, setelah periode



Gambar 4 : Tapak Habura Kabira di Uruk yang menunjukkan lokasi tembok benteng (Sumber: Gates, 2011, 40)

peperangan yang panjang (Bodde, 1986: 62). Dikatakan bahwa ratusan ribu, dan bahkan hingga sejuta nyawa melayang untuk membangun tembok ini. Tembok Besar terus menerus dibangun utamanya di masa-masa dinasti sesudahnya dengan ongkos yang sangat besar, utamanya di masa Dinasti Ming di abad ke-14 Masehi sehingga tembok ini mencapai panjang 6.259 kilometer atau lebih dari 4 kali panjang Pulau Jawa dari Merak sampai dengan Banyuwangi. Bila kita hitung juga bentuk-bentuk pertahanan lain seperti sungai dan bukit terjal yang melengkapi tembok ini, maka panjangnya 8.850 kilometer.

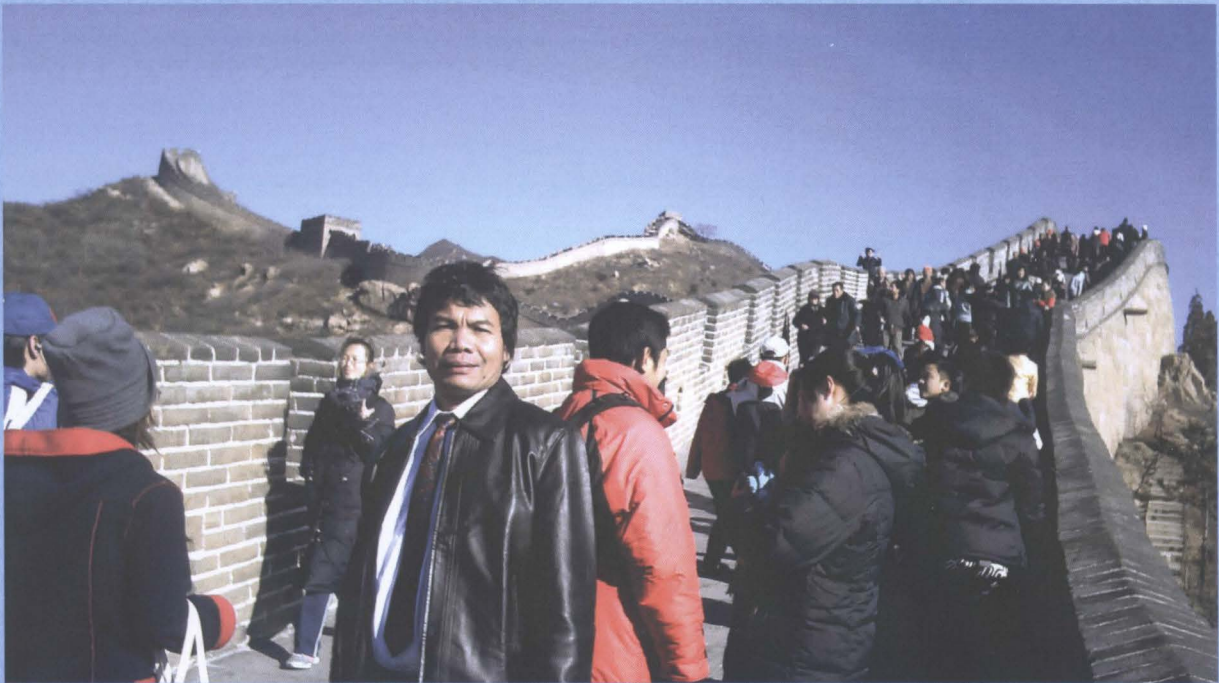


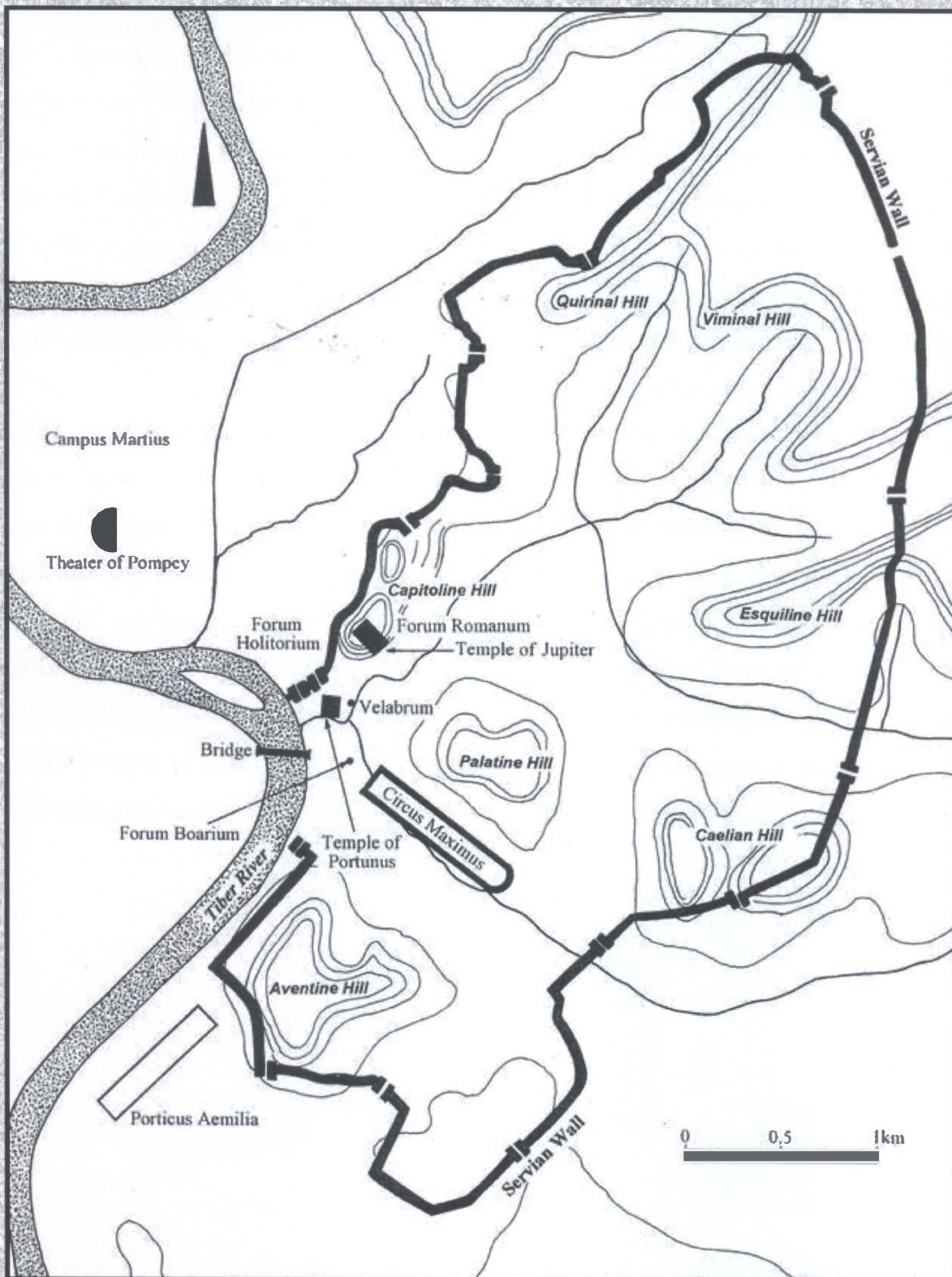
Foto 2: Tembok Cina, salah satu ikon pariwisata dunia yang ramai dikunjungi.
Foto ini diambil dari jalur tracking Sektor Badaling (Foto MAE, 2008).

Di abad ke-8 Masehi, salah satu sisi tembok benteng ibukota Chang'an di masa Tang memiliki panjang sekitar 10 kilometer. Begitu panjang tradisi dan terencananya benteng yang membentuk ibukota di Cina sehingga bisa dirumuskan adanya 11 elemen yang membentuknya (Steinhardt, 1990: 6-12): adanya tembok yang mengelilingi kota dalam pola bujur-sangkar, gerbang, sistem pertahanan yang biasanya berupa menara, pengaturan ruang dalam yang jelas, adanya orientasi permukiman, pengelompokan permukiman, akses air yang baik, benteng yang luas, jumlah penduduk yang sangat

besar, dan rencana tata kota yang jelas. Ibukota inilah yang menjadi sumber inspirasi bagi perkembangan ibukota lain bagi masyarakat di wilayah yang memperoleh pengaruh kekaisaran Cina. Kyoto, ibukota Jepang sejak akhir abad ke-8 dibangun dengan mengambil ibukota Cina masa Tang sebagai inspirasi, meski minus temboknya (McCullough, 1990: 97-182).

Di Eropa, penggunaan tembok sebagai bagian dari pertahanan kota bisa dilacak dari tradisi Romawi yang memang, dibanding dengan tradisi perkotaan Yunani, lebih berorientasi militeristik. Tembok pertama dan paling mengagumkan adalah apa yang disebut sebagai Tembok Servian yang mengelilingi ibukota Roma di abad ke-4 Sebelum Masehi (Edlund-Berry, 2013: 411, 421-423). Meski namanya dikaitkan dengan Servius Tullius yang berkuasa di abad ke-7 Sebelum Masehi, tembok ini sebenarnya dibangun beberapa ratus tahun sesudah dia berkuasa untuk memperkuat pertahanan Kota Roma dari serangan orang-orang Gaul yang terus meningkat di masa tersebut. Tembok ini kemudian nantinya diperkuat dan diperpanjang di masa Auerlius di abad ke-3 Masehi dan karenanya sering disebut sebagai Tembok Aurelian. Kota-kota Romawi lainnya juga dilengkapi dengan tembok pertahanan yang membentuk benteng. Kota tua Gerasa (Jerash) di tepi Sungai Jordan yang juga jatuh di bawah kekuasaan Roma, memiliki tembok pertahanan yang dibangun di abad pertama Masehi yang mengelilingi kota seluas sekitar 100 hektar (Gates, 2011:404). Nimes di Perancis yang di masa Romawi bernama Nemasus, adalah kota yang sebenarnya sudah ada sebelum ditaklukkan oleh Roma sekitar abad ke-2 Sebelum Masehi. Namun, tembok yang mengelilingi kotanya baru didirikan sekitar tahun 16 Sebelum Masehi di masa Kaisar Augustus (Gates, 2011: 409).

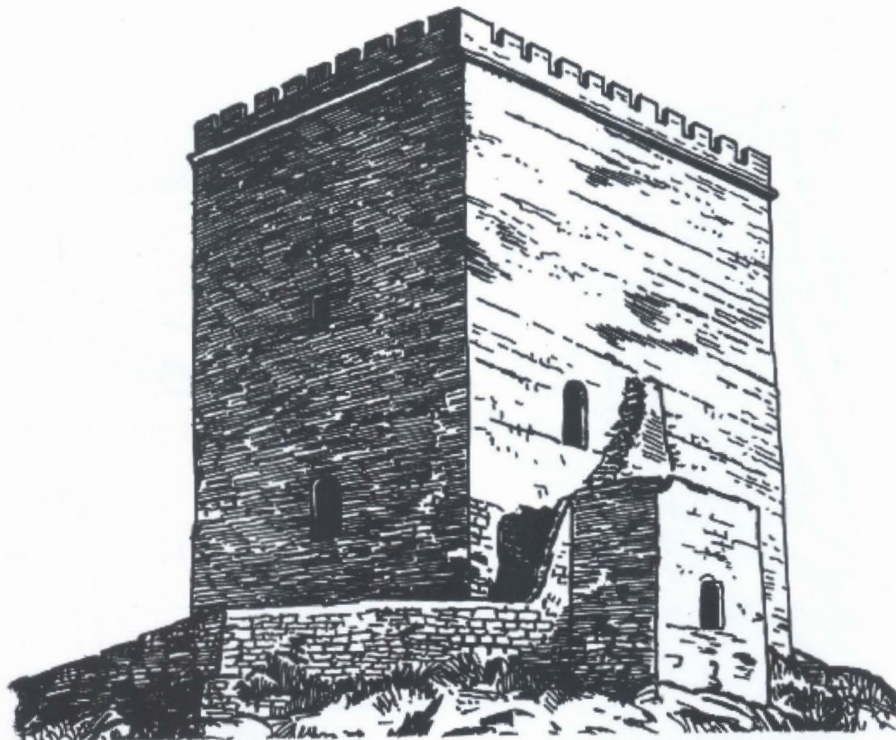
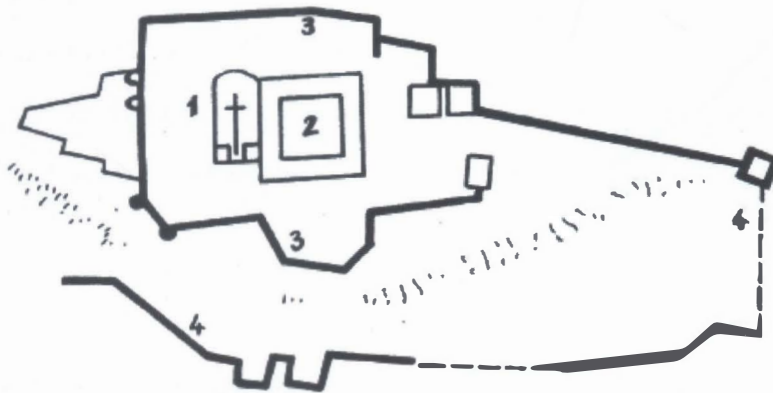
Sejalan dengan melemahnya Kekaisaran Roma dan semakin meningkatnya serangan-serangan terhadap permukiman utamanya, kota-kota Romawi semakin harus memikirkan sistem pengamanannya. Dan sebenarnya dibangunnya Tembok Aurelian adalah merupakan usaha untuk memperkuat kota di tengah bertambah besar dan seringnya ancaman dari luar kota. Jatuhnya ibukota Roma di tahun 476 sering digunakan sebagai penanda berakhirnya masa kuno di Eropa dan mulainya masa atau



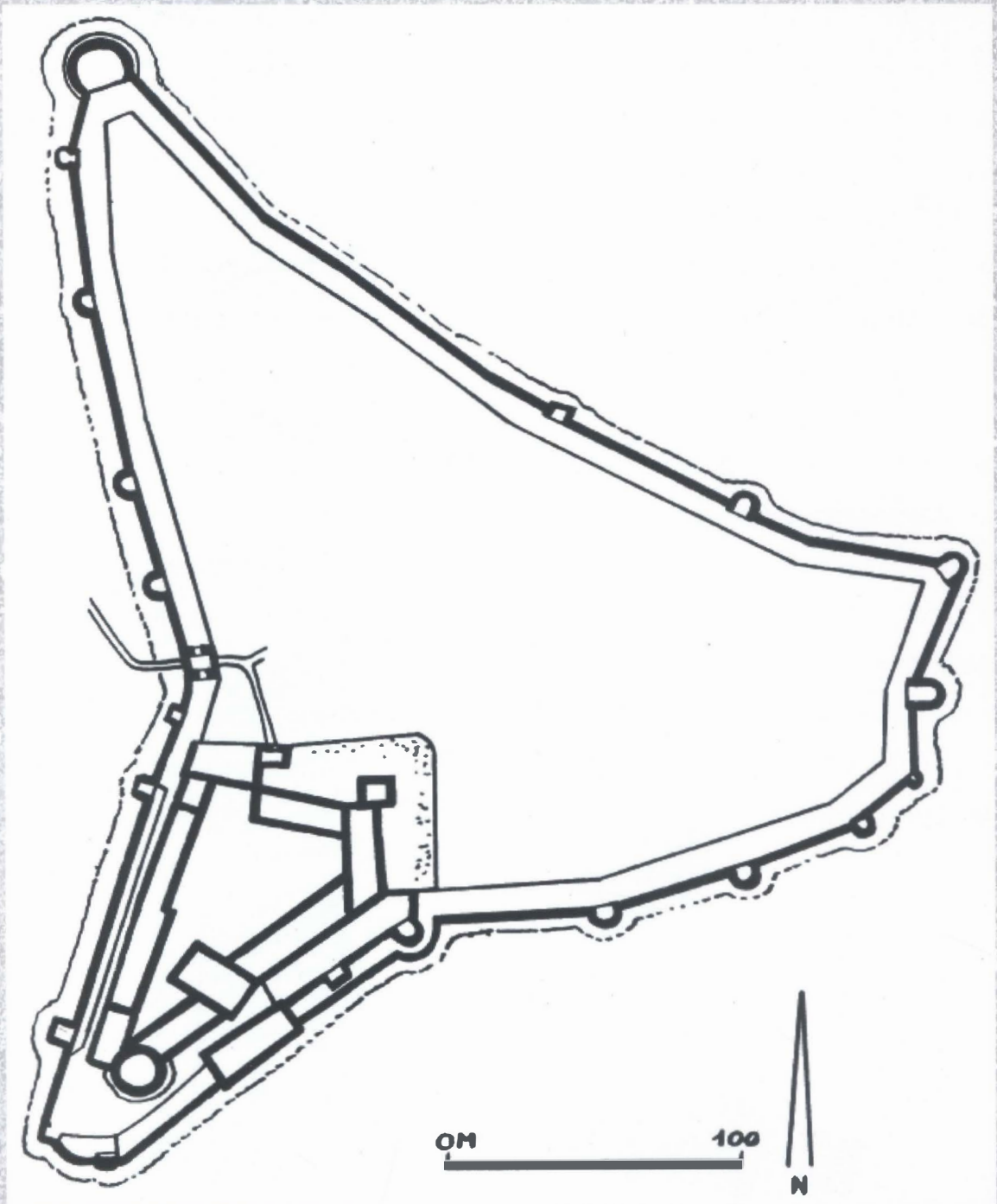
Gambar 5: Kota Roma yang dikelilingi oleh Tembok Servian (Sumber: Gates, 2011, 330)

abad-abad pertengahan. Kota-kota yang berkembang di masa itu sebagian merupakan pertumbuhan lebih lanjut dari kota-kota Romawi. Meski tidak sedikit juga yang tumbuh di jaman yang baru. Namun, satu ciri yang menunjukkan hilangnya satu kekuatan yang begitu dominan seperti di masa Romawi dan munculnya aneka kekuatan-kekuatan politik dan militer yang saling serang adalah semakin kecilnya ukuran kota yang kemudian dilengkapi dengan tembok pertahanan yang lebih kuat (Lepage, 2002: 8). Dengan kata lain, kota-kota abad pertengahan semakin mempertimbangkan fungsi pertahanan dengan mengandalkan pada benteng yang mengelilinginya untuk melindungi diri dari kemungkinan serangan.

Salah satu sumber pengaruh bagi bentuk dan rancangan benteng adalah pengaruh Arab yang dibawa oleh para pejuang Islam (sejak abad ke-8) yang memiliki tradisi nomaden (berpindah-pindah). Menara tinggi yang bersenjata yang berada agak jauh dari garis benteng yang disebut barbican (dari kata *barbakh* atau menara-gerbang) adalah satu elemen penting yang diambil dari tradisi Arab ini (Lepage, 2002: 11). Naiknya Karel Agung (Charlemagne) sebagai penguasa baru Eropa seolah melanjutkan tradisi bentuk dan rancangan benteng yang ada. Karel Agung tidak mengandalkan pada kekuatan pasukan yang besar tetapi lebih mengandalkan pasukan kavaleri (berkuda) yang berpindah-pindah—tidak berbeda dengan yang dilakukan oleh para ksatria Arab.

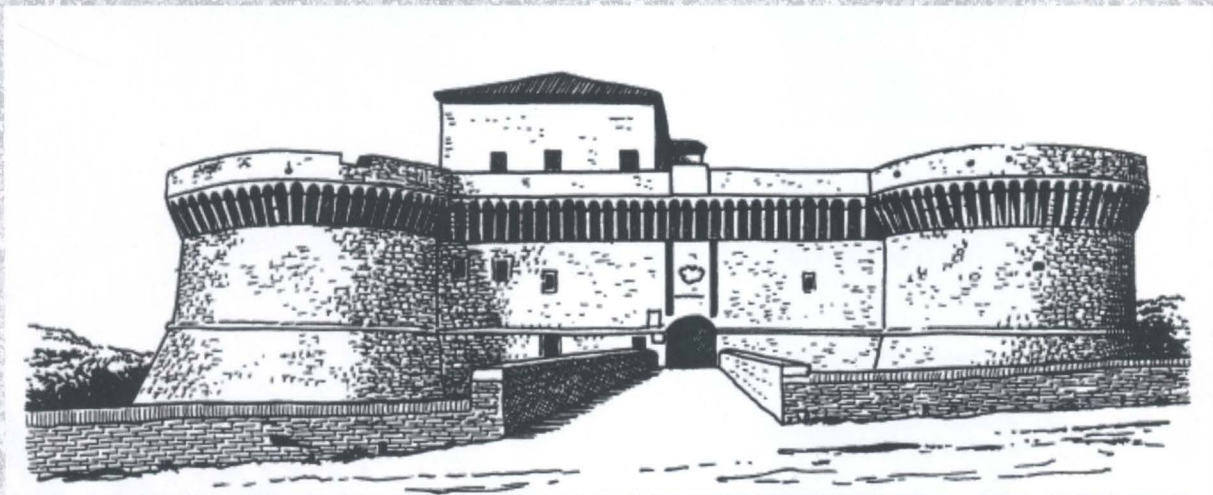


Gambar 6: Kastil Ucles di Spanyol yang pernah jadi Istana resmi kalifat di abad ke-11
(Sumber: Lepage, 2002, 73)



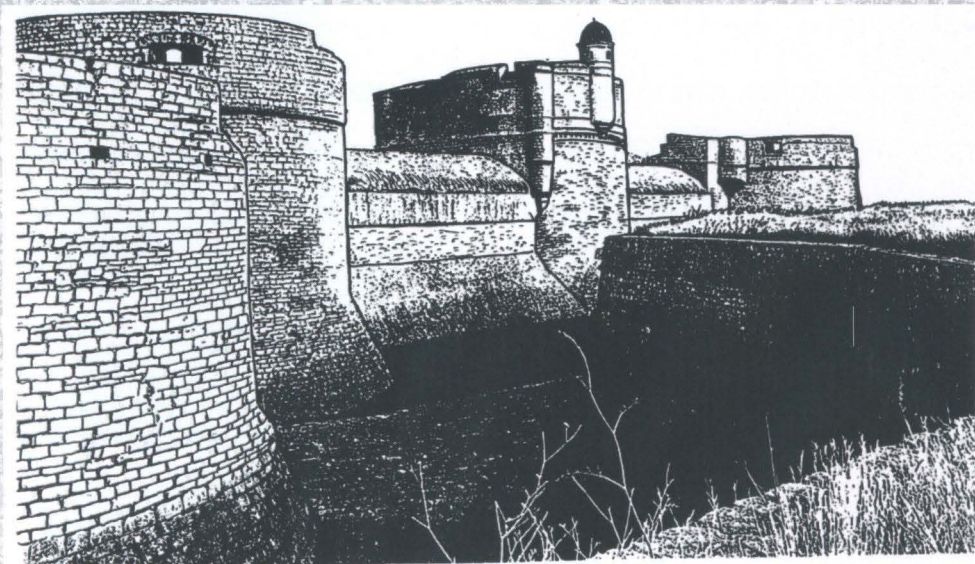
Gambar 7: Tapak Benteng Margat di Syiria yang digunakan di masa Perang Salib.
(Sumber: Lepage, 2002, 79)

Benteng kelak memiliki bentuk dan rancangan baru bersamaan dengan dicapainya kondisi politik dan militer yang relatif stabil di abad ke-14 (Lepage, 2002: 107). Di masa ini benteng memiliki tembok yang tebal dan ruang dalam tembok yang relatif lebih luas. Di sini bisa ditafsirkan bahwa tidak seperti abad-abad yang lampau yang menekankan mobilitas yang tinggi dan pasukan yang bisa berpindah dengan cepat, sekarang benteng menjadi seolah besar dan "berat" karena situasi keamanan dan ancaman perang sudah menurun.

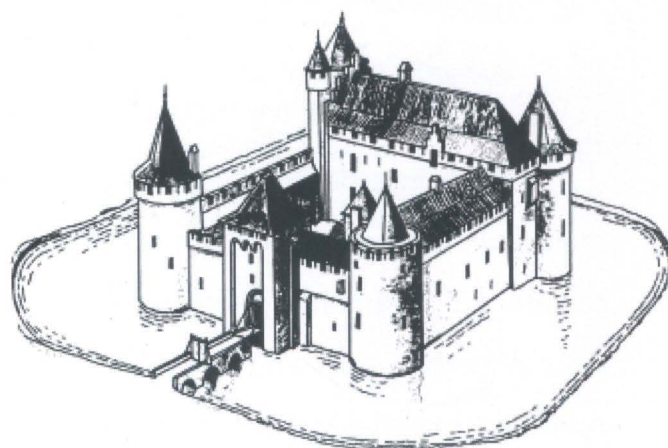
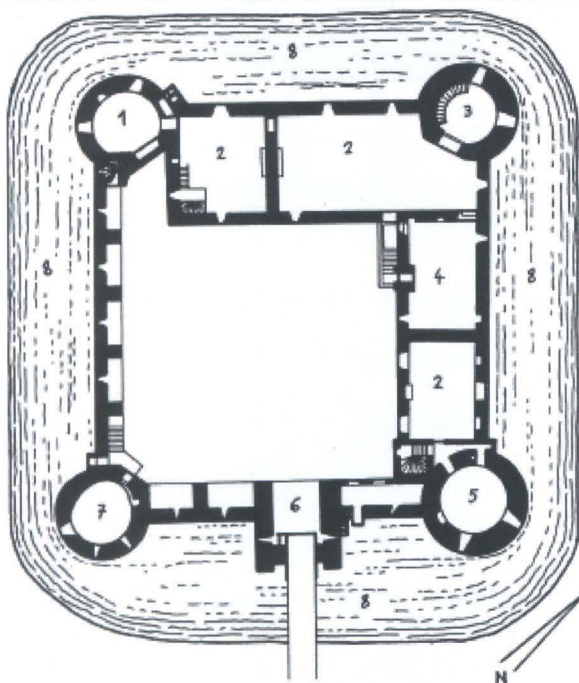


Gambar 8: Benteng Senigallia di Italia yang menggabungkan bentuk abad pertengahan dengan pentingnya meriam (Sumber: Lepage, 2002, 196)

Situasinya berubah lagi bukan karena adanya perubahan politik yang dramatis, melainkan karena munculnya teknologi perang yang baru di Eropa yakni penggunaan senjata api, utamanya meriam. Di awal abad ke-16 penggunaan meriam dalam peperangan menjadi lebih sering yang membuat kebutuhan pertahanan yang berbeda. Apabila di masa lalu tembok benteng dibuat tinggi untuk memudahkan penjagaan oleh pasukan pemanah dan mempersulit pasukan penyerbu untuk memanjatnya, di masa ini tembok yang terlalu tinggi mempersulit pemasangan dan penembakan meriam dari dalam benteng. Tidak mengherankan karenanya konstruksi dan bentuk benteng juga berubah.

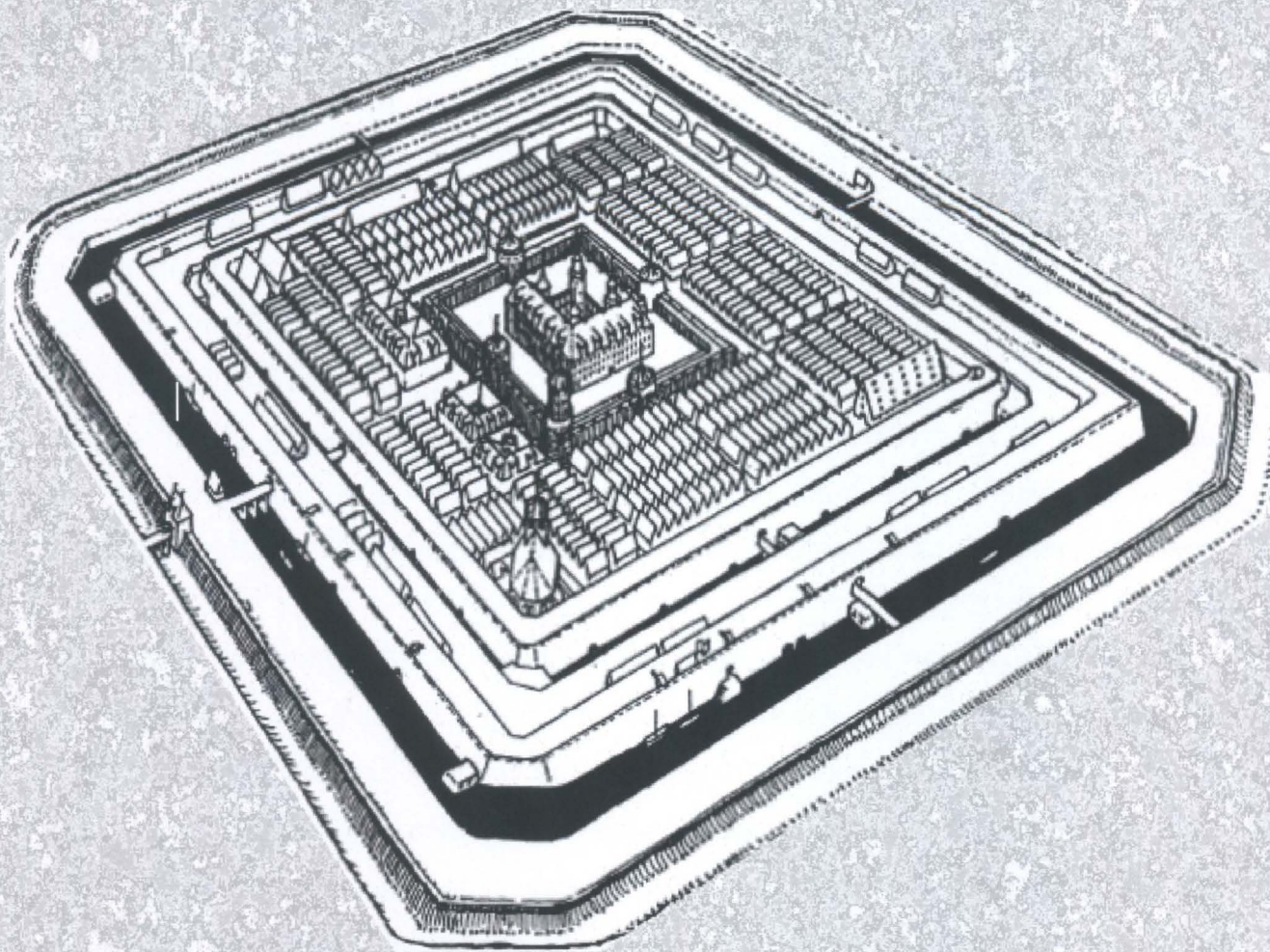


Gambar 9: Tembok Benteng Salses (Perancis) yang mengkombinasikan tembok gaya abad pertengahan dengan pentingnya penggunaan meriam
(Sumber: Lepage, 2002, 197)



Gambar 10: Benteng Muiden di Negeri Belanda (Sumber: Lepage, 2002)

Di pertengahan abad ke-16, Albrecht Durer, seorang perancang benteng menulis satu karya yang dianggap menjadi buku acuan utama perencanaan dan pembangunan benteng. Dalam rancangan ini maka benteng tidak hanya memiliki tembok yang lebih rendah dari benteng yang dibangun di masa sebelumnya, tetapi juga menara-menara besar yang dapat dipasang meriam, parit di sekitar benteng dan tembok dari tanah untuk mempersulit dijatuhkannya benteng oleh pasukan penyerbu (Lepage, 2002: 197).



Gambar 11: Rancangan Kota oleh Durer (Sumber: Lepage, 2002, 221)

Di Negeri-negeri Tanah Rendah (sekarang Negeri Belanda) seperti yang ditulis oleh Hans Bonke (2010), apa yang disebut dengan Perang 80 Tahun yang dipicu oleh Pemberontakan Belanda di tahun 1568 dan diakhiri dengan Perjanjian Westphalia di tahun 1648 yang mengakui kemerdekaan Belanda, menjadikan wilayah-wilayah di Negeri Tanah Rendah (*Lagelanden/ Low Countries*—sekarang Kerajaan Belanda dan Kerajaan Belgia dan juga sebagian kecil Jerman dan Perancis) menjadi tempat ujicoba dirumuskannya konstruksi dan bentuk benteng yang sesuai dengan munculnya dan digunakkannya teknologi baru. Seperti juga Durer, ahli matematika Belanda Simon Stevin, yang mengajar di Universitas Leiden juga menganjurkan pembangunan benteng yang temboknya dibuat dari timbunan tanah dan dilengkapi dengan parit yang melingkari daerah yang cukup luas untuk meletakkan meriam.

Satu perkembangan lain yang tidak kalah pentingnya adalah munculnya kota-kota di Eropa yang menjadi pusat perdagangan dan pusat militer. Sesudah abad ke-12 peta Eropa ditandai dengan semakin banyaknya kota-kota yang sebagian masih memainkan peranan penting hingga sekarang meski sebagian lainnya bahkan sudah tidak bisa dilihat sisa-sisa kejayaannya. Lebih dari 100 kota menjadi bagian "Hense" (atau kadang "Hanseatik") di Jerman termasuk Dortmund dan Hamburg. Di luar Jerman, kota-kota Amsterdam (Belanda), Brussel (Belgia), Bergen (Norwegia) adalah kota-kota yang meski permukiman awalnya sudah ada jauh sebelumnya, tapi betul-betul tumbuh sesudah abad ke-12.

Berbeda dengan kota-kota masa kini yang "terbuka" kota-kota di masa abad pertengahan merupakan wilayah permukiman yang dilingkari oleh tembok yang melindungi apa dan siapapun di dalamnya. Tapi tembok benteng fungsinya tidak terbatas pada fungsi militer dan keamanan saja. Tembok benteng yang melingkari kota seringkali juga menjadi batas wilayah hukum di bawah penguasa kota. Sang penguasa memiliki yurisdiksi bagi apapun yang terjadi di dalam batas kota dan dia dapat menerapkan hukum yang diberlakukannya kepada mereka yang ada di sana (Lepage, 2002: 256)

Secara historis karenanya bisa dilihat bahwa benteng adalah bagian yang sangat penting dalam pembentukan kota-kota di dunia. Di banyak tempat di dunia benteng menjadi penanda utama dari kota-kota tua. Dalam bahasa-bahasa Eropa untuk kota sering digunakan istilah penting *burgh* (dalam tradisi Anglo-Saxon yang kelak menjadi *borough* [istilah ini masih dipakai untuk menunjuk bagian-bagian dari kota New York saat ini] dan dari kata ini muncul istilah *burgess* dalam bahasa Inggris dan *burger* dalam bahasa-bahasa Germanik, termasuk bahasa Belanda yang mengacu pada "warga kota") (Lepage, 2002 : 28). Namun, jelas bahwa kota tidak melulu dibentuk oleh bangunan fisik yang ada di dalam dan/atau di sekelilingnya. Terlebih lagi, masyarakat kota merupakan produk sejarah dan interaksi sosialnya, lebih daripada sekedar interaksi antara masyarakat dengan bangunan fisik.

Benteng memang bagian yang penting, namun, pembentukan masyarakat kota tidak ditentukan oleh bentengnya. Tak semua kota memiliki benteng dan tak semua benteng berkembang menjadi kota. Pemikir Jerman Max Weber ([1921] 1958: 75-78) mengatakan bahwa benteng menjadi unsur penting dalam pembentukan kota dan masyarakat kota, meski bukan satu-satunya unsur. Dalam usahanya untuk merumuskan sebuah sintesa tentang pembentukan masyarakat kota, dia berpendapat lebih tepat dikatakan bahwa kota merupakan percampuran (*fusion*) antara benteng dan pasar. Hubungan antara kedua elemen ini, menurutnya, selalu rumit namun dari bentuk akhir dari kerumitan inilah akan muncul wajah kota.

C. Benteng dan Pembentukan Kota di Nusantara

Di Nusantara, berbagai komunitas sudah memulai tradisi pembangunan benteng pertahanan sejak berabad yang lampau. Sejak tahun 2007 melalui kerjasama antara Direktorat Jenderal Sejarah dan Purbakala Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata Republik Indonesia dengan Pusat Dokumentasi Arsitektur (PDA) dan didukung oleh pelbagai pihak dari Indonesia maupun dari Negeri Belanda, telah dilakukan usaha untuk membuat inventori dan identifikasi seluruh benteng yang ada di Indonesia, baik yang masih relatif utuh, maupun yang hanya tersisa sebagian kecil saja dan hasilnya sudah diterbitkan (Pusat Dokumentasi Arsitektur, 2010). Usaha yang komprehensif ini sangat membantu pemahaman kita mengenai keanekaragaman benteng yang ada. Dan berdasarkan usaha ini dapat juga lebih dipahami peranan benteng dalam perkembangan kota di Kepulauan Nusantara.

Dari usaha inventori dan identifikasi di atas, diketahui bahwa ada sekurangnya 442 benteng (*forts*) yang diduga berasal dari berbagai masa dengan keragaman bentuk, ukuran, dan fungsi, dan kesemuanya ditemukan di sepanjang Kepulauan Nusantara bahkan di tempat yang sekarang sulit dijangkau. Sangat disayangkan bahwa tidak semua benteng dapat diketahui secara tepat masa pendiriannya, dan masih sedikit sekali yang sudah dikaji dengan cukup rinci. Melalui berbagai sumber baik arkeologis maupun tekstual dilakukan beberapa pendugaan atas asal usul maupun masa pembangunan benteng. Di ujung barat Provinsi Nangroe Aceh Darussalam ditemukan berbagai tinggalan benteng, dan yang tertua diperkirakan berasal dari abad ke-13. Di bagian timur Nusantara, dari Jailolo di ujung utara Pulau Halmahera hingga Pulau Leti di ujung selatan tersebar benteng-benteng dengan berbagai kondisi masa kini yang beragam. Di antara 442 benteng yang diinventori dan diidentifikasi dimasukkan juga 53 bunker yang dibangun di masa pendudukan Jepang. Dan sebagian bunker ini ditemukan di wilayah bahkan lebih ke timur lagi yakni di Pulau Papua.

Dari kesemua benteng yang berhasil diidentifikasi dan kemudian diinventori, Mundarjito dan Ivan Effendi memulai usaha yang sangat penting dalam kajian benteng dengan mengusulkan tipologi benteng yang hingga kini bisa ditemukan ataupun dilacak jejaknya di Kepulauan Nusantara. Sudah jelas bahwa mulai dari abad ke-16, pembangunan benteng di Kepulauan Nusantara mendapat pengaruh kuat dari teknologi maupun rancangan benteng utamanya di Eropa. Ketika Portugis datang di Kepulauan Nusantara di awal abad ke-16 dan mulai membangun benteng, tidak mengherankan bahwa teknologi benteng yang dibawahnya masih merupakan teknologi benteng abad pertengahan di Eropa sebelum dicoba dan dibangunnya benteng gaya "baru"—gaya yang didapatkan dari Perang 80 Tahun. Benteng yang dibangun Portugis ini lebih mementingkan ketebalan dan tinggi tembok. Seperti dikatakan Bonke (2010: 35), benteng yang dibangun Portugis masih bergaya lama yang belum memperhitungkan peranan artileri, dan ini membedakannya dengan benteng yang dibangun Belanda kelak. Namun, lebih jauh lagi, Mundarjito dan Ivan Effendi berpendapat ada yang mereka sebut sebagai "Benteng Nusantara."

Dalam tipologi yang mereka lakukan, Mundarjito dan Ivan Effendi (2010: 26) berpendapat bahwa Benteng Nusantara adalah benteng yang dalam pembangunannya tidak mengikuti prinsip-prinsip apa yang mereka sebut "Benteng Kolonial" yang dapat dilacak dari "bentuk, ukuran, rencana tapak, bahan, teknik konstruksi dan sistem pertahanannya." Berdasarkan elemen-elemen ini, keduanya mencoba mengelompokkan benteng-benteng Nusantara untuk kelak memudahkan analisa.

Berdasarkan fungsinya, Benteng Nusantara bisa dibagi menjadi 2 kelompok yakni benteng yang dibangun untuk melindungi permukiman dan yang bukan. Berdasarkan analisa Mundarjito dan Ivan Effendi (2010: 27-29) diketahui bahwa hampir tiga-perempat (73,8%) dari semua Benteng Nusantara dibangun untuk melindungi permukiman. Dari lokasinya, diketahui bahwa benteng-benteng ini tersebar dari pantai, tanah rendah, hingga perbukitan. Dari kesemua lokasi ini diperoleh kesimpulan bahwa lebih dari separuh (tepatnya 55,6%) berada di atas perbukitan yang membuatnya lebih kuat dan sulit ditaklukkan. Penting dicatat bahwa hampir seperlima (19%) benteng-

benteng ini dibangun di tepi pantai. Dari bahan konstruksinya dapat juga diketahui bahwa hampir separuh (46%) benteng-benteng Nusantara dibangun dengan bahan dasar batu karang dan timbunan tanah tanpa bantuan perekat lainnya. Dan dari bentuk atau rencana tapaknya, diketahui bahwa 39,7% di antaranya dibangun dengan rencana tapak berbentuk geometris (segitiga, segiempat, segi-banyak) sementara hampir seperlimanya (19,8%) bentuknya mengikuti bentuk dan topografi lahan dimana benteng dibangun. Bentuk geometris ini menunjukkan adanya usaha untuk mempertimbangkan aspek-aspek simbolis dan kosmologis dalam merencanakan permukiman utama—istana atau bangunan yang dihuni kerabat penguasa lainnya—yang dikelilingi oleh tembok.

Analisa benteng-benteng di Nusantara di atas dilakukan tanpa berdasar pengetahuan yang mendekati pasti mengenai kapan benteng-benteng tersebut dibangun. Memang ada beberapa benteng yang bisa diperkirakan kapan mulai dibangun dan kapan dibangun ulang meski oleh penguasa yang berbeda. Namun, diakui bahwa sebagian besar benteng yang ada belum dapat diperkirakan kapan didirikan. Karenanya apabila kajian lanjutan dilakukan, terbuka kemungkinan hasil analisa dan kesimpulan di atas direvisi atau bahkan diganti dengan pembagian lain begitu pengetahuan kita atas benteng meningkat sejalan dengan semakin canggih dan semakin baiknya ketersediaan data yang ada. Secara tentatif bisa disimpulkan bahwa Benteng Nusantara memiliki karakteristik cenderung dibangun untuk melindungi permukiman, dibangun di perbukitan, dibuat dengan bahan dasar batu karang dan timbunan tanah tanpa perekat, dan memiliki rencana tapak geometris.

Sebelum menguatnya pengaruh para pedagang dan pelaut dari Eropa di Kepulauan Nusantara, banyak kota pelabuhan di daerah ini sudah memiliki tembok yang mengelilinginya. Untuk memahami struktur permukiman yang dikelilingi oleh tembok ini setidaknya ada dua aspek yang harus dipertimbangkan, yakni aspek kosmologis-simbolis dan aspek pragmatis, dalam hal ini pasar. Dengan melihat kota-kota utama di Kepulauan Nusantara (masa sebelum atau sekitar abad ke-17) seperti Aceh, Banten, Gresik, Makassar, dan Ternate, Reid (1998: 78) memiliki struktur yang

mempertimbangkan aspek-aspek kosmologis yang merefleksikan peranan penguasa sebagai simbol yang berada di pusat semesta. Karenanya tidak mengherankan jika dalam susunan permukiman ini, untuk mencapai “pusat” yang adalah lokasi tempat sang penguasa tinggal dibutuhkan usaha untuk melalui lapisan-lapisan penjagaan dan permukiman. Di permukiman ini, tempat tinggal kerabat penguasa juga diatur berdasarkan kedekatannya dengan penguasa yang saat itu bertakhta. Pada saat yang sama, para penguasa juga menyadari pada saat terjadi pertumbuhan kota yang pesat dan jumlah penduduk yang meningkat, maka aspek kosmologis dan simbolis ini sering harus dikalahkan dengan tuntutan-tuntutan pragmatis.

Aspek-aspek pragmatis yang paling nyata bisa dikatakan merupakan akibat semakin terserapnya kota-kota pelabuhan ke dalam sistem pelayaran dan perdagangan dunia. Dalam hal ini pelabuhan dan sekaligus pasar menjadi unsur utama yang mempengaruhi pembentukan kota dan perbentengan yang dibangun di sekitarnya. Di Banten pada awal abad ke-17, meski di tengah kota yang dikelilingi oleh tembok terletak istana dan masjid yang menjadi “pusat” dari permukiman ini, lokasi yang tak kalah pentingnya adalah pasar yang terletak di sebelah timur dan di luar benteng, dan juga kantor Perusahaan Dagang Inggris (*East-India Company* atau EIC) di sebelah barat juga di luar benteng (Reid, 1998: 84). Dua hal yang penting di sini adalah bahwa pasar dimana transaksi ekonomi yang sangat penting dilakukan, dibuat di luar benteng—seolah membatasi akses para pedagang asing terhadap “pusat” kekuasaan. Dan, kedua, pasar dan jumlah pasar di kota-kota pelabuhan selalu diatur untuk memastikan bahwa tidak ada sumber kekuatan yang dapat menjadi sumber kekuatan baru yang dikuasai bukan oleh penguasa yang sedang bertakhta. Pasar karenanya dilihat sebagai potensi sumber daya bagi yang berkuasa, sekaligus sebagai sumber ancaman kalau tidak diawasi dengan baik. Karenanya, lokasi dekat dengan pusat kekuasaan namun sekaligus berada di luar tembok benteng adalah pengaturan yang terbaik.

Dias Pradadimara, MS, MA.

BAGIAN KEDUA

Benteng-Benteng Peninggalan Kerajaan Gowa

1. Benteng Kale Gowa

Berdasarkan berbagai kajian baik arkeologi, sejarah, ataupun kajian atas naskah-naskah vernakular, tidak diragukan lagi bahwa Benteng Kale Gowa adalah benteng yang paling penting dalam sejarah kekaraengan (dan nantinya kesultanan) Gowa. Tidak hanya itu di saat masih berdiri tegak, wilayah yang dikelilingi oleh tembok benteng ini adalah wilayah terluas yang berada dalam perlindungan benteng di Sulawesi Selatan. Meskipun demikian, di masa kini benteng ini hampir tidak dikenal bahkan oleh masyarakat Kota Makassar dan Kabupaten Gowa. Memang banyak benteng lain yang juga tidak dikenal



Foto 3: Struktur dinding Benteng Kale Gowa (belakang Masjid Syekh Yusuf)

oleh masyarakat, namun mengingat pentingnya benteng ini dalam sejarah, sungguh tragis bahwa Kale Gowa tidak mendapat pengakuan yang memadai. Masyarakat jauh lebih mengenal Benteng Ujung Pandang/Fort Rotterdam, dan sampai tingkat tertentu, Benteng Somba Opu sebagai benteng-benteng peninggalan sejarah di Kota Makassar. Tidak pelak bahwa keberhasilan usaha renovasi dan pelestarian kedua benteng ini menjadi penyebab dikenalnya keduanya. Sungguh sangat disayangkan bahwa pelestarian Benteng Kale Gowa belum dan mungkin sangat sulit dilaksanakan baik karena ukurannya ataupun karena padatnya permukiman dan bangunan lain di lokasi benteng ini. Karenanya meski penting, Benteng Kale Gowa masih akan sangat sulit untuk muncul sebagai ikon masyarakat Makassar.

Benteng Kale Gowa adalah benteng terbesar dan tertua dari Kekaraengan Gowa yang masih bisa dilacak. Benteng ini terletak kira-kira 8 kilometer dari muara Sungai Jeneberang (dan kini berada di Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa). Jarak antara lokasi benteng dengan muara sungai sangat penting untuk dipertimbangkan mengingat kondisi di abad ke-15 dan utamanya ke-16 dimana di satu sisi laut adalah medium penghubung utama bagi benteng ini dengan dunia luar baik yang dekat maupun yang di seberang lautan dan karenanya kedekatan dengan laut adalah hal yang penting, namun, di sisi lain, jarak yang terlalu dekat akan berarti membuat benteng ini lebih 'terbuka' bagi kemungkinan serangan oleh mereka yang ingin menguasai wilayah ini.

Sudah sejak sebelum Tumaparisi Kallona menjadi Karaeng Gowa, para pendahulunya dipastikan sudah memerintah Gowa dari lokasi Kale Gowa sekarang. Namun baru di masa dia berkuasa (1511-1547) sebagian tembok Benteng Kale Gowa dibangun meski hanya dengan timbunan tanah. Kelak penerus Tumaparisi Kallona yakni Tunipalangga (memerintah 1547-1565) membangun tembok benteng ini dengan menggunakan batu bata. Dalam Sejarah Goa (Wolhoff dan Abdurrahim 1959: 26 [par. 67] disebutkan bahwa Tunipalangga memasang bata pada tembok yang sebelumnya sudah dibuat oleh pendahulunya. Tunipalangga sendiri tidak lagi memerintah dari Benteng

Kale Gowa melainkan dari Benteng Somba Opu (yang dibangun belakangan) yang berada tepat di muara Sungai Jeneberang. Di bawah tekanan VOC, baik sesudah ditandatanganinya Perjanjian Bungaya dan utamanya sesudah kekalahan Kesultanan Gowa di tahun 1669, tembok Benteng Kale Gowa secara bertahap harus dibongkar. Dikatakan bertahap karena di tahun 1677 sumber arsip VOC menyebutkan bahwa sebagian tembok masih berdiri.

Benteng Kale Gowa memiliki peranan yang sangat penting karena fungsinya sebagai tempat seremonial. Di dalam benteng ini bisa ditemukan sumur-sumur yang memiliki makna simbolik bagi masyarakat setempat, batu pelantikan, istana-istana mereka yang pernah memerintah Gowa, Mesjid Katangka, beberapa makam para penguasa Gowa dan keturunannya, makam Syekh Yusuf dan istrinya, dan situs penting lainnya (lihat tulisan Andini Perdana di bagian lain penerbitan ini). Ini semua menunjukkan bahwa Kale Gowa dan tembok yang mengelilinginya tidak sekedar berfungsi pragmatis, tetapi merupakan bagian dari konsepsi kekuasaan—dan bisa jadi kosmologis—bagi penguasa dan masyarakat Gowa dan sekitarnya.

Diperkirakan bahwa Benteng Kale Gowa menjadi lokasi pusat pemerintahan Kesultanan Gowa setidaknya dalam 4 masa, yakni masa pemerintahan Tumaparisi Kallona (dan pendahulu-pendahulunya) sampai dengan tahun 1547, 1618-1631, 1670-1677, dan masa sesudah tahun 1694 (belum jelas sampai kapan). Tunipalangga tidak menjadikan lokasi ini tempatnya memerintah, melainkan Benteng Somba Opu yang terletak beberapa kilometer dari Kalegowa di muara Sungai Jeneberang.

Tembok Benteng Kale Gowa mengelilingi wilayah yang luas dan menjadikan benteng ini benteng terluas di Sulawesi Selatan. Dan mengingat umurnya yang panjang, benteng ini memiliki pola permukiman yang sangat rumit di dalamnya. Apabila tembok keliling dibangun kembali (direkonstruksi) maka panjangnya kira-kira adalah 3,8 kilometer yang akan mengelilingi wilayah seluas kurang-lebih 840 ribu m² atau 84 hektare. Tembok mengelilingi permukiman di dalam dan membentuk pola bulat telur yang memanjang ke barat dan timur. Di sepanjang tembok ini setidaknya ada dua jenis

dinding, yakni yang terdiri dari dinding utama yang dibangun dengan bata merah yang berukuran besar dan kemudian di sisi luar dan dalamnya dilapisi dengan dinding dengan batu merah yang berukuran lebih kecil dan diisi tanah di antara dinding-dinding ini. Jenis dinding kedua hanya terdiri dari lapisan dua dinding dengan batu merah kecil yang diisi tanah di antara keduanya. Tidak bisa dipastikan apakah tembok benteng ini memiliki fondasi. Bulbeck yang melakukan kajian arekologis dengan teliti di benteng ini mengajukan hipotesis bahwa dinding jenis pertama adalah bagian tembok yang dibangun lebih dahulu sebelum kemudian dinding jenis kedua disusul dibangun (1992: 209, 214).

2. Benteng Somba Opu

Selain Benteng Ujung Pandang / Fort Rotterdam, benteng kedua yang paling dikenal masyarakat, utamanya masyarakat di Kota Makassar adalah Benteng Somba Opu. Dan untuk ini kita harus berterima kasih pada usaha pemugaran dan pelestarian yang terus menerus dilakukan sejak akhir tahun 1980-an. Kondisi peninggalannya yang kini dapat dilihat jelas menjadi daya tarik sendiri. Namun, bukan hanya karena kondisi peninggalannya saja benteng ini (seharusnya) dikenal luas, namun dalam sejarah Sulawesi Selatan, bahkan sejarah Indonesia di abad ke-17, benteng ini dicatat memiliki kedudukan yang sangat sentral.

Berbeda dengan Benteng Kale Gowa yang merupakan benteng awal dimana pusat kekuasaan para penguasa kekaraengan Gowa diletakkan, benteng ini dibangun sebagai respon penguasa kekaraengan Gowa akan semakin meningkatnya perdagangan global dimana pelabuhan yang berada di bawah pengaturan penguasa Gowa merupakan satu simpul penting dalam jaringan perdagangan tersebut. Begitu spesifiknya fungsi Benteng Somba Opu sehingga dalam buku harian (*lontara bilang*) salah satu tempat yang dibangun di dalam benteng ini disebut dengan menggunakan fungsinya sebagai acuan yakni tempat mengawasi perdagangan (*maccini dangang*) (Cummings, 2011: 42). Hal ini juga diperkuat dengan lokasi benteng ini yang dibangun



Gambar 13 : Lukisan lama yang menggambarkan keletakkan Benteng Somba Opu di antara Benteng Panakukang dan Benteng Ujung Pandang/Fort otterdam



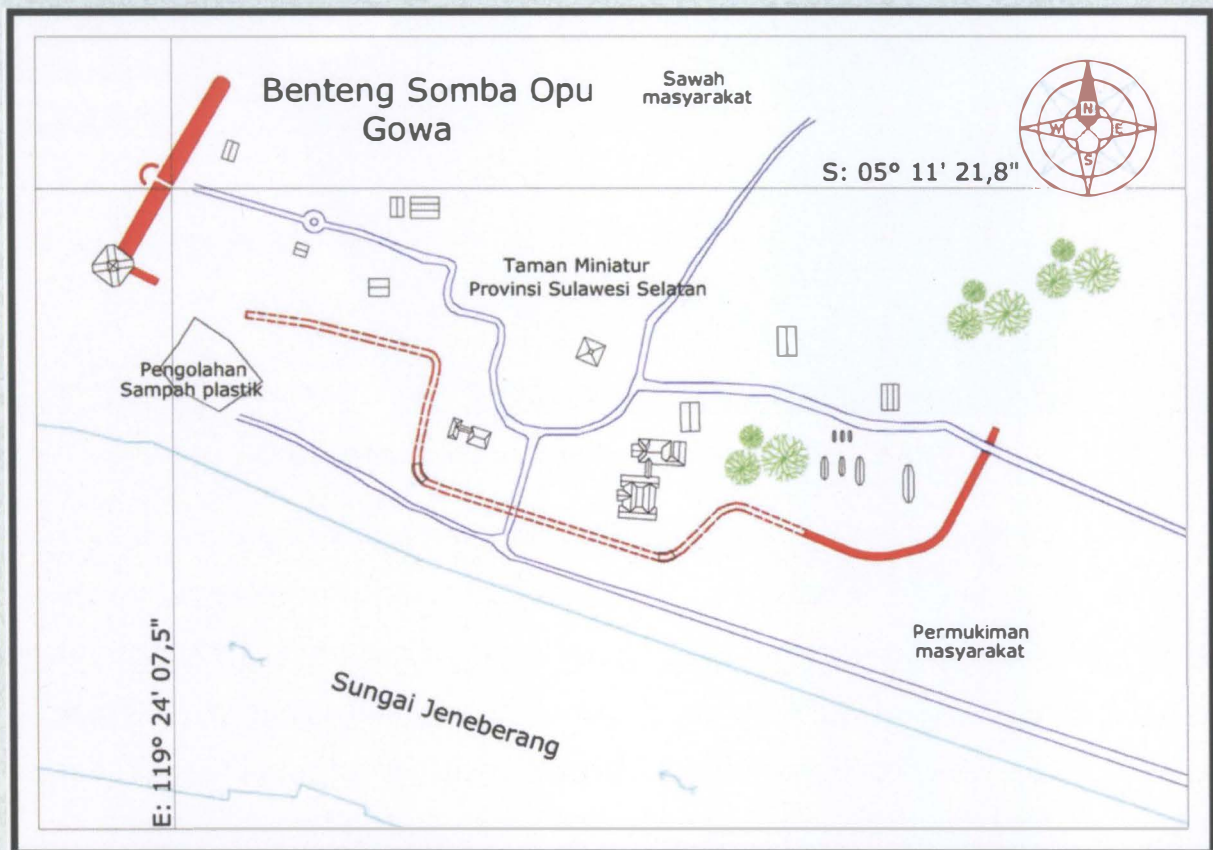
Peta 1: Peta keletakkan Benteng Somba Opu (skala 1: 400)



Foto 7: Ujung struktur dinding Benteng Somba Opu sisi barat (Mukhsin, 2009)

tepat di muara Sungai Jeneberang sehingga dari dalam benteng ini pengawasan atas lalu lintas laut benar-benar bisa dilakukan. Lokasi ini juga sangat strategis karena letaknya tidak jauh dari Benteng Kale Gowa yang memiliki fungsi simbolis yang sangat kuat.

Dengan cepat Benteng Somba Opu berkembang menjadi pusat permukiman atau bahkan kota dimana tidak hanya warga Kekaraengan Gowa saja yang tinggal dan menetap di sini dan di sekitar benteng, tapi juga para pedagang dari segala penjuru dunia memiliki kantornya sendiri. Pedagang Denmark, Inggris, Portugis, Gujarat, dan tentu saja Belanda diberikan satu daerah di sekitar benteng dimana mereka bisa menjadikannya kantor (*factorij*) bagi kegiatan dagang mereka (Andaya, 1981: 36). Tidak itu saja, juga di dekat benteng disediakan beberapa tempat yang berfungsi sebagai pasar (Reid, 1993: 82). Bisa dibayangkan keramaian di muara Sungai Jeneberang di saat kapal-kapal sandar.



Gambar 14: Peta situasi Benteng Somba Opu - tidak berskala (Martinus, 2009)

Benteng Somba Opu sendiri tampaknya lebih berfungsi sebagai pusat pemerintahan. Dari hasil penelitian arkeologis Bulbeck (1992: 371) menyimpulkan bahwa lokasi dimana benteng ini berdiri sudah mulai dipakai di abad ke-13 dan ke-14 meskipun peningkatan pemakaian secara signifikan baru terjadi di abad ke-16 dan ke-17. Ini artinya lokasi ini dan pembangunan tembok benteng yang kelak menjadi pusat kota baru terjadi di abad ke-17 sesuai dengan apa yang dicatat dalam *lontara bilang*. Dari penelitian arkeologis bisa diduga pula bahwa istana-istana Sultan Alauddin dan Sultan Hasanuddin berada tidak jauh dari *maccini dangang* di ujung barat laut benteng.



Foto 5: Dinding Benteng Somba Opu sisi barat (MAE, 2009)

Benteng Somba Opu awalnya memiliki tembok yang terbuat dari tanah yang diperkirakan juga dibangun oleh Tumaparisi Kallona. Dan baru kelak di bawah pimpinan Tunipalangga temboknya dipasang bata merah. Apabila dilihat dari atas, dapat dilihat tembok benteng sepanjang lebih dari 300 meter yang melindungi sisi selatan yang menghadap ke Sungai Jeneberang, dan di sisi timur dan barat juga ada benteng sepanjang masing-masing 100 meter. Tidak ada petunjuk bahwa di sisi utara juga pernah ada tembok benteng. Sejak awal 1990-an, usaha untuk merenovasi benteng ini sudah dilakukan dan hasilnya benteng yang temboknya nampak rapi dibangun sudah bisa dikunjungi. Untuk lebih dapat dinikmati, dibangun juga rumah-rumah tradisional dari berbagai daerah di Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat.

3. Benteng Ujung Pandang/ Fort Rotterdam

Tidak diragukan lagi, inilah benteng yang paling dikenal dari Kota Makassar. Tidak berlebihan bila dikatakan bahwa benteng ini adalah salah satu ikon terpenting kota ini. Bahkan bisa dikatakan bahwa bagi pengunjung ke Kota Makassar, baik dari Sulawesi Selatan, dari luar pulau, atau bahkan dari luar negeri, tidak lengkap berkunjung ke Kota Makassar tanpa singgah ke Benteng Ujung Pandang / Fort Rotterdam.

Awalnya benteng yang disebut Benteng Ujung Pandang ini merupakan satu dari serangkaian benteng yang dibangun oleh Kekaraengan Gowa sebagai bagian dari sistem pertahanannya. Lokasi benteng ini sendiri berada di antara pusat Kekaraengan Tallo di muara Sungai Tallo (di bagian utara pantai kota Makassar) dan Benteng Somba Opu di muara Sungai Jeneberang (sekarang di bagian selatan kota). Di masa awalnya karenanya benteng ini bukan merupakan pusat permukiman melainkan daerah yang berada di antara 2 permukiman utama. Namun, sejak benteng ini diambilalih oleh VOC berdasarkan Perjanjian Bongaya di tahun 1669, maka benteng ini menjadi pusat permukiman baru yang kelak menjadi Kota Makassar masa sekarang.

Benteng Ujung Pandang / Fort Rotterdam sering disebut juga Benteng Panyua karena bila dilihat dari atas bentuknya seperti penyu. Di setiap sudut dilengkapi dengan

bastion, di sepanjang tembok benteng dibangun ruang-ruang, dan ditengahnya terletak gedung gereja. Untuk waktu yang lama benteng ini menjadi tempat tinggal para serdadu VOC dan nantinya tentara kolonial. Di salah satu ruangan di benteng ini juga sempat menjadi tempat ditahannya Pangeran Diponegoro dan beberapa anggota keluarganya.



Foto 6 : Salah satu bangunan dalam Benteng Ujung Pandang/Fort Rotterdam yang pada masa kolonial difungsikan sebagai gereja (kini aula)



Foto 7 : Gedung M (kiri), N (tengah), O dan A (kanan) dalam Benteng Ujung Pandang/Fort Rotterdam

Tidak selamanya benteng ini dalam kondisi dipakai dan selalu dirawat. Setidaknya sesudah masa pengakuan kedaulatan di tahun 1949 benteng ini sempat tidak digunakan dan kondisinya jadi rusak parah. Atap beberapa bangunannya lepas, dindingnya mengelupas, dan bagian-bagian temboknya runtuh. Baru setelah mengalami proses renovasi secara bertahap benteng ini dikembalikan ke kondisinya semula. Gedung-gedung di dalamnya menjadi lokasi perkantoran dan museum. Dan bahkan sesudah usaha renovasi terkini, kondisi benteng menjadi rapi kembali.

4. Benteng Tallo

Dari segi kesejarahan, Benteng Tallo mungkin tidak kalah pentingnya dengan Benteng Kale Gowa. Benteng Tallo bisa dikatakan sebagai benteng bagi pusat kekuasaan dari Kekaraengan Tallo yang merupakan "saudara kembar" bagi Kekaraengan Gowa. Adanya permukiman yang berada di muara Sungai Tallo merupakan penyeimbang bagi permukiman di muara Sungai Jeneberang. Tapi seolah berlomba, nasibnya tidak beda jauh dengan nasib Benteng Kale Gowa dimana keduanya sudah hampir habis ditelan permukiman masa kini, dan benteng ini sudah hampir tidak bisa dikenali sisanya bahkan oleh masyarakat umum Kota Makassar.

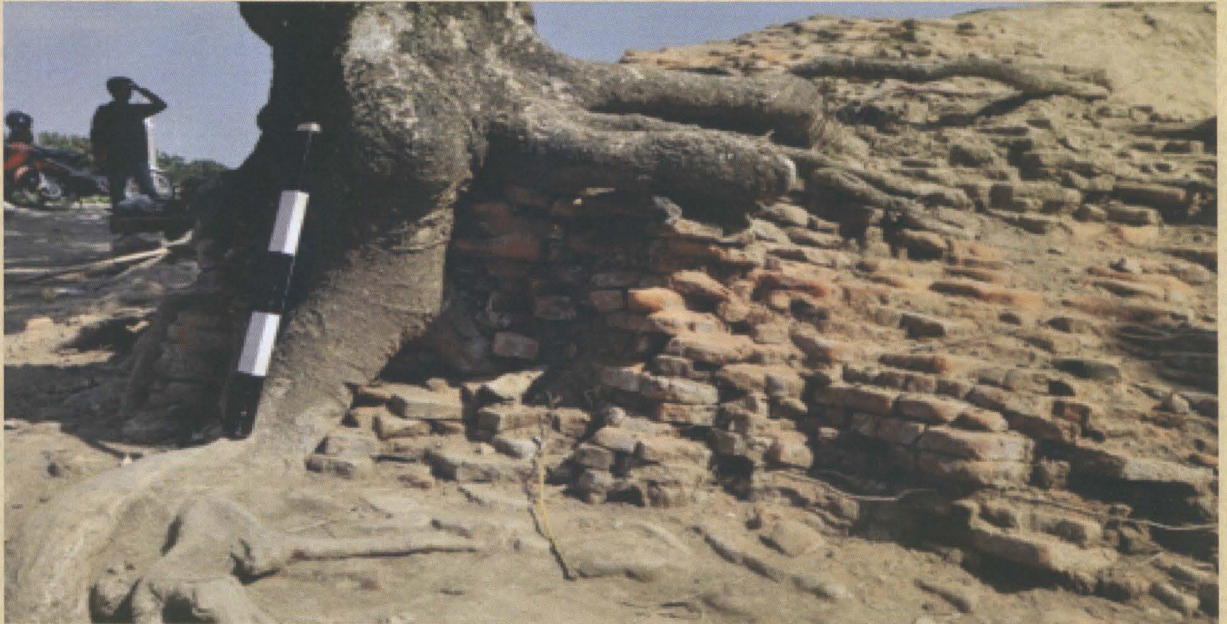


Foto 8 : Struktur bastion barat laut yang rusak akibat akar pohon (Martinus, 2009).



Foto 9 : Singkapan struktur dinding benteng yang telah direkonstruksi di tengah pemukiman penduduk (Martinus, 2009).

Dari udara, Benteng Tallo berbentuk trapesium yang panjangnya berukuran 1,2 kilometer dan 290 meter lebar. Diperkirakan temboknya di masa masih utuh sepanjang 2,74 kilometer yang melindungi wilayah di dalamnya seluas 40,34 hektare (Bulbeck, 1992: 403). Tampaknya benteng ini memiliki 2 gerbang. Sama dengan Benteng Kale Gowa, di dalam benteng ini ada juga batu tempat pelantikan dan makam para penguasa Tallo dan keluarganya. Dari adanya kedua situs ini saja sudah menunjukkan pentingnya Benteng Tallo bukan sekedar bagian dari benteng pertahanan Kesultanan Gowa, tetapi juga merupakan pusat dan tempat yang memiliki fungsi simbolik yang sangat bermakna setidaknya bagi Kekaraengan Tallo.

Bulbeck (1992: 410) memperkirakan benteng ini temboknya didirikan di akhir abad ke-16 atau awal abad ke-17. Tembok bata didirikan pada sekitar tahun 1615 seperti yang disaksikan oleh beberapa pedagang Inggris yang melaporkan adanya kesibukan luar biasa untuk membuat bata di lokasi ini di awal abad ke-17.

5. Benteng Panakkukang

Benteng Panakkukang adalah salah satu benteng pertahanan yang dibangun sebagai bagian sistem pertahanan Kesultanan Gowa. Jatuhnya benteng ini ke tangan VOC di tahun 1660 memicu gerak sejarah yang lebih besar di Sulawesi bagian selatan. Sultan Hasanuddin begitu murka atas jatuhnya benteng ini sehingga sebagai hukuman, Karaeng Sumanna yang bertanggungjawab atas benteng segera dicopot dari jabatannya dan digantikan oleh Karaeng Karunrung (Andaya, 1981: 49). Karaeng Karunrung kemudian memerintahkan mobilisasi para tawanan Soppeng untuk menggali kanal yang dapat memisahkan benteng ini dan seolah mengisolasi dan menciptakan "pulau" untuk Benteng Panakkukang. Belum lagi, Sultan Hasanuddin terus membangun untuk memperkuat pertahanannya dan mempersiapkan diri untuk pertempuran yang lebih besar. Semua pekerjaan yang luar biasa berat bagi mereka yang dipaksa untuk bekerja ini membuat La Tenritatta dan beberapa sekutunya yang masih menjadi tawanan untuk segera melarikan diri dari tugas paksa ini. Dan sejak peristiwa ini

La Tenritatta perlahan-lahan membangun kekuatan yang membawanya hingga Batavia dan menjalin kerja sama yang erat dengan VOC untuk kelak kembali ke Gowa.

Benteng Panakkukang sendiri terletak di tepi Sungai Jeneberang tidak jauh dari Benteng Somba Opu. Lokasinya yang strategis membuat benteng ini sangat penting dalam sistem pertahanan Kesultanan Gowa. Benteng ini dari atas memiliki bentuk yang tidak terlalu berpola yang menyerupai jajaran genjang yang sangat panjang pada kedua sisinya dan di ujung selatan agak melingkar menyerupai bastion (Bulbeck, 2005: 118). Tembok benteng nampaknya hanya dibangun dengan menggunakan timbunan tanah saja. Luas wilayah yang dilindungi di dalam tembok benteng hanya sekitar 1 hektare. Sama seperti nasib kebanyakan benteng, tidak banyak lagi yang mengetahui adanya Benteng Panakkukang, dan kondisinya di Kelurahan Barombong Kecamatan Tamalate Kota Makassar sudah sangat sulit untuk dikenali oleh pengunjung awam.

6. Benteng Barombong

Benteng Barombong sudah sulit untuk dilacak keberadaan dan tempatnya secara tepat. Perubahan penggunaan lahan, termasuk adanya pembangunan jalan raya di daerah yang kini bagian dari Kelurahan Barombong Kecamatan Tamalate Kota Makassar menyebabkan pelacakan akan sangat sulit dilaksanakan. Tetapi dalam sejarah perbentengan dan sistem pertahanan Kesultanan Gowa, Barombong penting bukan (hanya) karena bentengnya. Melainkan karena diperkirakan adanya tembok sepanjang pantai yang berujung di Benteng Barombong yang menjadikannya satu sistem pertahanan yang unik di jamannya.

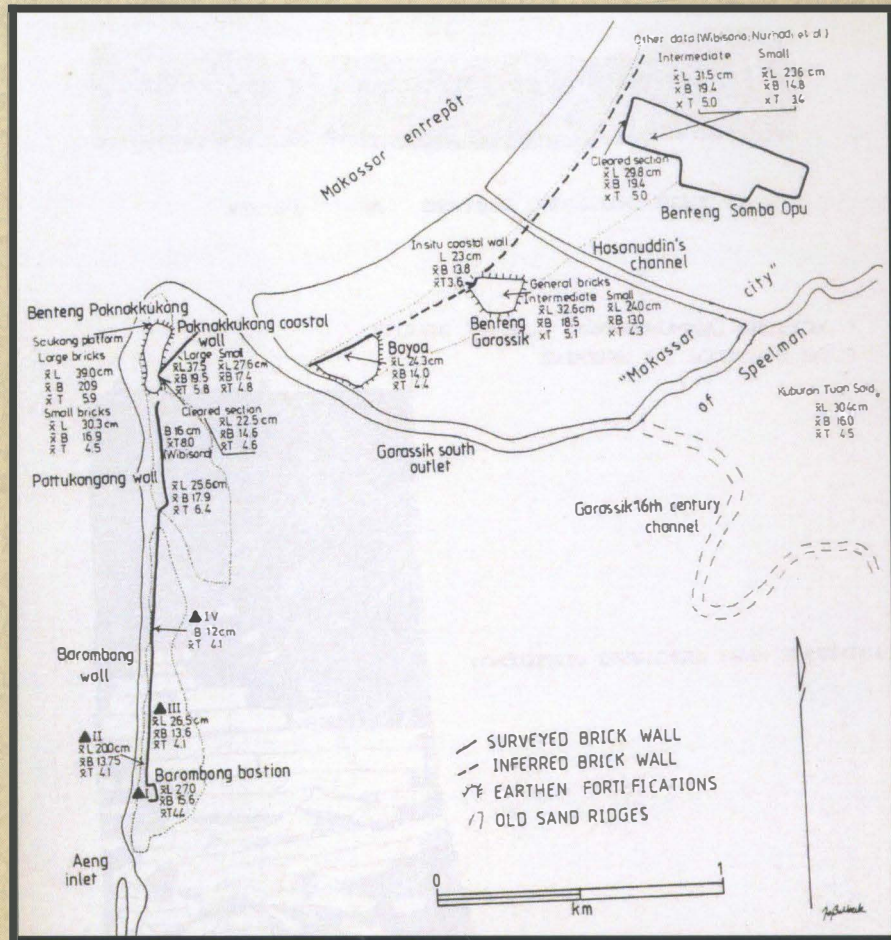
Bulbeck (1992: Gambar 11-19; 2006: 121-122) memperkirakan bahwa di sepanjang pantai sejak Benteng Somba Opu sampai dengan Benteng Barombong pernah dibangun tembok dari batu merah yang menjadi pertahanan Kesultanan Gowa. Bahkan lebih jauh lagi, Bulbeck juga beranggapan bahwa tembok ini bisa jadi dibangun juga ke utara sepanjang pantai melalui Mariso dan sampai di Ujung Tana tidak jauh dari Benteng Tallo. Adanya tumpukan batu merah yang terhampar di sepanjang lokasi di atas

mendorong Bulbeck mengajukan anggapan akan adanya tembok pertahanan sepanjang lebih dari 10 kilometer. Jika anggapan ini benar, maka sistem pertahanan semacam ini sangat jarang ditemukan di Nusantara. Tentu bisa dipertanyakan efektifitas tembok semacam ini mengingat begitu banyak sumber daya yang dicurahkan untuk membangunnya sementara akhirnya Kesultanan Gowa ditaklukkan dalam pertempuran yang dahsyat.

7. Benteng Garassi

Benteng ini adalah salah satu benteng yang penting yang dituntut oleh VOC untuk diruntuhkan menyusul ditandatanganinya Perjanjian Bongaya 1667. Kini situs dimana masih ada sisa-sisa benteng ini terancam terendam air akibat banjir dan meluapnya sungai di sekitarnya. Dari atas benteng dapat dilihat berbentuk segitiga dengan sisi-sisinya sepanjang sekitar 100 meter dan salah satu sudutnya menghadap ke selatan. Tembok benteng ini dibangun dengan menggunakan campuran antara timbunan tanah dan bata merah (lihat tulisan Rahmat Kurniawan di bagian lain penerbitan ini).

Lokasinya yang strategis dan temuan-temuan arkeologisnya mendorong kesimpulan bahwa benteng ini berperan sebagai pelabuhan kecil sepanjang abad ke-16, mungkin pernah ada istana kecil dibangun di sana, benteng pertahanan di abad ke-17, tempat kuburan, dan tentu saja tempat tinggal (Bulbeck, 1992: 381).



Gambar 15 : Denah Benteng Garassi (Bulbeck, 1992).

8. Benteng Ana Gowa

Benteng Ana Gowa adalah salah satu benteng terkecil di Makassar. Tembok yang mengelilinginya berbentuk bujur sangkar dengan panjang tembok keseluruhan sekitar 1,4 km. Wilayah yang dilindungi oleh tembok ini berkisar sekitar 1,5 hektare saja. Selain tinggalan arkeologis, bisa dikatakan tidak ada catatan lain yang menunjukkan keberadaan dan, apalagi, fungsi Benteng Ana Gowa. Bahkan tinggalan arkeologis yang ada tidak menunjukkan bahwa benteng ini pernah ditinggali (Bulbeck, 1992: 262). Dengan berbagai keterbatasan seperti ini, bisa dimengerti ada beberapa perkiraan yang diajukan untuk menjelaskan fungsi dan sejarah Benteng Ana' Gowa.

Ada dugaan, misalnya, bahwa Benteng Ana Gowa adalah tempat istana sesudah dihancurkannya Benteng Somba Opu. Namun, seperti yang disebut di atas, hampir tidak ada tinggalan arkeologis yang dapat menunjang dugaan ini. Lagipula, sesudah jatuhnya Benteng Somba Opu, Benteng Kale Gowa masih berfungsi dan menjadi tempat yang jauh lebih sesuai untuk menjadi istana utama Kesultanan Gowa. Ada juga dugaan bahwa benteng ini mungkin dibangun sejalan dengan kebangkitan beberapa kelompok di kalangan bangsawan Kesultanan Gowa dalam perjuangannya melawan VOC di pertengahan dan akhir abad ke-18. Benteng ini karenanya dibangun sebagai tempat istana baru.

Namun, dugaan ini sangat lemah karena teknik konstruksi yang dipakai untuk dinding tembok ternyata mirip dengan teknik konstruksi yang digunakan di Benteng Kale Gowa karenanya akan lebih besar kemungkinan benteng dibangun hampir sejaman dengan Benteng Kale Gowa di abad ke-16. Lagipula, apabila pembangunan ini dilaksanakan di abad ke-18, seharusnya ada catatan historis baik dalam arsip VOC ataupun dalam tradisi lisan yang merekam kegiatan pembangunan benteng ini. Sayang memang tidak ada catatan yang memadai tentangnya. Bulbeck (1992: 262) cenderung mengatakan bahwa benteng ini dibangun di masa tepat sesudah Tumparisi Kallona mengingat adanya disebut nama Karaeng ri Ana Gowa yang adalah cucunya seperti tercatat dalam Sejarah Goa. Sedang, masih menurut Bulbeck, fungsi yang dibawa oleh benteng ini adalah fungsi pertahanan. Benteng ini, yang lokasinya saat ini berada di seberang Sungai Jeneberang (di sisi yang berbeda dengan Benteng Kale Gowa) merupakan bagian dari Kecamatan Pallangga di Kabupaten Gowa, dapat berfungsi sebagai tempat mengundurkan diri dan mengungsi apabila Benteng Kale Gowa hampir jatuh. Kebenaran pendapat ini serta penafsiran yang tepat akan sejarah dan fungsi Benteng Ana Gowa masih menunggu kajian lebih lanjut.

9. Benteng Galesong

Dengan menggunakan arsip VOC sejarawan Leonard Andaya bisa menggambarkan dengan mendetil perang memperebutkan Galesong yang adalah permukiman yang dikelilingi benteng (Andaya, 1981: 88-9). Benteng Galesong menjadi satu lokasi strategis yang menentukan hasil akhir perang besar di Makassar dan di saat pertempuran hebat semua tokoh penting yang memainkan peranan besar dalam perang—Sultan Hasanuddin, para pimpinan pasukan Gowa, La Tenritatta, dan Speelman—semua hadir dan terlibat langsung dalam pertempuran memperebutkan benteng ini. Sesudah berakhirnya pertempuran yang dimenangkan oleh VOC dan La Tenritatta, wilayah Galesong hanya menyisakan kehancuran dimana rumah dan desa habis dibakar dan pohon-pohon roboh ditebang. Tidak diketahui apakah akibat dari pertempuran ini Benteng Galesong sudah lenyap sama sekali ataukah memang konstruksi benteng yang lebih sederhana yang dimiliki oleh benteng, tapi yang jelas kini tidak lagi bisa dikenali dimana dan seperti apa Benteng Galesong. Tinggalan arkeologis juga sedikit kalau tidak bisa dikatakan tidak ada.

Namun, dari bentuk topografinya, wilayah Galesong masa kini bisa dilihat memiliki daerah dengan permukaan yang relatif tinggi yang berada sejajar dengan garis pantai (Bulbeck, 1992: 713). Dari sini bisa diperkirakan bahwa Galesong memiliki bentuk lahan yang secara alami mudah (dan sederhana) untuk disesuaikan dengan keperluan perang dengan memasang bahan penahan yang dapat menjadi tembok benteng. Pada saat yang sama, mudah dan sederhananya tembok ini dapat berarti mudah pula tembok ini untuk diruntuhkan hingga tak berbekas.

10. Benteng Sanrobone

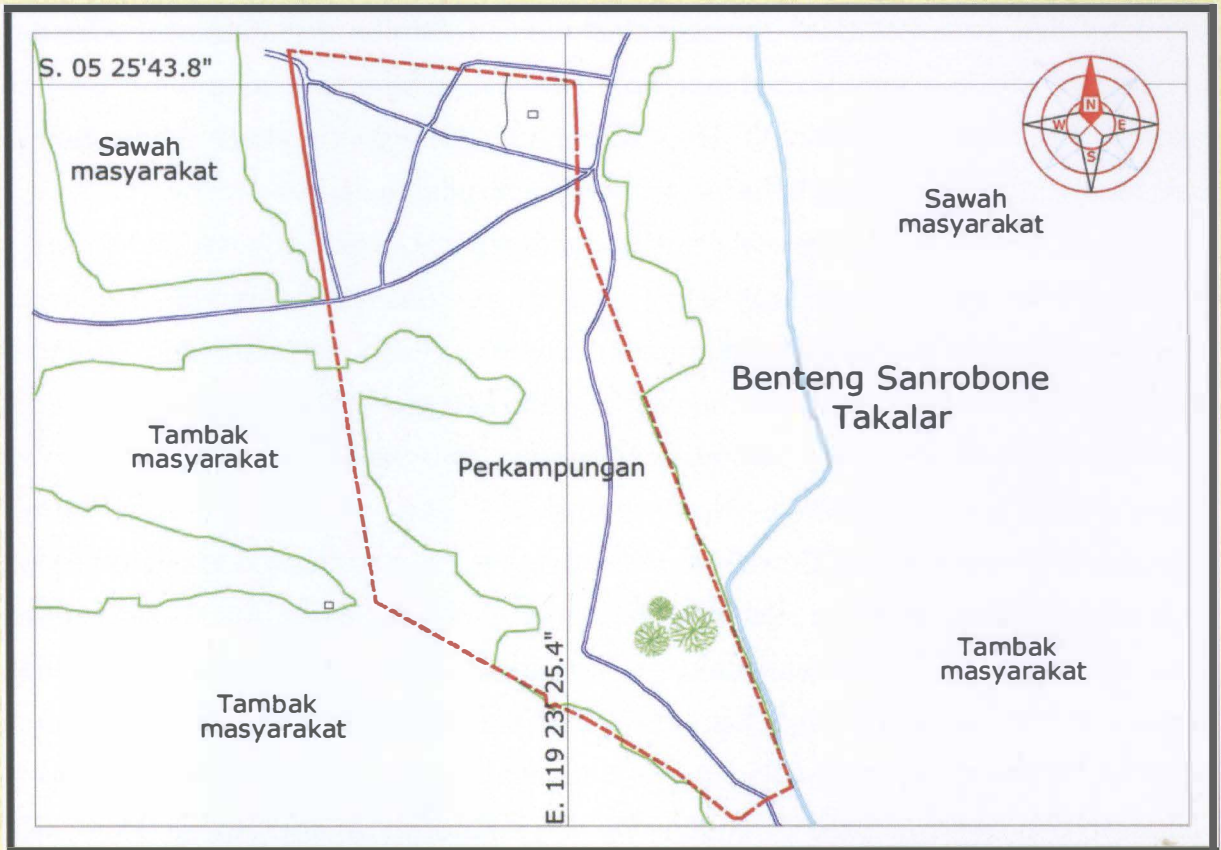
Benteng Sanrobone adalah benteng yang proses pembangunannya cukup rumit seolah merefleksikan rumitnya hubungan antara Sanrobone dan Gowa. Tidak heran karenanya bahwa para ahli masih belum sepakat mengenai sejarah pembangunan benteng ini ataupun mengenai sejarah Sanrobone secara umum atau bahkan mengenai namanya sekalipun (yang kadang ditulis Sanrabone). Sanrobone terletak kurang lebih 40

kilometer dari Kota Makassar dan sekarang menjadi bagian dari Kabupaten Takalar. Letaknya yang cukup jauh dari Benteng Kale Gowa (yang berada di Sungguminasa atau tepatnya di Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa) memberi tanda bahwa Sanrobone untuk waktu yang lama bukan merupakan bagian dari Kekaraengan Gowa.

Dari sumber-sumber sejarah lokal dapat diperkirakan bahwa hingga abad ke-16 kelompok-kelompok masyarakat yang ada di tempat yang kemudian disebut Sanrobone masih merupakan kelompok-kelompok yang terpisah dan memiliki pimpinan-pimpinannya sendiri. Abdurrazak Daeng Patunru (2004: 22-23) berpendapat bahwa melalui peperangan, kelompok-kelompok masyarakat ini ditaklukkan oleh Tumaparisi Kallona yang berkuasa di Gowa sejak 1511 dan wilayah dan masyarakatnya diserap oleh Gowa. Karaeng Gowa kemudian menunjuk dan mengangkat salah seorang pimpinan di sana menjadi Karaeng Sanrobone. Kelak, penguasa Gowa Sultan Hasanuddin menikahi salah satu anak Karaeng Sanrobone dan dimana dari perkawinan ini lahir I Mappadulung yang kemudian diangkat menjadi Karaeng Sanronbone. Sesudah ditandatanganinya Perjanjian Bongaya yang disusul dengan "Perang Makassar" dan jatuhnya Gowa di tangan VOC dan sekutunya La Tenritatta, di tahun 1678 I Mappadulung diangkat menjadi Sultan di Gowa bergelar Sultan Abdul Jalil.

Beberapa ahli arkeologi berpendapat bahwa Benteng Sanrobone termasuk benteng yang segera dibangun setelah Karaeng Tumaparisi Kallona menaklukan dan menguasai wilayah ini. Menurut pendapat ini Benteng Sanrobone adalah benteng yang pertama memiliki tembok yang dibangun dengan dua dinding batu merah dan karenanya menjadikannya benteng yang paling tua di bagian selatan Pulau Sulawesi yang menggunakan teknologi semacam itu. Meskipun demikian, penelitian terkini memunculkan keraguan mengenai pendapat di atas.

Benteng Sanrobone dari atas memiliki bentuk seperti trapesium yang memanjang dari utara ke selatan. Benteng ini memiliki tembok keliling sepanjang 2,3 kilometer yang dibangun dengan rapi menggunakan dua dinding bata merah (Bulbeck, 1992: 709). Apabila dibandingkan dengan tembok Benteng Tallo dan Benteng Kale Gowa yang memiliki keragaman konstruksi dan bahan, maka kerapihan dan keseragaman tembok Benteng Sanrobone sangat menyolok. Dari keseragaman konstruksi tembok ini membuat Bulbeck (2005: 138) berpendapat bahwa Benteng



Gambar 16 : Peta situasi Benteng Sanrobone, tidak berskala (Martinus, 2009)

Sanrobone dibangun dalam satu proses pekerjaan pembangunan yang singkat oleh satu kelompok pekerja di bawah pimpinan orang yang sudah berpengalaman membangun tembok dengan teknik semacam itu. Karenanya menurut dia, sulit diterima bahwa Benteng Sanrobone adalah benteng pertama yang dibangun dengan teknik semacam itu. Bahkan sebaliknya, lanjutnya, benteng ini kemungkinan adalah benteng terakhir yang temboknya dibangun dengan menggunakan dua dinding batu merah. Dengan mempertimbangkan aspek teknis konstruksi dan mempertimbangkan dinamika sejarah Gowa dan Sanrobone, Bulbeck kemudian memperkirakan bahwa Benteng Sanrobone dibangun antara tahun 1658 dan 1668.

Dias Pradadimara, MA. MS.

BAGIAN KETIGA

Arsitektur, Konstruksi dan Pola Pemukiman dalam Benteng

A. Arsitektur Benteng Ujung Pandang/Fort Rotterdam

Perubahan wajah dan kedudukan Makassar berkaitan erat dengan usaha Belanda menguasai kota tersebut untuk menjamin monopoli di Maluku. Tak mengherankan bila Makassar kemudian dijadikan pos pengawasan bagi pelayaran ke bagian timur. Para pegawai yang ditempatkan di kota ini diberi tugas utama mengawasi pelayaran ke Maluku. Masa keemasan Kesultanan Gowa pun habis. Belanda kemudian merombak dan mengganti nama Benteng Ujung Pandang menjadi "Fort Rotterdam" (Benteng Rotterdam) dan dijadikan markas tentara dan kantor perwakilan dagang. Benteng dan istana Somba Opu dimusnahkan dan diratakan dengan tanah. Demikianlah maka Makassar menjadi pusat pemerintahan dan perdagangan orang-orang Belanda, poros Somba Opu-Makassar hilang. Tinggallah Makassar memasuki babak sejarah baru dan Somba Opu yang pernah menjadi pusat pemerintahan Kerajaan Gowa tinggal menjadi puing-puing.

Fungsi "Makassar" berpusat di Benteng Somba Opu di bawah Kerajaan yang kemudian berubah menjadi Kesultanan Gowa-Tallo dan VOC berpusat di Benteng Ujung Pandang / Fort Rotterdam memiliki beberapa persamaan dalam geografi secara regional, maupun polanya. Kedua benteng berfungsi sebagai pusat pemerintahan yang juga pusat budaya, pusat pertahanan, dan pelabuhan. Baik di sekitar Benteng Somba Opu maupun Benteng Ujung Pandang / Fort Rotterdam, bermukim penduduk menurut suku, asal tempat atau negaranya membentuk "mozaik" terdiri dari perkampungan-perkampungan atau kluster. Hal tersebut terbentuk identik satu dengan lain, namun berbeda dalam sosial dan politik, dimana orang Eropa menggantikan orang Makassar

sebagai kelompok yang dominan. Sikap dan politik terhadap perdagangan berbeda bahkan bertolak belakang, antara Gowa-Tallo' dan Belanda. Pelabuhan Gowa-Tallo' digunakan untuk menarik sebanyak mungkin pedagang asing dan untuk mendukung arus barang yang mengalir dari Indonesia bagian timur ke Cina dan Selat Melaka. Sedangkan Belanda sebaliknya berkeinginan untuk mengatur dan membatasi arus tersebut. Prioritas pertama bagi Belanda adalah memantapkan pertahanan militer mereka, dan untuk melakukan hal ini mereka memanfaatkan sisa-sisa perbentengan Gowa. Seperti sudah diketahui dengan baik, Benteng Somba Opu di sebelah selatan, yang dekat dengan pusat kerajaan kuno Makassar "Kale Gowa" (Tamalate) ditinggalkan setelah dihancurkan oleh Belanda untuk kemudian mengambil benteng sebelah utara "Jumpandang" sebagai basis utama mereka, yaitu benteng yang kemudian diberi nama Fort Rotterdam.

Benteng Ujung Pandang yang sebelumnya menjadi elemen pertahanan Kesultanan Gowa terletak di atas tanah kering yang padat dekat dengan pantai. Di sebelah utara dan selatannya terdapat lahan yang sesuai untuk perumahan meski sebagian dataran alluvial di sebelah timurnya berawa-rawa yang tetap berupa sawah, ladang garam, ataupun empang ikan hingga abad ke-20 ketika daerah ini dimasukkan sebagai wilayah kota. Letak geografis dan topografisnya menguntungkan para pelaut dengan adanya tempat berlabuh yang terlindung berkat pulau-pulau di lepas pantai di sebelah baratnya. Lokasi ini juga menyediakan akses yang mudah untuk hubungan dengan Maluku, Filipina bagian selatan, Jawa. Berkat adanya angin muson para pelaut juga sangat diuntungkan dalam perhubungan pelayaran dengan kawasan Selat Melaka.

Benteng Ujung Pandang/Fort Rotterdam dijadikan markas tentara dan kantor perwakilan. Wilayah di sebelah utara benteng dijadikan kota dagang, yang dikenal dengan nama Vlaardingen. Di dalam *lontara* dan penelitian berdasarkan penggalian, yang didapatkan hanyalah kompleks kerajaan di dalam benteng Somba Opu. Mulai tahun 1673, benteng dibangun dan diperkuat dengan dinding batu setebal 2 meter, tinggi 7 meter. Perombakan tersebut, menyebabkan punahnya bangunan lama dan

sampai sekarang tidak didapat gambar-gambar asli pada masa pemerintahan Gowa. Kita tidak dapat memastikan apakah dalam perombakan dan pembangunan benteng pada masa Speelman ada unsur-unsur atau bentuk-bentuk lama yang dipertahankan. Hal ini dapat dimaklumi karena pada masa itu Somba Opu, lebih penting yaitu sebagai tempat bermukim raja. Bila kita melihat di dalam benteng, di dekat bangunan yang dahulu digunakan untuk kapel, dapat dilihat galian yang menunjukkan bekas bangunan lama (lihat foto 1).



Foto 10: Galian di sisi Gereja Kristen di tengah-tengah benteng, menunjukkan konstruksi asli fondasi dari Benteng Ujung Pandang.

Berdasarkan sebuah peta Fort Rotterdam dalam buku Leonard Andaya berjudul *Warisan Arung Palaka* (1981), yang menunjukka Benteng Ujung Pandang / Fort Rotterdam sebagai cikal bakal Kota Makassar pada abad ke-17, berbentuk seperti benteng-benteng di Eropa pada abad pertengahan. Selain dari gambar tersebut, bagian-bagian terbesar hingga sekarang masih ada setelah dipugar memperlihatkan

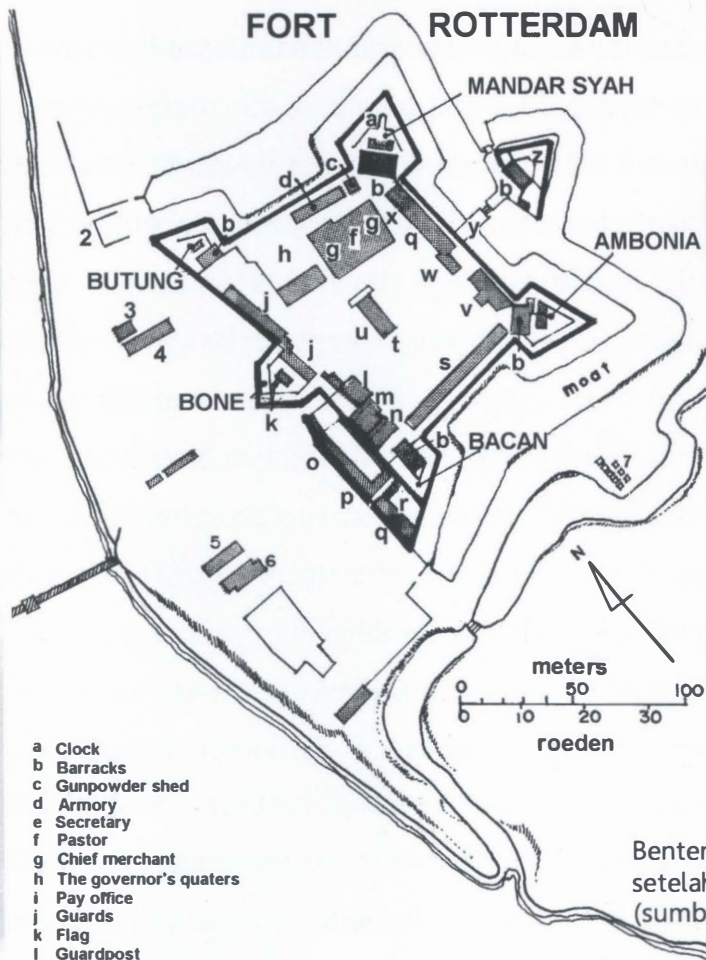
bahwa benteng berbentuk trapesium. Sisi sejajar terpanjangnya terdapat pada bagian barat sejajar dengan pantai. Seperti lazimnya benteng-benteng di Eropa pada Jaman Pertengahan, Benteng Ujung Pandang / Fort Rotterdam dahulu juga dikelilingi oleh parit, di sisi utara, timur dan selatan. Pada sisi barat, karena berhadapan langsung dengan laut dan berfungsi sebagai pelabuhan, tidak terdapat parit. Denah Benteng Ujung Pandang / Fort Rotterdam mirip kura-kura terdiri dari segi empat trapesium dari tembok keliling tersebut di atas sebagai tubuhnya, dan enam buah bastion, empat di sudut-sudut sebagai kaki, di depan tengah sisi barat sebagai kepala, dan di belakang tengah atau timur sebagai ekor. Bastion tengah belakang (timur), diberi nama Bastion Amboina, untuk pertahanan dari arah Timur atau pedalaman. Pertahanan bagian belakang ini mempunyai konstruksi berbeda dengan bastion lainnya, berbentuk segitiga dan dipisahkan oleh parit, dan untuk mencapainya dibuat jembatan.

Meskipun beberapa ahli sejarah tidak sependapat tentang sebuah gambar denah (gambar No. 1) dari Benteng Ujung Pandang / Fort Rotterdam dimuat dalam artikel Heather Sutherland berjudul "Ethnicity, Wealth and Power in Colonial Makassar", dalam Peter J.M. Nas (ed), *The Indonesian City*, (Leiden: KITLV, 1986) namun, menurut saya gambar ini cukup akurat, bila dikaji berdasarkan pada artefaknya. Dalam gambar tersebut terlihat keempat bastion di sudut, masing-masing mempunyai barak atau asrama tentara, diberi nama diambil dari nama pulau-pulau di Maluku. Bastion selatan depan atau barat diberi nama Bacan, di sebelah utaranya dari, menempel sejajar dengan dinding barat-selatan benteng terdapat unit-unit, masing-masing dari utara ke selatan: pos jaga, kediaman komandan artileri dan ahli bedah utama (lihat gambar no 1 denah: b, o, p, q, r). Bastion depan-tengah dari dinding barat, bagian yang runcing mengarah langsung ke laut, diberi nama Bone. Di tengahnya terdapat tiang bendera. Selain itu di belakangnya ada unit melintang utara selatan untuk penjaga. Posisi dan bentuk Bastion Bone persis seperti kepala kura-kura.

Di sisi kanan atau selatannya terdapat pintu gerbang utama masuk ke dalam benteng (lihat gambar No. 1, 15. k; j). Bastion sudut utara-barat diberi nama Butung,

seperti telah disebut di atas semua bastion di bagian tengahnya terdapat barak tentara. Di antara Bastion Bone dan Butung, terdapat tempat para penjaga, menempel sejajar dengan tembok benteng. Dua bastion di sisi timur, yang di utara bernama Mandarsyah, di selatan Ambonia, bentuk denahnya satu dengan lain sama, yaitu segi empat jajaran genjang, masing-masing juga ada baraknya. Pada Bastion Mandarsyah dahulu diletakkan jam (lihat gambar No. 1, 15: a). Di tengah-tengah benteng, ada unit bertingkat, cukup dominan di dalam lingkungannya, baik karena letaknya maupun karena bentuknya. Lantai atas dahulu untuk Gereja Kristen, lantai di bawahnya untuk gudang mesiu. Arsitektur gedung di tengah benteng ini, cukup sederhana, berdenah segi empat panjang, atapnya pelana, berkemiringan cukup tajam. Pada dinding utara selatan ada *gable*, tanpa tritisan. Jendela berderet di dinding atas sisi barat dan timur, ambang atasnya melengkung bagian dari lingkaran. Untuk masuk gereja ada tangga di luar di sebelah utara. Gudang mesiu masuknya dari selatan, melalui sebuah pelengkung.

Di sisi selatan menempel sejajar dengan dinding benteng, terdapat unit memanjang, bertingkat dengan teras panjang hampir sepanjang unitnya, dahulu untuk gudang kompeni. Kolom berderet pada teras berbentuk silindris seperti kolom Yunani Dorik. Di sisi timur, juga sejajar-menempel dinding benteng, terdapat unit memanjang, terdiri dari beberapa bagian: yang di ujung selatan untuk penjaga utama, menyambung dengan penjaga gudang dan ujung utara untuk komandan pasukan (lihat gambar No. 1: w; q; x). Di tengah dinding benteng sisi timur, terdapat gerbang untuk masuk dari parit, setelah melalui jembatan, yang melintas di atas parit, menghubungkan bastion timur-tengah dengan bagian utama benteng. Unit bangunan yang juga sangat penting dan bersejarah lainnya di dalam benteng adalah balai kota, menempel sejajar dinding timur benteng, menempel pada barak dari Bastion Ambonia. Arsitekturnya cukup unik, dua lantai dengan bukaan-bukaan dan jendela yang ambang atasnya melengkung, seperti pada arsitektur Romawi. Ruang utama ada di lantai dua, dicapai melalui tangga dari luar yang langsung berhubungan dengan teras. Aspek tropis cukup dominan, terlihat pada tritisannya yang cukup lebar.



- a Clock
- b Barracks
- c Gunpowder shed
- d Armory
- e Secretary
- f Pastor
- g Chief merchant
- h The governor's quaters
- i Pay office
- j Guards
- k Flag
- l Guardpost
- m Commander of the artillery
- n Principel surgeon
- o Quartermaster
- p Salors
- q Storekeeper
- r Carpenter
- s Company's werehouse
- t Gunpowder magazine
- u Church
- v City hall
- w Main guardpost
- x Militaria head
- y Land gate
- z Outer works : half-moon shape

- 1 Artillerymen
- 2 Shed for gun-carriegers
- 3 Coal shed
- 4 Blacksmith
- 5 Shipbuilding shed
- 6 Lime warehouse
- 7 Graveyard

Benteng Ujung Pandang pada abad ke-17
setelah dirombak oleh Speelman
(sumber: Sutherland, 1986)

Legenda :

- a. Jam
- b. Barak
- c. Gudang Mesiu
- d. Gudang persenjataan
- e. Sekretaris
- f. Kediaman Pastor
- g. Kepala perdagangan
- h. Kantor dan kediaman gubernur
- i. Kantor pembayaran
- j. Penjaga
- k. Bendera
- l. Pos jaga
- m. Komandan altileri
- n. Ahli bedah
- o. Intendan
- p. Pelaut
- q. Penjaga gudang
- r. Tukang kayu
- s. Gudang kompeni
- t. Penyimpanan mesiu
- u. Gereja
- v. Balai kota
- w. Penjagaan utama
- x. Komandan militer
- y. land gate
- z. outer works: half moon shape

Di luar depan benteng di halaman barat yang merupakan tepian air laut, terdapat elemen-elemen pertahanan, perkapalan dan dermaga. Paling utara (lihat gambar 1: 2;3;4; 5;6) bangsal untuk pengangkut senjata, bangsal untuk batu bara, pandai besi, bangsal perbaikan kapal, gudang kapur. Di luar benteng sebelah selatan, terdapat kuburan. (lihat gambar 1: 7). Di sebelah selatan benteng terdapat parit, dahulu berhubungan dengan benteng Vredenburg, di sebelah timur untuk pertahanan dari arah timur, yang juga dikelilingi parit. Sistem ini membuat kedua dinding ujungnya rata dengan *gable* pada bagian atasnya. Semua *gable* tidak mempunyai tritisan dan dihias dengan *raking cornice* dan tiga amortizement masing-masing pada titik sudut membentuk segi tiga. Pada bagian barat-utara, terdapat sebuah unit dengan ciri-ciri arsitektur sama dengan lainnya. Bangunan ini juga mempunyai kemiringan atap tajam dengan *gable* dikedua ujungnya, banyak jendela dan pintu, teras memanjang pada sisi selatan dengan deretan kolom menyangga atap. Yang agak berbeda dengan unit lainnya, di sini menggunakan lantai marmer yang diperkirakan didatangkan dari Eropa.

Arsitektur bangunan-bangunan di dalam Benteng Ujung Pandang / Fort Rotterdam bergaya Eropa, sama sekali tidak memasukkan unsur-unsur budaya setempat. Namun, demikian kita mendapatkan ciri bangunan tropis dengan banyaknya jendela dan pintu. Semua jendela tersebut menggunakan sistem krepak, yang tidak terdapat di daerah-daerah yang mempunyai empat musim. Selain itu ciri bangunan tropis juga terlihat pada selasar-selasar yang terdapat memanjang pada sisi sebagian besar unit-unit bangunan yang selain berfungsi sebagai teras, penghubung ruang-ruang juga sebagai isolasi panas. Semua unit bangunan di dalam benteng bertingkat. Beberapa di antaranya berlantai tiga dan yang lain dua, ditambah sebuah lantai lagi memanfaatkan ruang di bawah konstruksi atap (*attic*). Bangunan-bangunan dibuat demikian, disamping bertujuan menghemat tanah di dalam benteng, juga agar penghuni tidak merasa terkurung, karena dari lantai atas orang dapat melihat pemandangan ke segala arah tanpa dihalangi oleh dinding. Kemungkinan besar sistem ini juga berfungsi pertahanan, untuk mengamati langsung bila ada serangan dari luar



Foto 16: Unit penyimpanan mesiu, pada tahun 1925an, di sisi kanan dalam gambar terlihat bagian dari barak tentara (foto koleksi KITLV, Leiden).

Foto 17: Bastion Mandarsyah, berlatar belakang gedung-gedung bekas kediaman komandan militer dan kepala administrasi gudang pada 1990-an



Foto 18, 19: Pintu gerbang-dalam pada 1915an, yang masih ada hingga sekarang dan Pintu gerbang luar, sekarang sudah tidak ada lagi (kanan) (foto koleksi KITLV, Leiden)



Foto 20: Unit gudang kompeni (lihat gambar No.1 15 s) di kanan, menempel sejajar dengan dinding selatan benteng, terdiri dari dua lantai, ditambah satu lantai di bawah atap langsung dengan teras panjang dan deretan kolom silindris mirip kolom Dorik, pada 1915-an, diujung terlihat Balai Kota (gambar 15 V). Gedung yang sama pada saat ini. Diujung terlihat kantor yang pada waktu itu disebut Balai Kota. (foto koleksi KITLV, Leiden) (lihat pula foto 13 di bawah).

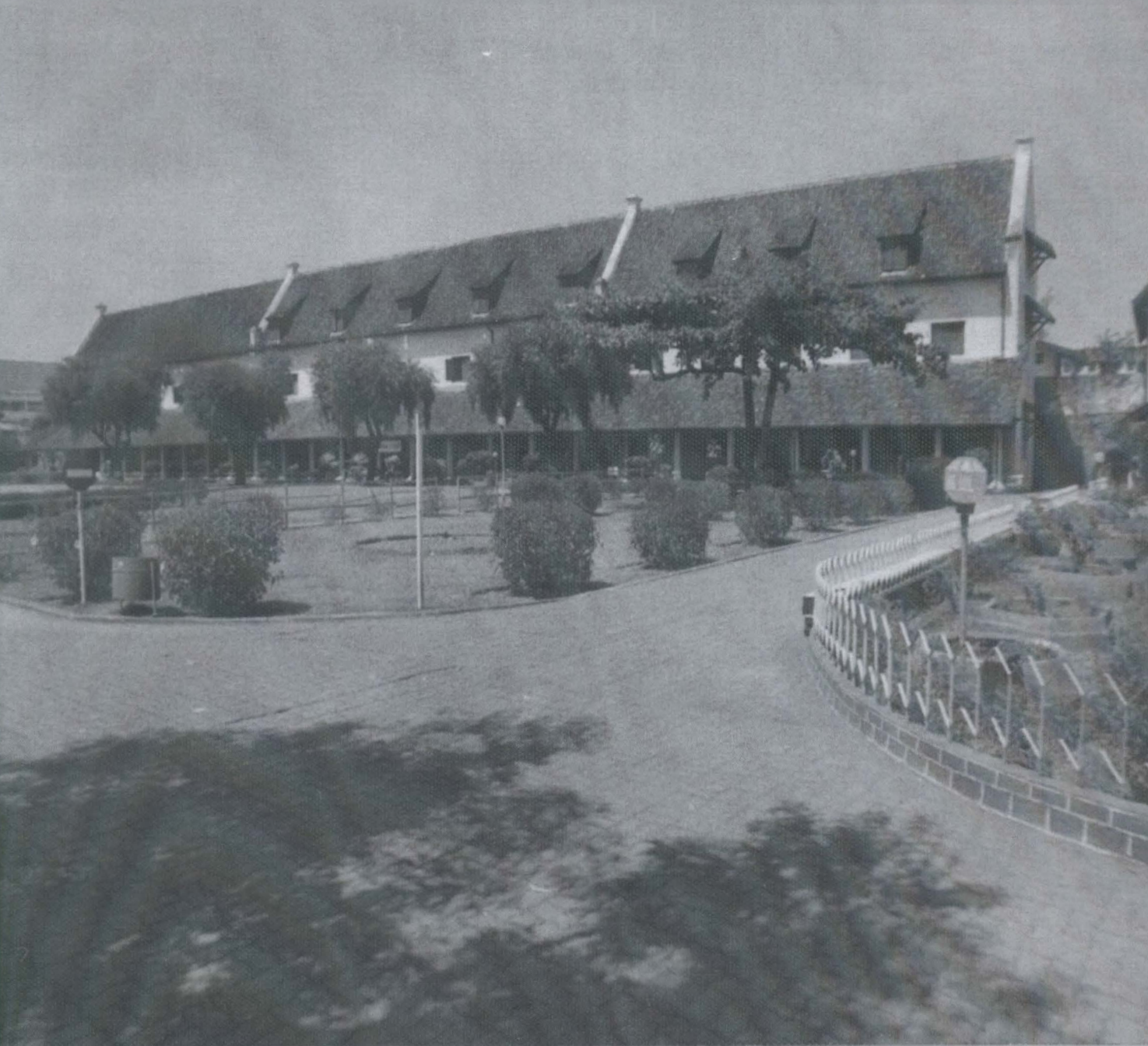


Foto 21: Unit yang sama pada tahun 2000



Foto 22: Gedung di dalam benteng, bekas Balai Kota.
Di depan ada tugu yang dulu di atasnya ada patung, di taman sebelah utara benteng.

Prof. Dr. Ir. Yulianto Sumalyo, DEA.

Pola Permukiman Dalam Benteng Kale Gowa

Benteng Kale Gowa terletak di Kota Makassar, khusus bagian sisi utara sedangkan sebagian besar termasuk di dalam wilayah Kelurahan Katangka, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa. Letak astronomisnya adalah 50 11' 32 LS 1190 27' 7" BT dengan ketinggian sekitar 50 meter di atas permukaan laut (dpl). Menurut Bulbeck, Benteng Kale Gowa dijadikan sebagai istana pada empat masa, yaitu masa pemerintahan Karaeng Tumapa'risi' Kallona sampai tahun 1547; tahun 1618-1631 digunakan kembali sampai tahun 1639; tahun 1670-1677; dan untuk masa periode yang tidak diketahui sampai 1694. Menurut Bulbeck jumlah benda cagar budaya secara keseluruhan dalam benteng adalah 43 buah dan satu di antaranya adalah tinggalan prasejarah. Beberapa struktur cagar budaya yang ditemukan



Foto 23 ; Struktur Benteng Kale Gowa (Dok.Iqbal, 2004)

adalah makam Sultan Hasanuddmakam Arung Palakka, batu pelantikan, sumur bisu (*bungung bisu*), sumur Tomanurung atau sumur berani (*bungung barania*), sumur besar (*bungung lompowa*), mesjid tua Katangka, makam raja-raja Gowa dan keturunannya, makam Syekh Yusuf, batu *tallua* (tiga batu), *assung laburu* (lesung batu), makam Karaeng Allamoncong, makam Tompo Bataya, makam pra Islam di Bone-Bone, bekas istana Karaeng Tumapa'risi Kallona, bekas istana Sultan Alauddin, bekas istana Sultan Abdul Jalil, makam Kaballokang, makam Islam Bisei (Jera' Bisei), makam Karaeng Tumassalangga Baraja, makam Sulengkaya, bekas makam Kale Kundrulu, dan bekas tatakan Mappadundung serta beberapa pecahan keramik.

Hirarki Situs di Wilayah Benteng Kale Gowa

Hirarki situs didasarkan atas pembentukan tipologi situs. Ringkasnya, hirarki situs adalah tingkatan tipologi situs dan disajikan dalam bentuk histogram. Histogram ini memperlihatkan hierarki-hierarki situs dari daerah yang berbeda, periode yang berbeda (masa penghunian atau umur situs) dan perbedaan jenis komunitasnya (Renfrew dan Bahn, 1996 : 171). Pembahasan tipologi telah diintegrasikan dengan hierarki situs dengan uraian sebagai berikut:



Foto 24 ; Sumur Bissu dari Arah Utara

1. Masa pemerintahan Karaeng Tumapa'risi' Kallona

Diduga bahwa Benteng Kale Gowa dihuni oleh populasi dengan jumlah yang cukup banyak. Di sini terdapat istana Tamalate yang ditempati oleh Karaeng Tumapa'risi' Kallona, yang di sekelilingnya terdapat batu pelantikan raja, yang dijadikan sebagai pusat pemujaan dan upacara di daerah ini. Berdasarkan tradisi lisan bahwa batu ini merupakan batu dewa dari kayangan yang sakral. Hal ini ditandai dengan adanya sesajian, lelehan lilin (merah maupun putih), tempat pedupaan dan taburan bunga di atas batu. Batu pelantikan sangat berhubungan dengan Istana, karena setelah raja dilantik di atas batu ini, maka raja akan menempati istana yang berada tidak jauh dari batu pelantikan ini. Kehadiran sebuah istana dan tempat sakral dalam suatu daerah menunjukkan bahwa daerah tersebut merupakan *primary regional center*.

Di dalam benteng terdapat pula "batu tallua", yang menurut legenda merupakan tempat berpijaknya Tomanurung sehingga disucikan oleh masyarakat setempat. Selanjutnya ada "sumur lompowa", batu mappadundung, sumur Tomanurung yang dipercaya untuk mendapatkan kekuatan bagi prajurit kerajaan. Situs-situs ini juga berhubungan langsung dengan *nucleated village* yang berada diempat daerah permukiman. Pertama; daerah permukiman Lonjo Boko, yang memiliki temuan keramik dan gerabah dalam jumlah kecil dari awal abad ke-16, yang kemudian permukiman ini ditinggalkan. Kedua; Benteng Kale Gowa di daerah permukiman Lonjo Boko yang didiami oleh komunitas kecil yang okupasinya ditemukan pada dinding benteng tertua (Bulbeck, 1992 : 222-23). Ketiga; makam dari masa Karaeng Tumassalangga Baraja dan daerah sekitar permukiman Mangasa. Beberapa sumber menyebutkan bahwa daerah ini merupakan pusat Kerajaan Gowa-Tallo pada masa pemerintahan Tumassalangga Baraja (anak Tomanurung Bainea ri Taka' Bassia dengan Karaeng Bayo) (Bulbeck, 1992 : 219). Sementara itu Mangasa adalah salah satu *gallarang* Bate Salapang pada masa pemerintahan Karaeng Tumapa'risi Kallona. Keempat; makam pra Islam di daerah permukiman Bone-Bone dan temuan fragmen gerabah dengan pertanggalan awal abad 16. Temuan tersebut menunjukkan bahwa daerah ini diokupasi selama beberapa waktu dan selanjutnya ditinggalkan. Kelima; daerah permukiman Bisei, yang menurut (Patunru, 1967 : 1) merupakan salah satu *gallarang* Bate Salapang dan merupakan gerbang timur Benteng Kale Gowa.

2. Masa pemerintahan Sultan Alauddin

Primary regional center berada di istana Sultan Alauddin di Datak Toa, batu pelantikan, dan Istana Karaeng Tumapa'risi Kallona. Pada masa ini istana dipindahkan dari daerah permukiman Tamalate ke daerah Datak Toa dan dilengkapi dengan pusat upacara. Meskipun Somba Opu dijadikan bandar perdagangan, namun istana yang didiami oleh Sultan Alauddin ini merupakan pusat kerajaan dan segala keperluan yang berkaitan dengan raja akan dilakukan di istana Sementara pusat upacaranya berada di batu pelantikan dan di bekas istana Karaeng Tumapa'risi' Kallona.

Setelah melakukan upacara, maka raja yang dilantik akan memasuki kompleks makam raja-raja Gowa (sekarang disebut sebagai Komplek Makam Sultan Hasanuddin) untuk melakukan penghormatan kepada para raja yang dimakamkan di sana. Sumur Lompowa selanjutnya dijadikan tempat pengambilan air bagi masyarakat (biasa maupun keturunan bangsawan) sementara kelompok kaum bissu yang merupakan penghubung antara dunia dewata dan manusia mengambil air di sumur bissu. Daerah tersebut kemudian disebut sebagai *secondary regional center*. *Segregated elite district* berada di daerah permukiman Datak Toa, yaitu mesjid tua Katangka dan kompleks makam raja-raja Gowa dan keturunannya di daerah permukiman Datak Toa.

3. Masa pemerintahan Sultan Abdul Jalil

Primary regional center berada di daerah permukiman Datak Toa, yaitu di Istana Sultan Abdul Jalil dengan Mesjid Tua Katangka sebagai pusat upacara dan Sumur Lompowa untuk pengambilan air. Berdasarkan konstruksinya (susunan balok kapur dengan spesi), sumur lompowa diperkirakan digali pada abad ke-17. Pembuatan sumur ini dikarenakan sumur bissu hanya digunakan oleh kaum bissu sedangkan sumur Tomanurung ditimbun oleh Sultan Alauddin.

Secondary regional center berada di daerah permukiman Tamalate, Datak Toa dan Kale Gowa. Raja baru akan dilantik di batu pelantikan dan menggelar upacara di bekas Istana Karaeng Tumapa'risi Kallona dan menetap di sana. Raja dan keturunannya yang meninggal akan dimakamkan di kompleks makam Sultan Hasanuddin, dan orang-orang penting akan dimakamkan di Mangasa dan Lakiung. Daerah pusat masih didukung oleh daerah permukiman Bisei, sedangkan daerah permukiman lain seperti Katangka Toa, Kaballokang dan Allamoncong mulai diokupasi pada masa ini.

Sistem Permukiman

Benteng Kale Gowa, selain berfungsi sebagai benteng pertahanan yang melindungi Kerajaan Gowa-Tallo di daerah pedalaman, juga berfungsi sebagai pusat kegiatan sakral kerajaan seperti tempat pelantikan raja. Secara otomatis wilayah tersebut memerlukan perangkat pengamanan yang khusus. Kebiasaan umum yang berlaku dalam masyarakat baik sebagai pusat kerajaan maupun pusat pemerintahan menjadikan daerah ini tidak mudah dimasuki karena memiliki norma-norma tersendiri yang harus dipatuhi.

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa pada masa pemerintahan Karaeng Tumapa'risi' Kallona Benteng Kale Gowa dijadikan sebagai pusat permukiman, pemerintahan dan pertahanan dengan beberapa pertimbangan. Pertama; di bukit Tamalate (atau biasa disebut Taka' Bassia) merupakan tempat pertamakali ditemukannya Tomanurung. Kedua; di daerah ini terdapat batu dewata, yaitu batu pelantikan raja. Ketiga; daerah dekat "batu tallua" merupakan tempat bersemayamnya Tomanurung. Keempat; di daerah ini terdapat sumur Tomanurung, yang dipercaya dapat menambah kekuatan dalam berperang. Kelima; kepercayaan terhadap Tomanurung berpengaruh terhadap stratifikasi masyarakat. Stratifikasi muncul ketika Tomanurung, yang dianggap sebagai keturunan dewata sehingga keturunannya disebut Karaeng (keturunan bangsawan). Bukti Perbedaan status tersebut, dapat dilihat dari: 1). Tempat pemakaman. Adanya perbedaan baik tempat maupun bentuk makam antara Raja Gowa-Tallo dan keturunannya dengan rakyat biasa. Berdasarkan letaknya, beberapa raja dimakamkan di daerah yang memiliki kontur tinggi dari permukaan laut, misalnya di Kompleks Makam Arung Palakka dan Kompleks Makam Hasanuddin. Sementara rakyat biasa dimakamkan di tempat biasa atau tidak memiliki keistimewaan apapun. Berdasarkan bentuknya, makam raja dan keturunannya memiliki atap atau cungkup (baik berbentuk susun timbun maupun kubah), berundak, memiliki banyak motif ragam hias (floraistis, kaligrafi dan geometris), serta memiliki identitas orang yang dimakamkan. Sementara makam rakyat biasa terkadang tidak memiliki cungkup, tidak berundak, tidak beragam hias, dan tidak beridentitas.

Bulbeck telah membagi wilayah ini kedalam 12 daerah permukiman dan didalamnya terdapat beberapa situs. Seperti yang terlihat pada tabel dibawah ini.

No	Daerah Pemukiman	Situs di dalam daerah permukiman					
		Pemakaman	Indikasi pemukiman	Batu yang disakralkan	Istana	Mesjid	Sumur
1	Mangasa	3	1	-	-	-	-
2	Tamalate	1	1	3	1	-	1
3	Kale Gowa	-	1	1	1	-	1
4	Allamoncong	1	-	-	-	-	-
5	Sulengkaya	1	1	-	-	-	-
6	Lonjo Boko	-	2	-	-	-	-
7	Datak Toa	1	1	-	1	1	1
8	Kaballokang	1	1	-	-	-	-
9	Bone-Bone	1	1	-	-	-	-
10	Lakiung	2	1	-	-	-	-
11	Bisei	1	1	-	-	-	-
12	Katangka Toa	-	1	-	-	-	-

Daerah permukiman dan situs di dalamnya

Tabel di atas menunjukkan daerah pusat (*primary dan secondary regional center*) memiliki situs yang relatif lebih banyak dibandingkan dengan daerah lainnya (*nucleated village*) memiliki situs yang relatif lebih sedikit.

Lingkungan dalam wilayah ini juga mendukung adanya permukiman di dalam benteng karena tersedianya sumber air, kondisi tanah yang tidak terlalu lembab dan didukung oleh jalur transportasi yang memudahkan penghuninya berinteraksi dengan sesamanya, meskipun lokasi benteng itu agak jauh dari sungai atau pesisir, sehingga wilayah ini telah dihuni oleh manusia pada tahun 1425 (Sonda, 1999 : 83).

Penutup

Wilayah Benteng Kale Gowa dijadikan sebagai istana pada empat masa, yaitu masa pemerintahan Karaeng Tumapa'risi' Kallona, Sultan Alauddin, Sultan Abdul Jalil, dan Karaeng Sanro Bone. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka diketahui bahwa situs-situs di wilayah ini memiliki hierarki. Hierarki ini dapat dilihat pada perbedaan perlakuan terhadap situs, misalnya terdapat situs yang dijadikan pusat umum, pusat pemerintahan, pusat upacara yang disakralkan, struktur cagar budaya, dan juga terdapat situs permukiman yang kemudian ditinggalkan oleh penghuninya.

Ketika ditinggalkan pada masa pemerintahan Karaeng Tumapa'risi' Kallona, wilayah benteng ini berubah menjadi kawasan yang sakral, sehingga terdapat aturan-aturan tersendiri yang harus dipatuhi. Hal inilah yang menyebabkan perbedaan tiap ruang okupasi dan menyebabkan adanya daerah yang lebih penting dibandingkan yang lain. Diketahui bahwa ketika masa pemerintahan Karaeng Tumapa'risi' Kallona, daerah pusat berada di Tamalate; masa pemerintahan Sultan Alauddin, daerah pusat berada di Kale Gowa; sedangkan pada masa pemerintahan Sultan Abdul Jalil pusat berada di Datak Toa. Hal ini ditandai dengan adanya istana dan bangunan untuk keperluan upacara. Penempatan kembali benteng ini sebagai istana kerajaan Gowa-Tallo dikarenakan beberapa faktor yang berbeda di setiap masanya. Faktor-faktor penempatan suatu daerah tersebut adalah ideologi, lingkungan, keamanan, politik dan stratifikasi sosial. Hal ini menyebabkan tidak adanya keteraturan pola sebaran situs yang ada di dalam wilayah ini, disamping situs yang relatif bervariasi, yaitu makam, mesjid, sumur, batu yang disakralkan, permukiman, dan istana.

Andini Perdana, SS, M. Hum.

Konstruksi dan Bahan Benteng Garrasi

Data penulisan ini bertumpu pada hasil ekskavasi yang sudah dilakukan dari tahun 2000 hingga 2004. Ekskavasi kerja sama antara Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala (BP3) Makassar (sekarang Balai Pelestarian Cagar Budaya Makassar, BPCB) dan Jurusan Arkeologi Universitas Hasanuddin telah menghasilkan data yang sangat penting. Penulis ingin menampilkan beberapa bagian saja dari sejumlah kotak galian dan lot yang berhasil diekskavasi. Penggalan pada kotak 1 menggunakan sistem lotting dengan jumlah lot yang berhasil dicapai sebanyak 3, yaitu dengan spesifikasi tanah dan temuan sebagai berikut; warna tanah coklat yang terdiri dari lempung, humus dan pasir, struktur dinding benteng berhasil ditemukan pada kedalaman 20 cm dengan ukuran bata yang bervariasi dengan panjang ± 27 cm, lebar 15 cm dan tebal 4 cm, warna agak kemerah-merahan. Temuan serta berupa pecahan bata relatif sedikit, fragmen tembikar dan fragmen porcelain. Pada lot 2 penggalan dilaksanakan pada bagian selatan kotak hingga mencapai kedalaman 31 cm dan ditemukan pula fragmen keramik asing 1 pecahan dan fragmen tembikar 5 pecahan serta satu buah gigi. Pada akhir penggalan lot ini susunan bata pada struktur bervariasi antara satu hingga dua lapisan.

Penggalan pada lot tiga dilaksanakan pada bagian utara dengan maksud untuk menampakkan jumlah lapisan struktur pada dinding hingga mencapai kedalaman 20 cm. Pada akhir penggalan, berhasil ditampakkan sisi utara dari struktur dengan jumlah susunan sebanyak 2 lapisan. Warna bata pembentuk struktur yang berhasil ditemukan agak merah kehitam-hitaman sedang ukurannya cenderung bervariasi, antara lain lebar bata ± 13 cm, panjang ± 24 cm dan tebal ± 3 cm. Struktur pada kotak ini langsung mengikuti keadaan kontur tanah dan letak bata memanjang pada lapisan pertama dan membujur pada lapisan kedua tanpa ada unsur perekat. Lebar struktur dinding yang berhasil ditampakkan ± 85 cm dengan arah hadap antara bagian timur dan barat. Ukuran bata dengan tipe bujur sangkar pada lot ini panjangnya ± 18 cm dan tebal $\pm 3-5$ cm. Temuan serta pada lot ini terdiri dari porcelain 1 keping, pecahan tembikar 45 keping

dan pecahan tulang binatang 5 potong (Ramli, 2001: 12-3).

Penggalian pada kotak 2 yang dilaksanakan pada tahun 2000 oleh BP3 Makassar. Pada bagian timur grid , terdapat indikasi adanya gejala struktur berupa pecahan-pecahan bata yang perlu diketahui dan ditampakkan. Kotak ini berada di sisi timur pematang sebuah kebun yang belum ditanami pada waktu itu. Pada kedalaman 15 cm terdapat beberapa pecahan bata, pecahan tembikar dan pecahan porcelain. Sampai akhir penggalian lot satu berhasil ditampakkan permukaan struktur bagian barat dengan lebar 94 cm dengan posisi keletakan 52 cm dari dinding utara kotak, 54 cm dari dinding selatan dan 124 cm dari dinding timur. Bata pada struktur ini panjangnya 24-25 cm, lebarnya berkisar 13-15 cm dan tebal bata 3-5 cm. Struktur dinding ini tersusun dari bata dengan warna agak kemerah-merahan dan kehitaman dengan posisi bata miring atau dengan kata lain bagian ketebalan bata diletakkan diatas sebagai bagian permukaan struktur.

Deskripsi Situs

Bukti-bukti tentang adanya tinggalan Benteng Garassi mulai terungkap ketika David Bulbeck pada tahun 1992 melakukan penelitian tentang Kerajaan Gowa-Tallo dalam rangka menulis disertasinya. Sumber inipun diperkuat ketika salah seorang staf Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala (BP3) Makassar tahun 1999 disertai dua butir peluru meriam kuno dari salah seorang penduduk Kampung Garassi bernama Syarifuddin Dg Tata. Menurut penuturannya bahwa peluru meriam tersebut ditemukan dari kebunnya di Kampung Garassi saat dia mengolah lahannya untuk ditanami palawija (wawancara Syarifuddin Dg Tata).

Pada saat sekarang keberadaan Benteng Garassi sangat memprihatinkan, apalagi pada tahun 1990-an terjadi pelebaran sungai Balang Beru (wawancara Syarifuddin Dg Tata, 2004), yang mencapai 4 meter. Pada permukaan tanggul dijadikan jalan yang menghubungkan antara Kampung Taenga di sebelah timur dengan Kampung Panakkukang di sebelah barat situs. Keberadaan tanggul tersebut diperkirakan telah



Foto 25: Permukaan tanggul yang memotong dinding Benteng Garassi untuk jalanan yang menghubungkan Kampung Taenga di sebelah timur dengan Kampung Panakkukang di sisi barat situs.

memotong Benteng Garassi. Hal ini ditandai dengan adanya beberapa pecahan bata disekitarnya dan dalam jumlah yang cukup banyak.

Proses penambangan pasir pada Sungai Balang Beru yang berada pada bagian utara dan bagian tenggara situs oleh sejumlah masyarakat yang berdiam disekitar situs secara tidak langsung akan menambah rusaknya areal situs. Selain itu aktivitas masyarakat sebagai penggali liar (*dopu-dopu*) juga mengancam situs tersebut. Benteng Garassi berdasarkan penggalian berada $\pm$ 20-150 cm di bawah permukaan tanah dan pada saat musim hujan areal ini, terutama pada bagian utara yang berbatasan dengan sungai Balang Beru terendam air akibat meluapnya sungai. Pada bagian ini sebagian situs dijadikan lahan pertanian dan perkebunan hingga mengakibatkan perubahan tata guna lahan.

Struktur Dinding Benteng Garassi



Foto 26 : Struktur dinding benteng Garassi sisi utara

Bahan utama Benteng Garassi adalah bata berwarna merah kecoklatan dan kehitam-hitaman. Bahan tersebut diidentifikasi dari kotak gali yang berhasil ditampakkan selama proses penggalian tahap 1 hingga 5, baik oleh Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala (BP3) Makassar maupun oleh mahasiswa Arkeologi Unhas.

Bata sebagai materi utama pembuatan struktur dan dinding Benteng Garassi berdasarkan hasil pengamatan pada semua kotak gali berbentuk persegi panjang dan bujur sangkar. Bata dengan bentuk persegi panjang, rata-rata menghasilkan ukuran yang agak berbeda seperti; panjang rata-rata 23-28 cm. lebar 15-18 cm, tebal 3-5 cm.

Ukuran bata pada benteng ini sudah memenuhi kriteria bata yang baik untuk bangunan, seperti yang dikeluarkan oleh Lembaga Penyelidikan Masalah Bangunan (LPMB), yaitu panjang 24 cm, lebar 5 cm dan tebal 5 cm. Bata dengan bentuk bujur

sangkar biasanya lebih kecil ukurannya dari bata persegi panjang. Rata-rata bata ini berukuran ± 10 cm - cm dengan ketebalan rata-rata $\pm 3 - 5$ cm.

Hal yang menarik dari temuan ini adalah adanya gambar-gambar yang berupa jari-jari tangan manusia, gambar jejak kaki binatang yang terdiri dari kaki ayam dan khaki anjing, pada permukaan bata. Penyusunan bata pada struktur dinding dilakukan dengan sistem tumpukan bata tanpa mempergunakan bahan perekat. Pada dasar bata digunakan sebagai bahan pembentuk utama benteng yang diletakkan menyilang antara satu sama lain, dengan 2 sistem, yaitu "satu batu" dan "satu setengah batu". Pada pemasangan satu batu, dua buah bata dipasang berjejer kemudian diatasnya atau disampingnya, dua buah bata juga dipasang berjejer dengan selalu memperhatikan posisi nat. Nat dalam pengertian ini menunjuk pada pertemuan antara bata satu dengan yang lain. Pemasangan bata dengan sistem satu batu sekarang banyak digunakan pada bangunan-bangunan besar atau bertingkat. Konstruksi dinding benteng dengan pemasangan bata secara acak tanpa ada teknik-teknik tertentu, tidak didapatkan selama proses penelitian ini. Hasil pengamatan penulis melalui semua kotak gali yang mempunyai struktur dinding menunjukkan dua jenis konstruksi, yaitu konstruksi "susun timbun" dan "susun rapi". Konstruksi susun timbun mempunyai pengertian bahwa pada bagian dalam dan luar dari struktur dan dinding benteng dipasang bata kemudian pada bagian tengah dari struktur dan dinding diisi dengan tanah hingga menghasilkan ketebalan di atas 2 bata. Susun rapi mempunyai pengertian bahwa struktur dan dinding benteng pada bagian tengah tidak mempunyai isian.

Fondasi yang merupakan salah satu bagian terpenting dari sebuah bangunan tidak ditemukan. Bata yang dipasang kesemuanya langsung diletakkan di atas tanah dengan mengikuti kontur tanah yang ada.

Kesimpulan

Benteng Garassi berkonstruksi susun timbun dan susun rapi. Konstruksi situs Benteng Garassi belum mengenal sistem pengerasan landasan bangunan dan pasangan batu kosong (lantai kerja), namun pada dasarnya telah mengenal adanya dua sistem pemasangan bata yang mempunyai daya tahan kuat. Bata yang digunakan termasuk bata khusus, hal ini dapat dilihat pada material bahannya yang terdiri dari tanah liat dengan kandungan batu pasiran yang sangat rendah serta didukung dengan pembakaran yang cukup sempurna sehingga menghasilkan bata bakar yang kuat dan tahan air.

Benteng Garassi memperlihatkan konstruksi yang sama dengan Benteng Somba Opu dan Benteng Sanrobone, yaitu pada bagian barat dekat dengan laut dinding-dinding selalu lebih tebal. Hal ini disebabkan adanya pemikiran bahwa kemungkinan serangan akan lebih besar berasal dari arah barat (laut) sedangkan pada bagian lainnya serangan kemungkinannya kecil karena hanya berupa daratan yang terdiri dari lahan perkebunan dan pertanian penduduk.

Rahmat Kurniawan, SS.

BAGIAN KEEMPAT

Konservasi, Pengembangan dan Pemanfaatan

A. Konservasi dan Zonasi Benteng Ujung Pandang/Fort Rotterdam

Secara ringkas zonasi atau pemintakatan adalah penataan ruang untuk mengakomodir berbagai kepentingan. Pada dasarnya pemintakatan diadakan untuk menindaklanjuti kegiatan pelestarian terhadap benda cagar budaya dan situs yang selanjutnya dapat dimanfaatkan. Pada tahapan pemanfaatan ini, pemintakatan berperan membatasi perlakuan terhadap benda cagar budaya dan lingkungannya. Hal ini dilakukan untuk melindungi dan sekaligus mengatur peruntukan lahan, agar tidak terganggu oleh kepentingan lain yang terjadi di sekitarnya.

Berdasarkan peruntukannya lahan dibedakan atas tiga bagian, yaitu lahan (zona) situs, lahan pengamanan dan lahan pemanfaatan. Lahan situs kemudian dikenal dengan lahan inti, yaitu lahan yang ditentukan mengikuti batas-batas situs. Lahan pengamanan selanjutnya dikenal dengan lahan penyangga, batas-batasnya ditentukan berdasarkan kebutuhan ruang untuk melindungi lahan inti dari ancaman luar. Sedangkan lahan pemanfaatan, kemudian dikenal dengan lahan pengembangan adalah sejumlah lahan yang disiapkan untuk berbagai kegiatan pengembangan dan pemanfaatan cagar budaya dan situs. Serta zona pengendalian adalah gabungan antara zona penyangga dan zona pengembangan yang berfungsi untuk mengendalikan areal/pembangunan yang berguna untuk perlindungan dan pelestarian situs.

Dalam pelestarian sumberdaya arkeologi, pemintakatan sebenarnya merupakan tingkatan kedua setelah upaya pertama, yaitu perlindungan hukum dan penetapan situs. Perlindungan hukum dan penetapan menurut Kasnowihardjo (2001), adalah upaya melindungi sumberdaya arkeologi dengan peraturan perundang-undangan sehingga terhindar dari kerusakan akibat tindakan atau perbuatan manusia. Peraturan ini yang kemudian menjadi dasar formal untuk memperlakukan sumberdaya arkeologi secara legal dan berketetapan hukum.

Potensi Sumberdaya Arkeologi

1. Potensi Arkeologi

Benteng Ujung Pandang atau dikenal pula dengan nama Fort Rotterdam terletak di Jalan Ujung Pandang No. 1 Makassar yang secara administratif termasuk dalam wilayah Kelurahan Bulu Gading Kecamatan Ujung Pandang Kota Makassar. Benteng menghadap ke laut Selat Makassar dengan letak astronomis S. 05°08'10" E.119°24'30". Adapun batas-batasnya adalah sebagai berikut: sebelah utara, terdapat jalan Riburane, Kantor Radio Republik Indonesia Nusantara IV, auditorium RRI, dan Bank Danamon. Sebelah timur, terdapat jalan Slamet Riyadi, Kantor Pos dan Giro, Bank Mandiri, Bank Bukopin, Kantor Garuda Indonesia, Kantor Indosat, pedagang kaki lima, penjual benda-benda pos dan permukiman penduduk. Sebelah selatan, terdapat jalan WR. Supratman, Kantor Legiun Veteran Republik Indonesia Cabang Sulawesi Selatan, mesjid, pedagang kaki lima, ruko dan penjual makanan dan pasar burung. Sebelah barat, terdapat jalan Ujung Pandang, tugu, pelabuhan penyeberangan ke Pulau Kayangan, Kantor Popsa, ruko, Kantor Polairud, restoran *fast food* dan penjual kelapa muda.

Benteng Ujung Pandang mempunyai lima bastion dan dua pintu keluar. Pintu gerbang utama terdapat di sebelah barat yang terbuat dari kayu yang dilengkapi dengan penutup/daun pintu kembar dua sedang pintu sebelah dalam berukuran lebih kecil dengan pasak-pasak besi (angkur). Adapun pintu gerbang kedua merupakan pintu kecil terdapat di sebelah timur. Benteng Ujung Pandang memiliki luas 2,5 ha, di dalamnya terdapat 16 buah bangunan dengan luas 12.999,57 m².

1. Identifikasi Bentuk dan Tinggalan

Denah benteng jika dilihat dari atas terlihat menyerupai penyu dengan bagian kepala terletak di sebelah barat, pada masing-masing sudut terdapat bastion yang nampak seperti bagian kaki (penyu).

Dinding benteng dibangun dengan cara menyusun sejumlah balok-balok batu padas yang telah ditata. Ukurannya bervariasi disesuaikan dengan bentuk bangunan, bagian dalam ditimbun dengan batu karang dan pada beberapa sisi terdapat tanah isian. Untuk mengikat balok-balok batu padas dipergunakan campuran kapur dan pasir.

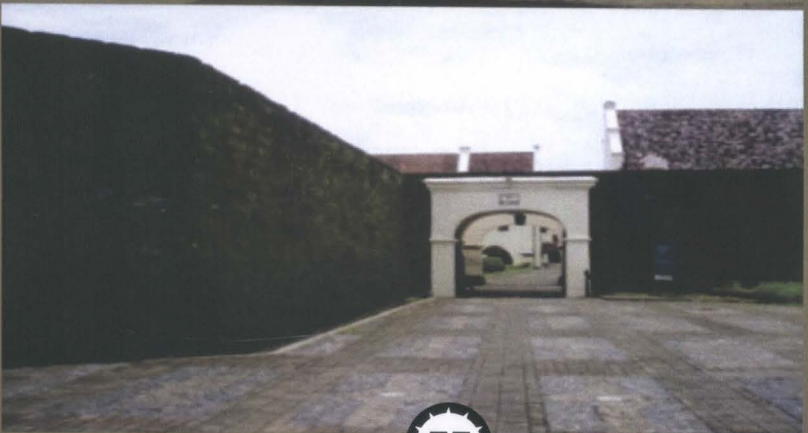


Foto 27 : Bagian luar dinding Benteng Ujung Pandang yang masih tampak. Foto 2 : dinding selatan (Bastion Buton), bagian dinding luar sebelah barat antara Bastion Buton dengan Bastion Bone, Foto 3: dinding sebelah barat antara pintu gerbang dan Bastion Bacan, Foto 4 : pintu gerbang Benteng Ujung Pandang (Dokumentasi BPCB Makassar, 2010).

Bagian dinding benteng telah beberapa kali mengalami pemugaran baik secara parsial maupun total oleh Balai Pelestarian Cagar Budaya Makassar dari tahun 1997-2003, dan 2012.

Adapun ukuran balok-balok batu dinding adalah; paling besar panjang (p) 75 cm (paling kecil 44 cm), lebar (l) 34 cm, tinggi (t) 20 cm. Ukuran pada setiap sisinya tidak sama. Dinding tertinggi adalah 7 meter dan yang terendah 5 meter. Sedangkan ketebalannya rata-rata 2 meter. Adapun ukuran dari tiap dinding adalah; dinding barat (p) 225 m, (t) 2 m, (tinggi) 5-7 m. Dinding utara (p) 164,2 m, (t) 2 m, (tinggi) 5-7 m. Dinding timur, (p) 193,2 m, (t) 2 m, (tinggi) 5-7 m. Dinding selatan (p) 155,2 m, (t) 2 m, (tinggi) 5-7 m.

2. Bangunan Dalam Benteng

Arsitektur bangunan-bangunan yang berada dalam benteng bergaya Eropa khususnya Belanda abad pertengahan (abad ke-16 dan abad ke-17) (Tjandrasasmita, 1986: 13).



Gambar 17. Keletakan bangunan dalam Benteng Ujung Pandang

Bangunan-bangunan tersebut seluruhnya didirikan oleh Belanda, kecuali bangunan XI didirikan pada masa pendudukan Jepang. Sebagian bahan bangunan didatangkan langsung dari Eropa khususnya Belanda, seperti genteng, bata, ubin, besi dan kayu (Sumalyo, 1999: 303). Luas keseluruhan bangunan dalam kawasan Benteng Ujung Pandang adalah 12.999,57 m².

Ancaman

Sebagian dari potensi arkeologi dalam benteng telah mengalami kerusakan dan pelapukan yang disebabkan oleh beberapa faktor, misalnya pengaruh alam, unsur-unsur kimia, biologis, dan perbuatan manusia (vandalisme). Selain itu, faktor usia yang cukup tua dan bahan sumberdaya arkeologi yang sangat rentan terhadap faktor cuaca, maka kondisi tersebut akan menyebabkan terjadinya proses kerusakan dan pelapukan. Seluruh sumberdaya arkeologi baik yang sudah maupun yang belum dipugar harus selalu diperhatikan dalam pemeliharannya agar kondisi keterawatannya tetap terjaga dengan baik (Haryono, 2005:2).

Proses kerusakan dan pelapukan sumberdaya arkeologi pada umumnya disebabkan oleh interaksi antara sumberdaya arkeologi dengan lingkungannya. Interaksi tersebut merupakan bagian dari proses alam yang tidak dapat dihindari, sebab pada dasarnya semua benda di alam ini akan mengalami proses penuaan degradasi yang mengakibatkan menurunnya kualitas bahan. Faktor-faktor lain yang berpengaruh terhadap benda di lingkungan alami adalah: 1) faktor-faktor dalam iklim (kelembaban, suhu dan sinar matahari), 2) serangga-serangga, 3) mikroorganisme (misalnya jamur dan bakteri), 4) bahan-bahan pencemaran di lingkungan tanah dan atmosfer. Beberapa faktor yang menjadi pemicu proses perusakan adalah interaksi antara suhu, air, dan sinar matahari.

Beberapa contoh kerusakan dan pelapukan yang biasa terjadi pada sumberdaya arkeologi yang berbahan batuan adalah kerusakan mekanik dan perbuatan manusia (vandalisme). Sedangkan pelapukan yang biasa terjadi terdiri atas; pertama, pelapukan secara fisis yang disebabkan oleh angin, air, suhu, kelembaban dan sinar matahari, misalnya terjadi pengelupasan dan aus pada batuan. Kedua, pelapukan secara khemis yang disebabkan oleh air, baik air rembesan, kapilaritas, dan hujan, misalnya batuan

mengalami kerapuhan. Ketiga, pelapukan secara biotis yang disebabkan oleh kegiatan jasad-jasad yang hidup pada permukaan benda, misalnya batuan ditumbuhi jasad renik seperti lumut, mikroba, dan tumbuhan spermathophyta (Mansjur, 1984: 4). Beberapa contoh ancaman yang dapat dialami oleh Benteng Ujung Pandang sebagai struktur cagar budaya adalah:

1. Kesalahan Penanganan

Pemugaran dan penataan taman telah dilakukan beberapa kali, di antaranya tahun 2002-2003. Penataan taman yang sangat kontras atau kurang harmonis dengan benteng dan bangunannya memberikan efek yang sangat berarti. Hal ini dapat dilihat dari pemberian tanaman hias, pembuatan teras dan jalan-jalan setapak yang kemungkinan besar masih terdapat tinggalan arkeologis di bawahnya.

2. Bangunan Baru di Sekitar Benteng Ujung Pandang

Akibat perkembangan kota yang semakin maju menyebabkan lahan yang tersedia terus berkurang sehingga mengancam keberadaan benteng sebagai struktur cagar budaya.



Foto 28,29,30,31,32: Bagian dinding benteng barat laut (kiri atas), dinding benteng sebelah timur (kanan atas dan kiri bawah), dan dinding benteng sebelah utara (kanan bawah), yang dapat dilihat dalam kotak area.

Dengan adanya permukiman dan kantor pemerintah dan swasta di sekeliling benteng, seperti (pada sisi barat) restoran *fast food* yang mengganggu kelayakan pandang ke laut. Selain itu terdapat ruko-ruko di sepanjang jalan yang dapat memberikan efek yang sama pula.

Pada bagian utara terdapat kantor pemerintah dan swasta dengan struktur bangunan berlantai 2 dan 3 yang memiliki ukuran lebih tinggi dari dinding benteng.

Pada bagian dinding sebelah timur terdapat rumah-rumah penduduk yang sebagian besar menutupi benteng yang menambah kesan kesemrawutan dan kekumuhan. Sedangkan pada sisi selatan sebagian dinding hilang, dan tampak beberapa kantor instansi pemerintah.

3. Reklamasi Pantai

Reklamasi pantai dilakukan untuk menyiasati kekurangan lahan yang tersedia di depan benteng untuk perluasan pembangunan pelabuhan peti kemas, dan pembangunan hotel yang dapat menyebabkan kerusakan ekosistem laut dan pencemaran.



Foto 33, 34 Reklamasi pantai yang digunakan sebagai pelabuhan peti kemas

4. Kerusakan Mekanis

a) Pecah, retak dan patah

Akibat perubahan cuaca yang terjadi pada siang dan malam menyebabkan bahan penyusun dinding benteng mudah mengalami keretakan, pecah dan patah. Hal ini dapat dijumpai pada dinding benteng maupun pada bastion.



Foto 35, 36 Keadaan batu benteng yang pecah, retak dan patah.

b) Vandalisme

Kunjungan wisatawan dengan intensitas yang cukup tinggi dapat memperparah kelestarian benteng, terutama pengunjung yang sengaja membuat tulisan-tulisan pada dinding bangunan dan dinding benteng.

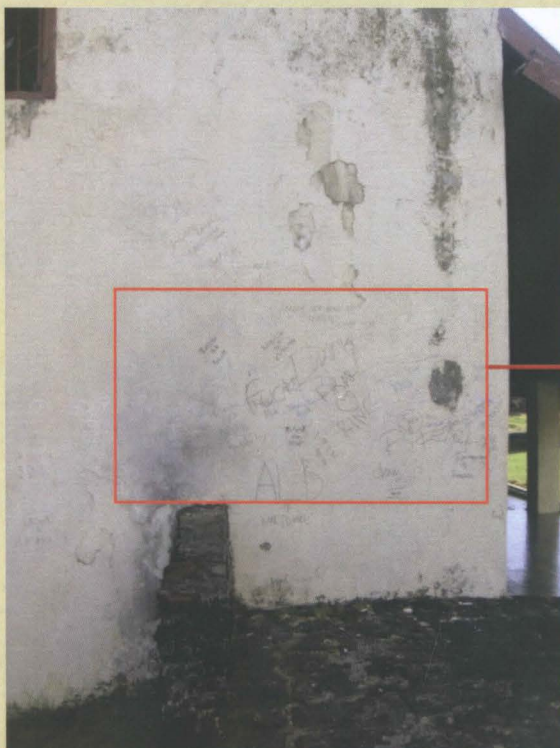


Foto 37, 38 Vandalisme pada dinding bangunan dalam Kompleks Benteng Ujung Pandang

5. Pelapukan Biologis

Pelapukan secara biologis merupakan proses penghancuran batu karena aktivitas makhluk hidup, yang menyebabkan kerusakan yang bersifat mekanis dan khemis. Contoh pelapukan biologis yang bersifat mekanis adalah pemecahan batuan karena pertumbuhan tanaman di atas batuan tersebut. Hal ini karena pertumbuhan akar tanaman pada celah-celah batuan mengakibatkan retak dan hancurnya batuan. Pelapukan biologis dapat pula berlangsung simultan dengan pelapukan kimia. Pelepas unsur-unsur atau bahan-bahan kimia oleh tanaman dapat mempercepat pelapukan khemis. Karbondioksida yang dihasilkan tanaman akan menghasilkan kenaikan keasaman air pada tanah, sedangkan oksigen yang dihasilkan akan membantu proses oksidasi. Demikian pula penyerapan bahan-bahan kimia dari batuan atau hasil pelapukannya oleh tanaman dapat mempercepat proses pelapukan khemis.

a) Jenis Algae

Jenis ini akan tumbuh pada bahan baku benteng yang kondisinya lembab, berpori dan sedang menutupi semua permukaan bahan. Sumber makanan jenis algae yaitu debu yang melekat pada pori bahan dinding benteng dan bangunan. Kehidupan yang lama



Foto 39 : Algae pada dinding bangunan

dan menutupi permukaan bahan benteng mengakibatkan pelapukan yang selanjutnya menjadi sumber makanan, ia akan mati, kering dan mengelupas pada musim kemarau. Pada saat mengelupas akan membawa partikel yang mengakibatkan aus pada permukaan bahan baku benteng.

b) Jenis Moss

Jenis moss adalah tumbuhan yang mempunyai akar batang dan daun semu. Tumbuhan ini hidup pada lingkungan yang lembab dan pada endapan-endapan debu dan pori-pori bahan baku benteng untuk mencari makanan. Akar lumut akan masuk ke dalam pori-pori untuk mencapai makanan, pada proses asimilasi akar lumut mengeluarkan gas yang akan bereaksi dengan unsur bahan baku dan mengakibatkan terjadinya kerapuhan pada bahan baku tersebut.



Foto 40, 41 : Lumut pada dinding bangunan dan dinding benteng

c) Jenis Lichen

Lichen adalah pertumbuhan simbiosis antara algae dengan lumut, lichen tumbuh pada permukaan bahan baku benteng pada kondisi lingkungan sedang maupun panas. Pada suhu udara yang tinggi lichen akan mati dan mengelupas sehingga mengakibatkan permukaan bahan menjadi lapuk dan aus.

c) Postules

Postules yang terjadi pada bahan baku benteng adalah asosiasi antara lumut dan ganggang yang tumbuh pada daerah endapan garam yang pecah dan membentuk lubang.

d) Campanulaceae

Campanulaceae adalah terna, semak-semak kecil, jarang berupa tumbuhan berkayu, kebanyakan mempunyai saluran getah yang beruas-ruas, tunggal kadang-kadang berbagi sangat dalam, duduk tersebar, jarang berhadapan, tanpa daun penumpu. Kelopak terdiri atas 5 daun, kadang-kadang 6-10 atau mempunyai 3-4 taju-taju. Daun-daun mahkota berlekatan, adakalanya bebas. Benang sari sama banyaknya dengan taju-taju daun mahkota yang berjumlah 3-10, duduknya berseling dengan daun-daun mahkota. Bakal buah tenggelam atau setengah tenggelam, beruang 2 banyak bakal biji pada tembuni yang aksilar atau pada dinding, tangkai putik 1. Buahnya kebanyakan berupa kendaga, kadang-kadang buah buni. Biji dengan endosperm. Tanaman ini merupakan bangsa Campanulatae (Asterales, Synandreae) (Tjitrosoepomo, 2000: 332).

6. Khemis

Pelapukan secara khemis yang terjadi pada bahan baku (batu) benteng disebabkan oleh proses hidrolisa, oksidasi, karbonasi, hidrasi, atau reaksi kimia yang lebih kompleks.

a) Penggaraman

Letak Benteng Ujung Pandang berada di pesisir pantai sehingga udara yang berhembus di sekitarnya mengandung air dengan kadar garam yang tinggi. Ketika musim hujan berlangsung, udara yang berhembus banyak mengandung air sehingga terjadi kelembaban. Air yang menyentuh dinding diserap oleh struktur bangunan akibat gaya kapiler, ini terjadi karena struktur bangunan memiliki porositas yang tinggi.



Foto 42, 43 : Contoh penggaraman yang terjadi pada dinding bangunan

Pada saat musim panas udara terasa sangat panas, sehingga menyebabkan bangunan mengalami perekahan, bisul (mengalami pembengkakan) hal ini ditunjang dengan kondisi bangunan yang telah termakan usia yang umumnya terjadi di bangunan dalam benteng. Hal ini disebabkan juga oleh masuknya air yang mengandung garam tinggi ke dalam struktur bangunan, pada saat musim panas air yang terdapat di dalam struktur bangunan akan keluar dan meninggalkan kandungan garam yang nantinya akan mengalami pengkristalan. Kristal-kristal garam yang terdapat dalam bangunan akan menyumbat air yang tersebar oleh garam-garam akan memperbesar volume garam yang telah terbentuk sebelumnya. Garam-garam yang besar mendorong lapisan luar bangunan (plesteran dan cat) sehingga menimbulkan bisul-bisul pada permukaan bangunan yang nantinya akan meletus (Akbar, 2009).

b) Kapilarisasi

Kapilarisasi disebabkan oleh masuknya air ke dalam sistem kapiler dan bisa terjadi jika medianya memiliki porositas yang tinggi, hal ini dapat terjadi pada bata dan struktur bangunan. Air dapat menimbulkan kelembaban pada bata antara lain melalui sistem kapiler. Akibat selanjutnya adalah populasi organisme bertambah dan jika terjadi penguapan maka dapat meninggalkan garam pada permukaan yang menyebabkan bata cepat rapuh (Winarno, 2003: 1).



Foto 44, 45 : Kapilarisasi pada dinding bangunan benteng

Air merupakan agen yang paling berpotensi merusak bangunan, air merembes dan masuk ke dalam dinding bangunan oleh gaya tarik molekul melalui porositas bangunan yang biasa disebut kapilarisasi air. Kapilarisasi air pada bangunan mulanya berawal dari perembesan air baik dari bawah, dinding bangunan, hempasan air hujan yang ditiup angin maupun dari atap atau talang air yang rusak.

Bangunan terkena rembesan air dengan intensitas cukup tinggi kemudian pada waktu tertentu terkena sinar matahari secara langsung akan mengalami penggerusan hingga perekahan, jika tidak segera ditangani maka akan merusak struktur bangunan. Selain itu rembesan air juga dapat memicu pertumbuhan ganggang atau lumut, berkembangnya mikroorganisme yang merusak bangunan, apalagi kondisi bangunan yang sudah tua sehingga material bangunan pun mudah digerogeti oleh akar. Tumbuhan mikroorganisme akar yang menembus dinding bangunan ketika dicabut akan menimbulkan lubang-lubang kecil, jika proses tersebut berjalan dalam waktu cukup lama, maka sangat mungkin akan terjadinya kerusakan yang lebih parah (Akbar, 2009: 12-13). Faktor lain yang menyebabkan kerusakan adalah iklim dan material penyusun bangunan itu sendiri.

Pemintakan

a. Strategi Pemintakatan

Benteng Ujung Pandang saat ini dikepung oleh bangunan-bangunan baru yang mengakibatkan kelayakan pandangnya terganggu. Kondisi ini, merupakan sebuah ancaman terhadap eksistensi benteng sebagai warisan budaya bangsa. Keberadaannya yang “tertekan” oleh bangunan baru, menjadikan pemintakatan perlu penanganan yang komprehensif.

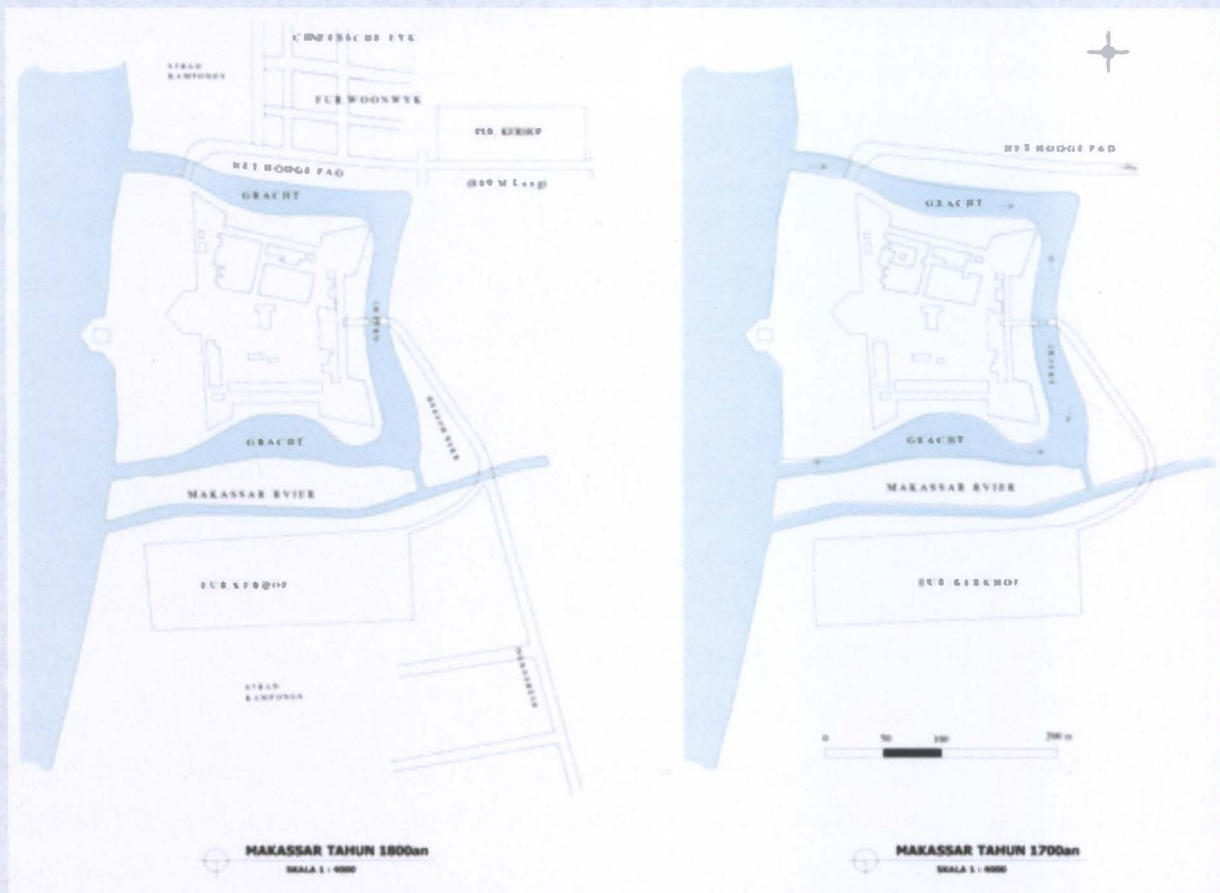
Pemintakatan yang komprehensif dilakukan untuk melindungi sekaligus mengatur peruntukan lahan di kawasan Benteng Ujung Pandang sehingga tidak menimbulkan benturan kepentingan dengan sektor lain di sekitarnya. Pemintakatan selain dilakukan untuk melindungi dan mengamankan cagar budaya, juga dimaksudkan untuk memberi ruang penyebaran pengunjung agar tidak berada di bangunan cagar budaya secara bersama-sama pada suatu saat dalam jumlah besar (Mundardjito, 2006). Pemintakatan, selain dilakukan di dalam kompleks benteng juga meliputi kawasan di luar benteng, yang memiliki nilai historis terkait dengan sejarah Kota Makassar.

Oleh karena itu, batas-batas wilayah Benteng Ujung Pandang harus diperjelas status dan keberadaannya karena akan menjadi kawasan cagar budaya yang dilindungi oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya) serta lahan yang dibutuhkan untuk pengamanannya yang ditetapkan melalui sistem pemintakatan. Pengaturan areal mintakat ini diharapkan menjadi solusi dalam menghadapi benturan antara kepentingan pelestarian dan pengembangan dengan kepentingan sektor lain.

Pada dasarnya pemintakatan merupakan suatu upaya pengamanan dan perlindungan terhadap wilayah situs yang bertujuan untuk mempertahankan kondisi kelestariannya sebagaimana yang ada saat ini (*existing condition*) agar dapat dipertahankan selama mungkin untuk selanjutnya diwariskan kepada generasi berikutnya. Penentuan wilayah dan penarikan garis batas wilayah mintakat harus didasarkan pada berbagai segi kepentingan sehingga mintakat yang ditetapkan dapat dikendalikan secara arif dan bijaksana serta memungkinkan untuk memenuhi berbagai kepentingan dan tidak merugikan pihak lain.

a. Penentuan Batas Mintakat

Penentuan batas mintakat Benteng Ujung Pandang, dilakukan dengan mengacu pada nilai-nilai arkeologis dan keaslian lingkungan masa lalu sebagai satu kesatuan pada masanya. Hal ini sesuai dengan konsep pelestarian, dimana mempertahankan keaslian situs, baik yang berhubungan dengan keaslian bahan (*material*), bentuk (*form*), tata letak (*setting*), dan teknik pengerjaan (*workmanship*) merupakan hal yang penting. Adapun lahan yang dipertahankan keasliannya adalah yang terbukti secara arkeologis mengandung cagar budaya atau hubungan keruangan yang memiliki konteks dengannya.



Gambar 18. Denah Benteng Ujung Pandang tahun 1800 (kiri) dan 1700 (kanan)

Berdasarkan data sejarah maupun hasil penelitian arkeologi yang telah dilakukan selama ini, maka batas-batas asli situs meliputi areal dalam dan luar benteng. Seperti yang ada pada denah Benteng Ujung Pandang tahun 1700 dan 1800 (lihat gambar 2), terlihat bahwa terdapat kanal yang mengelilingi benteng mulai dari sisi selatan, timur,

dan utara. Di awal abad ke-18 hingga akhir abad ke-19, keadaan politik di Kota Makassar mulai aman. Perlahan, kehidupan dalam benteng ditinggalkan dengan memindahkan beberapa unit bangunan ke luar benteng. Diantaranya membangun kediaman residen pada tahun 1885 dan Gereja Protestan Immanuel tahun 1885 di bagian timur benteng. Kediaman Residen Belanda terletak di Jl. Ahmad Yani atau sebelah utara benteng yang kini dijadikan Markas Kepolisian Kota Besar Makassar.

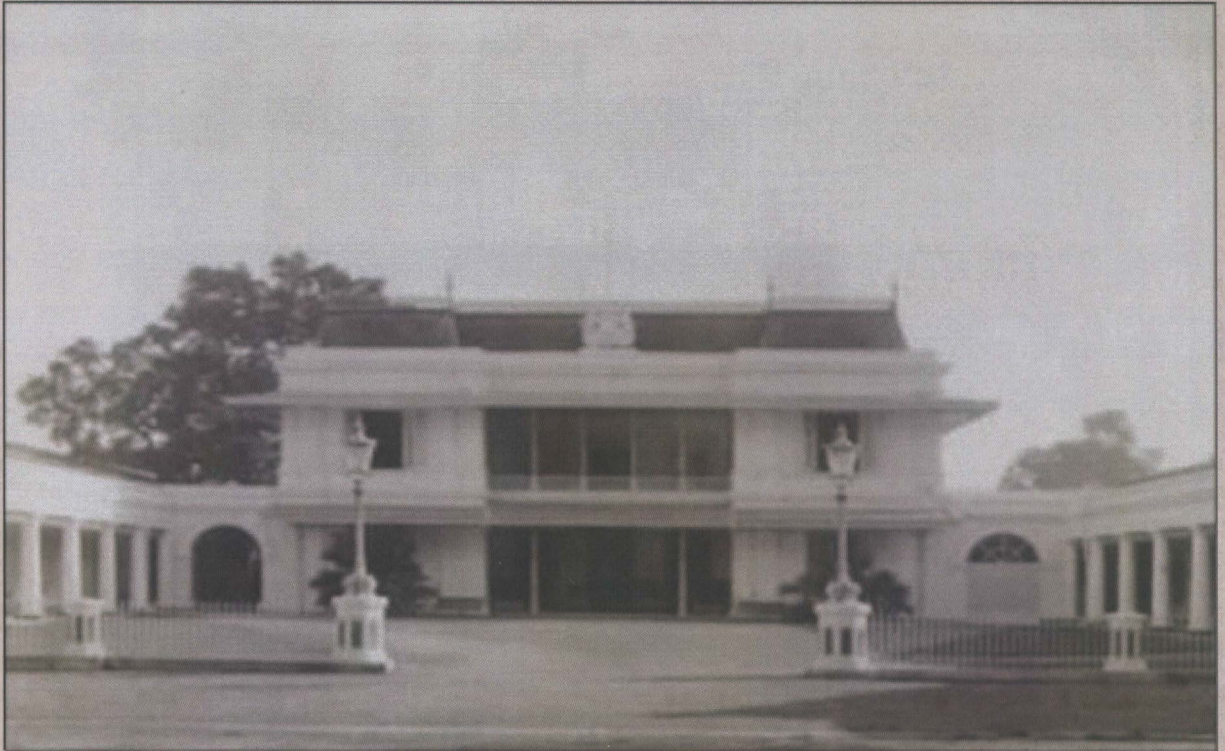


Foto 46: Tempat Kediaman Residen Makassar dan Daerah Bawahannya
di Jln. Jendral Ahmad Yani Makassar

Dengan demikian, perkembangan Kota Makassar diawali dari permukiman dalam benteng di abad ke-17, dan kemudian berkembang keluar mulai abad ke-18 hingga akhir abad ke-19. Persebaran bangunan yang mengikuti pola jalan yang ada dan terkonsentrasi di bagian utara, selatan, serta timur benteng. Oleh karena itu, Benteng Ujung Pandang memiliki nilai penting yang sangat tinggi karena menjadi awal dari pertumbuhan Kota Makassar. Termasuk juga kawasan di sekitar benteng yang merupakan kawasan kota lama yang banyak mengandung tinggalan cagar budaya.

Berdasarkan uraian di atas, maka penentuan batas mintakat Benteng Ujung Pandang juga mempertimbangan kajian arkeologis dan historis sebagai *urban heritage*. Maka, area mintakat Benteng Ujung Pandang terdiri dari mintakat inti dan mintakat pengendalian yang merupakan perpaduan dari mintakat penyangga dan mintakat pengembangan. Hal ini juga sejalan dengan konvensi internasional yang terkait dengan pelestarian kawasan budaya, di mana kelayakan pandang dan keterkaitan historis antara cagar budaya dan kawasan menjadi salah satu prasyarat dalam penentuan pemintakatan atau zonasi. Dengan pertimbangan tersebut, maka area mintakat benteng dibagi menjadi dua mintakat, yaitu mintakat inti dan mintakat pengendalian (lihat gambar dan peta pembagian mintakat Benteng Ujung Pandang).

Luas keseluruhan zona inti adalah 11,7 Ha, dengan batas mintakat sebelah barat garis pantai Selat Makassar, sebelah utara jl. Riburane, sebelah timur jl. Slamet Riady, dan sebelah selatan jl. W.R Supratman. Mintakat inti adalah zona yang batas dan luasnya mengikuti luas lahan situs itu sendiri. Oleh karena itu batas-batas situs harus terlebih dahulu ditentukan untuk dapat menetapkan lahan mintakat ini. Secara arkeologis, batas-batas situs meliputi seluruh areal yang mengandung tinggalan arkeologi baik



Gambar 19: Peta pembagian mintakat Benteng Ujung Pandang

yang ditemukan di atas maupun di bawah permukaan tanah yang dapat diketahui dengan ekskavasi, dan hal ini termasuk pula seluruh area di sekitar Benteng Ujung Pandang yang memiliki keterkaitan historis dengan sejarah Kota Makassar.

Namun demikian dalam perspektif pelestarian, hal ini tidak dapat digunakan karena situs sendiri tidak dapat dipisahkan dari kompleksitas kehidupan bermasyarakat. Pelestarian situs tidak harus menghambat keberlangsungan hidup bermasyarakat. Oleh sebab itu konsep keterkaitan historis tidak dapat dijadikan standar dalam penentuan batas-batas mintakat situs. Sebaran tinggalan arkeologi cukup kuat dijadikan sebagai aspek penentu batas situs, baik sebaran permukaan maupun sebaran yang masih terpendam di bawah permukaan tanah.

Berdasarkan data sejarah, termasuk peta dan denah lama Kota Makassar, kompleks Benteng Ujung Pandang bukan satu-satunya bangunan bersejarah di kawasan ini. Mengacu pada denah Benteng Ujung Pandang tahun 1700 dan 1800 terdapat parit yang mengelilingi benteng mulai dari bagian utara, timur, dan selatan. Kemudian, seiring perkembangan, dimana kondisi relatif aman bagi pemerintahan Belanda, maka parit yang mengelilingi benteng yang semula berfungsi untuk



Gambar 20. Peta Kota Makassar di akhir abad ke -18
(sumber: Fort Rotterdam Makassar Indonesia/Letter of intent 12.04.2006)

melindungi benteng mulai tidak difungsikan. Bahkan pada fase ini, pemerintah Belanda mulai membangun menjadi taman-taman kota dan fasilitas pemerintahan lain di luar benteng. Hal ini dapat terlihat pada Peta Kota Makassar di akhir abad ke 18 yang disertai dengan foto penunjang.

Berdasarkan uraian tersebut, jelas bahwa areal disekeliling benteng memiliki nilai sejarah yang penting dan erat kaitannya dengan keberadaan benteng. Hal ini didukung pula oleh data hasil ekskavasi yang dilakukan pada tahun 1994 di sisi barat Benteng Ujung Pandang, berhasil ditemukan struktur dan temuan lepas lainnya. Selain itu, keberadaan bangunan cagar budaya lainnya baik di kawasan Pecinan di sebelah utara, maupun kawasan di sebelah timur hingga Lapangan Karebosi serta kawasan di sebelah selatan benteng menjadi unsur penting dalam penentuan batas mintakat. Oleh karena itu, mintakat inti Benteng Ujung Pandang meliputi:

a. Zona cagar budaya I yang meliputi bangunan Benteng Ujung Pandang serta bangunan dan area dalam benteng dengan luas 2,5 ha. Saat ini, bangunan dalam kompleks Benteng Ujung Pandang dimanfaatkan oleh Museum La Galigo, Kantor Balai Pelestarian Cagar Budaya, dan Dewan Kesenian Makassar.

Zona Cagar Budaya I diperuntukan untuk kawasan konservasi cagar budaya. Dalam zona ini kegiatan yang dapat dilakukan sangat dibatasi, harus berwawasan pelestarian. Dalam tataran praktis, zona inti bisa dimanfaatkan untuk kepentingan ilmu pengetahuan maupun pariwisata, dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan dilakukan sesuai dengan peraturan penundangan yang berlaku, serta tetap memperhatikan prinsip-prinsip pelestarian. Tidak ada kegiatan lain baik fisik maupun non fisik yang dapat dilakukan dalam areal ini kecuali untuk perawatan dan pengamanan. Pembangunan fasilitas tidak dibenarkan, kecuali dalam kondisi tertentu di mana dibutuhkan sarana untuk mendukung kegiatan perawatan dan pengamanan yang tidak memungkinkan penempatannya di luar zona inti. Meskipun demikian penempatan sarana atau fasilitas tersebut tidak dibenarkan jika mengubah bentuk landscape, lingkungan, menimbulkan pencemaran, sifatnya permanen dan sulit untuk dibongkar atau dipindahtempatkan.

Rehabilitasi lingkungan dan perkuatan landscape dapat dilakukan pada keadaan tertentu dan jika tidak maka akan mengakibatkan kerusakan lebih lanjut. Tetapi kegiatan pengembangan tersebut harus diawali dengan penelitian yang komprehensif, termasuk ekskavasi arkeologi untuk menyingkap temuan yang masih terpendam dalam tanah. Dalam rangka pemanfaatannya, beberapa kegiatan yang dimungkinkan untuk dilakukan dalam areal ini antara lain pendidikan dan penelitian, serta perkunjungan umum, dengan ketentuannya masing-masing. Untuk bidang pendidikan dan penelitian dapat dilakukan dengan ketentuan tidak bertentangan dengan prinsip pelestarian, dan secara metodologis dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah. Khusus untuk kegiatan jenis ini terlebih dahulu mendapatkan izin dari instansi atau lembaga yang bertanggungjawab atas masalah pelestarian situs. Khusus pemanfaatan untuk pariwisata, termasuk pengadaan fasilitas penunjang dapat dilakukan dengan tetap mengedepankan prinsip-prinsip pelestarian. Dalam hal ini, prasarana dan sarana penunjang harus memiliki keterkaitan konteks dengan bangunan inti dari Benteng Ujung Pandang.

Hal ini dilakukan sebagai upaya mempertahankan konteks, setting dan lingkungan situs dalam keadaan yang sebenarnya. Dengan demikian diharapkan tampilan Benteng Ujung Pandang sebagai warisan budaya bangsa tetap dapat menggambarkan keadaan dan suasana lingkungan seperti pada masanya yang turut menambah nilai historis yang dikandungnya. Selain itu, diperlukan konsep manajemen kunjungan yang tepat, sehingga dampak negatif dari kunjungan wisatawan dapat dikurangi. Pada intinya, setiap kegiatan yang dilakukan di zona inti tidak mengganggu kelestarian atau menghambat kegiatan perawatan dan pengamanan situs.

b. Zona Cagar Budaya II meliputi kawasan sekitar benteng dengan batas-batas, bagian utara jl. Riburanne, di timur jl. Slamet Riady, bagian selatan jl. W R. Supratman dan barat jl. Ujung Pandang, yang diperuntukkan sebagai ruang khusus hijau dan bangunan fasilitas penunjang dengan luas 5,3 ha. Saat ini, di dalam kawasan terdapat gedung Radio Republik Indonesia (RRI), auditorium RRI dan Mesjid RRI di sebelah utara benteng. Di sebelah timur terdapat gedung perkantoran, meliputi kantor Bank Danamon, Garuda Indonesia, Bank Mandiri, Kantor Indosat. Selain itu terdapat Kantor Pos dan kios penjual benda pos serta warung kelontong. Di sebelah selatan terdapat kanal dan taman,

Gedung Universitas Veteran Republik Indonesia (UVRI), kantor Legiun Veteran Republik Indonesia Cabang Sulawesi Selatan, dan markas Pemuda Pancamarga. Selain gedung

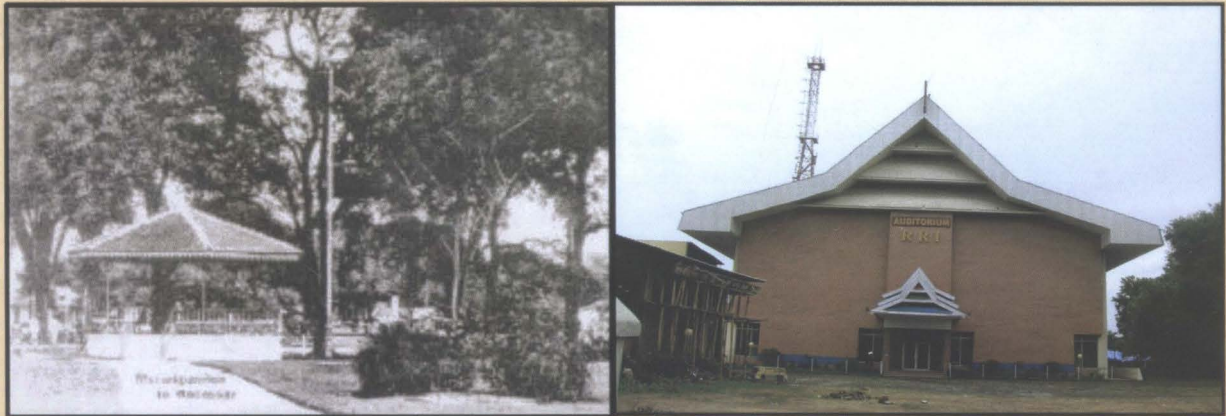


Foto 47, 48 : Repro Foto Yuliana Park (kiri) dan di lahan tersebut sekarang berdiri Gedung Radio Republik Indonesia (Sumber: Dokumentasi BPPP Makassar 2010)

Pada dasarnya, perlakuan di zona ini mengacu pada prinsip-prinsip yang diterapkan di zona cagar budaya I. Faktor yang membedakan adalah peringkat nilai penting kawasan karena kandungan nilai arkeologisnya yang berbeda. Area di zona inti pernah dijadikan sebagai taman kota yang ditandai dengan adanya Prins Hendrik Park dan Yuliana Park di sebelah utara benteng yang kini ditempati gedung RRI dan Kantor Bank Danamon.

c. Zona Cagar Budaya III meliputi area di bagian barat benteng hingga garis pantai, membujur dari utara ke selatan dengan batas gedung Money Changer La Tunrung pada bagian utara dan bangunan Zona Café di bagian selatan yang diperuntukkan sebagai ruang terbuka khusus dengan luas area 3,9 ha. Di kawasan ini, terdapat bangunan permanen yang dimiliki perorangan berupa bangunan ruko, Cafe POPSA, dermaga penyeberangan ke Pulau Kayangan, kantor Polairud, dan pedagang makanan dan minuman, dan kelontong.

Secara umum lahan ini hanya dipersiapkan bagi kegiatan pelestarian dan pengamanan dengan fokus pada usaha mempertahankan lingkungan makro. Pembangunan fasilitas yang berkaitan dengan kebutuhan pelestarian dan pengamanan diperkenankan. Namun sebagai wilayah konservasi, maka penempatan fasilitas

pendukung wisata dapat pula dilakukan secara terbatas untuk fasilitas-fasilitas standar, misalnya jalan setapak, gazebo, tempat sampah, toilet, areal parkir dan drainase. Khusus untuk fasilitas berukuran besar harus dibangun di tempat yang tidak menyolok dengan konstruksi non permanen atau semi permanen. Demikian pula dapat dilakukan penataan lingkungan, terutama dalam rangka rehabilitasi dan perkuatan lahan, bahkan perubahan bentuk landscape dimungkinkan untuk alasan mengembalikan kondisi asli atau mencegah terjadinya kerusakan lingkungan.



Gambar 21 . Peta Pembagian Mintakat Inti Benteng Ujung Pandang

2. Mintakat Pengendalian

Meliputi zona pengendalian darat dan pengendalian laut dengan luas keseluruhan 277,3 ha, dengan batas mintakat sebelah barat Pulau Laelae dan Pulau Kayangan, sebelah utara kawasan Pecinan dan jl. Ahmad Yani, sebelah timur Lapangan Karebosi, dan sebelah selatan jl. Pattimura, jl. Thamrin dan jl. Kartini. Penentuan garis batas untuk mintakat pengendalian sangat tergantung pada kondisi situs dan ancaman yang dihadapi. Kondisi situs adalah keadaan umum yang meliputi; keterawatan, tingkat kerusakan, *landscape*, dan vegetasi. Sedangkan ancaman adalah penyebab kerusakan

dan kondisi yang telah menyebabkan menurunnya kualitas situs atau keadaan lingkungan yang berpotensi menyebabkan kerusakan di masa mendatang. Perluasan permukiman juga menjadi ancaman tersendiri bagi eksistensi situs dan lingkungannya, sebab pertumbuhan populasi yang terus meningkat jelas membutuhkan lahan-lahan permukiman baru. Cakupan lahan pengendalian harus mampu berperan mempertahankan kondisi situs atau bahkan meningkatkan kemampuan bertahan situs terhadap berbagai gangguan.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka dalam menentukan luas dan batas-batas mintakat pengendalian Benteng Ujung Pandang akan menyesuaikan dengan kepentingan masyarakat maupun pembangunan di sekitar situs. Penentuan batas akan mengambil garis batas dengan referensi model kontur yang memperhitungkan masalah keutuhan dan kesatuan ruang geografis baik darat maupun laut. Dengan demikian luasan lahan pengendalian meliputi daratan maupun laut, sehingga diharapkan Benteng Ujung Pandang masih dapat ditampilkan secara utuh dengan setting lingkungan yang lengkap. Pada sudut-sudut tertentu, akan dipertimbangkan ruang-ruang pandang yang lebih lapang untuk kepentingan pemanfaatan, sekaligus menopang fungsi stabilitas lingkungan alami sebagai penanda Kota Tua Makassar.

Dengan model ini, maka pada bagian-bagian di mana luasan ruang lahan yang sangat sempit tidak mampu secara efektif meredam pengaruh dari luar, harus diperlakukan secara lebih ketat. Keberadaan lahan pengendalian ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa ancaman yang mungkin timbul lebih kecil, atau kepentingan masyarakat di sekitar situs diperkirakan tidak menimbulkan efek yang besar. Selain itu kondisi permukaan lahan dianggap lebih stabil serta vegetasi penutup lahan yang tidak membutuhkan ruang yang luas. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka mintakat pengendalian Benteng Ujung Pandang dibagi menjadi empat zona dengan masing-masing peruntukan lahan yang berbeda.

Secara keseluruhan batas-batas lahan pengendalian dapat diuraikan sebagai berikut:

a) Zona Pengendalian I meliputi wilayah Pecinan di sebelah utara benteng, yaitu kawasan Jl. Sulawesi, Jl. Jempea yang secara administratif termasuk dalam wilayah Kelurahan Ende, Patunuang, dan Melayu Baru, dengan luas area 4,1 ha. Saat ini kawasan

Pecinan menjadi salah satu objek wisata budaya di Kota Makassar, terutama saat perayaan Cap Go Meh yang dilaksanakan setiap tahun.

b) Zona pengendalian II meliputi area di sebelah timur dan sebagian di selatan benteng dengan luas area keseluruhan 17.5 ha. Batas utara jl. Ahmad Yani, batas timur Jl. Kajolalido, batas selatan jl. Usman Jaffar dan jl. Pattimura dan batas barat Taman Macan atau jl. Slamet Riady. Di kawasan ini terdapat sebaran bangunan bersejarah yang juga memiliki nilai penting terkait dengan sejarah Kota Makassar. Keberadaan bangunan baru lainnya di kawasan ini yang berpadu dengan bangunan bersejarah, menjadi pertimbangan zona pengendalian ini memakai konsep kawasan *mix use building*.



Gambar 22. Peta Pembagian Mintakat Pengendalian Benteng Ujung Pandang

c) Zona pengendalian III meliputi area Lapangan Karebosi dengan luas 10,7 ha. Batas timur jl. Sudirman, batas selatan jl. Kartini, batas barat jl. Kajaolalido dan utara jl. Ahmad Yani. Kawasan ini yang merupakan *natural landscape* dengan muatan nilai sejarah yang

penting dalam kaitannya dengan perjalanan sejarah Kota Makassar.

d) Zona pengendalian IV merupakan area pengendalian laut dengan luas 245 ha mulai dari tepi pantai membentang ke arah barat sampai Pulau Kayangan dan Pulau Laelae. Area ini menjadi penting untuk menunjang konsep *waterfront*, yaitu perpaduan antara konsep daratan dan lautan yang akan menjadi panduan dalam pengelolaan Benteng Ujung Pandang.

Penutup

Kenyataan bahwa penanganan situs dan benda cagar budaya yang ada di dalamnya masih kurang tepat dan efektif dalam pengembangan dan pemanfaatannya. Pemahaman bahwa situs merupakan salah satu sumberdaya budaya yang dapat dimanfaatkan sebagaimana layaknya sumberdaya budaya lainnya, telah membawa sebagian situs berada diambang kehancuran. Hal ini diakibatkan oleh kurangnya pemahaman pada sistem penanganan dan manajemen sumberdaya arkeologi. Sementara penanganan benda-benda arkeologi membutuhkan suatu manajemen khusus yang memperlakukan situs dan cagar budaya tersebut secara layak sesuai dengan sifatnya yang rapuh, jumlah terbatas dan tidak dapat diperbaharui.

Kelemahan pada manajemen pengelolaan sumberdaya arkeologi adalah kecenderungan untuk memperlakukan situs dan cagar budaya sebagaimana layaknya sumberdaya yang terbaharui, dengan melakukan modernisasi situs maupun temuannya yang justru menghilangkan nilai budaya dan historis yang dikandungnya. Sebuah situs atau cagar budaya memiliki nilai hanya jika masih dijumpai dalam keadaan utuh bentuknya (*form*), bahan (*material*), tata letak (*setting*), dan juga teknik pengerjaannya (*workmanship*).

Sebagai upaya mengurangi resiko kerusakan maka Balai Pelestarian Cagar Budaya Makassar telah melakukan kegiatan pemintakatan situs-situs di berbagai daerah dengan prioritas pada situs yang mengalami ancaman atau berpotensi untuk dikembangkan. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan dukungan kepada Pemerintah Daerah atau pihak terkait dengan kepentingan terhadap pemanfaatan situs agar dapat melakukan pengembangan dan pemanfaatan secara proposional dan terkendali

dengan tetap mengedepankan pelestarian terhadap objek cagar budaya dan lingkungannya. Penetapan batas-batas mintakat beserta pengaturan pemanfaatan dan perlakuan masing-masing mintakat diharapkan dapat menjadi solusi untuk mengurangi kemungkinan perlakuan yang bertentangan dengan prinsip pelestarian.

Iswadi, SS., Yadi Mulyadi, SS, MA

B. Konservasi dan Zonasi Benteng Somba Opu

Areal Benteng Somba Opu secara administratif berada dalam tiga dusun/kampung, yakni Dusun Pattung (untuk sisi selatan dan timur), Kampung Sapiria (sisi utara), dan Kampung Sarombe (bagian barat) Kelurahan Benteng Somba Opu Kecamatan Barombong Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan. Secara astronomis benteng ini terletak pada $05^{\circ} 11' 18.84''$ LS- $05^{\circ} 29' 29.67''$ LS dan $119^{\circ} 24' 06.54''$ BT- $119^{\circ} 24' 27.68''$ BT. Terletak diantara dua sungai, yaitu Sungai Balang Beru yang mengalir di selatannya dan Sungai Jeneberang di sebelah utara.



Foto 49 : Foto udara Benteng Somba Opu dari Peta Citra Google (2010)

Tinggalan di Benteng Somba Opu yang kini masih tersisa adalah dinding benteng dan struktur bangunan lainnya. Luas benteng adalah 113.590 m^2 (11,36 ha). Ketinggian dinding diperkirakan mencapai 7 m (sisi barat), sedangkan tebal dinding bervariasi antara $3,66 \square 4,10$ m hingga $10,3 \square 10,5$ m. Pintu utama terletak di bagian barat dan sisi selatan, dengan ukuran (lebar) sekitar 4,5 m dan tinggi 4 m. Pada gambar dan

peta lama benteng dilukiskan sebagai berbentuk persegi namun, sisa-sisa yang masih tampak pada saat ini menunjukkan bentuk yang agak berbeda. Hampir separuh bagian utara benteng tidak ditemukan lagi. Sementara pada sisi selatan yang menghadap Sungai Balang Beru, temboknya tidak lurus. Bagian tengah benteng menjorok lebih keluar.

Dinding benteng pada umumnya terbuat dari susunan bata yang dipasang horizontal. Struktur dinding yang tebal dibuat dengan sistem sandwich. Kedua sisi luar dipasang bata sejajar sedangkan celah antara keduanya diisi dengan tanah dan remukan bata. Namun, pada bagian-bagian tertentu terdapat struktur dari batu padas.

Setelah mengalami keruntuhan karena serangan Belanda pada akhir abad ke-17 benteng ini mulai ditinggalkan dan akhirnya tidak digunakan lagi. Lebih dari tiga abad sisa-sisa benteng tidak terawat dan terkubur dalam tanah. Namun, sejak dasawarsa 1980-an, reruntuhan Benteng Somba Opu mulai mendapat perhatian yang serius dari para ahli sejarah dan arkeologi. Sejumlah penelitian arkeologis dilakukan baik melalui pengamatan, survei, maupun ekskavasi. Hasil-hasil penelitian itu semakin mengungkapkan pentingnya Benteng Somba Opu sebagai warisan budaya yang harus dilestarikan. Setelah melalui kajian dan penggalian penyelamatan pada awal tahun 1990-an, Kompleks Benteng Somba Opu dikembangkan menjadi Taman Miniatur Sulawesi (TMS). Sejumlah bangunan berarsitektur tradisional Sulawesi Selatan didirikan sebagai upaya untuk meningkatkan apresiasi terhadap warisan budaya daerah ini. Sejalan dengan perkembangan waktu, TMS secara perlahan makin tidak mendapat perhatian dari masyarakat.

Meskipun demikian, Benteng Somba Opu tetap diakui sebagai tinggalan sejarah yang mempunyai nilai-nilai penting. Karena itu, benteng telah didaftar sebagai Situs Cagar Budaya dengan nomor inventaris 113 dan telah ditetapkan sebagai Objek Vital Nasional berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Republik Indonesia No. PM.19/UM.101/MKP/2009 dan sebagai Kawasan Taman Wisata Budaya berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan No. 9 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2009-2024.

Gambaran temuan dibagi berdasarkan lokasi temuan yakni di sisi barat, selatan dan timur benteng. Pada sisi barat terdapat dinding yang memanjang dari utara ke

selatan, terbagi oleh sebuah gerbang. Dinding barat bagian selatan berukuran panjang 62,7 meter, lebar 10,20 meter dan tinggi 3,20 meter. Dinding barat bagian utara berukuran panjang 85,50 meter, lebar 10,3 meter dan tinggi 3,20 meter. Pintu gerbang bagian barat benteng berukuran lebar 3,70 meter. Selain dinding dan pintu pada sisi barat terdapat pula struktur yang melengkung, membentuk setengah lingkaran dengan ukuran lebar 3,04 meter dan tinggi 1,46 meter. Jarak antara kedua ujung lengkungan adalah 11,30 meter, dan jarak antara dinding benteng dengan lengkungan adalah 5,17 meter.

Bastion Maccini Sombala pada sudut barat daya memiliki ukuran tinggi 4,8 meter dengan diameter 18,80 meter. Jika dijumlahkan berdasarkan ukuran dinding yang ada maka sisi ini memiliki panjang 148,2 meter. Selain temuan struktur dinding yang berdasarkan pengukuran yang detil diperoleh ketebalan 3 meter (Muttalib, 1989: 8). Lokasi struktur ini yang oleh masyarakat disebut dengan pa'banderang berada pada azimuth $96,48^{\circ}$ keluar dari Bastion Maccini Sombala.



Foto 50: Struktur dinding benteng bagian barat

Pada dinding selatan benteng terdapat struktur yang masih terpendam di bawah permukaan tanah. Hal ini menunjukkan bahwa bagian ini belum pernah dipugar. Untuk memudahkan maka dinding selatan ini akan dibagi menjadi lima bagian yang diurut dari

barat ke timur. Bagian 1; merupakan dinding benteng selatan bagian barat yang menyambung dengan Bastion Maccini Sombala, memiliki ukuran panjang 32 meter, lebar 3,40. Bagian 2; merupakan struktur dengan bentuk melengkung, panjang 11 meter, lebar 3,67 meter, dan tinggi 1,20 meter. Bagian 3; merupakan struktur yang berada di bawah jembatan dekat Museum Situs Karaeng Pattingalloang dengan ukuran panjang keseluruhan 88,5 meter, lebar 3,65 meter, tinggi 0,85 meter. Bagian 4; merupakan struktur dengan ukuran panjang 9,5 meter, lebar 3,60 meter, tinggi 1,17 meter. Bagian 5; struktur melengkung dengan panjang 17 meter, lebar 3,65, dan tinggi 0,99 m. Secara keseluruhan panjang dinding yang tampak pada sisi bagian selatan adalah 141,0 meter.



Foto 51 : Struktur dinding benteng bagian selatan

Dinding benteng bagian timur memiliki ketinggian yang berbeda dengan dinding yang lainnya. Dinding berukuran panjang (diukur hingga pinggir jembatan bagian utara) 184,90 m, lebar 3,65 meter dengan tinggi dinding bagian selatan 2,22 meter, sementara tinggi dinding bagian utara 1,49 meter. Dinding sebelah timur bagian utara berukuran panjang 17 meter, lebar 3,70 meter, dan tinggi 0,87 meter. Keseluruhan panjang dinding sisi timur adalah 201,90 meter.



Gambar 23 : Lokasi ekskavasi dan pengukuran geolistrik di Benteng Somba Opu (2011)

Secara keseluruhan berdasarkan hasil ekaskavasi yang dilakukan oleh Tim dari Kantor Suaka Peninggalan Sejarah dan Purbakala (SPSP Sulselra, kini Balai Pelestarian Cagar Budaya Makassar, BPCB) pada tahun 1987, 1989 dan 1992 diperoleh data ukuran batu padas bervariasi dari yang paling kecil, panjang 56 cm dan lebar 29 cm dengan ketebalan 18 cm. Batu padas paling besar berukuran panjang 91 cm, lebar 41 cm dan ketebalan 22 cm. Sementara bata yang digunakan paling kecil berukuran 22 cm dan lebar 12 cm serta tebal 3 cm. Bata besar berukuran panjang 33 cm, lebar 22 cm dan tebal 4 cm. Bentuk dan ukuran celah yang ada pada kaki dinding benteng bagian atas berukuran 2,65 cm, tinggi 46 cm, lebar 42 cm dengan kedalaman 56 cm.



Foto 52 : Struktur dinding Benteng Somba Opu bagian timur

Nilai Penting Benteng Somba Opu

Sesuai Undang-undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, warisan budaya harus dilestarikan apabila memiliki nilai penting bagi ilmu pengetahuan, sejarah, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan. Berdasarkan hasil kajian yang sejauh ini telah dilakukan, Benteng Somba Opu ternyata mempunyai nilai penting yang tinggi bagi ilmu pengetahuan, sejarah, jatidiri komunitas, maupun publik.

Nilai Penting Ilmu Pengetahuan. Benteng Somba Opu terbukti telah menumbuhkan minat bagi para ahli di bidang ilmu arkeologi dan sejarah. Minat ini ditunjukkan dari sejumlah penelitian yang sudah dilakukan oleh sejumlah sarjana dari dalam maupun luar negeri. Sejumlah tulisan ilmiah telah dihasilkan, diterbitkan, dan dibahas dalam berbagai forum ilmu pengetahuan di tingkat nasional dan internasional. Hal ini menunjukkan situs Benteng Somba Opu dapat menjadi sumber informasi untuk pengujian maupun pengungkapan sejarah terutama pada masa proses interaksi budaya Nusantara dengan Barat. Selain itu, hingga kini situs ini juga masih terus menjadi tempat penelitian bagi kajian ilmu arkeologi dan sejarah, serta praktek penelitian mahasiswa. Penelitian juga telah membuktikan bahwa situs ini dapat menyediakan informasi yang cukup menarik untuk merekonstruksi kemampuan teknologi rekayasa (engineering), khususnya bangunan pertahanan. Struktur dan artefak yang ditemukan di situs ini dapat

menunjukkan tahap-tahap perkembangan teknologi konstruksi bangunan benteng tradisional, yang merupakan salah satu khasanah pengetahuan bangsa (*ethno-science*).

Nilai Penting Sejarah. Situs Benteng Somba Opu telah menunjukkan perannya yang besar dalam perjalanan sejarah Sulawesi Selatan maupun Indonesia pada umumnya. Banyak peristiwa sejarah yang telah terjadi di situs ini merupakan tonggak yang ikut menentukan sejarah kawasan Sulawesi. Situs Somba Opu menjadi saksi kegigihan perjuangan mempertahankan kemerdekaan dan kebebasan dari penjajahan. Bahkan, tokoh-tokoh yang terlibat dalam peristiwa sejarah di sini, yaitu Sultan Hasanuddin, telah ditetapkan sebagai pahlawan nasional. Hal ini merupakan suatu penghargaan yang tinggi bagi perjuangannya. Di samping itu, situs Somba Opu mempunyai nilai penting bagi sejarah perkembangan Makassar dan perannya dalam jaringan perdagangan global.

Nilai Penting Jatidiri. Karena perannya dalam sejarah, Situs Somba Opu dapat menjadi bagian dari identitas atau jatidiri masyarakat Makassar. Somba Opu adalah lambang persatuan orang Makassar. Karena itu, Belanda berusaha sekuat tenaga menghancurkan Somba Opu untuk melemahkan semangat orang Makassar. Benteng ini juga menjadi kebanggaan orang Makassar karena dapat menjadi bukti semangat kejuangan dalam mempertahankan kemerdekaan. Semangat dan kejuangan ini diakui secara nasional sebagai salah satu bukti keteguhan bangsa Indonesia menentang penjajahan. Benteng Somba Opu dapat menjadi kebanggaan karena dapat menunjukkan kemampuan teknologi bangunan pertahanan tradisional yang tidak banyak ditemukan di tempat lain di Indonesia.

Nilai Penting Publik. Nilai-nilai penting yang dikandung Benteng Somba Opu dapat menumbuhkan nilai penting potensial tinggalan sejarah ini. Benteng mempunyai nilai penting bagi publik karena dapat dijadikan sarana pendidikan masyarakat, khususnya untuk menumbuhkan nilai keteladanan, semangat kejuangan, dan sikap merdeka. Selain itu, benteng ini juga mempunyai nilai penting bagi pariwisata sejarah dan pendidikan. Nilai penting potensial ini dapat digarap dengan baik melalui penyajian yang menarik dan edukatif.

Nilai-nilai penting Benteng Somba Opu inilah yang harus dilestarikan dan disajikan kepada masyarakat melalui keberadaan bukti-bukti fisik (*tangible*). Dengan

demikian, masyarakat tidak hanya “mendengar kisah” tentang nilai-nilai pentingnya, tetapi juga dapat menyaksikan dan menyentuh tinggalan-tinggalan sejarah dan budaya yang nyata tersebut.

Hakekat Pelestarian

Pada dasarnya, kegiatan pelestarian merupakan suatu proses budaya yang hampir selalu dilakukan oleh manusia, baik secara pribadi maupun sebagai anggota komunitas tertentu. Upaya pelestarian muncul karena dorongan manusia untuk mempertahankan milik atau unsur budaya yang dianggap masih memiliki nilai tertentu dalam kehidupan. Karena itu, pada hakekatnya pelestarian adalah upaya agar suatu karya budaya (baik itu berupa gagasan, tindakan atau perilaku, maupun budaya bendawi) berada dalam sistem budaya yang masih berlaku. Seringkali, karya budaya yang hendak dilestarikan pernah terbuang atau ditinggalkan, tetapi kemudian ditemukan kembali. Selanjutnya, karena nilai-nilai karya budaya itu dianggap penting maka karya budaya itu dimasukkan kembali dalam sistem budaya yang berlaku saat ini. Proses pelestarian karya budaya yang pernah hilang atau hampir hilang untuk dimanfaatkan kembali dalam konteks budaya saat ini seringkali disebut sebagai revitalisasi.

Pelestarian seringkali menimbulkan masalah karena adanya pandangan yang mempertentangkan antara pelestarian dan pembangunan. Seolah pelestarian selalu menghambat dan menghalangi pembangunan atau pengembangan suatu area yang mengandung tinggalan cagar budaya. Sesungguhnya proses pelestarian dan pembangunan harus dapat berjalan searah dan bahkan saling mendukung. Situasi sinergis ini akan terjadi apabila perencanaan pelestarian dan pengembangan di area yang mengandung cagar budaya dapat dilakukan secara terpadu dan terkoordinasikan. Bahkan, pembangunan dan pengembangan area dapat menjadi faktor pendukung penyajian dan pelestarian nilai-nilai penting dari cagar budaya yang ada di sekitarnya.

Sehubungan dengan hal itu, maka kajian nilai penting merupakan keharusan bagi setiap upaya pelestarian. Kajian ini harus menemukan dan menentukan nilai penting apa saja yang dikandung oleh cagar budaya yang hendak dilestarikan. Hasil kajian nilai penting akan menentukan apakah suatu karya budaya harus dilestarikan dan bagaimana cara-cara pelestariannya. Dengan mengetahui nilai penting yang ada, dapat

ditentukan kebijakan pelestarian yang dapat diterapkan terhadap karya budaya yang dimaksud.

Perlu dipahami pula bahwa pelestarian tidak hanya berorientasi masa lampau. Sebaliknya, pelestarian harus berwawasan ke masa kini dan masa depan, karena nilai-nilai penting itu sendiri diperuntukkan bagi kepentingan masa kini dan masa depan. Dari aspek pemanfaatan cagar budaya, tujuan pelestarian dapat diarahkan untuk mencapai nilai manfaat (*use value*), nilai pilihan (*optional value*), dan nilai keberadaan (*existence value*). Nilai manfaat lebih mengutamakan pemanfaatannya pada saat ini, baik untuk ilmu pengetahuan, sejarah, agama, jatidiri, kebudayaan, maupun ekonomi melalui pariwisata yang keuntungannya (*benefit*) dapat dirasakan oleh generasi saat ini. Nilai pilihan mengasumsikan cagar budaya adalah simpanan untuk generasi mendatang, sehingga cagar budaya dilestarikan demi generasi mendatang. Karena itu, pilihan pemanfaatannya diserahkan kepada generasi mendatang dan generasi saat ini bertugas menjaga stabilitasnya agar cagar budaya tidak akan mengalami perubahan sama sekali. Nilai keberadaan lebih mengutamakan pelestarian yang bertujuan untuk memastikan bahwa karya budaya akan dapat bertahan (*survive*) atau tetap ada (*exist*), walaupun tidak merasakan manfaatnya.

Berdasarkan kerangka pikir itu, maka pelestarian memiliki dua aspek utama. Pertama, pelestarian terhadap nilai budaya dari masa lampau, nilai penting yang ada saat ini, maupun nilai penting potensial untuk masa mendatang. Kedua, pelestarian terhadap bukti bendawi yang mampu menjamin agar nilai-nilai penting masa lampau, masa kini, maupun masa mendatang dapat diapresiasi oleh masyarakat.

Pelaksanaan Pelestarian

Sebagaimana yang telah dikemukakan bahwa pelestarian tidak hanya dilakukan terhadap bukti bendawi (fisik) yang ada, tetapi juga nilai-nilai penting yang terkandung di dalamnya. Agar kedua hal tersebut dapat tercapai maka pelestarian bukti bendawi harus dapat dipertahankan, karena tanpa bukti bendawi nilai-nilai penting yang ada hanya akan menjadi wacana saja atau bahkan dapat dianggap sebagai 'dongeng' atau 'legenda' belaka. Untuk menjamin agar bukti-bukti bendawi dapat merepresentasikan nilai-nilai, bukti-bukti itu harus terjaga kondisinya. Dua aspek fisik yang harus dapat

dipertahankan kondisinya adalah keaslian (*authenticity*) dan keutuhan (*integrity*).

Untuk mempertahankan keaslian, dapat dilakukan upaya-upaya mempertahankan unsur-unsur berikut ini; (a) bentuk dan rancangan (desain), (b) bahan, (c) kegunaan dan fungsi, (d) tradisi, teknik, dan sistem manajemen, (e) lokasi dan latar lingkungan, (f) bahasa dan warisan budaya tak-bendawi lainnya, dan (g) semangat dan perasaan yang melingkupinya. Sementara itu, untuk memenuhi kondisi keutuhan atau keterpaduan unsur, maka pelestarian harus mampu mempertahankan unsur-unsur karya budaya yang ada dalam keadaan cukup lengkap sedemikian rupa sehingga masih mampu memberikan gambaran yang utuh tentang cagar budaya yang ada dan mencerminkan nilai-nilai penting yang dikandungnya.

Dalam rangka mencapai tujuan pelestarian dari suatu karya budaya, maka ada tahap-tahap persiapan maupun pelaksanaan pelestarian. Tahap-tahap yang umumnya dilakukan adalah sebagai berikut; (1) meneliti dan mengungkapkan nilai-nilai penting cagar budaya, (2) melindungi sebagian atau seluruh cagar budaya agar dapat bertahan lebih lama, (3) sedapat mungkin menghambat kerusakan atau merosotnya nilai-nilai pentingnya, (4) menyajikan nilai-nilai penting cagar budaya agar dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas. Presentasi atau penyajian nilai penting itu kepada masyarakat seringkali menjadi masalah dalam pelestarian. Kurangnya informasi tentang nilai penting dibalik benda-benda budaya mengakibatkan masyarakat tidak dapat merasakan manfaatnya. Pada gilirannya, mereka seringkali melihat upaya pelestarian hanya untuk kepentingan sekelompok masyarakat saja. Karena itu, pelestarian yang bermanfaat menekankan perlunya penyajian nilai-nilai penting ini.

Upaya pelestarian dapat dilaksanakan dalam tiga kegiatan utama, yaitu perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan. Perlindungan dimaksudkan untuk mencegah agar cagar budaya tidak mengalami kerusakan dan kehancuran serta kehilangan selamanya. Pengembangan dapat diartikan sebagai upaya untuk menjaga kualitas penampilan cagar budaya agar dapat difungsikan terus seperti fungsi semula atau untuk fungsi lain yang sesuai dengan ketentuan undang-undang. Pemanfaatan, memberikan kegunaan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, baik untuk pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan, ekonomi, maupun kebudayaan di masa kini dan mendatang.

1. Zona inti

Merupakan area yang memberikan perlindungan utama pada bagian terpenting cagar budaya, yaitu situs dan lingkungannya. Batas zona inti ditetapkan sesuai batas asli situs yang ditentukan berdasarkan sisa dinding benteng yang masih ada. Juga berdasarkan sebaran temuan struktur bata baik yang berada di luar maupun di dalam dinding benteng. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh F. David Bulbeck pada tahun 1985, dapat diketahui bahwa Benteng Somba Opu pada saat itu sudah dapat diidentifikasi bentuk dan strukturnya sebagaimana yang terlihat sekarang ini meskipun masih berupa gundukan tanah dengan singkapan struktur bata di beberapa tempat. Selain struktur bangunan, di sebelah barat dinding ditemukan pula struktur lain yang disebut "pa'benderang" dan struktur bata sisa jalur dinding yang dibangun sepanjang Barombong hingga Tallo.

Hasil interpretasi data sejarah (peta kuno atau litografi) menunjukkan bentuk utuh dan luas Benteng Somba Opu yang dibuktikan melalui survei lapangan, terutama untuk mengetahui keletakan seluruh dinding utara, sebagian dinding barat, dan sebagian dinding timur. Peta yang dibuat oleh Arend de Roever dan Bea Brommer menunjukkan bahwa Benteng Somba Opu berbentuk segi empat bujursangkar yang dilengkapi bastion di keempat sudutnya dengan arah hadap ke barat atau ke arah laut, diapit oleh Sungai Balang Beru di sebelah selatan dan Sungai Jeneberang di utara. Dinding bagian barat dilengkapi dengan dua bastion lain yang ditempatkan dalam jarak yang hampir sama. Pengamatan lapangan yang dilakukan pada 5 dan 6 Januari 2010 diketahui bahwa sisa dinding barat benteng berukuran panjang 148,2 meter memiliki satu bastion lain disamping bastion sudut.

Jika mengacu pada peta-peta litografi, sebagaimana telah disebutkan di atas, diketahui bahwa bastion ini merupakan salah satu dari dua bastion lain yang ditempatkan pada jarak yang hampir sama. Dengan demikian, dapat diperkirakan bahwa ukuran keseluruhan dinding barat Benteng Somba Opu, sekitar dua kali panjang sisa dinding sekarang atau memiliki panjang 296,4 meter. Demikian pula halnya dengan panjang dinding timur, yaitu sekitar 201,90 meter. Oleh karena itu, berdasarkan panjang dinding barat dan dinding timur, dapat disimpulkan keletakan dinding utara berjarak 296,4 meter dari dinding selatan, dan sekaligus merupakan batas situs Benteng Somba Opu.

Dasar lain penentuan zona inti didasarkan atas gejala georafis yang masih dapat diamati di lapangan, yaitu bekas sungai yang pernah mengalir dari timur ke barat di bagian utara benteng. Batas zona inti juga ditentukan berdasarkan kebutuhan ruang di sekitar situs untuk kepentingan pemeliharaan, misalnya menghindari penetrasi akar pohon dan untuk kepentingan pengamanan dari aktifitas yang terdapat di zona penyangga, misalnya gangguan dari hewan ternak dan masyarakat sekitar benteng. Termasuk kebutuhan ruang pandang terhadap Benteng Somba Opu secara keseluruhan untuk menampilkan nilai penting. Batas zona inti juga ditentukan oleh ruang pandang yang dihitung dari jarak pandang minimal terhadap titik tertinggi bagian atau komponen tertinggi Benteng Somba Opu, yaitu tinggi bastion sudut tenggara benteng, 4,8 meter, dengan sudut 45 derajat. Zona inti Benteng Somba Opu menempati area seluas 15,127 ha dengan batas-batas sebagai berikut: sebelah utara, bekas aliran sungai yang telah dimanfaatkan menjadi sawah oleh masyarakat. Sebelah barat: sawah dan permukiman penduduk Kelurahan Somba Opu, di selatan, yakni tepi sungai Jeneberang, dan di bagian timur berupa sawah dan lahan kosong.

2. Zona Penyangga

Merupakan area yang mengelilingi zona inti dan berfungsi untuk menyangga dan melindungi zona inti. Batas zona penyangga ditentukan berdasarkan batas alam/geografis, yaitu tepian bagian selatan sungai Balang Beru yang sekaligus juga batas cagar budaya, karena pada kegiatan survei arkeologis tahun 1986, ditemukan sisa struktur bangunan yang masih di tempat aslinya (*intact*) di dasar sungai dan di tepian selatan Sungai Balang Beru. Batas pemilikan/penguasaan ruang dalam hal ini sawah dan permukiman di bagian utara dan barat benteng. Batas yang ditetapkan berdasarkan kebutuhan perlindungan dan ruang pandang horizontal di sebelah timur, yang ditetapkan berjarak 100 meter dari batas zona inti. Di bagian utara, batas zona penyangga ditentukan berdasarkan distribusi temuan arkeologis hasil ekskavasi tahun 1991, yaitu berjarak sekitar 50 meter dari batas zona inti.

Zona penyangga menempati area seluas 39,425 ha dengan batas-batas sebagai berikut: sebelah utara dengan zona pengembangan; barat dengan sawah, permukiman, dan zona pengembangan. Di sebelah selatan berbatasan dengan tepian Sungai Balang Beru dan zona pengembangan. Sedangkan di timur berbatasan dengan zona pengembangan dan badan Sungai Jeneberang.

3. Zona Pengembangan

Merupakan area yang berfungsi untuk peningkatan potensi cagar budaya bagi kepentingan rekreasi, daerah konservasi lingkungan alam, lanskap budaya, kehidupan budaya tradisional, keagamaan, dan kepariwisataan. Zona pengembangan sangat berkaitan dengan tujuan pemanfaatan cagar budaya untuk kepentingan agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, dan pariwisata.



Gambar 24: Skema pengendalian Benteng Somba Opu

Seluruh aktivitas di zona pengembangan sebagai cagar budaya harus diutamakan untuk menampilkan atau menyampaikan nilai-nilai pentingnya untuk meningkatkan apresiasi publik. Batas-batas zona pengembangan ditentukan berdasarkan batas budaya dan batas yang ditetapkan sesuai kebutuhan untuk pelestarian. Oleh karena itu zona pengembangan di bagian selatan situs Benteng Somba Opu ditentukan mengikuti jalan dan sisa-sisa Benteng Garassi.

Selain itu, zona pengembangan di sebelah barat juga berfungsi sebagai area untuk menahan laju pembangunan perumahan dan pengembangan kawasan Tanjung Bunga yang arah perkembangannya ke timur (menuju Benteng Somba Opu).

Zona pengembangan terletak di dua tempat, yaitu di sebelah selatan zona penyangga, di seberang Sungai Garassi seluas 14,717 ha, di sekeliling zona penyangga (sebelah timur, utara, dan barat) seluas 35,922 ha, dan satu lokasi lainnya terpisah diantara zona penunjang yang terletak di sebelah timur laut zona penyangga seluas 2,363 ha. Secara keseluruhan luas zona ini adalah 53,002 ha. Batas-batas zona pengembangan adalah sebagai berikut: sebelah utara dan barat berbatasan dengan Kabupaten Gowa, selatan dan timur dengan Kampung Garassi dan Sungai Jeneberang.

4 Zona Penunjang

Merupakan area yang diperuntukan bagi sarana dan prasarana penunjang serta untuk kegiatan komersial dan rekreasi umum. Batas-batas zona ini ditentukan berdasarkan batas tata guna lahan dan batas kepemilikan/penguasaan lahan, serta permukiman penduduk di bagian utara dan timur, berjarak sekitar 250 hingga 400 meter dari benteng. Selain itu, batas zona penunjang ditentukan berdasarkan batas geografis, yaitu tepian selatan Sungai Jeneberang dan tepi sebelah utara Sungai Balang Beru. Seluruh areal zona penunjang berada di luar batas zona pengembangan, kecuali satu lokasi di sebelah utara, zona penunjang dikelilingi area zona pengembangan.

Secara keseluruhan luas zona penunjang adalah 32,051 ha, dengan batas-batas sebagai berikut: sebelah utara berbatasan dengan zona pengembangan, batas kabupaten/kota, dan Sungai Jeneberang. Sebelah barat dan selatan berbatasan dengan zona pengembangan dan permukiman, sedangkan di timur berbatasan dengan Sungai Jeneberang.

Penutup

Berdasarkan hasil kajian zonasi maka lokasi *waterboom* harus direlokasi ke zona penunjang, ke arah timur dari lokasi sekarang (lihat peta zonasi Situs Benteng Somba Opu). Taman Burung yang bertujuan untuk pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan dapat ditempatkan di zona pengembangan yang terletak di sebelah timur Benteng Somba Opu, dengan syarat harus memperhatikan keletakan, ketinggian, dan jarak dengan zona inti situs Benteng Somba Opu. Sarana *tree top* dapat berada di zona inti dengan mengikuti ketentuan dan aturan yang berlaku pada zona inti. Sarana dan prasarana wisata dan sarana pendukung lainnya harus ditempatkan pada zona penunjang. Beberapa hal yang menjadi bagian penting dari rekomendasi perlu pula disampaikan kepada berbagai pihak pemangku kepentingan bahwa setiap rencana pelestarian (perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan) situs Benteng Somba Opu harus mengacu pada sistem zonasi yang telah ditetapkan. Perlu kajian interdisiplin untuk pembuatan detil teknis zonasi Benteng Somba Opu, serta menempatkan tanda (tonggak/patok) sebagai batas zonasi. Perlu sosialisasi dan pengembangan program dan kegiatan pelestarian yang bersifat edukatif dan rekreatif kepada masyarakat, khususnya masyarakat sekitar Benteng Somba Opu.

DAFTAR PUSTAKA

Andaya, Leonard Y. 2004. *Warisan Arung Palakka*. Innawa. Makassar

Anonim, 1987. *Penggalian Penyelamatan Benteng Somba Opu*. Suaka Peninggalan Sejarah dan Purbakala Sulawesi Selatan. Ujung Pandang.

....., 1992. *Ekskavasi Penyelamatan dan Rekonstruksi Dinding Barat Benteng Somba Opu Kabupaten Gowa*. Suaka Peninggalan Sejarah dan Purbakala Sulawesi Selatan dan Tenggara Bekerjasama Dengan Proyek Persiapan Pembangunan Miniatur Sulawesi Pemda Tingkat I Propinsi Sulawesi Selatan. Ujung Pandang.

....., 1995. *Pengupasan/Penyelamatan dan Rekonstruksi Benteng Somba Opu Sebagai Pusat Kerajaan Gowa*. Suaka Peninggalan Sejarah dan Purbakala Propinsi Sulawesi Selatan dan Tenggara. Ujung Pandang.

Bulbeck, Francis David. 1986. *The South Sulawesi Historic And Prehistorical Archaeology Project*. Australian National University

....., 1992. *A Tale Of Two Kingdom The Historical Archaeology of Gowa and Tallok, South Sulawesi, Indonesia*. **Thesis**. Australian National University. Australia.

Muttalib, Abdul, 1989. *Benteng Somba Opu Suatu Kajian Tentang Arkeologi* (makalah dalam simposium kesejarahan bertopik "Benteng Somba Opu dan Islam" yang dilaksanakan dalam rangka Milad XXII Fakultas Adab IAIN Alauddin Ujung Pandang). Ujung Pandang.

Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata. PM.19/UM.101/MKP/2009, tentang objek vital nasional.

Peta Citra Google, 2010

Peta Rupa Bumi. Edisi Tahun 1991. Bakosurtanal

Rasyid, Darwis. 1983. *Benteng-benteng Pertahanan Kerajaan Gowa*. **Skripsi**. Universitas Hasanuddin. Makassar

Robinson, Kathryn and Mukhlis Paeni. Editor. 1998. *Living Through Histories Culture History and Social Life In South Sulawesi*. Canberra.

Roever, Arend de and Bea Brommer. *Grote Atlas van de Verenigde Oost-Indische Compagnie Comprehensive Atlas of The Dutch United East India Company*. Indische Archipel En Oceanie/ Malay Archipelago and Oceania.

UU No.11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya

Rustan, SS., Iswadi, SS., Supriadi, SS, MA

C. Konservasi dan Zonasi Benteng Sanrobone

Identifikasi dan Keletakan Benteng

Benteng Sanrobone merupakan salah satu dari 14 benteng pertahanan Kerajaan Gowa yang mulai dibangun pada tahun 1510, terletak di Desa Sanrobone Kabupaten Takalar. Benteng menempati areal yang tersebar di tiga dusun dari lima dusun yang ada, yaitu Dusun Kassuarrang, Dusun Salekowa dan Dusun Sanrobone, berada sekitar ± 12 km dari jalan poros Takalar-Makassar. Letak astronomisnya adalah $5^{\circ} 26' 43''$ LS dan $119^{\circ} 23' 32''$ BT dengan ketinggian 5-10 meter dpl. Untuk mencapai benteng ini dapat mempergunakan kendaraan roda dua dan empat melalui Desa Paririsi menuju ke Kampung Pattalassang.

Berdasarkan hasil penelusuran struktur yang masih dapat diidentifikasi, bahwa Benteng Sanrobone berbentuk segi empat memanjang dari utara ke selatan dengan luas keseluruhan 37.240 meter dan panjang dinding sekitar 2.200 m. Tebal dinding rata-rata 4,45 meter, tinggi dinding yang tersisa bervariasi mulai dari ± 1 sampai 4 meter. Bahan penyusun benteng terdiri atas tanah liat dan bata yang tidak menggunakan perekat (spesi). Jika mengacu pada keletakannya, maka bangunan awal benteng adalah gundukan tanah liat, karena berada di bawah struktur bata. Bata-bata tersebut diletakkan sesuai kontur tanah dengan teknik susunan yang apik. Bata yang dipergunakan ukurannya bervariasi terdiri atas; (1). Panjang 27 cm lebar 15 cm tebal 3 cm, (2). Panjang 26 cm, lebar 25 cm, tebal 5,5 cm, (3). Panjang 24 cm, lebar 5,5 cm, dan tebal 3 cm, (4). Panjang 25 cm, lebar 5,5 cm, tebal 3,5 cm. Salah satu bagian dinding benteng, di sisi utara dekat dari Bastion Malaga, pernah dipugar pada tahun 1996. Dinding benteng saat ini, tidak semuanya dalam kondisi utuh. Beberapa bagian telah hilang dan hanya meninggalkan sisa struktur dengan tinggi 2-5 cm hampir rata dengan permukaan tanah. Bahkan ada dinding yang sudah hilang karena di atasnya dibangun rumah dan jalanan.

FIELDS (BARE OF ARTEFACTS)

Mapped Brick Wall

▲ Locations of Measured

Surveyed Zone Borders

X Findspots

Islamic Graves

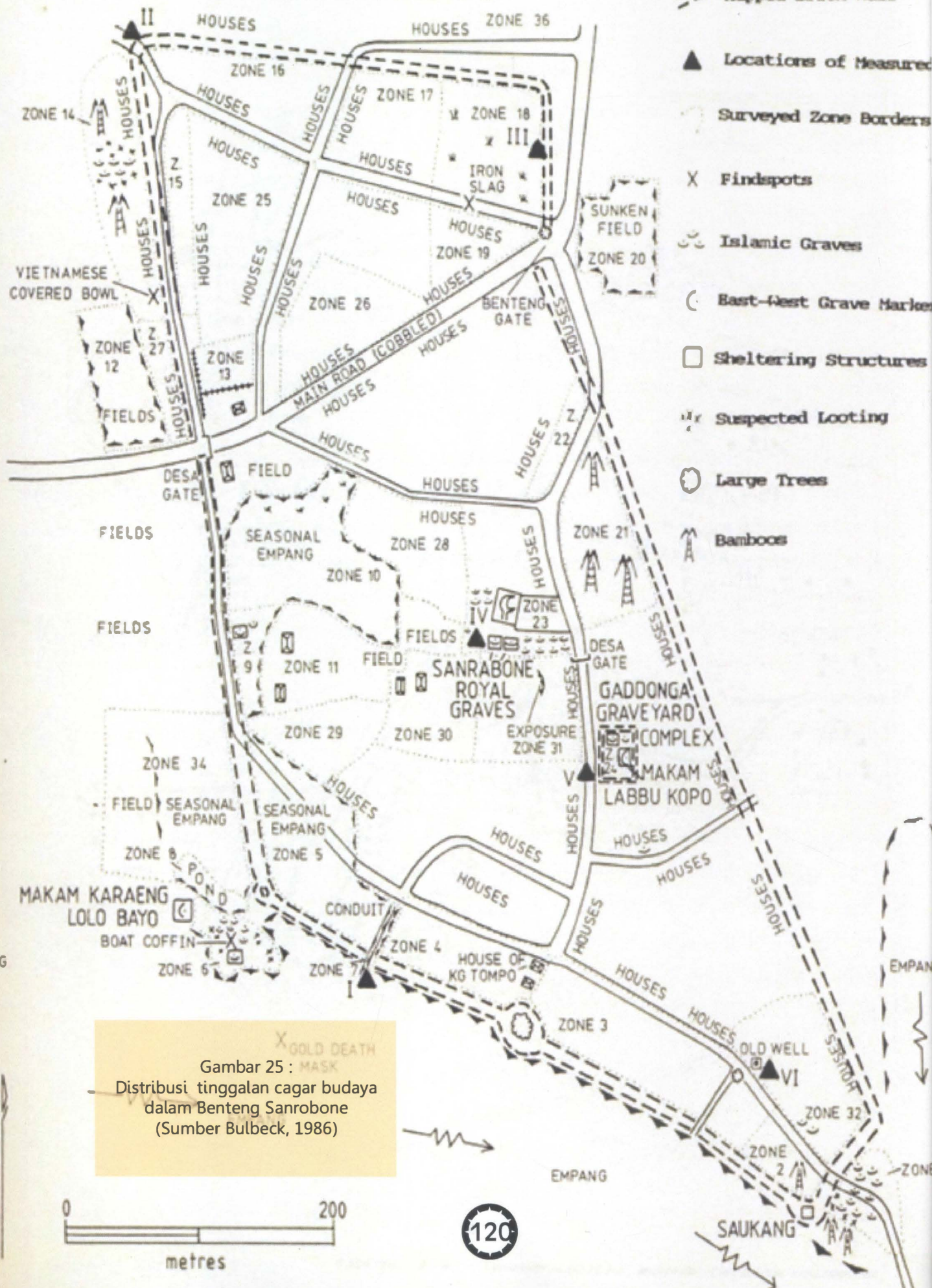
East-West Grave Markers

Sheltering Structures

Suspected Looting

Large Trees

Bamboos



Gambar 25 :

Distribusi tinggalan cagar budaya
dalam Benteng Sanrobone
(Sumber Bulbeck, 1986)

Bastion

Bastion adalah bagian dari sebuah benteng yang menjorok keluar, mempunyai tinggi yang sama atau lebih rendah dari tembok benteng, saling dihubungkan oleh tabir (Pusat Dokumentasi Arsitektur, 2009). Bastion dapat berbentuk bulat atau menyerupai mata panah. Adapun bentuk bastion di Benteng Sanrobone adalah bulat setengah lingkaran sehingga memiliki komponen berupa sayap, muka, dan tabir. Sayap bastion yaitu sisi yang membentuk sudut dengan tabir, muka bastion adalah sisi miring dari sebuah bastion yang menghadap keluar, sedangkan tabir adalah tembok yang menghubungkan antarbastion. Oleh karena itu, bastion adalah bagian benteng yang terletak di sudut dan menjadi salah satu ciri khas dari bangunan benteng pertahanan. Benteng ini memiliki empat bastion, yaitu Bastion Mallaga di sisi utara, Bastion Jonggoa di timur laut, Bastion Lolo Bayo di bagian barat daya, dan Bastion Balasapati di sudut tenggara.

1. Bastion Mallaga

Bastion ini terletak di sisi utara dengan keletakan astronomis $05^{\circ} 25' 42.8''$ LS dan $119^{\circ} 23' 25.4''$ BT. Bagian sayap bastion relatif utuh, demikian pula muka sehingga masih terlihat jelas bentuk setengah lingkaran. Pada salah satu bagian bastion, terdapat dua pohon beringin besar. Bastion ini berhadapan langsung dengan jalan, yaitu jalan Pendidikan dan Keamanan.



Foto 53 : Sisa struktur pada bagian muka Bastion Mallaga dan dua pohon beringin yang tumbuh di atas struktur bata (Dokumentasi BP3 Makassar, 2010)

2. Bastion Jonggoa

Bastion Jonggoa terletak di sisi timur laut dari dinding benteng. Letak astronomis $05^{\circ} 25' 42.3''$ LS dan $119^{\circ} 23' 16.2''$ BT. Pada bagian luar dan dalam dinding bastion ditumbuhi tanaman bambu. Bagian timur terpotong jalanan yang menghubungkan dengan kawasan sekitar situs. Pada bagian atas bastion ditumbuhi pohon jenis bitti, bambu, belukar dan lumut.



Foto 54 . Kondisi struktur bata pada dinding Bastion Jonggoa, ditumbuhi pepohonan yang dapat mengancam kelestariannya (Dokumentasi BP3 Makassar, 2010)

3. Bastion Lolo Bayo

Bastion Lolo Bayo berada di sudut barat daya berhadapan dengan pantai. Berdasarkan hasil plotting GPS, koordinat astronomis bastion ini adalah $05^{\circ} 26' 01.1''$ LS dan $119^{\circ} 23' 18.6''$ BT. Berdasarkan jejak struktur benteng yang masih tersisa, bastion Lolo Bayo tidak jauh berbeda dengan bastion lainnya baik dari segi bentuk maupun strukturnya yang merupakan perpaduan antara gundukan tanah dan susunan bata tanpa spesi. Pada bagian ini, terlihat gundukan tanah yang menjadi dasar fondasi bagi susunan bata di atasnya. Tumpukan bata ini disusun membentuk kontruksi setengah lingkaran.



Foto 55 . Bastion Lolo Bayo dilihat dari arah barat daya (Dokumentasi BP3 Makassar, 2010)

Bastion telah dipagari dengan kawat berduri yang kondisinya sudah rusak. Lokasinya berada di tepi pantai dan di sekitarnya terdapat pertambakan. Di sini terdapat makam kuno Karaeng Lolo Bayo yang ramai diziarahi masyarakat. Menurut informasi dari tokoh masyarakat, penamaan bastion ini memang merujuk pada sosok Karaeng Lolo Bayo seorang yang sakti dan merupakan Panglima Angkatan Laut Kerajaan Sanrobone (wawancara dengan H. Siantang dan Karaeng Gassing, 8 November 2010).

4. Bastion Balasapati

Bastion Balasapati merupakan bastion yang letaknya di sudut tenggara. Sebagaimana Bastion Lolo Bayo, bastion ini berbatasan langsung dengan pantai yang kini telah beralih fungsi menjadi areal pertambakan. Hasil pengukuran GPS menunjukkan bahwa bastion berada pada titik astronomis $05^{\circ} 26' 08.1''$ LS dan $119^{\circ} 23' 31.4''$ BT. Pada bagian muka bastion masih tampak struktur dinding setinggi 80 cm, sedangkan pada bagian lain hanya runtuh bata dan gundukan tanah. Di atas bastion terdapat "saukang" yang dipercaya oleh masyarakat sebagai tempat peristirahatan Karaeng Balasapati. Kondisi bastion secara umum sudah mengalami kerusakan yang cukup parah karena ditumbuhi pohon-pohon besar yang merusak struktur.



Foto 56: Bastion Balasapati dilihat dari arah tenggara (foto kiri), bangunan Saukang di sisi utara dinding bastion (kanan) (Dokumentasi BP3 Makassar, 2010)

Potensi dan Nilai Penting Benteng Sanrobone

Potensi yang dimaksudkan dalam tulisan ini mengacu pada kemampuan atau kekuatan yang terdapat pada Benteng Sanrobone yang mempunyai kemungkinan untuk dikembangkan. Oleh karena itu, untuk memperoleh informasi yang akurat terkait dengan potensi benteng, maka dilakukan pengumpulan data lapangan berupa survey, observasi dan wawancara. Berdasarkan hasil penelusuran data lapangan, Benteng Sanrobone memiliki beragam potensi yang meliputi potensi sejarah, arkeologis, geologis, budaya baik berupa *local wisdom* maupun *indigenous knowledge* dan potensi alam. Berikut uraian dari masing-masing potensi tersebut.

1. Potensi Sejarah

Raja pertama Kerajaan Sanrobone bernama Kare Panca Belong, dialah yang mendirikan benteng atas perintah Raja Gowa ke-9 Karaeng Tumapakrisik Kallona. Pada setiap sudut benteng terdapat bastion, yakni Bastion Malaga, Bastion Balasapati, Bastion Jonggoa, dan Bastion Lolo Bayo. Semua bastion memiliki nilai sejarah yang berbeda terkait dengan latar belakang penamaannya. Selain bastion, di dalam benteng terdapat pula makam-makam kuno bagi tokoh-tokoh penting Kerajaan Sanrobone. Makam-makam tersebut terdiri dari, Makam Kare Panca Belong, Makam Gaddong, Komplek Makam Raja

Sanrobone, dan Makam Tamma Danggang. Tempat bersejarah lainnya adalah Mesjid Baitul Maqdis yang letaknya berdekatan dengan Komplek Makam Raja Sanrobone. Mesjid ini dibangun pada 1601 oleh Datu' Mahkota, ulama asal Minangkabau yang menyebarkan agama Islam di Sanrobone. Terdapat pula sumur tua serta sisa-sisa istana raja di Kassuarrang. Di sisi barat laut Bastion Lolo Bayo terdapat Makam Karaeng Lolo Bayo. Makam ini ditempatkan di luar benteng karena ia merupakan orang Bajo, yang secara adat tidak diperkenankan ditaruh di dalam benteng. Itulah sebabnya mengapa Datu' Mahkota dimakamkan pula di luar, di Desa Mandalika, sekitar 3 km dari Benteng Sanrobone.

2. Potensi Arkeologis

Potensi arkeologis yang dimaksudkan dalam paparan ini adalah tinggalan berupa artefak atau material culture yang terkait langsung maupun tidak dengan keberadaan benteng dan sejarah Kerajaan Sanrobone.

Berdasarkan hasil survey lapangan, kawasan Benteng Sanrobone kaya dengan beragam potensi arkeologis baik yang *movable* maupun *unmovable*. Tinggalan arkeologis yang termasuk dalam katagori *unmovable* terdiri dari: sisa struktur benteng, sisa struktur bastion, makam Raja Sanrobone, makam Kare Panca Belong, makam Gaddong, makam Tamba Danggang, sumur tua, dan mesjid tua. Adapun yang *movable object* terdiri dari meriam, jangkar, dan fragmen keramik.

Keberadaan meriam semakin mempertegas fungsi benteng sebagai sarana pertahanan. Berdasarkan hasil wawancara dengan H. Siantang dan Karaeng Gassing (tokoh masyarakat dan Pengurus Lembaga Adat Sanrobone), terdapat dua meriam yang ditemukan. Meriam tersebut ditemukan pada 19 Mei 1991 di saat seorang warga bernama Bacu mengolah lahan perkebunannya di Kampung Kassuarrang. Kini meriam-meriam tersebut disimpan di rumah H. Siantang dan Karaeng Gassing.

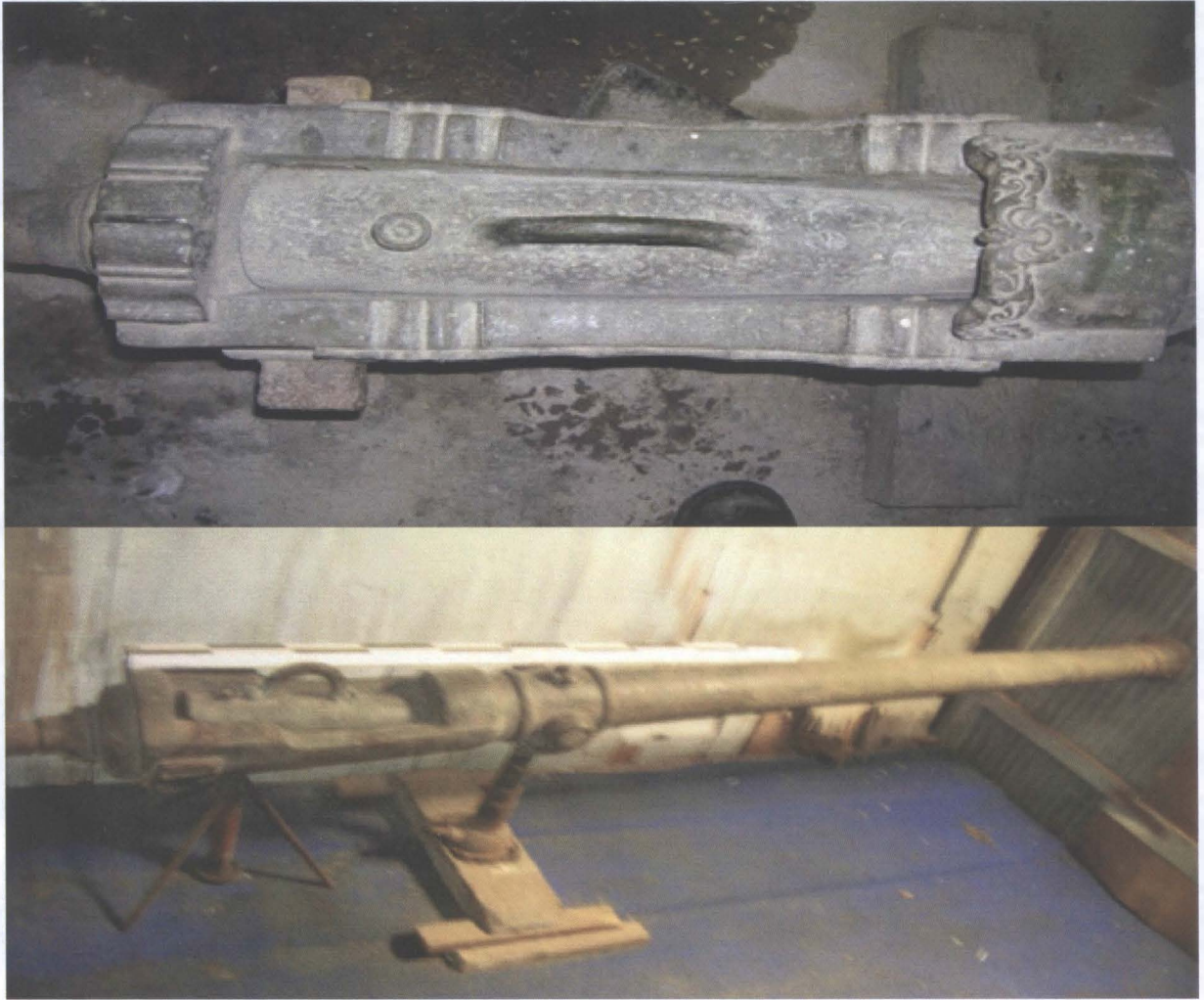


Foto 57 dan 58: Meriam temuan dari Benteng Sanrobone

Potensi dan Ancaman

Dalam kajian *cultural resource management*, cagar budaya dipahami sebagai warisan budaya baik berupa benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, situs cagar budaya, dan kawasan cagar budaya, baik di darat maupun di air, yang perlu dipertahankan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, teknologi, pendidikan, agama, dan kebudayaan. Hal ini memperlihatkan bahwa warisan budaya memiliki dua sisi yang berbeda, yaitu nilai penting dan keterancaman karena sifatnya yang terbatas, langka, serta tidak dapat diperbaharui. Oleh karena itu potensi dan ancaman pada warisan budaya merupakan hal yang tidak

dapat dipisahkan. Dalam pembahasan poin ancaman, diuraikan faktor-faktor yang dapat mengancam kelestarian Benteng Sanrobone, meliputi faktor budaya dan alam.

1. Potensi Budaya

Secara kultural perwujudan budaya di kawasan ini merupakan refleksi dari budaya Makassar. Masyarakat Sanrobone sangat kental dengan budayanya, terutama yang terkait dengan ritual perkawinan, upacara-upacara keagamaan atau kematian, seni pertunjukan, keterampilan membuat barang-barang kerajinan, dan lain-lain. Hal ini tentu saja merupakan suatu potensi yang dapat dikembangkan, terutama ketika dikaitkan dengan perencanaan pengelolaan benteng sebagai objek wisata budaya.

2. Potensi Alam

Potensi alam sangat terkait dengan lansekap Benteng Sanrobone yang berada di kawasan pesisir, dengan ekosistem yang khas serta flora dan fauna yang spesifik. Oleh karena itu potensi alam di kawasan Benteng Sanrobone adalah kemampuan yang terkandung dalam suatu wilayah pesisir, terutama berupa panorama alam yang khas pesisir. Selain itu, keberadaan areal tambak di sekitar benteng terutama di sisi selatan, menjadi potensi yang dapat dikembangkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang bersinergi dengan upaya pemanfaatan Benteng Sanrobone sebagai objek wisata budaya.

Oleh karena itu pengelolaan kawasan Benteng Sanrobone tidak hanya difokuskan pada *natural landscape* tetapi juga pada *heritage landscape*, yang keduanya dikenal sebagai "saujana budaya". Berkaitan dengan hal ini, *The World Heritage Committee* (WHC), dan Australia ICOMOS (1995) menyatakan bahwa saujana budaya terapkan pada suatu kawasan bentanglahan (*landscape*) yang memiliki penampakan alam dengan arti khusus bagi manusia untuk dikembangkan. Terminologi saujana budaya merupakan manifestasi keanekaragaman interaksi antara manusia dan lingkungan alamnya. Saujana budaya merepresentasikan sebuah kontinum pola penggunaan lahan yang melampaui beberapa generasi.

Bentang lahan ini merupakan ekspresi evolusi dari nilai-nilai kebudayaan manusia, norma-norma dan sikap terhadap lahan tersebut. Sikap ini terungkap melalui

kualitas visual dari sisa sejarah pengaruh manusia pada bentanglahan modern. Jadi, saujana budaya dibuat melalui hubungan yang intensif antara kebudayaan dan alam yang membentuk lingkungan dalam waktu yang lama dan menghasilkan bentanglahan di masa kini.

Kriteria dan pedoman untuk melakukan analisis nilai penting terhadap setiap potensi yang ada di Benteng Sanrobone, yaitu potensi sejarah, arkeologis, budaya dan alam. Oleh karena itu, kawasan ini perlu dilestarikan sehingga potensi yang dimiliki dapat memberikan manfaat untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, seperti tampak dalam uraian di bawah ini.

Kriteria Nilai Penting Sejarah	
1.	Berkaitan erat dengan peristiwa sejarah di tempat itu, dalam hal ini adalah sejarah Kerajaan Sanrobone, Kerajaan Gowa dan Kabupaten Takalar
2.	Dapat menjadi sarana untuk mendokumentasikan dan melestarikan nilai-nilai sejarah lokal, tradisi, dan adat istiadat masyarakat setempat
3.	Dapat menjadi media dalam membantu upaya masyarakat mengenal dan merevitalisasikan identitas sosial kulturalnya
4.	Dapat menjadi sarana untuk mendokumentasikan beragam fase dan peristiwa penting dalam sejarah kehidupan masyarakat
5.	Merupakan fakta-fakta dan bukti-bukti yang sah mengenai masa lalu yang berguna bagi manusia dalam memperkaya pengetahuan
Kriteria Nilai Penting Ilmu Pengetahuan	
1.	Memiliki potensi diteliti lebih lanjut untuk menjawab masalah-masalah dalam bidang keilmuan secara umum
2.	Memuat informasi yang dapat menjelaskan mengenai proses perubahan budaya dan adaptasi manusia terhadap lingkungannya
3.	Memuat informasi yang dapat menjelaskan tindakan manusia dan interaksi manusia dengan manusia lainnya
4.	Memuat informasi yang dapat menjawab masalah yang berkaitan dengan pengembangan metode, teknik dan teori dalam berbagai bidang ilmu
Kriteria Nilai Penting Kebudayaan	
1.	Sumberdaya budaya itu terkait dengan hasil pencapaian budaya tertentu, mendorong proses penciptaan budaya, atau menjadi jatidiri bangsa atau komunitas tertentu
2.	Dapat memberikan pemahaman latarbelakang kehidupan sosial, sistem kepercayaan, dan mitologi suatu bangsa
3.	Mempunyai kandungan unsur-unsur keindahan baik yang terkait dengan seni rupa, seni hias, seni bangun, maupun bentuk-bentuk kesenian lain, termasuk keserasian antara bentang alam dan karya budaya (saujana budaya), dan menjadi sumber inspirasi yang penting untuk menghasilkan karya-karya budaya di masa kini dan mendatang

Ancaman

Dari beberapa tinggalan arkeologi yang ada di wilayah Sanrobone salah satu diantaranya adalah Benteng Sanrobone yang kini menghadapi sejumlah ancaman baik dari alam maupun budaya. Degradasi bahan sumberdaya arkeologi dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu kerusakan dan pelapukan bahan. Faktor yang menyebabkan kerusakan dan pelapukan antara lain adalah perencanaan, menurunnya rasio kekuatan bahan maupun struktur, dan faktor lingkungan. Faktor perencanaan meliputi kesalahan dan ketidaksempurnaan perencanaan, kurangnya ilmu pengetahuan, penggunaan konstruksi di luar kemampuan bahan, atau faktor-faktor lain. Selain itu kerusakan dan pelapukan juga dapat terjadi akibat penurunan rasio kekuatan gaya statis, dinamis, kimia-fisis, jenis material dan struktur cagar budaya. Faktor lingkungan juga memberikan sumbangan yang besar terhadap kerusakan dan pelapukan antara lain disebabkan oleh manusia, bencana alam, iklim dan air, serta pertumbuhan jasad. Proses kerusakan dan pelapukan meliputi mekanis, fisis, kimia, dan biologi.

Ancaman lainnya adalah aktivitas penggalian liar. Benteng ini menyimpan tinggalan arkeologi yang signifikan, yang mendorong masyarakat sekitar situs untuk melakukan penggalian. Hal ini ditunjukkan dengan banyaknya lubang-lubang galian dalam areal benteng, terutama di sekitar Bastion Balasapati dan Bastion Lolo Bayo .



Foto 59: Salah satu dinding Benteng Sanrobone



Foto 60 : Struktur batu yang mulai lapuk dan aus

Zonasi Benteng Sanrobone

Pada prinsipnya zonasi merupakan sistem tata ruang dalam situs atau kawasan cagar budaya yang meliputi penentuan batas-batas keruangan dan fungsi masing-masing ruang.

Dalam Pasal 72 UU No. 11 Tahun 2010 tentang cagar budaya diatur mengenai penetapan batas-batas keluasan dan pemanfaatan ruang dalam situs dan kawasan berdasarkan kajian, sedangkan Pasal 73 Ayat (3) membagi sistem zonasi terdiri dari a). zona inti, b). zona penyangga, c). zona pengembangan, dan/atau d). zona penunjang. Zona inti adalah area perlindungan utama untuk menjaga bagian terpenting cagar budaya, sedangkan zona penyangga merupakan area yang melindungi zona inti. Di samping itu, zona pengembangan merupakan area yang diperuntukan bagi pengembangan potensi cagar budaya untuk kepentingan rekreasi, daerah konservasi lingkungan alam, lanskap budaya, kehidupan budaya tradisional, keagamaan, dan kepariwisataan. Sedangkan zona penunjang adalah area yang diperuntukkan bagi sarana dan prasarana penunjang serta untuk kegiatan komersial dan rekreasi umum. Penetapan luas, tata letak, dan fungsi zona ditentukan berdasarkan hasil kajian dengan mengutamakan peluang peningkatan kesejahteraan rakyat.

Dasar Penentuan Zonasi

Secara umum batas-batas ruang (zona) ditentukan berdasarkan batas asli cagar budaya, batas budaya, batas alam/geografis, batas administrasi, batas pemilikan/penguasaan ruang, batas tataruang yang telah ditetapkan dan batas yang ditetapkan berdasarkan keperluan.

Zona inti I adalah bagian terpenting situs, dimana struktur dan bangunan ditemukan. Dari hasil pengukuran, maka keseluruhan luas dari zona ini adalah 34.237 m² atau 3,42 ha, terdiri atas 6 satuan bangunan atau struktur, yaitu: struktur dinding benteng baik yang tampak dipermukaan atau hanya berupa gundukan tanah dan tanah datar tanpa gundukan yang merupakan kelanjutan dari alur struktur yang tersingkap. Zona inti I terdiri atas struktur dinding benteng yang meliputi areal yang berada di bagian dalam dan luar struktur. Batas-batas zona ini dinyatakan dalam garis imajiner yang ditarik sejajar dengan struktur dan alurnya, baik di bagian luar maupun bagian dalamnya dengan jarak masing-masing 5 meter. Jarak ini ditetapkan dengan berdasarkan lebar struktur dinding yang tersingkap dipermukaan yang memiliki ukuran lebar rata-rata 5 meter. Dengan demikian area ini terdiri atas struktur dinding berbentuk melingkar selebar 15 meter dengan panjang bentangan 2.161 m, dengan total luas 32.416 m² atau 3,24 ha. Beberapa aturan yang dapat diterapkan pada zona inti I sebagaimana disebutkan di atas dapat diuraikan sebagai berikut:

No	Dapat dilakukan	Persyaratan	Tidak Dapat Dilakukan
1	Aktivitas Konservasi dan pemugaran	Ada izin dari instansi yang berkompeten	Aktivitas non konservasi, dan pemugaran
2	Penelitian, pendidikan, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan	* Ada izin dari instansi yang berkompeten; * Tidak melakukan aktivitas yang bersifat membangkar struktur yang tidak mengikuti kaidah arkeologi	Aktivitas fisik, khususnya terkait dengan penggalian tanah dan pengrusakan struktur
3	Penataan	* Ada Izin dari Instansi yang berkompeten, * Didahului dengan studi kelayakan atau kajian/penelitian	Mengubah tata lingkungan asli (yang ditemui sekarang), termasuk menebang atau menanam pohon yang dapat membahayakan struktur
4	Perkunjungan / rekreasi	* Ada izin dari instansi berkompeten, * Tidak melakukan pengrusakan dan pencemaran	Perkunjungan yang tak terkendali

Selain itu yang masuk pula dalam zona inti I ini adalah kompleks makam Raja-raja Sanrobone seluas 954 m² atau 0,095 ha. Selanjutnya kompleks makam Pancabelong dengan seluas 225 m² atau 0,025 ha, makam Tamaddanggang dengan luas keseluruhan adalah 100 m² atau 1 are. Makam Gaddong yang berdenah segi empat seluas 95 m², berada di atas lahan terbuka yang dikelilingi pagar kawat seluas 500 m² (0,05 ha) di permukiman penduduk.

Zona Inti II adalah zona yang dipastikan sebagai zona utama situs, namun tidak ditemukan adanya struktur dinding benteng atau struktur/bangunan lain yang terkait. Luas keseluruhan zona ini adalah 201.716 m² (20,17 ha). Garis batas terluar dari zona ini adalah garis batas bagian dalam dari zona inti I. Untuk zona inti II, regulasi atau aturan yang diterapkan adalah sebagian besar aturan yang diterapkan pada zona inti I, kecuali ditambahkan beberapa hal yang dapat dilakukan, antara lain:

No	Dapat dilakukan	Persyaratan	Tidak Dapat Dilakukan
1	Pendirian bangunan non-permanen dan bersifat reversible atau mudah dibongkar dan dipindahkan	* Ada izin dari instansi yang berkompeten * Bangunan menggunakan arsitektur yang mencirikan arsitektur tradisional/lokal	Pendirian bangunan permanen
2	Mempertahankan bangunan permanen yang telah ada	* Ada izin dari instansi yang berkompeten; * Telah ada sebelum adanya zonasi	Menambah luas dan ketinggian bangunan
3	Kegiatan pengolahan lahan/halaman rumah secara terbatas	* Membongkar tanah sesuai dengan kebutuhan untuk tanaman tidak melebihi 50 cm * Jenis tanaman terbatas pada tanaman jangka pendek atau tanaman pelindung dengan akar yang tidak merusak struktur/bangunan cagar budaya	Penanaman pohon jangka panjang bertajuk tinggi, tanaman dengan akar yang dapat merusak struktur atau bangunan cagar budaya yang terpendam di dalam tanah.
4	Penggalian tanah untuk kebutuhan air bersih dan sanitasi	* Ada izin dari instansi berkompeten * Ada pengawasan dari instansi yang berkompeten pada saat penggalian	Penggalian tanah untuk bangunan permanen atau untuk kepentingan lain yang tidak sesuai
5	Kegiatan pendidikan, sosial, ekonomi, dan kebudayaan yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip pelestarian	* Tidak mengganggu benda, struktur, dan bangunan cagar budaya yang ada	Segala kegiatan yang bertentangan dengan prinsip perlindungan cagar budaya.

Zona Penyangga

Zona penyangga situs terletak di sekeliling atau di luar batas zona inti I, meliputi permukiman, sawah, dan tambak. Batas-batas terluar zona ditentukan berdasarkan kebutuhan ruang untuk perlindungan lahan inti, termasuk ketersediaan ruang yang cukup bagi visibilitas terhadap benteng secara utuh, kelayakan dan keserasian pandangannya. Untuk itu, selain menetapkan lahan dengan fungsi permukiman (saat ini), juga di sebagian besar sisi situs perlu juga memasukkan lahan produksi masyarakat di sekitarnya, di antaranya sawah dan tambak sebagai lahan penyangga. Berdasarkan batas-batas yang ditetapkan, maka diperoleh luas lahan adalah 260.775 m² (26,08 ha). Untuk aturan perlakuan pada zona penyangga, sesuai dengan prinsipnya sebagai lahan perlindungan bagi zona inti ditambah dengan berbagai pertimbangan lain untuk menunjang pengembangan dan pemanfaatannya, maka beberapa hal berikut mutlak diperlukan.

No.	Dapat dilakukan	Persyaratan	Tidak Dapat Dilakukan
1	Pendirian bangunan non-permanen dan bersifat reversible atau mudah dibongkar dan dipindahkan	* Ada izin dari instansi yang berkompeten * Bangunan menggunakan arsitektur yang mencirikan arsitektur tradisional/lokal * Tidak menghalangi pandangan terhadap struktur atau bangunan cagar budaya yang ada dalam benteng	Pendirian bangunan permanen, atau bangunan yang dapat mengganggu pandangan atau mengganggu keserasian pandangan terhadap benteng dan lingkungan di sekitarnya
2	Penataan lingkungan	* Ada Izin dari Instansi yang berkompeten * Didahului dengan studi kelayakan atau kajian/penelitian * Tidak mengubah setting yang ada tanpa adanya penelitian khusus setting lingkungan yang seharusnya	* Mengubah tata lingkungan asli (yang ditemui sekarang), termasuk menebang atau menambah pepohonan yang tidak sesuai dengan lingkungan aslinya * Mengubah fungsi lahan yang ada sekarang
3	Pengolahan lahan sesuai dengan fungsi sekarang, misalnya sawah, tambak, ataupun kebun	Mempertimbangkan pengaruh aktivitas terhadap kondisi zona inti	Mengubah fungsi lahan tanpa koordinasi dengan instansi yang berkompeten
4	Kegiatan sosial, ekonomi, pendidikan, keagamaan, budaya, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang tidak bertentangan dengan prinsip pelestarian cagar budaya	Tidak menimbulkan dampak negatif terhadap upaya perlindungan terhadap cagar budaya, baik secara langsung maupun tidak langsung.	* Kegiatan yang melanggar etika, norma, maupun adat istiadat atau kebiasaan masyarakat setempat. * Menutup akses masyarakat umum terhadap Benteng Sanrobone sebagai struktur cagar budaya.

Zona Pengembangan

Zona pengembangan dikhususkan bagi kegiatan pengembangan nilai dan fungsi situs. Untuk itu penentuan posisi dan luas harus mempertimbangkan strategi berkaitan dengan akses terhadap situs dan kemungkinan pengaruhnya. Beberapa lokasi dapat dianggap cukup strategis berdasarkan keterjangkauan dan kemungkinan dampaknya terhadap kelestarian situs. Termasuk yang dipertimbangkan adalah kelestarian lingkungan di sekitar benteng dan tataguna lahan sekarang ini, antara lain sawah, tambak, kebun dan permukiman.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka dihasilkan 4 zona di sekeliling situs, yaitu: a). zona pengembangan 1, terletak di sebelah utara situs berupa kebun di tengah sawah. Lokasi ini dihubungkan dengan jalan desa, berjarak 180 m dari zona inti atau 110 m dari zona penyangga. Lokasi ini dianggap cukup strategis dimanfaatkan untuk pengembangan karena cukup dekat dari situs dan adanya ruang terbuka sehingga panorama benteng dengan lingkungannya dapat dinikmati dari lokasi ini. Lokasi pengembangan 1 ini dengan batas terluar adalah sawah seluas 5.054 m^2 (0,5 ha). b). zona pengembangan 2, yang berbatasan langsung dengan batas luar zona penyangga, berada di persimpangan jalan desa sekitar 140 m di sebelah timur laut Bastion Mallaga, yang sekarang ini merupakan gerbang utama menuju Benteng Sanrobone. Zona ini dapat memanfaatkan lahan minimal 2.931 m^2 (0,29 ha), sekaligus untuk membatasi luas perubahan fungsi lahan sawah. c). zona pengembangan 3, adalah lokasi di sebelah barat situs. Lokasi ini berupa kawasan permukiman sehingga sangat cocok untuk mengembangkan model pemanfaatan oleh masyarakat sebagai pelaku utama. Batas-batas luar dari zona ini adalah sawah di sebelah utara, batas luar zona penyangga di sebelah timur, tambak di sebelah selatan, dan permukiman penduduk di sebelah barat. Secara keseluruhan lokasi ini seluas 22.807 m^2 (2,28 ha), dan masih dapat dikembangkan atau diperluas ke arah barat, tergantung kebutuhannya. d). zona pengembangan 4 berada di sebelah barat, sekitar 30 m dari Bastion Lolo Bayo. Lokasi ini berupa perbukitan di tengah tambak yang sebagian dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai kebun dan permukiman.

Untuk pengembangannya, memang membutuhkan model-model yang khusus. Batas-batas zona pengembangan 4 adalah; tambak di sebelah utara dan selatan, batas

luar zona penyangga di sebelah timur, dan permukiman di sebelah barat, dengan luas 8.223 m² (0,82 ha), dan masih dapat diperluas ke arah barat sesuai kebutuhan. Secara keseluruhan lokasi pengembangan ini seluas 39.015 m² (3,9 ha). Berbeda dengan aturan yang diberlakukan pada zona inti dan penyangga, regulasi di zona ini memang dirancang untuk mengakomodir kepentingan lain dengan tidak mengabaikan kepentingan pelestarian cagar budaya. Beberapa aturan yang dianggap perlu untuk diterapkan pada zona ini antara lain:

No.	Dapat dilakukan	Persyaratan / Anjuran
1	Pendirian atau penambahan bangunan baru, baik permanen maupun non permanen yang mendukung upaya pemanfaatan	* Bangunan menggunakan arsitektur yang mencirikan arsitektur tradisional/lokal * Tidak mendominasi atau tidak lebih mencolok dibandingkan dengan bangunan benteng dan bangunan di dalamnya
2	Penataan landscape dan lingkungan	* Tidak menghilangkan ciri khas lingkungan alami situs, atau setidaknya masih mencerminkan lingkungan asli situs.
3	Kegiatan ekonomi	* Melibatkan masyarakat di sekitarnya sebagai pelaku ekonomi * Memberikan kontribusi terhadap pelestarian situs
4	Kegiatan sosial, ekonomi, pendidikan, keagamaan, budaya, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi lainnya	Tetap mempertimbangkan kelestarian situs

Penutup

Berdasarkan hasil kajian zonasi maka beberapa bangunan di atas struktur dinding benteng antara Bastion Lolobayo dan Bastion Balasapati-Bastion Jongowa harus dipindahkan ke lokasi semula. Sarana jalan tambak yang terletak di antara bastion Jonggowa dan Bastion Lolobayo harus ditutup demi keamanan struktur benteng. Sarana dan prasarana wisata dan sarana pendukung lainnya harus ditempatkan pada zona pengembangan. Oleh karena itu perlu segera menetapkan Situs Benteng Sanrobone sebagai Cagar Budaya Peringkat Provinsi dengan Keputusan Gubernur yang selanjutnya diperkuat dengan Perda. Dan setiap rencana pelestarian (perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan) harus mengacu pada sistem zonasi yang telah ditetapkan serta perlu kajian interdisiplin untuk penyusunan master plan pelestarian Benteng Sanrobone.

DAFTAR PUSTAKA

Andaya, Leonard Y. 2004. *Warisan Arung Palakka*. Ininnawa. Makassar

Anonim, 1987. *Penggalian Penyelamatan Benteng Sanrobone*. Suaka Peninggalan Sejarah dan Purbakala Sulawesi Selatan. Ujung Pandang.

....., 1992. *Ekskavasi Penyelamatan dan Rekonstruksi Dinding Barat Benteng Sanrobone Kabupaten Gowa*. Suaka Peninggalan Sejarah dan Purbakala Sulawesi Selatan dan Tenggara Bekerjasama Dengan Proyek Persiapan Pembangunan Miniatur Sulawesi Pemda Tingkat I Propinsi Sulawesi Selatan. Ujung Pandang.

....., 1995. *Pengupasan/Penyelamatan dan Rekonstruksi Benteng Sanrobone Sebagai Pusat Kerajaan Gowa*. Suaka Peninggalan Sejarah dan Purbakala Propinsi Sulawesi Selatan dan Tenggara. Ujung Pandang.

Bulbeck, Francis David. 1986. *The South Sulawesi Historic And Prehistorical Archaeology Project*. Australian National University

....., 1992. A Tale Of Two Kingdom The Historical Archaeology of Gowa and Tallok, South Sulawesi, Indonesia. **Thesis**. Australian National University. Australia.

Muttalib, Abdul, 1989. *Benteng Sanrobone Suatu Kajian Tentang Arkeologi* (makalah dalam simposium kesejarahan bertopik "Benteng Sanrobone dan Islam" yang dilaksanakan dalam rangka Milad XXII Fakultas Adab IAIN Alauddin Ujung Pandang). Ujung Pandang.

Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata. PM.19/UM.101/MKP/2009, tentang objek vital nasional.

Peta Citra Google, 2010

Peta Rupa Bumi. Edisi Tahun 1991. Bakosurtanal

Rasyid, Darwis. 1983. **Skripsi**. Universitas Hasanuddin. Makassar

Robinson, Kathryn and Mukhlis Paeni. Editor. 1998. *Living Through Histories Culture History and Social Life In South Sulawesi*. Canberra.

Roever, Arend de and Bea Brommer. *Grote Atlas van de Verenigde Oost-Indische Compagnie Comprehensive Atlas of The Dutch United East India Company*. Indische Archipel En Oceanie/ Malay Archipelago and Oceania.

UU No.11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya

Rustan, SS., Iswadi, SS, Yadi Mulyadi, SS,.MA.

D. Menyelami Dunia yang Dilipat: Sebuah Analisis Struktural Terhadap Kawasan Benteng Somba Opu

Pengantar

Tulisan ini berisi penafsiran terhadap salah satu benteng Kerajaan Gowa, Benteng Somba Opu (BSO). Sebagai sebuah fenomena kebudayaan materi yang berwujud monumen, kawasan BSO setidaknya mengandung tiga kelompok bangunan yang berasal dari tiga konteks waktu. Pertama, tinggalan struktur BSO yang berasal dari konteks waktu abad ke 16-17. Kedua, kelompok bangunan Taman Miniatur Sulawesi (TMS) yang berasal dari konteks waktu akhir abad ke-20. Ketiga, kelompok bangunan Gowa Discovery Park (GDP) dari konteks waktu awal abad ke-21. Atas fenomena tersebut, kawasan BSO bukan sebatas ruang yang mengandung sisa struktur yang ditemukan dan telah mengalami proses restorasi dan rekonstruksi, namun kawasan yang telah mengalami modifikasi menjadi TMS dan GDP. Baik TMS maupun GDP telah mengubah kawasan BSO menjadi kebudayaan materi baru yang tentu saja memiliki makna yang baru pula.

Integrasi tinggalan struktur tersebut dengan bangunan-bangunan lain dalam konteks TMS dan GDP menyiratkan telah terjadinya penafsiran terhadap makna dari tinggalan struktur BSO. Dalam penafsiran tersebut, pemroduksi TMS dan GDP tentunya memiliki pemaknaannya masing-masing sehingga keduanya memiliki ancangan yang berbeda dalam memproduksi kawasan BSO. Hal tersebut terlihat pada TMS yang memproduksi kawasan BSO menjadi ruang miniatur budaya Sulawesi Selatan. Adapun yang dilakukan oleh pemroduksi GDP, adalah menjadikan kawasan BSO menjadi sebuah wahana hiburan modern keluarga. Pada level permukaan, produksi tersebut terlihat seperti perubahan fungsional semata. Namun, jika dilakukan pembacaan secara lebih mendalam, terlihat perubahan atau pergeseran nilai atau makna ruang BSO. Perubahan nilai atau makna tersebut adalah hasil dari pembacaan dan interpretasi yang dilakukan secara terus menerus sehingga BSO yang dijumpai sekarang ialah hasil dari produksi kultural dan historis.

Sebagai sebuah wujud arsitektur yang menempati ruang tertentu, modifikasi terhadap kawasan BSO adalah apa yang disebut oleh Lefebvre (1991) sebagai produksi

ruang. Ruang dalam hal ini menjadi bagian dari sebuah produksi (proses) sejarah, yang meliputi persinggungan dari waktu, ruang, dan makhluk sosial, yang mengarah kepada '*a materialization of social being*' (Lefebvre, 1991:102). Dalam pemahaman tersebut, BSO merupakan hasil dari produksi ruang di mana manusia memberikan bentuk berupa wujud arsitektur pada sebuah satuan ruang. Sebagai sebuah hasil dari produksi ruang yang bersinggungan dengan waktu dan manusia sebagai makhluk sosial, kawasan BSO telah mengalami tiga kali produksi ruang.

Penafsiran terhadap kawasan BSO menjadi penting sebab kawasan tersebut merupakan sebuah ruang yang bernilai bagi masyarakat Sulawesi Selatan pada khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya. Bekal penafsiran tersebut merupakan pegangan yang berharga dalam memahami perubahan yang terjadi pada kebudayaan masyarakat Sulawesi Selatan dengan membaca kebudayaan materinya. Selain itu, karena objek penelitian ini juga ternyata bersinggungan dengan pengelolaan yang terjadi pada sebuah situs arkeologi, maka tulisan ini dapat dimanfaatkan sebagai acuan teoritis bagi perumusan model pengelolaan sumber daya arkeologi. Tepatnya sebagai tawaran langkah awal yang sebaiknya ditempuh dalam perumusan model pengelolaan, yaitu pemahaman terhadap makna dari kebudayaan materi.

Analisis Struktural dan Penerapannya

Guna menafsirkan perubahan maknanya, kawasan BSO akan dianalisis dengan menggunakan analisis struktural dalam bingkai kajian arkeologi kontekstual. Dalam kacamata arkeologi kontekstual, kebudayaan materi dapat dibaca dan dianalisis seperti sebuah teks namun dengan tetap mengingat bahwa teks dalam hal ini dipahami hanya sebagai metafora, bukan sebagai analogi langsung (Hodder dan Hutson 2003:169). Kebudayaan materi juga dapat dibandingkan sebagai teks karena sebagai sebuah objek material, kebudayaan materi dapat dimengerti dengan menggunakan bahasa. Arkeolog bisa mengerti sebuah artifak dengan terlebih dahulu mentrasfernya ke dalam bentuk kata melalui proses observasi, deskripsi, dan analisis (Olsen, 1990:164).

Menurut Hodder dan Hutson (2003:45-6), strukturalisme sudah mulai diperdebatkan dalam arkeologi sejak penerbitan buku Leroi-Ghouram berjudul *Préhistoire de l'art Occidental* pada tahun 1965. Meskipun cukup menarik perhatian dan

telah diterapkan oleh beberapa arkeolog, namun, strukturalisme tidak pernah menjadi sebuah paradigma yang dominan dalam arkeologi. Hodder mengemukakan tiga alasan, yaitu: pertama, strukturalisme itu sendiri bukanlah sebuah pendekatan yang koheren karena terlalu banyak pendekatan yang berkembang di dalamnya. Kedua, beberapa pendekatan dalam strukturalisme tidak sejalan dengan agenda arkeologi prosedural yang begitu dominan dalam arkeologi. Ketiga, adanya pendekatan-pendekatan yang tidak sejalan dengan arkeologi prosedural karena pendekatan tersebut dinilai tidak ilmiah, atau karena pendekatan tersebut terlalu rumit dan sulit untuk diterapkan.

Salah satu pendekar arkeologi yang memperkenalkan metode analisis struktural dalam arkeologi ialah James Deetz. Bagi Deetz, kebudayaan materi, seperti kata-kata, merupakan hasil dari aktivitas motorik manusia, dibuat melalui gerakan otot di bawah panduan mental terhadap bahan baku yang digunakan (1967:87). Lewat analogi tersebut, Deetz memberikan landasan penerapan linguistik struktural dalam mengkaji kebudayaan materi yang didasarkan pada sebuah sistem kognitif universal (Preucell 2006:101). Lebih lanjut Deetz menyatakan bahwa "...pasti terdapat unit-unit struktural dalam artifak yang dapat dipadankan dengan fonem dan morfem dalam bahasa, sebuah padanan yang melampaui analogi sederhana yang mencerminkan sebuah identitas esensial antara bahasa dan benda-benda dalam pengertian struktural" (1967:87). Deetz (1967:89-90) kemudian mengajukan faktem (*facteme*) dan formem (*formeme*) sebagai unit-unit struktural dalam artifak sebagai padanan fonem dan morfem yang merupakan unit-unit struktural dalam bahasa.

Kedua unit struktural yang dikemukakan oleh Deetz, selain sebagai jembatan konseptual dalam menerapkan analisis linguistik struktural terhadap teks kawasan BSO yang berwujud kebudayaan materi, juga berguna dalam mengidentifikasi relasi yang terlihat pada bangunan-bangunan yang ada di dalam kawasan BSO. Relasi antar bangunan menjadi penting karena secara struktural, sebuah bangunan menjadi bermakna karena relasinya dengan bangunan yang lain.

Sejalan dengan perkembangan pemikiran dalam arkeologi, strukturalisme yang pada awalnya dikembangkan oleh Ferdinand de Saussure dalam kajian bahasa, telah mengalami berbagai perubahan dan penyesuaian. Di antara para peneliti yang pernah menerapkan prinsip-prinsip strukturalisme dalam kajian kebudayaan materi,

tersebutlah nama Henrietta Moore. Moore mengajukan istilah 'struktural/semiotik' sebagai nama pendekatan yang mengkaji tanda, sistem tanda, dan pengombinasian ke dalam bentuk kode dan pesan. Menurutnya, wujud kebudayaan diproduksi berdasarkan pola relasi yang ditata menurut aturan-aturan kombinasi dan artikulasi yang ada dalam sebuah kebudayaan (Moore, 1996:3). Pola relasi tersebut merupakan sistem pengklasifikasian yang dipahami sebagai sistem makna di mana makna diperoleh dari serangkaian relasi oposisi dan pembedaan struktural. Berbeda dengan sistem oposisi biner dalam analisis struktural pada umumnya, Moore menekankan bahwa relasi oposisi yang ia kembangkan tidak mengarah pada logika internal sistem simbol, namun lebih melihat bagaimana oposisi antar tanda terbangun dengan memperhatikan konteks artikulasinya (1996:4).

Mencoba mengafirmasi model analisis yang digunakan oleh Moore, bangunan-bangunan dalam kawasan BSO akan dianalisis tidak dalam sebuah relasi internal bangunan, namun menyertakan konteks eksternal sebagai perangkat dalam menyusun relasi oposisi antar bangunan. Konteks eksternal yang dimaksudkan ialah narasi sejarah, konteks sosial, budaya, dan politik.

Kawasan BSO adalah sebuah karya diskursus dalam artian bahwa kawasan tersebut merupakan sebuah wujud kebudayaan materi yang diproduksi oleh 'seseorang' dengan bentuk tertentu dan dihadirkan untuk menyampaikan pesan (baca: makna) kepada khalayak tertentu. Berdasarkan narasi sejarahnya, 'karya' tersebut telah mengalami tiga kali produksi ruang. Di dalam kawasan terdapat bangunan-bangunan yang terdistribusi dalam sebuah medium ruang. Ketika tanda yang berwujud bangunan tersebut didirikan dalam sebuah medium ruang, maka tanda tersebut menjelma menjadi kata. Lebih lanjut, bangunan-bangunan yang berhubungan dalam sebuah satuan kawasan merupakan kalimat. Dalam kawasan BSO, terbentuk kelompok-kelompok bangunan sebagai hasil dari tiga kali momen produksi.

Dalam menganalisis kawasan BSO sebagai teks, digunakan analisis struktural dengan langkah-langkah; pertama, eksposisi struktur umum teks. Sebelum melakukan interpretasi, dilakukan pembacaan yang menyeluruh terhadap struktur umum teks yang menjadi panduan dalam membaca dan menafsirkan teks kawasan BSO. Kedua, kategorisasi elemen teks. Pada langkah ini, elemen-elemen yang ada dalam teks

kawasan BSO akan dikategorisasi. Langkah ini menjadi penting karena, dengan mengadaptasi pendapat Fountanille (2007: 17), seseorang tidak akan mampu menafsirkan teks tanpa memproduksi tipe, kelompok, dan kategori di mana elemen-elemen teks tersebut terstruktur. Dalam kajian kebudayaan materi, kategorisasi merupakan langkah di mana arkeologi menata kebudayaan materi ke dalam beragam tipe berdasarkan derajat kesamaan dan perbedaan. Hodder dan Hutson (2003: 178-83) menguraikan derajat kesamaan dan perbedaan sebagai asosiasi kontekstual yang dibagi ke dalam dimensi konteks, misalnya: temporal, spasial, deposisional, dan tipologis, dan sebagainya. "Temporal" merupakan asosiasi artifak berdasarkan konteks waktunya. "Spasial" merupakan asosiasi berdasarkan sebaran artifak dalam sebuah satuan ruang. "Depositional" adalah asosiasi artifak berdasarkan kesamaan lapisan budaya di mana artifak tersebut mengendap. "Tipologis" adalah asosiasi artifak berdasarkan kategori tipenya. Dimensi-dimensi tersebut saling berjaln dalam sebuah jejaring asosiatif sehingga sebuah artifak bisa saling berhubungan dalam skala dan dimensi yang berbeda. Dalam kajian ini, kategorisasi elemen teks disusun berdasarkan hubungan kesamaan dan perbedaan berdasarkan asosiasi kontekstual pada dimensi temporal, spasial, dan tipologis.

Berdasarkan kategorisasi yang telah disusun, analisis lalu berlanjut ke langkah ketiga, menyusun struktur binarium teks. Sebagai sebuah kata, bangunan-bangunan tersebut dapat dimaknai berdasarkan konstitusi internalnya dengan menyusun relasi biner berdasarkan perbedaan dan kesamaan faktem dan formemnya. Akan tetapi, masing-masing bangunan memiliki konteks eksternal yang meliputi konteks sejarah, budaya, politik, sosial, dan lain-lain. Oleh karena itu, pemaknaan terhadap elemen-elemen teks dilakukan berdasarkan relasi oposisi biner yang terbentuk dengan mengacu pada konstitusi eksternalnya.

Kawasan BSO: Ruang Tiga Jaman

Produksi Ruang I: Benteng dan Ibukota Kerajaan

David Bullbeck berpendapat bahwa Benteng Somba Opu (BSO) memiliki luas yang paling kecil di antara pusat istana lainnya yang pernah dimiliki para penguasa Gowa, namun, benteng inilah yang punya peran strategis dan nilai simbolik yang lebih

menonjol (2005: 77). Sementara Sagimun MD. memberikan keterangan mengenai bentuk dan struktur BSO sebagai berikut:

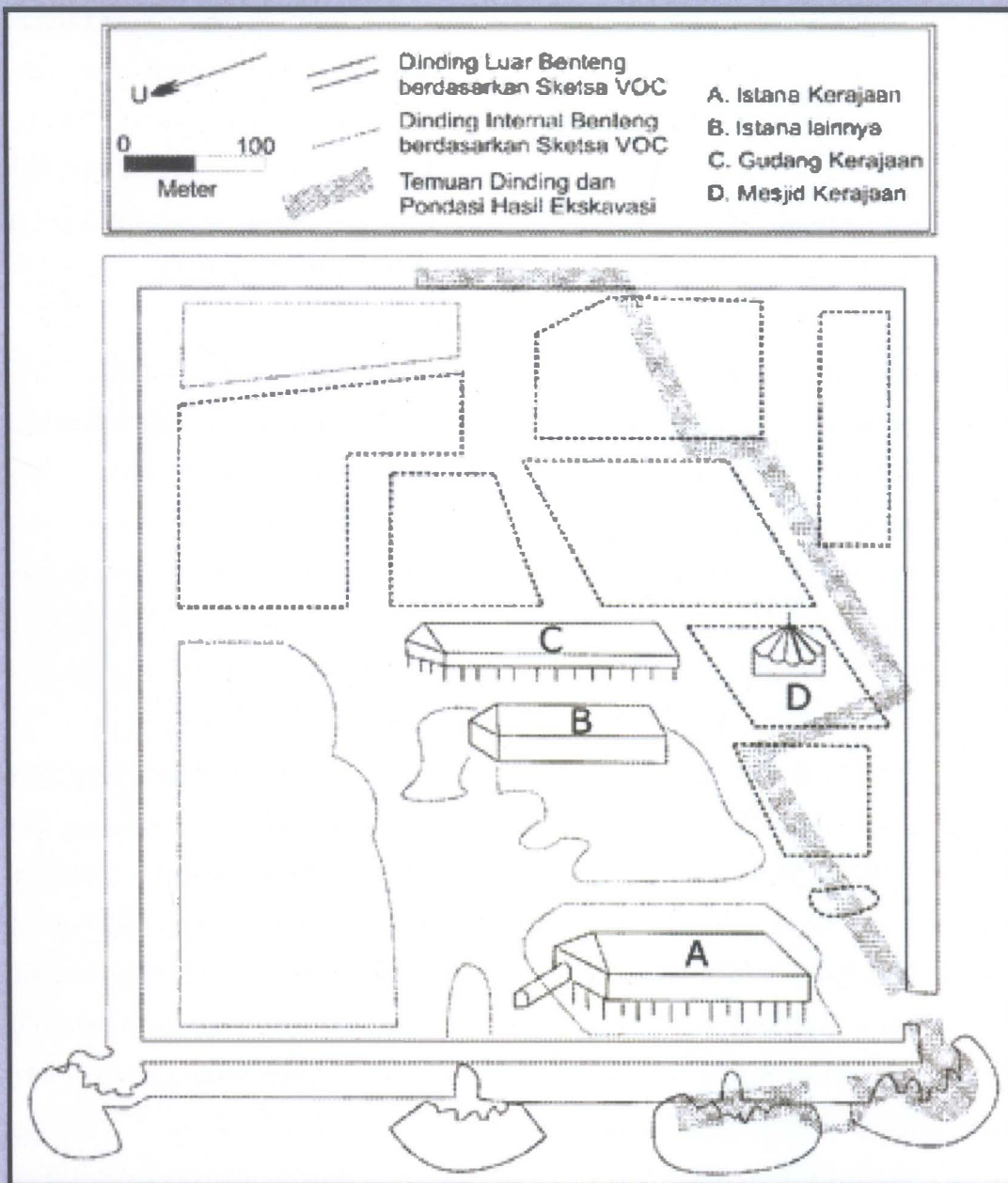
"...berbentuk persegi empat dengan panjang sisi $\pm$ 2 km, tinggi tembok lingkaranya $\pm$ 7-8 m, sedang tebal tembok jingkat tersebut rata-rata 12 kaki atau 3,6 m sehingga prajurit dengan mudah dapat berbaris berkeliling di atas tembok lingkar tersebut... Pada tembok lingkar sebelah barat terdapat empat buah selekoh atau katelum yang berbentuk bundar (setengah lingkaran). Di selekoh inilah ditempatkan meriam-meriam pertahanan...

...pada dinding sebelah utara terdapat dua buah selekoh yang berbentuk persegi. salah satu selekoh berada di bagian tengah dinding utara dan satunya lagi menjorok di sudut timur laut. Dinding sebelah timur dan selatan tidak begitu diperkuat. Membentang di arah selatan dan timur terbentang inti kerajaan yang disebut Kale Gowa (Sugimun, 1982: 11).

Di dalam benteng, terdapat istana yang menjadi tempat kediaman raja, rumah-rumah tempat kediaman para keluarga raja, para bangsawan, pembesar dan pegawai-pegawai kerajaan. Benteng tersebut kemudian dilengkapi dengan persenjataan dan alat-alat pertahanan lainnya. Di luar benteng terdapat permukiman prajurit beserta keluarganya, tukang-tukang, para pedagang baik yang berasal dari Nusantara maupun dari luar, dan penduduk biasa.

Struktur dan suasana BSO dapat pula diketahui dari pengamatan 'tangan pertama' bangsa Eropa yang secara intensif mengadakan kontak dagang dengan Kerajaan Makassar sejak pertengahan abad ke-16 (Bullbeck, 2005: 144). Salah satu gambaran mengenai keadaan BSO pada abad ke-17 diperoleh dari Hendrick Kerckringh, seorang saudagar kepala (*opperkoopman*) yang mengunjungi BSO pada tahun 1638. Kerckringh melukiskan BSO sebagai:

"...benteng besar yang terletak di tepi pantai. Temboknya terbuat dari bata dan batu karang. Raja dan para pembesar kerajaan bertempat tinggal di dalam benteng, di rumah-rumah yang didirikan di atas tiang-tiang besar dengan menggunakan bahan-bahan dari papan kayu, beratapkan sirap atau atap nipah. Sekitar empat mil dari BSO ke arah utara terdapat sebuah benteng di dekat pantai yang dinamakan Oedicupanda (baca: Ujung Pandang). Sekitar dua mil ke arah selatan terdapat benteng Grise (Garassi) dan Panakoeka (Panakkukang). Orang Melayu yang menetap di Somba Opu tinggal di rumah-rumah yang didirikan di antara rumah-rumah orang Makassar. Orang-orang Inggris dan Denmark bertempat tinggal di sebelah utara BSO dalam rumah-rumah yang dibangun dengan baik (Sugimun, 1982: 4).



Gambar 26 : Overlay sketsa VOC dengan fakta arkeologi dari BSO (Bullbeck, 2005: 71)

Jika diperhatikan dengan seksama, deskripsi yang dikemukakan oleh Sugimun hampir pasti diperoleh dari hasil pengamatannya terhadap lukisan Valentijn. Penggambaran Sugimun mengenai bentuk dinding dan letak selekoh sesuai dengan apa yang terlihat pada lukisan tersebut. Adapun lukisan Valentijn yang bertarikh 1638 ,

memang berangkat dari catatan perjalanan yang kemudian disempurnakan oleh sebuah tim artistik. Menurut Bullbeck (2005: 70) tim tersebut mungkin saja menambahkan idealisasi mereka tentang bentuk benteng yang harus berbentuk persegi. Terlepas dari kelemahan masing-masing sumber tersebut dalam menggambarkan struktur dan bentuk BSO di masa lalu, sejatinya masing-masing sumber berkontribusi dalam menyajikan penjelasan tentang struktur dan bentuk benteng di masa lalu.

Produksi Ruang II: TMS, Wujud Miniaturisasi Budaya Sulawesi Selatan

Setelah kekalahan Kerajaan Makassar dalam perang melawan VOC beserta sekutu pada 1667, BSO kemudian dihancurkan. Selang beberapa abad, serangkaian penelitian dan penggalian yang dilakukan guna menemukan kembali benteng tersebut. Penelitian yang intensif mulai dilakukan sejak akhir tahun 1970 membuahkan hasil. Reruntuhan benteng yang menjadi simbol kebesaran Kerajaan Makassar berhasil ditemukan. Dapat dikatakan, BSO memasuki babakan baru dalam daur hidupnya sebagai sebuah wujud kebudayaan materi. Sebuah babak yang akan dibentangkan berikut ini.

Pada tanggal 8-11 Desember 1982, Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Selatan menyelenggarakan seminar bertajuk "Perjuangan Rakyat Sulawesi Selatan Menentang Penjajahan Asing". Seminar yang mengundang berbagai tokoh menghimpun dua puluh makalah yang dipresentasikan selama acara. Sagimun MD, salah seorang sejarawan, hadir dan mempresentasikan makalah berjudul "Somba Opu". Makalah tersebut mengangkat hasil-hasil penelitiannya tentang BSO dan merekomendasikan agar benteng tersebut direkonstruksi mengingat sejarah dan nilai pentingnya (1982: 25-26).

Mungkin makalah itulah yang mengawali serangkaian upaya menemukan dan merekonstruksi wujud BSO yang terlaksana beberapa tahun kemudian. Ekskavasi penyelamatan yang dilaksanakan oleh Suaka Peninggalan Sejarah dan Purbakala Sulawesi Selatan pada tahun 1987 adalah langkah sistematis pertama bagi upaya rekonstruksi BSO sebagaimana yang dinyatakan dalam laporan penelitian (Muthalib, 1987). Lokasi penemuan struktur benteng tersebut disebut Situs BSO.



Peta 3 : Situasi struktur tinggalan BSO hasil rekonstruksi SPSP Sulselra

Berselang dua tahun kemudian, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menetapkan situs BSO sebagai lokasi pembangunan Taman Miniatur Sulawesi (TMS). Dari namanya, proyek tersebut memang mengharapkan keterlibatan provinsi-provinsi lainnya di Pulau Sulawesi. Karena proposal tersebut tidak mendapatkan respons dari pemprov. lainnya, maka nama proyek kemudian berganti menjadi Sulawesi Selatan dalam Miniatur. Namun, dalam perjalanannya, nama TMS tetap melekat pada pelaksanaan proyek tersebut. Proyek yang mulai dilaksanakan pada tahun 1989 selesai dan diresmikan pada tahun 1991.

Jika ditelisik lebih jauh, penggunaan kata miniatur dalam ide tersebut dapat secara langsung dikaitkan dengan keberadaan Taman Mini Indonesia Indah (TMII) di Jakarta. Sebuah wahana wisata sejarah budaya yang mulai dibangun oleh pemerintah sejak tahun 1969 dan diresmikan pada tanggal 20 April 1975. Secara konseptual taman

mini menghimpun keberagaman budaya (puncak-puncak kebudayaan) dari masing-masing provinsi ke dalam sebuah wahana terbuka. Penghimpunan tersebut bertujuan untuk menghadirkan 'keindahan' Indonesia dalam satu wadah tempat masyarakat Indonesia belajar dan menemukenali keragaman budaya yang mereka miliki sebagai satu bangsa. Didukung oleh inventarisasi bangunan-bangunan daerah se-Indonesia, rumah adat dari provinsi-provinsi di Indonesia dibuat "seasli-aslinya", sehingga membangkitkan suatu pemikiran bahwa Indonesia adalah warisan leluhur.

Dalam konsepsi yang sama namun dengan skala yang berbeda, TMS juga menghimpun keberagaman budaya dari setiap kabupaten yang ada di Sulawesi Selatan ke dalam satu wahana lingkungan terbuka. Jalinan konseptual tersebut nampaknya menggambarkan kesinambungan yang terjadi antara pemerintah pusat dan daerah, utamanya dalam hal pembinaan dan pengembangan kebudayaan. Dalam pemahaman yang demikian, fenomena pembangunan TMS oleh Pemprov. tidak bisa dilepaskan dari konteks kepemimpinan yang berlaku di pusat.

Di atas delta tempat ditemukannya struktur BSO, dilakukan pembebasan lahan. Semua penduduk yang sebelumnya bertempat tinggal di antara reruntuhan struktur diberi ganti rugi dan rumah pengganti yang telah disediakan oleh panitia pembangunan. Selain menyediakan rumah, panitia juga membiarkan areal persawahan yang ada di sisi timur struktur benteng untuk tetap berfungsi sebagai sawah. Penduduk yang memiliki sawah tetap diizinkan mengelola. Hal itu dimaksudkan untuk memberikan nuansa pedesaan dan menunjukkan pola bertani tradisional masyarakat Sulawesi Selatan. Lahan yang telah dibebaskan seluruhnya seluas ± 40 hektar, diberi nama "Kawasan BSO". Kawasan tersebut kemudian dibagi ke dalam tiga kelompok bangunan, yaitu kawasan rumah adat, kawasan anjungan pameran, serta kawasan rumah tradisional, dan kawasan pasar/galeri seni.

Kawasan rumah adat merupakan kawasan yang berada di dalam area yang dikelilingi oleh struktur benteng. Kawasan ini diidealkan sebagai kawasan cagar bagi rumah-rumah adat yang autentik dan mewakili keempat etnis besar yang ada di Sulawesi Selatan, yaitu: Bugis, Makassar, Mandar dan Toraja. Etnis Bugis diwakili oleh rumah adat dari Kabupaten Wajo, Luwu, dan Soppeng. Etnis Makassar diwakili oleh rumah adat Kajang (Kabupaten Bulukumba, Gowa, dan Kotamadya Ujung Pandang



Rumah Adat Kajang



Rumah Adat Toraja



Rumah Adat Mandar



Rumah Adat Soppeng



Museum Pattingaloang



Baruga Somba Opu

Foto 59 : Kolase foto beberapa bangunan dalam kawasan rumah adat (dokumentasi penulis, 2013)

(Tallo). Etnis Toraja diwakili oleh rumah adat dari Kabupaten Tana Toraja. Adapun rumah adat dari etnis Mandar dibangun berdasarkan catatan lontara yang menggambarkan secara detail bentuk rumah adat etnis Mandar yang pernah ada. Selain rumah adat Mandar, berdiri pula rumah adat dari Kabupaten Majene dan Kabupaten Mamuju. Keseluruh rumah adat tersebut didirikan oleh ahli pembuat rumah dari masing-masing etnis, lengkap dengan upacara ritual yang mengawali pembangunannya.

Selain rumah adat, terdapat bangunan lain yaitu Baruga Somba Opu, Museum Pattingaloang, amfiteater dan Masjid. Baruga Somba Opu merupakan gedung pertemuan yang didirikan dengan gaya arsitektur tradisional Sulawesi Selatan. Museum Pattingaloang merupakan tempat pameran dan penyimpanan semua temuan-temuan penting yang diperoleh dari ekskavasi di situs BSO seperti peluru, senjata tradisional, sampel bata bermotif, tembikar, dan keramik. Selain temuan ekskavasi terdapat pula benda-benda lain seperti peralatan rumah tangga, pakaian, dan mata uang kuno. Amfiteater berdiri sebagai panggung terbuka yang digunakan untuk pementasan kesenian. Adapun masjid merupakan bangunan yang telah ada sebelum proyek TMS dimulai. Masjid tersebut didirikan oleh penduduk yang telah direlokasi.



Dinas Kehutanan



Balai Besar Keselamatan Kerja



Aula Pertemuan



Anjungan Universitas Hasanuddin

Foto 60 : Kolase foto beberapa bangunan di kawasan Anjungan Pameran Tetap
(dokumentasi penulis, 2013)

Bergerak ke arah timur, dibangun kawasan “anjungan pameran tetap”. Beberapa lembaga baik pemerintah maupun swasta diundang untuk mendirikan anjungan pameran tetap. Instansi-instansi negeri seperti dinas-dinas dalam lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan, RRI, BUMN, universitas, dan lain-lain. Anjungan dari perusahaan swasta seperti PT. Inco, Lembaga Kursus Handayani, Koran Fajar, dan lain-lain. Terdapat kurang lebih 35 lembaga yang memiliki anjungan di kawasan anjungan pameran tetap. Bangunan tersebut didirikan di atas tanah kapling yang telah disediakan oleh Panitia Pembangunan TMS. Setiap anjungan dibangun dengan gaya modern, yaitu fondasi, dinding dari bata, dan atap genteng atau asbes. Melengkapi “kawasan anjungan pameran tetap”, berdiri sebuah aula pertemuan yang dibangun dengan material modern namun berusaha mengadopsi gaya atap dalam arsitektur tradisional Sulawesi Selatan. Ukurannya yang gigantis diidealkan mampu menampung 500-an orang.



Rumah Tradisional Kab. Bantaeng



Gazebo



Rumah Tradisional Kab. Sinjai



Galeri Seni

Foto 61 : Kolase foto beberapa bangunan di kawasan Rumah Tradisional dan Pasar Seni
(dokumentasi penulis, 2013)

Kelompok bangunan di ujung timur kawasan BSO adalah bangunan-bangunan yang terhimpun dalam kawasan Rumah Tradisional, dan kawasan Pasar/Galeri Seni. Berbeda dengan “kawasan rumah adat”, rumah-rumah yang ada dalam kawasan ini merupakan bangunan yang didirikan oleh pemerintah kabupaten (Pinrang, Soppeng, Enrekang, Bone, Jeneponto, Barru, Pangkep, Sidrap, Wajo, Polewali Mamasa, dan Sinjai). Bangunan-bangunan itu disebut rumah tradisional karena tidak memiliki nilai otentisitas. Bangunan itu sekedar menyesuaikan dengan konsep rumah tradisional yang umum dimiliki oleh penduduk dalam daerah tersebut.

Kawasan berikutnya ialah ‘pasar seni’. Di dalamnya terdapat beberapa galeri yang juga dibangun dengan gaya arsitektur rumah tradisional. Galeri-galeri tersebut dihuni oleh beberapa seniman lokal yang giat berkarya dalam khazanah seni budaya Sulawesi Selatan. Selain galeri, terdapat pula balai-balai (gazebo) yang berfungsi sebagai tempat penjualan pernak-pernik kerajinan tangan khas Sulawesi Selatan.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan selaku Pemroduksi

Pembangunan Taman Miniatur Sulawesi dilaksanakan dalam periode kedua kepemimpinan Gubernur Sulawesi Selatan Prof. H. Ahmad Amiruddin (1983-1988, 1988-1993). Akan tetapi, inisiatif yang sebenarnya berangkat dari diskursus kalangan intelektual lokal—sejarawan, antropolog, dan arkeolog—pada masa itu (Robinson, 1997: 73). Bagi Pemprov, ada keinginan untuk menciptakan lebih banyak destinasi budaya sehingga turis yang berkunjung tidak langsung bergerak menuju Tana Toraja yang pada saat itu telah dikenal sebagai destinasi wisatawan asing. Kota Makassar (dahulu Kota Madya Ujung Pandang) merupakan daerah yang potensial untuk dikembangkan menjadi destinasi transit sebelum turis-turis bergerak ke wilayah lain di Sulawesi Selatan. Keinginan tersebut disambut oleh kalangan sarjana yang sedang giat-giatnya melakukan penelitian sejarah di Sulawesi Selatan. Penemuan BSO merekatkan kedua pihak. Beberapa sarjana yang dekat dengan gubernur, menemui Ahmad Amiruddin guna melontarkan ide untuk merekonstruksi dan menjadikan BSO sebagai kawasan wisata sejarah budaya.

Mukhlis Paeni yang menjabat sebagai Ketua Masyarakat Sejarawan Indonesia Cabang Sulawesi Selatan ditunjuk sebagai ketua panitia pembangunan yang kemudian

bergerak di bawah bendera “Yayasan Pembangunan Miniatur Sulawesi Selatan”. Panitia tersebut terdiri dari berbagai unsur (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Selatan, SPSP Sulselra, Universitas Hasanuddin, Universitas Negeri Makassar (dulu IKIP Ujung Pandang) dan Universitas Islam Negeri Alauddin (dulu IAIN Alauddin Ujung Pandang) turut dilibatkan dalam kepanitiaan. Pemerintah daerah di Sulawesi Selatan terlibat dalam pembiayaan dan pembangunan rumah-rumah adat dan tradisional yang ditempatkan dalam kawasan tersebut.

Diresmikan pada tahun 1991, TMS menjadi tuan rumah pelaksanaan Festival Budaya Sulawesi Selatan. Dalam festival tersebut, berbagai wujud seni budaya ditampilkan oleh beragam komunitas. Penampilan komunitas-komunitas tersebut didukung oleh pemerintah daerahnya masing-masing. Berkaitan dengan itu, Pemprov. juga melaksanakan pameran pembangunan yang merupakan agenda tahunan. Dalam pameran tersebut, setiap biro, dinas, SKPD, dan pemerintah kabupaten/kota hadir dan menyajikan berbagai capaian-capaian yang telah mereka raih.

Selain sebagai lokasi tetap pameran pembangunan, TMS juga ramai oleh kunjungan wisatawan baik domestik maupun internasional. Sesuatu yang memang sudah direncanakan oleh pembangunannya. Di samping itu, TMS juga menjadi lokasi yang sering digunakan oleh mahasiswa untuk berbagai kegiatan seperti pengkaderan, kegiatan *outdoor*, dan acara permusyawaratan. Beberapa kegiatan yang ditempatkan di Makassar sering kali juga menyediakan sesi kunjungan ke TMS bagi pesertanya.

Pada periode kepemimpinan Gubernur H. Zainal Basri Palaguna (1993-1998, 1998-2003), pelaksanaan festival budaya dan pameran pembangunan tersebut masih merupakan agenda rutin, meskipun dalam perjalanannya, sempat tidak terlaksana dengan berbagai alasan. Pada masa kepemimpinan H. M. Amin Syam (2003-2008), kawasan TMS masih menjadi lokasi penyelenggaraan pameran pembangunan. Perbedaan tampak baik sebelum maupun sesudah tahun 1998. Jatuhnya Orde Baru dan terbukanya iklim untuk daerah-daerah mengembangkan hak-hak otonominya membuat pemerintah daerah yang dulu berperan aktif dalam pelaksanaan kegiatan tersebut mulai mengendur.

Pada tahun 2005, Pemprov melalui Dinas Pariwisata mengeluarkan izin penggunaan lahan TMS kepada seorang pengusaha pengolahan sampah plastik.

Berbekal kontrak penggunaan lahan, pengusaha tersebut mendirikan pabrik di sebuah lahan yang hanya berjarak kurang lebih 10 meter dari selekoh barat laut BSO. Pendirian itu seakan menjadi preseden yang menegaskan berkurangnya perhatian pemerintah terhadap pengelolaan kawasan tersebut—untuk tidak menyebut menelantarkan. TMS menjadi lokasi pelaksanaan pameran pembangunan untuk terakhir kalinya pada tahun 2008, di akhir masa jabatan H.M. Amin Syam.

Meskipun event-event itu berhenti namun reproduksi makna atas keragaman budaya Sulawesi Selatan masih terus berlangsung, yang kemudian lebih diarahkan untuk menjadi alat yang bisa membantu kepada upaya pencapaian tujuan nasional. Sebagai contoh, keragaman budaya diramu sedemikian rupa untuk menjadi daya tarik dalam bidang pariwisata dalam rangka meningkatkan pendapatan negara. Kebudayaan bagi rezim Orde Baru tidak dipahami sebagai sistem makna namun, sebagai sumber daya dalam bentuk arsitektur, makanan, pakaian tradisional, lagu dan tarian tradisional sebagai pajangan (Sutton, 2002: 29). Puncaknya, tahun 1991 ditetapkan sebagai tahun kunjungan wisata Indonesia (*Visit Indonesia Year*). Tahun ketika pemerintah mencanangkan dimulainya mobilisasi besar-besaran sumber daya budaya ke dalam industri pariwisata.

Produksi Ruang III : GDP, Menemukan Bali di Gowa

Kawasan BSO kembali mengalami produksi ruang, namun pembangunannya tidak dilakukan oleh pemerintah. Produksi ruang yang ketiga dilakukan oleh perusahaan swasta yang dikenal sebagai pengembang wahana hiburan di Indonesia. Biaya pemeliharaan dan perawatan yang sulit ditutupi membuat Pemprov. menguasai pengelolaan kawasan tersebut selama 30 tahun kepada sebuah perusahaan swasta. Rencana yang pada awalnya sempat tersendat oleh gelombang demonstrasi, akhirnya tetap berjalan dan selesai pada tahun 2012.

Setelah tidak lagi menjadi arena pameran pembangunan, TMS seolah menjadi lahan tak bertuan. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Selatan selaku pengelola TMS, sepertinya tidak lagi menaruh perhatian besar dalam perawatan dan pelestariannya. Beberapa bangunan rumah adat dan rumah tradisional yang tersebar di kawasan tersebut mulai mengalami kerusakan. Kondisi rusak yang paling mencolok

terlihat di rumah adat Mamasa yang dibangun bersebelahan dengan rumah adat Toraja. Pemekaran Provinsi Sulawesi Selatan yang membentuk Provinsi Sulawesi Barat, membuat Kabupaten Polmas selaku penanggungjawab bangunan lepas tangan karena kabupaten tersebut tergabung ke dalam provinsi yang baru dibentuk itu. Keseluruhan anjungan pameran tetap mulai mengalami kerusakan karena tidak lagi memperoleh perhatian dari instansi/lembaga pemiliknya. Karena itu, hampir seluruh bangunan anjungan telah beralih fungsi menjadi hunian bagi penduduk sekitar yang populasinya makin bertambah. Dalam kondisi yang terbengkalai tersebut, pada tanggal 18 Oktober 2010, Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi didaulat oleh Gubernur Sulawesi Selatan Syahrul Yasin Limpo untuk meletakkan batu pertama sebagai tanda dimulainya pembangunan "Gowa Discovery Park".

Proyek ini dibangun di dalam kawasan BSO, memanfaatkan lahan kosong yang telah dibebaskan oleh pemprov. Proyek ini merupakan wahana hiburan modern keluarga yang terdiri dari wahana taman air, taman burung, dan wahana *treetop*. Wahana taman air (*waterboom*) dan taman burung menempati areal persawahan yang berada di antara kawasan rumah adat dan kawasan anjungan pameran. Sedangkan wahana *treetop* memanfaatkan pepohonan dalam sebuah lahan kosong yang berada di antara rumah adat Soppeng dan rumah adat Toraja. Di sebelah wahana taman air, terdapat wahana taman burung dan gazebo yang bisa dimanfaatkan pengunjung secara gratis untuk beristirahat. Sebuah kafetaria dibangun di tengah-tengah wahana, membelakangi sebuah kolam ikan hias.

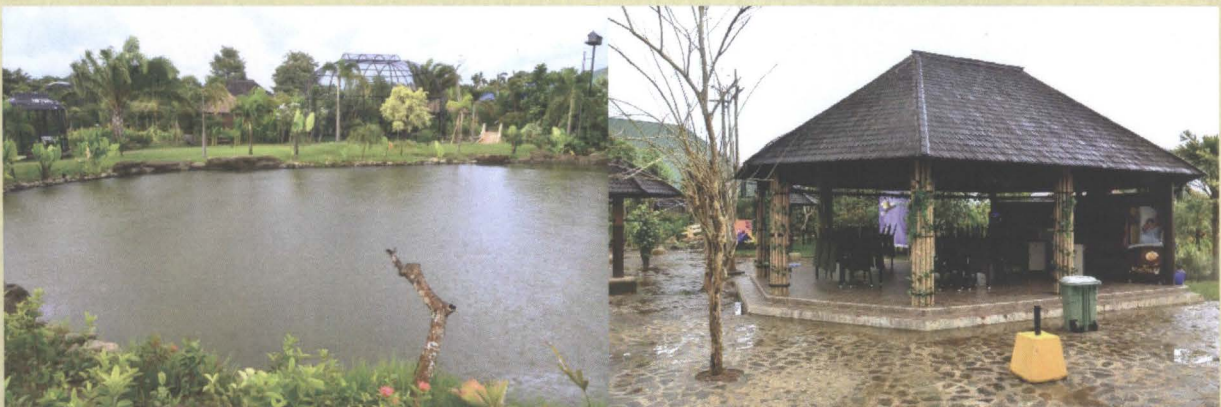


Foto 62 : Kolase foto situasi wahana Taman Burung (dokumentasi penulis, 2013)

Wahana taman air dan taman burung yang menyajikan nuansa budaya Bali. Atribut-atribut tradisional Bali dipajang dan mewarnai kedua wahana tersebut. Kain prada terlihat membungkus beberapa tiang dan beberapa payung dengan kain poleng yang dipajang pada pintu masuk. Balai-balai yang terdapat di dalam kedua wahana tersebut juga dibuat menyerupai balai-balai yang sering dijumpai pada hotel-hotel di Bali, lengkap dengan pemubug (candi kurung) sebagai kemuncak atap. Toko cendera mata juga menyediakan pernik-pernik khas Bali.



Foto 63 : Kolase foto ornamen Bali dalam wahana taman air (dokumentasi penulis, 2013)

Wahana taman air dan taman burung berdiri di atas lahan seluas ± 100 meter persegi dan dikelilingi oleh pagar pembatas. Pagar sisi barat yang membatasi wahana taman burung dibuat dari rangka besi yang memungkinkan pengunjung melihat tinggalan dinding selatan dan timur BSO. Tembok yang mengelilingi wahana taman air dibuat dari bata, dimaksudkan untuk melindungi privasi pengunjung taman air. Di sisi utara kedua wahana tersebut dibuat lahan parkir seluas ± 400 meter persegi. Di sebelah utara lahan parkir, berdiri sebuah bangunan yang berfungsi sebagai kantor pengelola GDP.

Wahana yang ketiga adalah *treetop*. Sesuai dengan namanya, wahana ini merupakan wahana bermain alam terbuka (*outdoor*) di mana pengunjung bisa melihat kawasan rumah adat dari ketinggian.

Kolaborasi Penguasa/Pengusaha

Dalam dua momen produksi sebelumnya, kawasan BSO diproduksi oleh pihak penguasa dalam hal ini Kerajaan Makassar lalu oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Berbeda dengan momen produksi sebelumnya, pembangunan GDP yang mulai dilaksanakan pada tahun 2010 diinisiasi oleh proposal yang diajukan oleh PT. Mirah Mega Wisata (PT. MMW). Sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang penyediaan wahana hiburan di Indonesia. Perusahaan tersebut dipimpin oleh Zaenal Tayeb yang merupakan pengusaha asal Sulawesi Selatan yang sukses mengembangkan usahanya di Bali.

Intensi pengusaha tersebut untuk menanamkan modalnya di tanah kelahirannya bermula dari ajakan Gubernur Sulawesi Selatan Syahrul Yasin Limpo dalam "Pertemuan Saudagar Bugis Makassar" tahun 2010. Dalam sambutannya, berulang kali Syahrul mengajak saudagar-saudagar Bugis dan Makassar yang sukses berkiprah di luar untuk kembali dan berperan serta dalam pembangunan di Sulawesi Selatan. Pertemuan yang dilaksanakan di Wisma Kalla, Makassar pada tanggal 16-17 September 2010, juga dihadiri oleh Zaenal Tayeb. Menyambut ajakan tersebut, Zaenal Tayeb mulai membangun komunikasi dengan gubernur dan menyatakan niatnya untuk membangun taman hiburan di Kota Makassar. Pemprov kemudian menawarkan kawasan BSO sebagai lokasi pembangunan. Momen kunjungan kerja Menteri Dalam Negeri ke Sulawesi Selatan kemudian dimanfaatkan untuk meminta beliau melakukan peletakan batu pertama pembangunan proyek tersebut.

Namun, pelaksanaan pembangunan GDP di kawasan TMS kemudian menuai protes dari berbagai kalangan utamanya mahasiswa yang tergabung dalam Forum Somba Opu (FSO). Proyek tersebut dinilai bisa mengancam kelestarian situs BSO dan tidak memiliki korelasi konseptual dengan TMS yang dirancang sebagai tempat wisata sejarah-budaya. Selain itu, proyek ini dilaksanakan tanpa didahului oleh studi untuk mengkaji dampak pelaksanaan proyek. Protes meluas dan disertai dengan aksi unjuk rasa di berbagai tempat di Kota Makassar. FSO bahkan melaporkan pelaksana proyek sebagai tindakan pengrusakan situs ke Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan dengan bersandar pada UU Nomor 10 tahun 2011 tentang Cagar Budaya.

Dalam sebuah pernyataan resmi yang dipublikasikan di berbagai media cetak lokal, Gubernur Syahrul Yasin Limpo menjelaskan bahwa:

...penataan BSO dimaksudkan untuk melestarikan keberadaan situs bersejarah yang merupakan satu-satunya benteng yang dibangun oleh rakyat Gowa dalam mempertahankan eksistensi Kerajaan Gowa pada abad XV. Pemerintah daerah bertanggungjawab memelihara dan melestarikan warisan tersebut sebagai solusi yang paling menguntungkan atas permasalahan yang tengah dihadapi, antara lain tingginya biaya pemeliharaan yang diperlukan, sulitnya mengamankan aset dari penyerobotan/penjarahan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab, serta bagaimana mengelola situs agar memiliki nilai tambah dan tetap mampu menjalankan fungsinya sebagai media pendidikan anak bangsa.

Dari pernyataan tersebut kita bisa menyimpulkan, pertama: proyek GDP direncanakan sebagai salah satu langkah pelestarian situs. Kedua, pemerintah mengetahui dengan baik nilai kesejarahan yang terkandung dalam situs. Ketiga, tanggung jawab pengelolaan dan pemeliharaan mengalami kendala biaya dan pengamanan. Keempat, proyek tersebut bertujuan untuk membuat kawasan itu mandiri dalam menjalankan fungsi edukasinya.

Berbagai pertemuan digelar antara pemprov, PT. MMW, dan masyarakat untuk mencari titik temu kepentingan yang saling berbenturan tersebut. Dari pertemuan-pertemuan itu, pemprov. menginstruksikan penghentian pekerjaan dan membentuk tim yang ditugaskan khusus untuk melakukan kajian zonasi. Tim yang terdiri dari ahli arkeologi dan staf Balai Pelestarian Cagar Budaya Makassar (dulu Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Makassar) mulai bekerja dan menyelesaikan laporan kajian zonasi BSO untuk disampaikan sebagai bahan pertimbangan pemprov. dalam menentukan kebijakan terkait pembangunan GDP.

Dalam laporan kajian tersebut, zonasi kawasan BSO dibagi ke dalam empat zona, yaitu zona inti, zona penyangga, zona pengembangan dan zona penunjang disertai ketentuan-ketentuan pemanfaatan pada masing-masing zona (BP3 Makassar, 2011: 54-58). Zonasi tersebut berdasarkan interpretasi terhadap UU No. 10 tahun 2011 tentang Cagar Budaya yang baru disahkan. Kajian tersebut kemudian menyarankan lokasi pembangunan wahana taman air dipindahkan dari zona penyangga ke zona penunjang (BP3 Makassar, 2011: 60). Namun, saran tersebut tidak dipenuhi sehingga pekerjaan tetap berjalan sesuai dengan rencana awal.

Setelah kajian dirampungkan, PT. MMW kemudian melanjutkan pengerjaan proyek dan mencapai tahap penyempurnaan sejak Januari 2012. Namun, beberapa

kendala teknis administratif membuat rencana peresmian sempat tertunda beberapa kali. Kendala-kendala tersebut antara lain belum dilakukannya penandatanganan kontrak kerja sama antara pemprov. selaku pemilik lahan dengan PT. MMW. Penandatanganan kontrak tertunda karena kedua belah pihak belum menemui kata sepakat menyangkut persentase saham pemprov, penetapan tarif masuk, dan susunan manajemen. Sambil melanjutkan proses negosiasi, PT. MMW melaksanakan *soft-launching* pada tanggal 7 Juli 2012. Penandatanganan kontrak kerja sama akhirnya terlaksana pada tanggal 14 Agustus 2012 namun, hingga bulan April 2013 GDP belum pernah diresmikan.

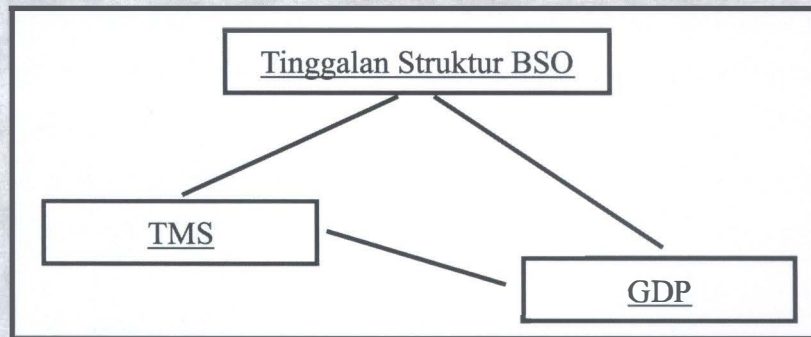
Sejak beroperasi, GDP seolah menjadi ikon baru kawasan BSO. Pamor TMS tidak hanya meredup oleh daya tarik wahana hiburan keluarga tersebut, namun ditambah dengan kebijakan pemprov terkait pelaksanaan pameran pembangunan. Pada tanggal 30 Agustus sampai 2 September 2012, pemprov. melaksanakan sebuah kegiatan bertajuk *Sulsel Incorporated and Development Expo* (SIDE 2012). Kegiatan tersebut merupakan metamorfosa dari kegiatan yang dahulunya dikenal dengan nama Pameran Pembangunan Sulawesi Selatan. Pameran tidak lagi dilaksanakan di TMS namun berpindah ke *Celebes Convention Center* (CCC). Pelaksanaannya pun tidak lagi dikelola langsung oleh pemprov. namun di serahkan kepada PT. Debindo. Meskipun dilaksanakan dengan nama dan di lokasi yang berbeda, pameran tersebut merupakan ajang expose hasil-hasil pembangunan yang diikuti oleh pemerintah kabupaten/kota dan berbagai instansi, lembaga dan perusahaan di Sulawesi Selatan.

Tekstualitas dan Makna Elemen Teks Kawasan BSO

Struktur Umum Teks Kawasan BSO

Mengacu pada uraian tentang proses produksi yang terjadi di kawasan BSO, dapat dipahami bahwa akumulasi dari ketiga momen produksi tersebut menghasilkan sebuah kawasan yang menempatkan tinggalan struktur BSO sebagai sentrum dari kawasan tersebut. Tinggalan struktur yang merupakan hasil dari rekonstruksi pada momen produksi kedua merupakan 'jejak' dari masa lalu. Tanpa keberadaan tinggalan struktur BSO, kawasan delta sungai Jeneberang tidak akan memiliki signifikansi seperti yang dimilikinya sekarang. Karena itu, tak salah jika tinggalan struktur BSO disebut sebagai

alasan keberadaan (*raison d'être*) bagi bangunan-bangunan lain yang di produksi pada momen produksi kedua dan ketiga.



Bagan 1 : Struktur Umum Teks Kawasan BSO

Jika digambarkan dalam bentuk bagan, tinggalan struktur akan menempati posisi puncak. Di bawah tinggalan struktur tersebut terdapat produk dari momen penulisan yang kedua, Taman Miniatur Sulawesi (TMS) dan produk dari momen produksi ketiga, Gowa Discovery Park (GDP). Relasi vertikal antara ketiganya menunjukkan sebuah kerangka waktu yang terbentang dari abad ke-16 hingga abad ke-21. Relasi vertikal tersebut dapat pula dipandang sebagai relasi interpretatif di mana bangunan-bangunan yang berdiri pada momen produksi yang kedua dan ketiga merupakan hasil interpretasi terhadap tinggalan struktur BSO. Dalam relasi interpretatif itu pula, TMS dan GDP merupakan bagian dari masa kini yang menginterpretasi sebuah 'jejak' dari masa lampau.

Kategorisasi Elemen Teks Kawasan BSO

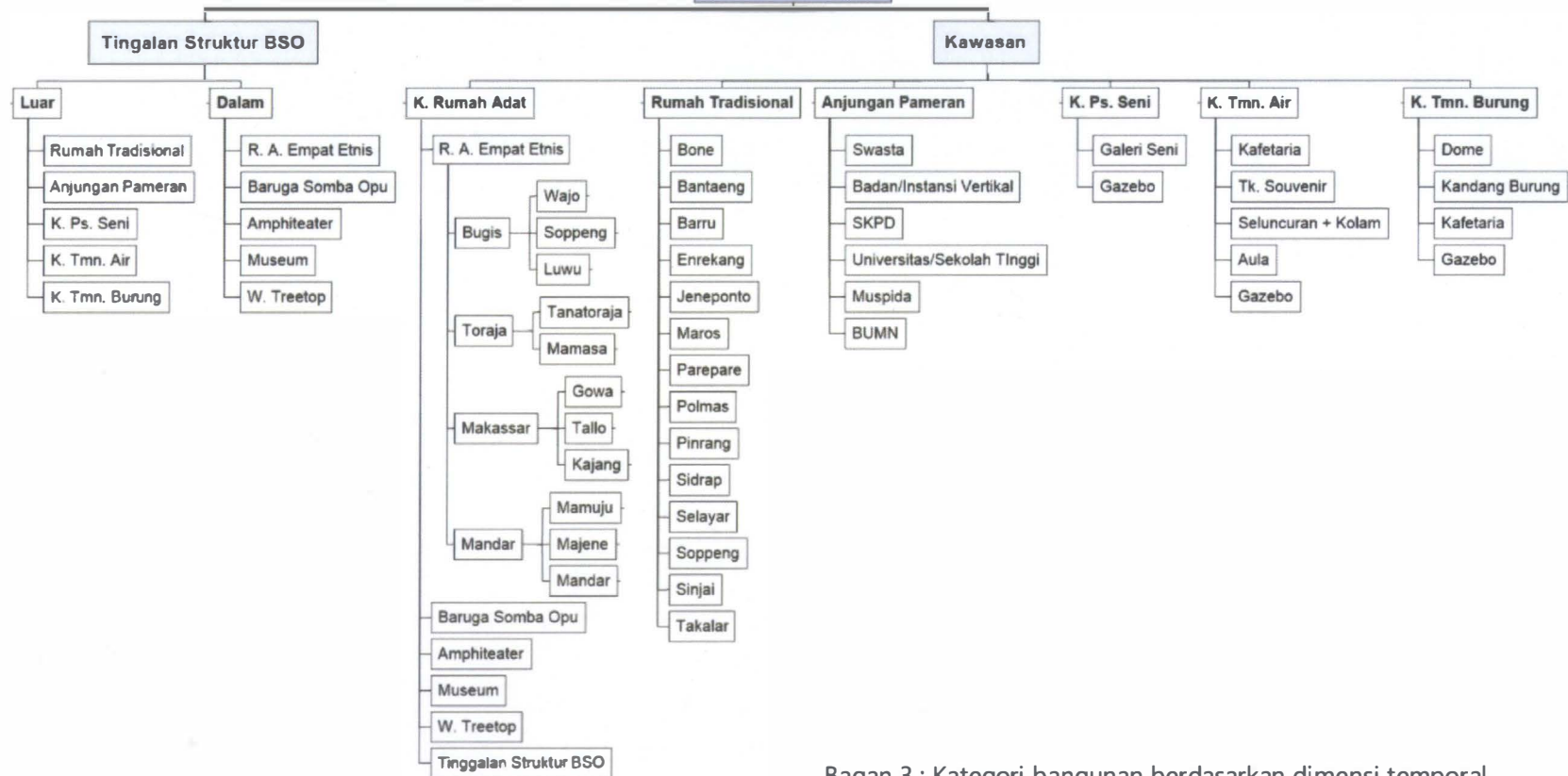
Langkah selanjutnya dalam analisis struktural terhadap teks Kawasan BSO adalah merumuskan kategorisasi elemen-elemen teksnya berdasarkan dimensi temporal, spasial, dan tipologis. Secara temporal, bangunan di kawasan BSO dapat dikelompokkan ke dalam kategori waktu Abad 16-17, abad 20, dan awal abad 21. Kategori tersebut disusun berdasarkan konteks momen produksi dari masing-masing elemen teks.



Bagan 2 : Kategori Bangunan berdasarkan Dimensi Temporal

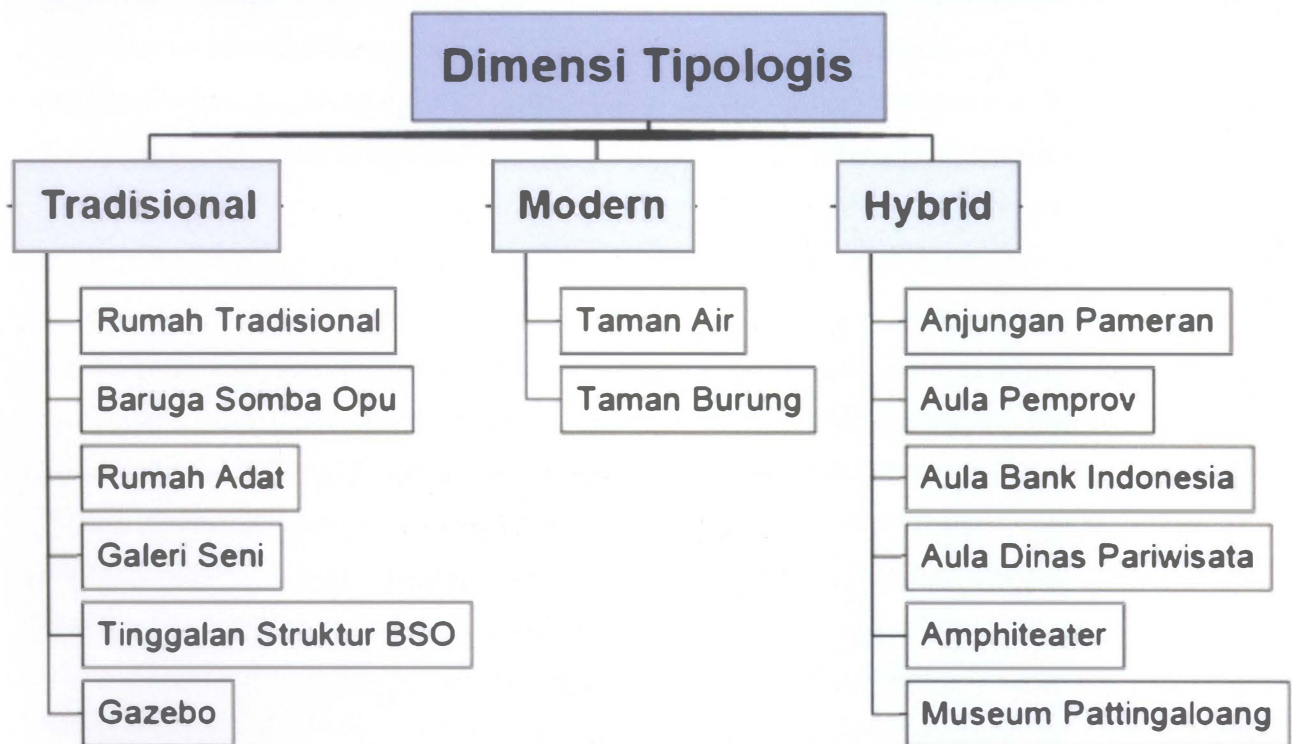
Berdasarkan dimensi spasialnya, keseluruhan elemen dapat dibagi ke dalam dua kategori besar, yaitu: pertama, berdasarkan relasinya dengan tinggalan struktur BSO. Tinggalan struktur yang ada dalam kawasan tersebut merupakan puing dari struktur benteng pertahanan Kerajaan Makassar. Sebagai sebuah bangunan yang dulunya berfungsi sebagai infrastruktur pertahanan, meskipun dalam bentuknya yang tak lagi utuh, tinggalan struktur BSO berfungsi melindungi wilayah-dalam dari potensi serangan dari luar. Berdasarkan fungsi tersebut, tinggalan struktur tersebut membentuk dikotomi antara bangunan yang berada di wilayah-dalam dengan bangunan yang berada di wilayah-luar. Bangunan-bangunan yang terdapat di wilayah-dalam yaitu: rumah adat empat etnis, Baruga Somba Opu, Museum Karaeng Pattingaloang, amfiteater, dan wahana *treetop*. Bangunan-bangunan yang terdapat di wilayah-luar tinggalan struktur yaitu, bangunan-bangunan di taman burung, taman air, kawasan anjungan pameran, kawasan rumah-rumah tradisional, dan kawasan pasar seni. Berdasarkan pembagian tersebut, terlihat peririsan antara momen produksi kedua dan ketiga, di mana wahana *treetop* yang merupakan hasil dari momen produksi ruang yang ketiga ditempatkan di wilayah-dalam tinggalan struktur BSO yang merupakan hasil dari momen produksi kedua.

Dimensi Spasial



Bagan 3 : Kategori bangunan berdasarkan dimensi temporal

Kedua, kategorisasi elemen teks berdasarkan pembagian kawasan yang ada dalam kawasan BSO. Dalam kategori ini, bangunan-bangunan dikelompokkan menjadi enam kawasan, yaitu: kawasan rumah adat, taman burung, taman air, kawasan anjungan pameran, kawasan rumah tradisional, dan kawasan pasar seni. Kawasan-kawasan ini terbentuk semata didasarkan pada hasil produksi ruang kawasan BSO pada momen produksi kedua dan ketiga. Dalam kategori ini, tinggalan struktur BSO yang berdasarkan dimensi temporal termasuk dalam kategori waktu abad ke-16-17, menjadi bagian dari kategori kawasan rumah adat yang secara temporal termasuk ke dalam kategori waktu awal abad ke-20.



Bagan 4 : Kategori Bangunan berdasarkan Dimensi Tipologis

Kategorisasi yang ketiga didasarkan pada relasi kesamaan dan perbedaan berdasarkan dimensi tipologis. Secara keseluruhan, bangunan-bangunan pada kawasan BSO dapat dibagi ke dalam tiga bentuk tipologi. Tipe pertama adalah tipe bangunan tradisional, yaitu bangunan-bangunan yang berdiri dengan konsep arsitektur tradisional Sulawesi Selatan. Tipe kedua adalah tipe bangunan modern. Istilah modern

digunakan dalam maknanya sebagai 'gaya bangunan baru' yang secara konsep konstruksi merujuk pada tipe bangunan yang berbeda dengan bangunan tipe tradisional. Adapun tipologi ketiga adalah tipe bangunan hibrid, tipe bangunan yang menggabungkan antara konstruksi bangunan modern dengan penambahan aksesoris bangunan tradisional. Berdasarkan dimensi tipologisnya, kategori elemen-elemen teks berdasarkan dimensi spasial dan temporal yang ada dalam kawasan BSO saling beririsan.

Struktur Binarium Elemen Teks Kawasan BSO

Langkah ketiga dalam analisis struktural terhadap teks kawasan BSO adalah menafsirkan makna dari elemen-elemen teks kawasan tersebut. Guna mensistematiskan uraian interpretasi, penyusunan struktur binarium teks akan mengikuti alur dimensi spasial berdasarkan kawasan untuk kemudian berkembang mengikuti relasi yang terbentuk berdasarkan dimensi temporal dan tipologisnya.

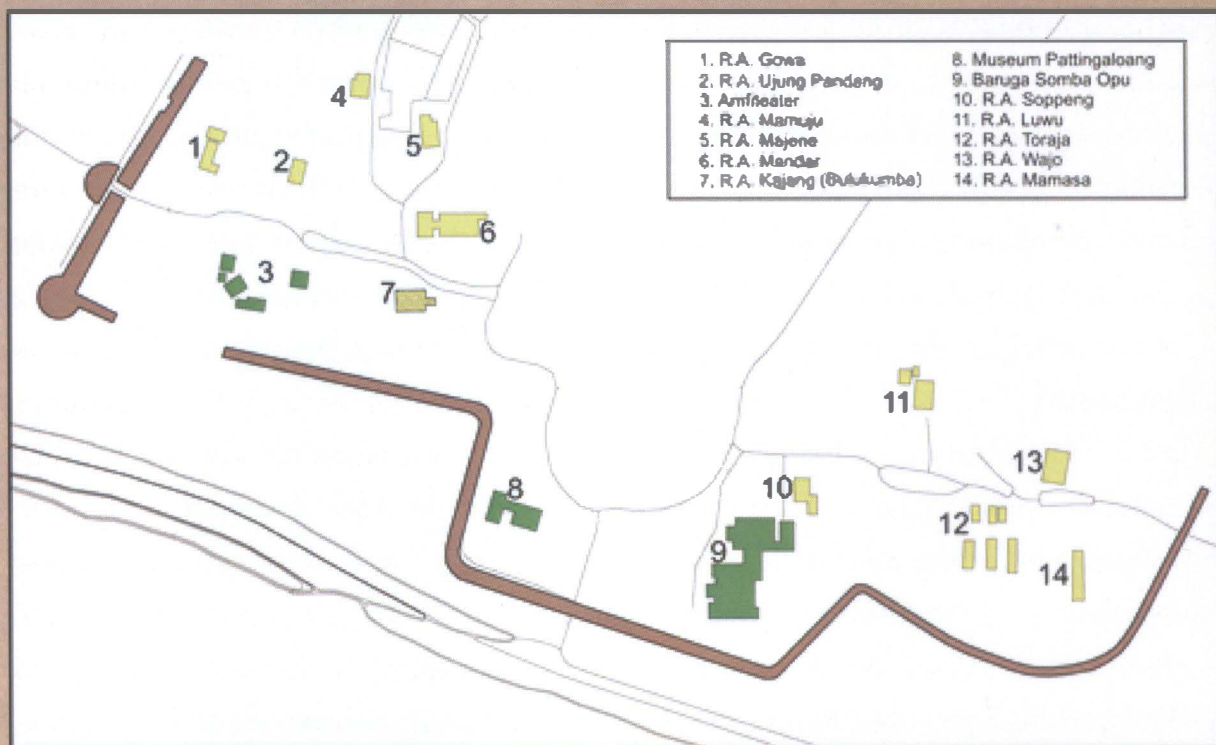
Kawasan Rumah Adat

Relasi biner yang pertama ialah relasi biner tinggalan struktur BSO, rumah adat empat etnis. Tinggalan struktur BSO merupakan 'jejak' masa lampau yang ditemukan dan direkonstruksi pada momen produksi yang kedua. Rekonstruksi yang dilakukan tidak mengembalikan tinggalan struktur benteng tersebut ke kondisi asalnya secara utuh namun, hanya merekonstruksi sebagian kecil dari keseluruhan benteng. Dalam narasi sejarahnya, benteng juga menyimpan memori tentang benturan antarkerajaan lokal di Sulawesi Selatan. Dalam satu periode sejarah, Kerajaan Makassar merupakan kerajaan yang berambisi untuk menjadi 'kerajaan atasan' bagi kerajaan lokal lain. Upaya tersebut ditempuh tak jarang dengan jalan peperangan. Selain itu, dalam upayanya untuk memperkuat sistem pertahanan, penduduk dari kerajaan yang diberi status budak dimobilisasi secara besar-besaran untuk membuat parit dan membangun dinding pertahanan. Tinggalan Struktur BSO juga merupakan jejak tentang peristiwa Perang Makassar, sebuah perang yang memperhadapkan Kerajaan Makassar dengan VOC. Memori yang coba diangkat dari peristiwa tersebut ialah perjuangan sebuah kerajaan yang lokal dalam mempertahankan kedaulatannya dari keinginan sebuah perusahaan dagang asing untuk memonopoli perdagangan.

Tinggalan struktur tersebut menyisakan sebuah rongga yang menganga di sisi utaranya. Rongga itu menyembulkan pertanyaan tentang berapa luas keseluruhan dari benteng tersebut. Ketimbang berupaya menjawabnya, yang ditekankan dari kondisi ini adalah prediksi tentang begitu luasnya benteng untuk digunakan dalam menggambarkan kemegahan sebuah bandar niaga, salah satu pusat jaringan perdagangan global. Sebuah kisah tentang kegemilangan salah satu kerajaan dalam dunia maritim yang kini menjadi bagian dari sebuah 'negara-bangsa' bernama Indonesia.

Rumah-rumah adat yang merepresentasikan empat etnis besar di Sulawesi Selatan berdiri di wilayah-dalam tinggalan struktur BSO. Keempat etnis tersebut (Mandar, Makassar, Bugis dan Toraja), pada dasarnya memiliki akar budaya yang sama sebagai penutur Austronesia. Menurut Fox (2006:1), rumah dalam dunia penutur bahasa Austronesia bukanlah sekedar entitas fisik tempat tinggal. 'Rumah' adalah sebuah kategori budaya yang digunakan untuk membedakan dan mendefenisikan beragam kelompok sosial. Selain itu, rumah juga digunakan sebagai penanda kontinuitas sejarah dalam fungsinya sebagai tempat penyimpanan reliqui atau benda-benda keramat dari masa lampau. Karena itu, tidak salah jika Claude Levi-Strauss menyebut formasi sosial di Indonesia dengan istilah '*sociétés à maisons*' (masyarakat/komunitas rumah) (Errington, 1998:203). Mengacu pada pendapat tadi, diperoleh alasan mengapa rumah dipilih sebagai representasi dari keempat etnis tersebut.

Sebaran rumah yang merepresentasikan empat etnis dalam kawasan rumah adat membentuk relasi oposisi sebagai berikut; Toraja:Bugis:Makassar:Mandar. Rumah-rumah etnis Toraja (12, 14) dan etnis Bugis (10, 11, 13) dibangun berdekatan dan berseberangan diametral dengan rumah-rumah dari etnis Makassar (1, 2, 7) dan Mandar (4, 5, 6) (lihat peta di bawah). Penempatan tersebut mungkin didasarkan pada hubungan keturunan antara keempat etnis tersebut. Oposisi Toraja:Bugis menunjukkan hubungan keturunan di mana etnis Bugis merupakan keturunan dari etnis Toraja. Adapun oposisi Makassar:Mandar merupakan subkategori dari Bugis. Penataan tersebut mungkin bertujuan untuk mengaburkan memori sejarah yang melekat pada tinggalan struktur



Peta 4 : Distribusi bangunan dalam kawasan rumah adat

BSO tentang benturan antarkerajaan lokal di Sulawesi Selatan. Rumah adat ditampilkan dengan gaya arsitektur istana yang dikhususkan untuk strata sosial bangsawan dan pembesar kerajaan. Bangunan rumah adat dengan konsep arsitektur istana yang dibangun di wilayah-dalam tinggalan struktur BSO bisa dipahami sebagai sebuah istana kerajaan. Dari distribusi spasialnya, rumah adat yang merepresentasi kerajaan-kerajaan yang beraliansi dengan Kerajaan Makassar ditempatkan secara terpisah. Penataan tersebut dapat ditafsirkan sebagai upaya untuk mengetengahkan etnisitas menjadi terma baru yang mengatasi konotasi rumah adat sebagai representasi kerajaan.

Berdasarkan uraian di atas, yang terbaca ialah bahwa rumah digunakan sebagai penanda tentang identitas baru, yaitu identitas etnis. Adapun tinggalan struktur BSO digunakan sebagai penanda/'jejak' sejarah. Relasi oposisi antara rumah dengan tinggalan struktur dapat ditafsirkan bahwa identitas etnis adalah sebuah konstruk yang memiliki latar belakang sejarah, sebuah konstruk yang 'dibayangkan' melekat pada tinggalan struktur yang berasal dari abad ke-16-17. Memori tentang benturan antarkerajaan yang terjadi di masa lalu, ditutupi dengan kehadiran representasi keempat etnis di wilayah-dalam tinggalan struktur BSO.

Museum yang ada di wilayah dalam tinggalan struktur benteng merupakan replika dari rumah pejabat Belanda yang ada di Watampone, Bone. Keberadaan bangunan tersebut membentuk relasi oposisi tinggalan struktur BSO:Museum Karaeng Pattingaloang. Jika merujuk ke latar sejarahnya, Kerajaan Makassar sebagai pengampu dari BSO runtuh oleh kerja sama antara Bone dengan VOC. Oposisi tersebut mungkin coba disamarkan dengan pemilihan nama museum yang menggunakan nama Karaeng Pattingaloang, salah seorang pembesar Kerajaan Makassar yang dikenal memiliki pengetahuan yang ensiklopedis dan memiliki hasrat besar terhadap pengetahuan-pengetahuan dari Barat. Namanya menjadi tepat untuk sebuah institusi yang bertugas menyimpan, mengoleksi, dan mendiseminasi pengetahuan. Penggunaan nama dan konstruksi bangunan yang saling beroposisi dan ditempatkan di wilayah dalam dapat ditafsirkan sebagai bentuk penerimaan kolonialisme sebagai bagian dari sejarah budaya Sulawesi Selatan.

Bangunan lainnya yaitu Baruga Somba Opu. Baruga yang berarti "rumah tempat pertemuan", dibangun dengan menggunakan konstruksi rumah panggung sebagaimana rumah-rumah adat lain yang ada di dalam kawasan rumah adat. Relasi oposisi yang terbentuk ialah Rumah Adat Empat Etnis: Baruga Somba Opu. Jika rumah adat dibangun dengan konstruksi arsitektur istana, bangunan yang dikhususkan untuk pertemuan dan pertunjukan seni tersebut menggunakan konsep arsitektur untuk strata sosial menengah yang ditunjukkan dengan penggunaan sambula yang bersusun tiga. Selain itu, bangunan tersebut tidak memiliki dinding tertutup sebagaimana yang terlihat pada konstruksi rumah-rumah adat. Hanya terdapat langkan yang berfungsi sebagai dinding pembatas. Dari konstruksinya dapat ditarik bahwa baruga mencoba membangun konotasi demokratis, beroposisi dengan keseluruhan bangunan rumah adat yang menggunakan konsep arsitektur istana. Relasi oposisi tersebut dapat ditafsirkan sebagai oposisi antara demokrasi sebagai nilai baru dan feodalisme yang melekat pada konstruksi rumah adat.

Selain Baruga Somba Opu, terdapat bangunan lain yang berfungsi sebagai ruang pertunjukan dan pertemuan, yaitu sebuah amfiteater. Sesuai dengan namanya, bangunan ini menderivasi konsep amfiteater sebagai arena pertunjukan pada zaman Romawi yang dibangun tanpa atap, dengan tempat duduk penonton bertingkat-tingkat

mengelilingi bangunan. Bangunan tersebut didirikan di depan rumah adat Gowa dan Tallo. Jika dipasangkan dengan Baruga Somba Opu, amfiteater lebih berkonotasi terbuka. Berdasarkan distribusi spasialnya terbentuk relasi oposisi yang berkaitan erat dengan konteks wilayah okupasi etnis Bugis dan Toraja yang lebih banyak mendiami wilayah pedalaman dan etnis Makassar dan Mandar yang mendiami wilayah pesisir. Dapat ditafsirkan bahwa tipologi bangunan dan distribusi spasialnya yang saling beroposisi, Baruga Somba Opu dan amfiteater merujuk pada identitas yang dilekatkan pada keempat etnis: oposisi antara Bugis+Toraja yang pedalaman dengan Makassar+Mandar yang pesisir.

Kawasan rumah adat merupakan sebuah selubung waktu dengan menggunakan tinggalan struktur benteng sebagai pembatas. Aliansi dan kontestasi antarkerajaan yang mewarnai masa lalu yang sejaman dengan tinggalan struktur BSO dihadirkan dalam konsep etnisitas. Melalui rumah-rumah adat, tersirat ajakan untuk menemukan identitas budaya Sulawesi Selatan di masa kini sebagai konstruk yang memiliki kesinambungan dengan masa lalu. Keragaman etnis dan perbedaan stratifikasi sosial melebur di Baruga Somba Opu yang menonjolkan citra demokratis, egaliter, dan terbuka. Kesuraman masa kolonial tidak ditampik tapi diterima sebagai bagian dari sejarah yang ditunjukkan dengan kehadiran Museum Karaeng Pattingaloang. Di dalam kawasan tersebut, masa lalu dihadirkan kembali di masa kini dengan makna baru sebagai bentuk usaha untuk berdamai dengan sejarah.

Kawasan Anjungan Pameran

Masa lalu yang beku, statis, dan bernuansa tradisional di kawasan rumah adat kontras dengan citra modern dan progresif yang coba ditonjolkan dalam kawasan anjungan pameran. Relasi oposisi yang terbentuk ialah Kawasan Rumah Adat: Kawasan Anjungan Pameran. Di dalam kawasan ini, seluruh bangunannya dibuat dengan menggunakan konstruksi bangunan modern. Bangunan di dalam kawasan ini berdiri langsung di atas tanah dengan ditopang oleh fondasi, dinding yang terbuat dari bata, dan atap yang menggunakan material modern seperti genteng, asbes dan seng.

Bangunan-bangunan yang ada di dalam kawasan anjungan pameran ada yang berfungsi sebagai aula dan anjungan. Tiga aula yang dimaksudkan ialah aula Pemerintah

Provinsi Sulawesi Selatan, Bank Indonesia, Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Selatan. Adapun anjungan merupakan ruang pameran tetap dari lembaga-lembaga/instansi untuk digunakan saat mengikuti pameran pembangunan, sebuah program tahunan yang gencar dilaksanakan sejak masa Orde Baru. Melalui pameran tersebut, rezim Orde Baru berupaya menyebarluaskan informasi tentang hasil-hasil 'pembangunan' yang telah dicapai. Diseminasi capaian pembangunan menjadi penting sebagai bagian dari propaganda dalam melanggengkan kekuasaan rezim Orde Baru.



Peta 5 : Distribusi bangunan dalam kawasan anjungan pameran

Institusi-institusi pemerintah baik dinas-dinas, badan, kantor, termasuk universitas bersama-sama hadir sebagai bagian dari sistem yang sedang giat menjalankan roda pembangunan. Tidak hanya itu, perusahaan swasta besar seperti PT. Inco, Harian Fajar, dan LPK Handayani juga memiliki anjungan di dalam kawasan tersebut. Kehadiran swasta menunjukkan bahwa pembangunan tidak hanya melibatkan negara melalui berbagai perangkatnya, namun juga melibatkan para pemilik modal. Bertandang ke kawasan anjungan pameran, pengunjung diajak untuk melihat 'panorama' hasil-hasil pembangunan sebagai kolaborasi pemerintah dan swasta. Akan tetapi, mencermati kondisi sebagian besar anjungan yang sudah tidak terawat dapat dimengerti pula bagaimana nasib dari ideologi pembangunan. Keruntuhan rezim Orde Baru pada tahun 1998 membuat beberapa program propagandisnya mulai kehilangan pesona. Tercatat, pameran pembangunan Sulawesi Selatan terakhir kali terlaksana pada tahun 2008. Sejak saat itu, para pemilik anjungan sudah tidak lagi memperhatikan kondisi propertinya. Memaknainya sebagai 'pusara' bagi sebuah ide yang berasal dari rezim yang telah tumbang menjadi beralasan.

Hal lain yang menarik dari bangunan-bangunan di kawasan anjungan pameran, ialah model atap yang mengadopsi konstruksi atap rumah tradisional, yaitu limasan dan tumpang. Fakta tersebut secara sederhana bisa dijelaskan sebagai adanya relasi paradigmatik antara formem atap sehingga model-model atap yang notabene menempati konteks posisi yang sama dalam struktur bangunan dapat dipertukarkan. Akan tetapi, model atap tersebut menimbulkan tafsiran yang berbeda jika memperhatikan konteks artikulasinya.



Foto 64 : Kolase foto model atap di kawasan anjungan pameran (dokumentasi penulis, 2013)

Atap adalah salah satu fitur umum dalam rumah tradisional di kawasan Asia Tenggara yang, disamping aspek fungsionalnya, juga memiliki nilai simbolik. Selain sebagai pelindung rumah dari panas dan hujan, atap dimetaforkan sebagai mahkota rumah sehingga sering dibuat raya dan megah. Pada rumah panggung yang membagi ruang rumah secara vertikal menjadi tiga bagian, atap sebagai bagian puncak selalu merupakan representasi dari 'dunia atas'. Karena faktor-faktor tersebut, atap menjadi fitur yang paling sering diinkorporasi pada bangunan berkonstruksi modern. Inkorporasi atap tradisional pada bangunan berkonstruksi modern cenderung merupakan upaya untuk menunjukkan adanya kesinambungan sejarah dan tradisi, menegaskan hubungan dengan masa lalu, menjelaskan bahwa masa lalu senantiasa hadir dan mewarnai masa kini.

Kedua model atap sama-sama memiliki akar sejarah di Sulawesi Selatan. Atap limasan merupakan atap yang umum digunakan pada rumah-rumah tradisional. Rumah

tradisional etnis Toraja yang berbentuk atap pelana merupakan arketipe dari model atap yang digunakan di rumah-rumah tradisional etnis Bugis, Makassar, dan Mandar (Pelras, 2003:265). Akan halnya dengan atap tumpang, model atap tersebut juga memiliki akar sejarah yang dibuktikan dengan penggunaannya pada bangunan masjid di Sulawesi Selatan sebagaimana yang terlihat pada Masjid Jami di Kota Palopo dan Masjid Al-Hilal di Katangka Kabupaten Gowa yang berasal dari abad ke-17.

Lebih lanjut, jika atap limas merupakan gaya yang inheren dalam tradisi berumah masyarakat Sulawesi Selatan, atap tumpang memiliki narasi yang lebih politis dalam konteks 'negara-bangsa' Indonesia. Preseden pertama terjadi ketika Indonesia menggelar Konferensi Asia-Afrika pada 1955, Presiden Soekarno menginstruksikan untuk mengganti atap tumpang Masjid Agung Bandung, yang dibangun pada 1810 dengan kubah. Lewat instruksi tersebut, Soekarno ingin meneruskan semangat 'reformasi Islam' yang termanifestasi dalam atap kubah. Abidin Kusno (2000) menguraikan bagaimana atap menjadi komoditi politik, simbol perebutan pengaruh antara Soekarno dan penerusnya, Soeharto. Sebagai 'arsitek' Indonesia pascakolonial, Soekarno [bersama Frederich Silaban] merancang masjid Istiqlal dengan menggunakan kubah sebagai 'mahkota' atapnya. Lewat atap kubah, Soekarno ingin membangun narasi tentang kemajuan (Kusno 2000:2), dengan gerak yang melampaui ekspresi arsitektur masjid tradisional Indonesia yang pada dewasa itu akrab dengan atap tumpang. Jika 'visi' Indonesia progresif Soekarno berdiri pongah di ibukota, Soeharto menyiarkan visi 'Indonesia yang menghargai tradisi' lewat penyebaran bangunan Masjid Yayasan Amal-Bakti Muslim Pancasila (YAMP) ke seluruh Indonesia dengan atap tumpangnya yang ikonis (Kusno 2000:2-4). Atap tersebut merupakan hasil reinterpretasi modern terhadap tipologi masjid Jawa tengah tradisional (Widodo, 2009:24) dengan mengambil contoh Masjid Demak.

Inkorporasi elemen atap limas dan tumpang pada bangunan aula dan anjungan di kawasan anjungan pameran sama-sama berusaha menunjukkan adanya kesinambungan sejarah dengan tradisi masa lampau. Akan tetapi, sementara atap limasan menarik garis dengan tradisi lokal Sulawesi Selatan, atap tumpang lebih menjurus pada politik kebudayaan yang diangkat oleh pengampu rezim Orde Baru. Keberadaan atap tumpang pada anjungan-anjungan pameran pembangunan dapat

ditafsirkan sebagai pernyataan kesetiaan ideologis pada 'visi keindonesiaan' yang diangkit oleh 'pusat' rezim Orde Baru dalam menjalankan roda pembangunan.

Penafsiran yang lain bisa lahir dari oposisi antara kawasan anjungan pameran:kawasan rumah adat. Sebagaimana yang telah dikemukakan sebelumnya, BSO mengandung memori tentang sebuah kerajaan yang berusaha untuk mengembangkan bandar niaganya dengan mempertahankan kedaulatannya. Oposisi tinggalan struktur dengan anjungan pameran seolah ingin menunjukkan adanya kesinambungan semangat tersebut. Pemroduksi kawasan BSO seolah ingin menyatakan bahwa administrasi pemerintahan yang tengah berkuasa berjalan dengan mengedepankan semangat yang oleh pengampu tinggalan struktur dalam mengembangkan bandar niaganya. Ketimbang mewujudkan sebagai kesinambungan, realitas bahwa kekuasaan asing tengah menancapkan kukunya dalam mengisap sumber daya alam di Indonesia coba dikaburkan. Jukstaposisi antara kedua elemen teks tersebut lebih sebagai sebuah oposisi yang saling menegasi. Oposisi tersebut dapat ditafsirkan bahwa masa lalu digunakan untuk menutupi 'kebobrokan' dari sistem yang tengah berjalan.

Kawasan Rumah Tradisional

Di sebelah timur kawasan anjungan pameran, berdiri rumah-rumah tradisional yang merepresentasikan kabupaten-kabupaten yang ada di Sulawesi Selatan. Meskipun memiliki ornamentasi yang berbeda, namun keseluruhan bangunan didirikan dengan pola yang seragam yaitu konstruksi rumah panggung dengan rangka berbentuk huruf 'H' dan menggunakan model atap limas. Berdasarkan konstruksinya, rumah-rumah di kawasan ini menunjukkan kesamaan dengan rumah-rumah yang berada di wilayahdalam tinggalan struktur BSO. Relasi oposisi yang terbentuk ialah relasi antarelemen yang berlawanan.

Secara leksikal, adat dan tradisi adalah dua istilah yang dapat dipergunakan secara bergantian karena merujuk pada konsep tentang kebiasaan dalam masyarakat yang diwariskan secara turun-temurun. Rumah-rumah di kawasan rumah adat ditafsirkan sebagai rumah yang memiliki autentisitas sejarah karena dibangun di wilayah dalam tinggalan struktur BSO. Sedangkan rumah-rumah di dalam kawasan rumah tradisional lebih sebagai penanda akan adanya kesinambungan nilai budaya.

Kawasan rumah tradisional ingin menunjukkan bahwa adat sebagai sesuatu yang diwariskan dari masa lalu, tetap lestari sebagai sebuah tradisi pada masa kini di seluruh kabupaten-kabupaten yang ada di Sulawesi Selatan.

Kawasan Pasar Seni

Kesinambungan yang sama juga terlihat pada bangunan rumah dan galeri seni di kawasan Pasar Seni. Tiga bangunan yang diidealkan sebagai galeri dan tempat tinggal bagi beberapa seniman lokal, berdiri dengan konstruksi arsitektur tradisional. Dapat ditebak bahwa karya seni yang dihasilkan adalah karya-karya yang menunjukkan kesinambungan nilai budaya yang diwariskan dari masa lampau. Bangunan gazebo yang terletak di sisi timur galeri menjadi tempat memasarkan buah kreativitas seniman yang bermukim di sana.

Relasi biner antara galeri dan gazebo merupakan refleksi dari konsep seni sebagai kriya (*arts as craft*), sebuah konsep yang marak berkembang sebagai dampak dari industrialisasi sektor pariwisata. Akan tetapi, dari tiga galeri yang ada, hanya dua yang masih digunakan, itu



Peta 6 : Sebaran bangunan di kawasan Rumah Tradisional dan Pasar Seni

pun hanya fungsi elementernya yaitu sebagai tempat tinggal seniman dan keluarganya. Mungkin karena minim apresiasi, ketiga galeri tersebut sudah tidak produktif dan dapat ditebak pula bagaimana kondisi gazebo yang diidealkan sebagai lokasi penjualan buah tangan mereka.

Kawasan Gowa Discovery Park

Kawasan lain yang dibangun dengan mengisi lahan kosong yang terletak di antara kawasan rumah adat dan kawasan anjungan pameran ialah kawasan "Gowa Discovery Park" yang menyajikan tiga wahana. Wahana pertama ialah taman air yang menyajikan beragam bentuk permainan dengan air sebagai tema utamanya. Sifat air yang tenang dan menyejukkan membuat elemen ini cocok untuk dijadikan sarana rekreasi. Air juga bersifat dinamis yang dapat menimbulkan semangat seseorang sehingga menjadi segar kembali. Selain itu, air juga berfungsi sebagai 'penahan' kebisingan dan polusi udara. Hal inilah yang membuat manusia merasa tenang bila berada dekat dengan air. Sifat-sifat tersebutlah yang memicu tumbuhnya tempat rekreasi dengan menggunakan media air. Sifat air yang dinamis dan mengalir dari tempat tinggi ke tempat rendah menjadi inspirasi terciptanya permainan-permainan air di sebuah taman air. Wahana yang kedua ialah taman burung yang menampilkan beragam spesies burung yang berasal dari seluruh Indonesia. Dalam keragaman flora tersebut, sejatinya taman burung merujuk pada suasana kehidupan yang alami, tenang, dan damai. Sebuah antitesis dari kehidupan urban yang bising dan penat.

Baik taman burung dan taman air, keduanya menonjolkan ornamen-ornamen Bali. Inkorporasi ornamen Bali tersebut dapat ditafsirkan bahwa wahana ini menawarkan sensasi berkunjung ke Bali yang terkenal sebagai destinasi pariwisata internasional tanpa harus meninggalkan Sulawesi Selatan. Dalam konteks tersebut, Bali tidak bisa lagi dipandang sebagai bagian dari lokalitas Indonesia, namun merupakan sebuah ikon yang telah mengalami glokalisasi. Glokalisasi ialah efek dari globalisasi di mana sesuatu yang lokal dimodifikasi untuk menjadi konsumsi global, atau sesuatu yang telah mengglobal dimodifikasi agar lebih sesuai dengan cara/mode/gaya konsumsi yang berlaku pada lokalitas tertentu.

Wahana ketiga yang terangkum dalam GDP ialah wahana treetop yang terletak di antara rumah adat Toraja dan rumah adat Soppeng. Dalam wahana tersebut, pengunjung diajak untuk melakukan aktivitas di alam terbuka yang memacu adrenalin. Aktivitas alam terbuka semacam itu pada umumnya "berusaha tampil sebagai metafora kehidupan" (Lucas, 2008:97). Dalam kehidupan, ada saat ketika seseorang harus berhadapan dengan risiko yang mungkin membuatnya terjatuh jika ia gagal untuk

mencapai tujuannya. Dalam kondisi yang terkontrol dengan perangkat pengamanan, kegiatan-kegiatan alam terbuka semacam itu menawarkan kesenangan. Sebuah ruang eskapis di mana pengunjung bisa bersenang-senang dengan metafora kehidupan.

Kesimpulan: Kawasan BSO sebagai Fenomena Pelipatan Dunia

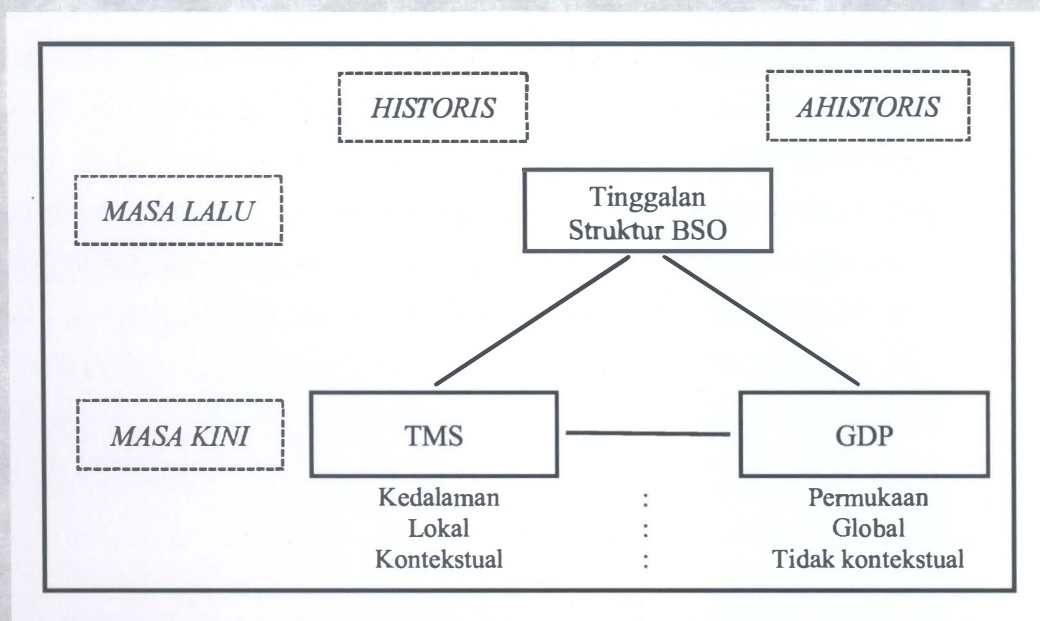
Jejeran pemaknaan dari elemen-elemen teks kawasan BSO sebagaimana yang telah diuraikan di atas, kemudian dirangkum dalam sebuah sintesis pemaknaan. Antara teks dari masa lalu dengan teks baru (TMS dan GDP) yang dituliskan pada masa kini dalam medium kawasan BSO membentuk hubungan interpretatif. Hubungan interpretatif antara TMS dengan tinggalan struktur BSO secara umum menunjukkan sifat yang historis, dalam artian bahwa TMS ingin menunjukkan adanya kesinambungan sejarah dengan tinggalan struktur BSO. Hal tersebut nampak dalam model bangunan dan pola distribusinya dalam kawasan BSO. Konsep etnis yang ditafsirkan sebagai identitas yang memiliki akar sejarah direpresentasikan dengan rumah-rumah yang dianggap memiliki autentisitas, ditempatkan di wilayah-dalam tinggalan struktur BSO. Sementara bangunan-bangunan yang merepresentasikan kesinambungan sejarah dan penghargaan terhadap tradisi dengan cermat didistribusikan di wilayah-luar tinggalan struktur BSO.

Berbeda dengan TMS, GDP hadir dengan mengesankan hubungan interpretatif yang ahistoris. Bangunan-bangunan dalam kawasan GDP sama sekali tidak memiliki relasi historis dengan tinggalan struktur BSO dan TMS. Amat sulit untuk menerima bahwa fungsi edukatif kawasan rumah adat bisa dirasakan sambil meniti tali di kawasan treetop yang berada di dalam kawasan rumah adat. Menambah pengetahuan tentang arsitektur tradisional Sulawesi Selatan sembari memacu adrenalin saat meluncur dari ketinggian yang ada di dalam wahana taman air. Demikian pula, memahami kemampuan adaptasi teknologi sistem perbentengan yang dimiliki Kerajaan Makassar sambil terpukau pada keunikan warna dan bentuk dari beragam spesies burung yang dikandangkan di dalam wahana taman burung.

Relasi antara TMS dan GDP menciptakan jukstaposisi antara yang historis dan yang ahistoris. Jika TMS menampilkan kedalaman dengan elemen-elemen teks yang berusaha menjangkau masa lalu dan menunjukkan kesinambungannya di masa kini,

GDP berpendar di permukaan dengan menghadirkan elemen-elemen teks yang sekadar mengisi 'celah' dalam kawasan BSO. GDP mengimplan elemen-elemen teks yang bersifat global, berposisi dengan elemen-elemen teks dari TMS yang bersifat lokal. Sifat global pada elemen-elemen teks yang secara temporal terasosiasi dengan GDP menghasilkan sebuah teks yang tidak kontekstual, berposisi dengan TMS yang mengedepankan kontekstualitas elemen teksnya. Kategori-kategori yang saling berposisi tersebut, dengan meminjam perkataan Levi-Strauss, 'adalah kecenderungan kognitif (*cognitive predisposition*)... yang merupakan atribut logika abstrak dasar' dalam sebuah teks (dalam Duranti 1997:34). Logika tersebut merupakan struktur makna dasar dalam teks kawasan BSO yang dapat digambarkan dalam bagan berikut:

Berangkat dari pembacaan terhadap teks dan struktur makna dalam kawasan BSO, sejatinya kawasan tersebut merupakan sebuah taman miniatur. Taman miniatur merujuk pada sebuah konsep taman hiburan yang memampatkan berbagai keragaman yang berasal dari konteks yang berbeda ke dalam satu wahana. Dalam pemahaman demikian, kawasan BSO masih menyisakan kesepadannya dengan Taman Mini Indonesia Indah utamanya yang nampak pada hasil dari momen produksi kedua, TMS. Shelly Errington (1998) menyediakan bagian khusus tentang Taman Mini Indonesia Indah (TMII) di Jakarta dalam bukunya yang mengkaji budaya tradisional di tengah



Bagan 5 : Struktur Makna dalam Teks Kawasan BSO

kepujian narasi nasionalisme, modernisasi, dan pembangunanisme. Errington menyimpulkan bahwa TMII adalah sebuah taman hiburan (*theme park*) bergaya arsitektur fantasi hibrid (*hibrid fantasy architecture*). Konsep taman fantasi hibrid tersebut memiliki tiga karakter yang menonjol, yaitu: 1) dibuat dalam skala yang masif, 2) dibuat oleh pengusaha dengan modal yang kuat atau pemerintah, atau bahkan sebagai hasil kolaborasi antara keduanya, 3) bangunan-bangunan di dalamnya merujuk secara ikonis pada wujud arsitektur lain tapi menjalankan fungsi yang berbeda (Errington 1998:191). Paralelisme antara struktur makna teks kawasan BSO dengan taman hiburan berkonsep arsitektur fantasi hibrid yang dikemukakan oleh Errington tersebut terlihat misalnya pada massifnya skala kawasan BSO yang merangkum bangunan-bangunan dalam sebuah lahan seluas 11,36 hektar. Dari sisi pemroduksi, kawasan BSO dibangun lewat kolaborasi antara pemerintah provinsi dengan PT. MMW selaku pemodal. Dari sisi elemen teksnya, bangunan-bangunan di dalam kawasan BSO adalah bangunan yang secara ikonis merujuk pada wujud arsitektur yang riil akan tetapi menjalankan fungsi yang berbeda. Sebagai contoh, rumah panggung di dalam kawasan BSO memiliki referensi riil dalam konsep arsitektur tradisional Sulawesi Selatan dan masih dijumpai di tengah-tengah masyarakat, namun di kawasan BSO rumah-rumah tersebut berfungsi sebagai simbol etnisitas, tidak lagi sebagai bangunan vernakular yang melayani fungsi dalam kehidupan domestik.

Akan tetapi, kawasan BSO lebih dari sekadar miniaturisasi dari berbagai keragaman tersebut. Menurut hemat penulis, kawasan BSO tampil lebih sebagai fenomena yang disebut Pilliang (2004) sebagai fenomena pelipatan dunia: gambaran sebuah dunia yang di dalamnya berlangsung berbagai bentuk pemaksaan, pemadatan, pemampatan, penekanan, perusakan, pengerdilan, dan miniaturisasi berbagai dunia (Pilliang 2004:43). Pelipatan tersebut terjadi dalam beberapa model, yaitu: 1) pelipatan ruang-waktu, 2) pemadatan waktu-tindakan, 3) miniaturisasi ruang-waktu, 4) pemadatan ruang-waktu simbolik, dan 5) peringkasan ruang-waktu psikis (Pilliang 2004:49-53). Berikut ini diuraikan bagaimana model pelipatan tersebut terjadi di kawasan BSO.

Pertama, pelipatan ruang-waktu. Pelipatan waktu terlihat pada penempatan hasil rekonstruksi tinggalan struktur yang berasal dari abad ke-16 dihadirkan bersama dengan bangunan-bangunan yang baru di bangun pada kisaran akhir abad ke-20 dan

awal abad ke-21 ke dalam satu kawasan yang bernilai historis. Sedang pelipatan ruang terjadi ketika hamparan geografi budaya Sulawesi Selatan dan ikon-ikon wisata budaya Bali ditempatkan secara bersamaan dalam satu kawasan. Pelipatan ruang dan waktu tersebut tidak bisa dipisahkan karena pengunjung yang 'mengalami' kawasan BSO mencerap lintasan waktu (masa lalu dan masa kini) dan hamparan geografi budaya tersebut dalam satu kesempatan kunjungan.

Kedua, pemadatan waktu-tindakan. Tanpa kunjungan ke kawasan BSO, seseorang harus mendatangi berbagai tempat untuk bisa melihat secara langsung keragaman budaya Sulawesi Selatan, dalam hal ini keragaman rumah arsitektur tradisional. Lebih lanjut, untuk merasakan sensasi berlibur ke Bali, seseorang harus meluangkan waktu dan biaya untuk mengunjungi Pulau Bali. Dengan berkunjung ke kawasan BSO, bentangan jarak tersebut tidak perlu lagi ditempuh dan waktu yang dibutuhkan untuk menyaksikan keragaman budaya tersebut menjadi lebih ringkas. Setelah bermain air 'di Pulau Bali', seseorang bisa 'berkunjung' ke Tana Toraja dan mengagumi Tongkonan sambil membandingkannya dengan rumah tradisional Soppeng yang berdiri di sebelahnya, lalu bergerak melihat capaian pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah tanpa harus melihat dan mengamati hasil-hasil pembangunan yang tersebar di berbagai tempat. Dalam pelipatan waktu-tindakan seseorang bisa mencapai efisiensi waktu, melakukan banyak hal dalam sesedikit mungkin waktu. Akan tetapi, demi mencapai efisiensi tersebut seseorang harus mengorbankan kualitas tindakannya. Seseorang tidak akan memperoleh kualitas yang sama antara berkunjung ke kawasan BSO untuk melihat Tongkonan dengan melihatnya langsung di kabupaten Tana Toraja.

Ketiga, miniaturisasi ruang-waktu. Waktu yang lampau dengan segala memori dan kompleksitasnya dalam kawasan BSO disematkan pada tinggalan struktur BSO. Sebagai sebuah tinggalan, kemampuannya untuk merepresentasikan secara utuh masa lampau tentu saja telah mengalami reduksi sebagai akibat dari rekonstruksi yang tidak mengembalikan tinggalan struktur benteng tersebut ke kondisi asalnya secara utuh, namun hanya merekonstruksi sebagian kecil dari keseluruhan benteng tersebut. Penyematan waktu dalam sebuah representasi yang tereduksi menghasilkan ketaksamaan, ambiguitas, atau kesumiran. Bagi Lowenthal (2002:15), kesumiran merupakan kualitas utama masa lampau yang ditonjolkan dalam sebuah taman miniatur yang berdiri di atas

lanskap sejarah. Sebagai sebuah jejak dari masa lampau, rekonstruksi tidak ditujukan untuk menghadirkan 'sosok' yang utuh karena semakin sumir sebuah 'sosok', akan semakin mudah untuk memanipulasi memori tentangnya. Manipulasi dalam hal ini terjadi dalam proses seleksi dan filtrasi memori-memori dari masa lampau yang dianggap tidak lagi tepat untuk dikenang di masa kini.

Pada sisi lain, pelipatan ruang dilakukan dengan mengemblemetisasi keragaman budaya Sulawesi Selatan ke dalam wujud rumah adat yang merepresentasikan identitas etnis. Hal yang sama berlaku pula pada batas-batas administrasi pemerintahan di mana keragaman yang tersebar itu lalu direpresentasikan dalam wujud rumah tradisional dan dihimpun dalam satu satuan ruang. Pun, budaya Bali yang letaknya jauh di sisi selatan Pulau Sulawesi direduksi dan direpresentasi dengan kain prada, kain poleng, dan pemubug pada kemuncak atap gazebo. Kehadiran emblem-emblem yang berasal dari konteks ruang yang berbeda adalah bentuk pelipatan ruang. Bersama dengan pelipatan waktu di atas, keduanya merupakan bentuk miniaturisasi ruang-waktu yang terjadi di kawasan BSO. Sejalan dengan miniaturisasi tersebut, terjadi reduksi, pengerdilan ruang-waktu ke dalam simbol-simbol yang merepresentasi semesta ruang-waktu.

Keempat, pemadatan ruang-waktu simbolik. Sebagaimana yang nampak dalam struktur makna kawasan BSO, konfigurasi elemen-elemen dalam teks kawasan BSO adalah sebuah wahana permainan tanda. Permainan tersebut nampak jelas dari jukstaposisi antara elemen-elemen yang saling berlawanan, antara yang historis:ahistoris, kontekstual:kontekstual, lokal:global, kedalaman:permukaan. Dalam jukstaposisi yang demikian, masing-masing elemen tersebut saling menegasi sehingga makna dari masing-masing elemen teks tersebut menjadi sumir, taksa, kehilangan referensi riilnya. Meskipun pada dasarnya, identitas etnis yang ditawarkan oleh TMS adalah sebuah konstruksi baru, sesuatu yang 'dibayangkan' ada dan menyejarah bersama tinggalan struktur BSO, seseorang tidak lagi bisa berkonsentrasi pada refleksi sejarah yang diidealkan oleh TMS karena dinegasikan oleh kehadiran GDP dengan elemen-elemen teksnya yang mengutamakan histeria, fantasi, dan eskapisme.

Kelima, peringkasan ruang-waktu psikis. Pelipatan ruang-waktu yang terjadi di kawasan BSO berjalan dengan membaurkan berbagai elemen-elemen teks yang saling beroposisi. Menempatkan berbagai emblem-emblem yang berasal dari konteks waktu

yang berbeda ke dalam satu ruang seolah-olah emblem-emblem tersebut berada pada satu lintasan sejarah yang linier. Merujuk pada Errington, "temporalitas disusun secara inkonsisten karena konsistensi temporal tidaklah relevan dalam sebuah taman miniatur: ide utama dalam sebuah taman miniatur bukan untuk menunjukkan urutan periode waktu tapi menggambarkan esensi umum sebuah identitas dalam kondisinya yang statis dan abadi" (1998:200). Manakala kawasan BSO menawarkan sebuah konstruksi identitas, seseorang yang berkunjung ke sana diajak untuk memersepsi ulang identitas dan memori kolektifnya. Seseorang yang berasal dari Kabupaten Barru, misalnya, melihat dirinya sebagai bagian dari etnis Bugis yang merupakan satu dari empat etnis besar di Sulawesi Selatan. Lebih lanjut, segala memori tentang benturan etnis di masa lalu yang melekat pada tinggalan struktur BSO adalah sesuatu yang tidak lagi relevan di masa kini.

Dalam pada itu, kawasan BSO dikomprehensi sebagai sebuah taman miniatur dengan konsep yang oleh Pilliang (2004) disebut sebagai 'dunia yang dilipat'. 'Mengalami' kawasan BSO adalah mengalami sebuah ruang di mana tanda yang terikat pada konteks ruang-waktu yang berbeda dimampatkan ke dalam satu kawasan. Pelipatan tersebut menciptakan ruang dengan kompleksitas tanda yang tinggi sebagaimana yang nampak dalam berbagai model pelipatan ruang-waktu yang terjadi di dalamnya.

Daftar Pustaka

Adams, Kathleen M.

- 1997 Touting Touristic "Primadonas": Tourism, Ethnicity and National Integration in Sulawesi, Indonesia. dalam Michel Piccard dan Robert E. Wood (Ed.). *Tourism, Ethnicity and the State in Asian and Pacific Societies*. Honolulu: University of Hawaii Press.

Ardhiati, Yuke

- 2005 *Bung Karno Sang Arsitek: Kajian Artistik Karya Arsitektur, Tata Ruang Kota, Interior, Kria, Simbol, Mode Busana, dan Teks Pidato, 1926-1945*. Depok: Komunitas Bambu.

Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Makassar (BP3 Makassar).

- 2011 *Laporan Kajian Zonasi Benteng Somba Opu, Kabupaten Gowa Propinsi Sulawesi Selatan*. Makassar: Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Makassar.

Bulbeck, David Francis.

- 1986 *The South Sulawesi Historic and Prehistorical Archaeology Project*. Australian National University.

1992 A Tale Of Two Kingdoms: The Historical Archaeology of Gowa and Tallok, South Sulawesi, Indonesia. Doctoral **Thesis**. Australian National University. Australia.

- 2005 "Sejarah Konstruksi dan Benteng-Benteng Pertahanan Makassar". dalam Kathryn Robinson dan Mukhlis Paeni (Ed.). *Tapak-Tapak Waktu: Sejarah, Kebudayaan, dan Kehidupan Sosial di Sulawesi Selatan*. Makassar: Innawa.

Cummings, William P.

- 2007 *A Chain of Kings; The Makassarese chronicles of Gowa and Talloq*. Leiden: KITLV Press.

Dhakidae, Daniel

- 2003 *Cendekiawan dan Kekuasaan dalam Negara Orde Baru*. Jakarta: Gramedia.

Deetz, James

1967 *An Invitation to Archaeology*. New York: Natural History Press.

Duranti, Alessandro

1997 *Linguistic Anthropology*. Cambridge: Cambridge University Press.

Effendy, Muslimin A.R.

2005 *Jaringan Perdagangan Makassar Abad XVI-XVII*. Wonogiri: Bina Citra Pustaka.

Errington, Shelly

1998 *The Death of Authentic Primitive Art And Other Tales of Progress*. Berkeley: University of California Press.

Fontanille, Jacques.

2007 *The Semiotics of Discourse*. New York: Peter Lang Publishing.

Fox, James J. (Ed.)

2006 *Inside Austronesian Houses*. Canberra: Australian National University Press.

Hodder, Ian., Scott Hutson.

2003 *Reading The Past: Current Approaches to Interpretation in Archaeology*. Edisi 3. Cambridge: Cambridge University Press.

Kusno, Abidin

2000 *Behind the Postcolonial; Architecture, Urban Space and Political Culture in Indonesia*. London: Routledge.

Lefebvre, Henry.

1991 *The Social Production of Space*. Oxford: Blackwell Publishing.

Lombard, Denys.

2005b *Nusa Jawa Silang Budaya: Bag. 2. Jaringan Asia*. Jakarta: Gramedia.

Lowenthal, David

2009 *The Heritage Crusade and The Spoils of History*. Cambridge: Cambridge University Press.

Lucas, Scott A.

2008 *Theme Park*. London: Reaktion Books.

Moore, Henrietta L.

1996 *Space, Text and Gender: An Anthropological Study of Marquet of Kenya*. New York: Guilford Press.

Muthalib, Abd.

1987 *Laporan Penggalian Penyelamatan Benteng Somba Opu* Tgl. 24-30 Agustus 1987. Ujung Pandang: SPSP Sulsel.

Olsen, Bjørnar.

1990 "Roland Barthes: From Sign to Text", dalam Christopher Tilley (Ed.), *Reading Material Culture: Structuralism, Hermeneutics, and Post-structuralism*. Oxford: Basil Blackwell.

Pelras, Christian.

2003 "Bugis and Makassar Houses; Variation and Evolution". dalam Reimar Schefold, Peter J.M. Nas, dan Gaudenz Domenig (Ed.), *Indonesian Houses*. Vol. 1. Tradition and Transformation in Vernacular Architecture. Leiden: KITLV Press.

2005 "Budaya Bugis: Sebuah Tradisi Modernitas". dalam Kathryn Robinson dan Mukhlis Paeni (Ed.), *Tapak-Tapak Waktu: Sejarah, Kebudayaan, dan Kehidupan Sosial di Sulawesi Selatan*. Makassar: Innawa.

Pilliang, Yasraf Amir

2004 *Dunia yang Dilipat; Tamasya Melampaui Batas-Batas Kebudayaan*. Yogyakarta: Jalasutra.

Preucell, Robert.

2006 *Archaeological Semiotics*. Oxford: Blackwell Publishing.

Robinson, Kathrin.

1997 "History, House and Regional Identity". *The Australian Journal of Anthropology*, Vol. 8: 1. Proquest. hlm. 71-88

Schefold, Reimar

2003 "The Southeast Asian-type House. Common Features and Local Transformations of an Ancient Architectural Tradition". dalam Reimar Schefold, Peter J.M. Nas, dan Gaudenz Domenig (Ed.). *Indonesian Houses*. Vol. 1. Tradition and Transformation in Vernacular Architecture. Leiden: KITLV Press.

Suaka Peninggalan Sejarah Purbakala Sulawesi Selatan (SPSP Sulsel)

1987 *Laporan Ekskavasi Penyelamatan Dinding Barat Benteng Somba Opu*. Ujung Pandang: SPSP Sulsel.

Sugimun M.D.

1982 "Somba Opu". Makalah dalam Seminar Perjuangan Rakyat Sulawesi Selatan Menentang Penjajahan Asing di Ujung Pandang, 8-11 Desember 1982. Tidak diterbitkan.

Sutton, R. Anderson.

2002 *Calling Back the Spirit : Music, Dance, and Cultural Politics in Lowland South Sulawesi*. Oxford University Press.

Widodo, Johannes

2009 "Arsitektur Indonesia Modern: Transplantasi, Adaptasi, Akomodasi, dan Hibridisasi". Dalam Peter J. M. Nas dan Martien de Vietter (Ed.) *Masa Lalu dalam Masa Kini Arsitektur di Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Wolhoff, G.J., Abdurrahim

t.t *Sedjarah Goa*. Ujung Pandang: Jajasan Kebudayaan Sulawesi Selatan.

Nur Ihsan D., SS, MA

BAGIAN KELIMA

Catatan Penutup

Benteng-benteng di Kota Makassar dan sekitarnya adalah cagar-cagar budaya yang mempunyai beragam fungsi yang sangat penting. Pada saat benteng-benteng dibangun, fungsi perlindungan dan pertahanan merupakan fungsi utama yang menjadi alasan dicurahkan sumber daya tenaga, bahan-bahan bangunan, dan waktu yang luar biasa besarnya. Untuk bisa efektif menjalankan fungsinya sebagai tembok pertahanan, benteng harus dibuat mengikuti rencana yang pada gilirannya didasarkan pada perkembangan teknologi perang, ancaman yang ada, dan kondisi lokal yang dimiliki pada saat itu. Masih belum jelas seberapa jauh rencana benteng-benteng yang ada di Makassar yang dibangun di abad ke-16 mengadopsi rencana dan perkembangan benteng-benteng di dunia. Namun lebih bisa dipastikan bahwa Benteng Ujung Pandang/Fort Rotterdam yang dibangun di abad ke-17 sudah mengambil rencana benteng yang memang sudah berkembang di Eropa. Mengingat keterbatasan teknologi dan sumber daya yang ada di abad ke-16 dan 17 (masa sebagian besar benteng-benteng di Kota Makassar dibangun), para penguasa harus melakukan mobilisasi tenaga kerja baik secara sukarela (dari kalangan hamba dan rakyatnya sendiri) maupun secara paksa untuk bisa mengumpulkan bahan dan membangunnya. Dan hal ini diperberat mengingat sistem pertahanan dan benteng yang dibangun berukuran cukup besar dan tidak sedikit jumlahnya.

Setelah benteng-benteng selesai dibangun, mereka dapat melindungi permukiman-permukiman, utamanya istana penguasa dan tempat penyimpanan bahan keperluan sehari-hari maupun keperluan perang. Dengan kata lain, benteng menjadi permukiman inti dan bahkan menjadi "kota." Gambar dari abad ke-16 menunjukkan pelaut Belanda dimasa itu menganggap Benteng Somba Opu sebagai "Kota" (stadt) Somba Opu. Meskipun demikian, permukiman tidak dibatasi pada tembok yang mengelilingi permukiman. Dan memang pada kenyataannya permukiman lain

berkembang di luar benteng dan memperluas batas kota itu sendiri. Kita tahu bahwa pasar dan beberapa kantor-kantor (factorijen) bagi para pedagang Eropa di Somba Opu tidak terletak di dalam benteng melainkan di luarnya. Demikian pula, kelak ketika Benteng Rotterdam (yang sebelumnya adalah Benteng Ujung Pandang yang merupakan salah satu benteng yang dibangun Kesultanan Gowa) menjadi pusat kota baru, maka pasar dan permukiman berkembang di luarnya, mulai dari Vlaardingen di sebelah utara benteng, Kampung Baru di sebelah selatannya, dan juga Kampung Bontoala di sebelah timurnya. Perkembangan permukiman tidak berhenti di sebelah utara dan selatan diabad ke-19 semakin banyak permukiman di sebelah timur, utamanya di lahan-lahan pertanian seperti Maricaya, Maccini dan sebagainya. Kota Makassar lahir dan tumbuh dengan menjadikan Benteng Rotterdam sebagai inti dan permukiman-permukiman lainnya berkembang keluar dari benteng ke berbagai arah.

Pada saat kota telah tumbuh sejalan dengan perkembangan sosial dan ekonomi penduduk kota maupun perkembangan dunia, maka di satu sisi fungsi benteng sebagai bagian dari sistem pertahanan mulai surut. Sebaliknya, di sisi lain, fungsi-fungsi kota (yang notabene awalnya lahir akibat benteng tersebut) mulai tumbuh dan menjadi fungsi-fungsi utaka yang menentukan denyut jantung kehidupan kota itu sendiri. Fungsi perdagangan dan ekonomi (seperti yang dijalankan oleh pasar dan lembaga-lembaga keuangan termasuk perbankan), fungsi sosial (yang dijalankan oleh lembaga-lembaga pendidikan dan lembaga sosial lain), dan fungsi politik sebagai pusat pemerintahan tidak lagi dijalankan oleh dan dari benteng. Kota telah tumbuh melampaui benteng yang melahirkannya. Namun, hal ini tidak berarti benteng sama sekali kehilangan fungsinya. Benteng dan bangunan lainnya tetap menyediakan ruang publik yang melayani masyarakat kota. Benteng Rotterdam, untuk waktu yang lama menjalankan fungsi-fungsi publiknya, menjadi tangsi militer, kantor, dan tempat ibadah. Ruang-ruang di sekitar benteng menjadi ruang terbuka yang bisa dimanfaatkan oleh warga kota. Dan kini selain sebagai kantor, Benteng Ujung Pandang/Fort Rotterdam menjadi museum, tempat pendidikan, hiburan, dan ruang terbuka, dan tidak kalah pentingnya sebagai obyek turisme bagi para pelancong yang mengunjungi Makassar khususnya dan Sulawesi Selatan umumnya. Benteng-benteng lainpun dapat dan sudah menjalankan fungsi serupa.

Bagi warga dan masyarakat kota, benteng dapat memiliki fungsi lain. Benteng dapat memiliki fungsi sebagai bagian dari sejarah, baik sejarah masyarakat maupun sejarah kota. Masa lampau, baik masa Kekaraengan dan Kesultanan dengan corak feodalnya, masa penjajahan dengan segala diskriminasinya, ataupun masa kemerdekaan dengan segala kekurangannya—semua adalah bagian yang tidak terpisahkan dari identitas kota dan masyarakatnya. Melupakan dan bahkan menghapuskan ingatan akan masa lampau adalah sebuah kesalahan besar yang bisa dilakukan secara sengaja ataupun tidak. Penghancuran sebuah peninggalan sejarah meski sudah ada peraturan perundangan yang melarangnya, seperti UU 5 tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya dan UU 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya, sering kali secara keliru dianggap sebuah tindakan yang “benar” yang dianggap dapat menghapus kenangan pahit masa lalu. Seolah-olah dengan menghilangkan bukti sejarah sama dengan menghilangkan dampak dari sejarah tersebut. Kasus penghancuran berbagai gedung kolonial di Jakarta seperti Gedung Harmonie pernah dianggap sebagai tindakan yang pantas, namun kini disadari sebagai sebuah tindakan keliru. Pemboman Candi Borobudur, atau perusakan Makam Sultan Hasanuddin juga tidak berbeda dengan tindakan keliru tadi. Sejarah, baik yang pahit ataupun yang manis, semua adalah bagian dari identitas kota dan masyarakatnya.

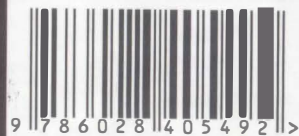
Undang Undang nomor 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya merupakan satu produk hukum terkini yang diharapkan dapat melestarikan berbagai peninggalan sejarah, termasuk (sisa-sisa) benteng. Sebelumnya sudah ada berbagai peraturan perundangan yang memiliki tujuan tidak jauh berbeda. Untung benteng-benteng di Makassar, setidaknya Benteng Ujung Pandang/Fort Rotterdam dan Benteng Somba Opu sudah menjalani proses yang menuju perlindungan menyeluruh terhadap cagar budaya yang sudah menjadi ikon kota. Usaha pelestarian ini tidak berarti ingin menciptakan jarak dan memisahkan antara peninggalan sejarah dan/atau cagar budaya, dalam hal ini benteng, dengan masyarakatnya. Sebaliknya, usaha pelestarian diharapkan dapat terus menjadikan benda-benda tersebut bagian yang integral bagi perkembangan masyarakat ke depan. Pelestarian benteng-benteng karenanya bukan lagi sesuatu yang wajib tetapi juga perlu.

Dias Pradadimara, MS, MA.



Penerbit:
Identitas Universitas Hasanuddin
bekerjasama dengan
Balai Pelestarian Cagar Budaya Makassar

978-602-8405-49-2



9 786028 405492 >